

**IMPLIKASI DAN DESAIN PARIWISATA
TERHADAP KESEJAHTERAAN MASYARAKAT SEKITAR
(STUDI DI PANTAI TELUK KILUAN DAN TANJUNG SETIA
PROVINSI LAMPUNG)**

DISERTASI

**Untuk Memenuhi Persyaratan
Memperoleh Gelar Doktor**



Oleh:

NELI AIDA

157020101011001

**PROGRAM DOKTOR ILMU EKONOMI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS BRAWIJAYA
MALANG**

2019



HALAMAN IDENTITAS TIM PROMOTOR DAN PENGUJI

Judul Disertasi : Implikasi dan Desain Pariwisata Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Sekitar (Studi di Pantai Teluk Kiluan dan Pantai Tanjung Setia Provinsi Lampung)

Nama Mahasiswa : Neli Aida
 Nim : 157020101011001
 Program Studi : Program Doktor Ilmu Ekonomi (PDIE)
 Minat : Ekonomi Pembangunan

Komisi Promotor

Promotor : Prof. Agus Suman, SE.,DEA.,Ph.D
 Ko-Promotor : Dr. Rachmad Kresna Sakti, S.E., M.Si.
 Ko-Promotor : Dr. Susilo, S.E., M.S.

Komisi Penguji

Dosen Penguji 1 : Dr. Iswan Noor, SE., ME.
 Dosen Penguji 2 : Dr. Asfi Manzilati, S.E., M.Si.
 Dosen Penguji 3 : Dr. Devanto Sastra, Pratomo, SE., M.Si., Ph.D

Komisi Penguji Luar

Dosen Penguji : Prof. Dr. Anwar Sanusi, S.E., M.Si.

Tanggal Ujian : 17 September 2019

a.n. Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis
 Universitas Brawijaya Malang
 Ketua Program Doktor Ilmu Ekonomi

Dr. Asfi Manzilati, S.E., M.Si.

PERNYATAAN ORISINALITAS

Saya menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa sepanjang pengetahuan saya, di dalam naskah disertasi ini tidak terdapat karya ilmiah yang diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademik di suatu Perguruan Tinggi. Karya saya ini hasil buah pikiran dan dieksplorasi dalam bentuk tulisan sendiri dan tidak pernah ditulis atau diterbitkan orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka. Pada kesempatan ini pula saya telah melakukan uji plagiasi atas tulisan disertasi ini dengan hasil kurang dari 5 persen tingkat toleransi plagiasinya.

Apabila ternyata di dalam naskah penelitian disertasi ini dapat dibuktikan adanya unsur-unsur plagiasi melebihi toleransi yang diberlakukan saya bersedia disertasi ini digugurkan dan gelar akademik doktor yang telah saya peroleh dibatalkan, serta diproses sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku (UU Nomor 20 Tahun 2003, pasal 25 ayat 2 dan pasal 70).

Malang, September 2019

Mahasiswa

Neli Aida
15702010101001



RIWAYAT HIDUP

Neli Aida, lahir di Baturaja, 15 Desember 1963, putri dari bapak K.H.M. Arief Mahya dan ibu Hj. Masamah (alm). Menempuh pendidikan SD sampai SMA di Kota Madya Bandar Lampung, lulus SMA tahun 1982, menyelesaikan S1 di Universitas Lampung (Unila) pada tahun 1997, dan pada tahun 1996 menyelesaikan studi S2 di Institut Pertanian Bogor (IPB). Bekerja sebagai Tenaga Pengajar pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Unila sejak tahun 1990 hingga sekarang.

Malang, 1 September 2019

Neli Aida
NIM 157020101011001





Kata Pengantar

Segala puji bagi Allah SWT atas segala pertolongan dan ridhonya, hingga disertasi ini dapat penulis selesaikan. Sekilas disertasi ini mencoba untuk mengantarkan pembaca pada proses pembangunan pariwisata secara lebih komprehensif dengan penekanan konsep pengelolaan pariwisata berbasis komunitas (*Community Base Tourism - CBT*) dan non-komunitas (*Non Community Base Tourism – Non-CBT*) serta konsep pengelolaan pariwisata New-CBT dengan menasar: tumbuhnya perekonomian lokal; peningkatan pendapatan masyarakat, memberdayakan peran masyarakat, swasta, dan pemerintah; memperluas lapangan kerja dan kesempatan berusaha; meningkatkan ketrampilan sehingga kesejahteraan masyarakat sekitar destinasi wisata meningkat.

Pada kesempatan ini penulis ucapkan terimakasih kepada:

1. Bapak Prof. Agus Suman, SE.,DEA.,Ph.D, sebagai promotor, yang telah berkenan meluangkan waktu untuk mengkaji dan membagi ilmunya serta memberikan masukan yang berharga demi kesempurnaan penelitian ini.
2. Bapak Dr. Rachmad Kresna Sakti, SE.,M.Si, selaku Ko-Promotor 1 yang tidak saja telah sabar membimbing, memberikan saran dan arahan guna perbaikan dan melengkapi konten penelitian, tetapi juga mengajarkan banyak hal mengenai ilmu tentang kehidupan.
3. Bapak Dr. Susilo. SE.,MS, selaku Ko-promotor 2 yang begitu banyak meluangkan waktu membimbing, menuntun menulis yang baik dan benar, memotivasi sehingga penulis, mendapat energi baru untuk menyelesaikan kuliah S3 di Program PDIE-UB ini.

4. Bapak Dr. Iswan Noor, SE., ME, ibu Dr. Asfi Manzilati, SE., ME, bapak Devanto Shasta Pratomo, SE., M.Si., Ph.D, selaku tim penguji internal yang berkontribusi tidak saja menguji dan memberikan masukan tetapi juga selalu siap untuk berdiskusi bilamana penulis membutuhkan dan perbaikan koreksiannya disampaikan dengan cara-cara yang mudah untuk difahami penulis.
5. Bapak Prof Candra Fajri Ananda., S.E., M.Sc., Ph.D. dan bapak Dr. Atim Djazuli, S.E., M.E. selalu memberi semangat dan mendorong penulis untuk cepat dan cepat melompat pada tahapan kualifikasi yang harus dilalui.
6. Bapak ibu pengampu matakuliah, telah memberi contoh kepada penulis tentang bagaimana mentransfer ilmu dan pengetahuan serta pengalaman dalam kemasan kekeluargaan dan tetap dalam kehangatan atmosfer akademik.
7. Penguji eksternal bapak Prof. Dr. Anwar Sanusi, S.E., M.Si. secara bertanggung jawab dan ikhlas menerima serta menjalankan tugas sebagai penguji yang profesional.
8. Keluarga besar FEB-Universitas Lampung yang dimotori oleh Dekan Prof. Satria Bangsawan., M.Si atas keluwesan aturan dan *support* yang diberikan.
9. Semua informan penelitian, dan *Stakeholder* di Kabupaten tanggamus, kabupaten Pesibar selalu bersedia kapan saja, dimana saja memberi penjelasan kepada peneliti atas pertanyaan-pertanyaan yang telah diajukan.
10. Rekan-rekan mahasiswa S3 dari semua program, khususnya bu Ami, pak Karyadinata, Pak Joni, bu Ana, bu Dewi, bapak dan ibu Tenaga Kependidikan di lingkungan FEB-UB, terutama pak Joko, bu Fitri, bu Lia,

bu Lisa, mas Gigih selalu siap memberikan informasi, bantuan, dan dukungan baik yang terkait dengan akademik maupun non-akademik.

11. Ayahanda KHM. Arief Mahya, ibunda Hj. Masamah (almh), bapak mertua alm H. Soenarto, ibu mertua Dahyan Rohmin Sumiati, dan seluruh keluarga besar tercinta: ncik Hilyati, udo Hi. Istamar Arief, S.H., ngah Hj. Erna pilih, S.H., ngah Prisrita Arief, S.Pd., MM., Akak Dr. Hi. Edi Irawan Arief, S.E.,M.Ec., dinda Septi Aprilia, M.Pd., dan dinda Andi Arief, S.IP., Laksamana Hi. Budi Siswanto, Wita Sayekti., Mira Kustiyah., Hj. Hervin Anom Permadi, Amd., Hj. Lina Anggraini., S.Psi. MM. atas doa yang tiada henti-hentinya untuk keberhasilan penulis.

12. Suami tercinta Dr. Ir. Hi. Sandi Asmara, M.Si, anak-anakku: Nedy amardianto, S.I.Kom, Nadiawati Meganingrum, S.H., dan Yunissa Meganingtyas telah mendukung secara moril dan materil, sangat sabar dengan situasi terlerai yang relatif panjang, dan kalian merupakan *supporting* yang inspiratif.

Semoga semua kebaikan yang sudah diperbuat bapak, ibu, rekan-rekan, dan keluarga menjadi ladang amal kebaikan dan Allah SWT telah menjanjikan dengan pahala sebagai balasannya. Semoga kita semua selalu menebar manfaat ilmu dan pengetahuan kepada sesama, amin.

Malang, September 2019

Penulis

Abstrak**Implikasi dan Desain Pariwisata
Terhadap Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Sekitar
(Studi Di Pantai Teluk Kiluan dan Pantai Tanjung Setia Provinsi Lampung)**

Oleh

Neli Aida

Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi perkembangan wisata di Pantai Teluk Kiluan berbasis komunitas (*Community Base Tourism*) dan di Pantai Tanjung Setia berbasis Non-komunitas (*Non-Community Base Tourism*), mengidentifikasi implikasi wisata Pantai terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat sekitar, dan merumuskan desain pariwisata di Pantai Teluk Kiluan dan Pantai Tanjung Setia Provinsi Lampung.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif mengambil studi kasus dalam memahami secara mendalam permasalahan-permasalahan yang muncul, sehingga mampu mengorek sebab akibat dari fenomena sosial agar dapat menemukan realitas sebenarnya melalui perilaku, ucapan dan tulisan dengan mengamati subyek yang diteliti/orang/informan.

Hasil penelitian menemukan pariwisata Pantai Tanjung Setia dengan pengelolaan Non-komunitas (Non-CBT) lebih berkembang dibandingkan dengan wisata Pantai Teluk Kiluan dengan pengelolaan komunitas (CBT). Belum berkembangnya pariwisata Pantai Teluk Kiluan itu disebabkan karena akses jalan raya rusak dan jauh, terbatasnya atraksi, lingkungan kotor dan kurang penataan, pasokan listrik dan internet belum menunjang, tidak terkoordinasi antar pelaku wisata, ongkos *trip* mahal, dan karena kelembagaan. Temuan berikutnya meskipun wisata di Pantai Tanjung setia berkembang namun belum meningkatkan kesejahteraan buat masyarakat sekitarnya. Beberapa hal teridentifikasi penyebabnya ialah: abai terhadap lingkungan, un-partisipatif atau dikuasai pemilik modal, respon pemerintah lambat, kepemilikan lahan/aset oleh WNA, dan faktor kelembagaan. Oleh karenanya dibuat suatu desain terhadap pengelolaan pariwisata di Pantai Teluk Kiluan dan Pantai Tanjung Setia yang dapat meningkatkan perkembangan dan berimplikasi terhadap kesejahteraan masyarakat sekitar dengan menggabungkan konsep pariwisata *base on community tourism* dan *non-community tourism*. Konsep pariwisata *base on community tourism* dan *non-community tourism* itu bernama New-CBT.

Implikasi penelitian ini mendesak kuat pemangku kepentingan (masyarakat, swasta dan pemerintah) merespon lebih baik lagi. Respon masyarakat dapat berbentuk partisipasi yaitu keterlibatan masyarakat secara langsung, partisipasi insentif, yang terkait dengan penerimaan kompensasi dan partisipasi interaktif yaitu berupa fikiran dan gagasan kritis. Respon Swasta dalam mempersiapkan atraksi yang dibutuhkan, dan respon pemerintah memperkuat kerangka kelembagaan untuk menciptakan *rule of the game* dalam pembangunan pariwisata di Pantai Teluk Kiluan dan Pantai Tanjung Setia Provinsi Lampung.

Kata Kunci: Pariwisata, Kesejahteraan Masyarakat, dan Desain New-CBT

Abstract

**Implications and Design of Tourism
Towards the Improvement of Welfare of Surrounding Communities
(Case study in Kiluan Bay Beach and Tanjung Setia Beach, Lampung
Province)**

By

Neli Aida

This study aims to identify the development of tourism on the Kiluan Coast Beach based on community and on the Tanjung Setia Beach Non-community based, identify the implications for improving the welfare of the surrounding community, and formulate the design of tourism in the Kiluan Bay Beach and Tanjung Setia Beach Lampung Province.

This research uses qualitative research methods to take case studies in understanding in depth the problems that arise, so that it is able to extract the cause and effect of social phenomena in order to discover the real reality through behavior, speech and writing by observing the subjects studied/people/informants.

The result of the research found that Tanjung Setia Beach tourism managed by non-community was more developed compared to Teluk Kiluan Beach tourism which was managed by community. The undeveloped tourism of Kiluan Bay Beach is caused by the access to damaged and distant highways, limited attractions, dirty environment and lack of arrangement, electricity and internet supply that are not yet supported, are not coordinated among tourism actors, expensive trip costs, and because of the institutional. The next finding, although tourism in Tanjung Setia Beach is developing, it has not yet improved welfare for the surrounding community. Some of the causes identified are: neglect of the environment, un-participatory or controlled by capital owners, slow government response, ownership of land / assets by foreigners, and institutional factors. Therefore, a design for tourism management in Teluk Kiluan and Tanjung Setia Beach can be made that can improve development and have implications for the welfare of the surrounding community called New-CBT.

The implications of this study strongly urge stakeholders to respond even better. Community response can take the form of participation, namely direct community involvement, incentive participation, which is related to receiving compensation and interactive participation in the form of critical thoughts and ideas. The Private Response in preparing the attractions needed, and the government's response strengthened the institutional framework to create the rule of the game in the development of tourism in the Gulf Coast of Kiluan and Tanjung Setia Beach in Lampung Province

Keywords: Tourism, Community Welfare, and New-CBT Design

DAFTAR ISI

Halaman

BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	19
1.3 Tujuan Penelitian.....	20
1.4 Manfaat Penelitian.....	20
1.4.1 Manfaat Secara Akademis.....	20
1.4.2 Manfaat Secara Praktis.....	21
BAB II PETA TEORI DAN PENELITIAN TERDAHULU	21
2.1 Pembangunan Ekonomi , Konsepsi Kelembagaan dan <i>Agency Theory</i>	21
2.1.1 Peran Kelembagaan Dalam Pembangunan Ekonomi.....	21
2.1.2 Konsepsi Kelembagaan Dan <i>Agency Theory</i>	27
2.1.3 Kelembagaan Dan <i>Agency Theory</i>	30
2.2. Diskusi Tentang Teori Pariwisata dan Pengelolaan Pariwisata.....	33
2.2.1 Diskusi Tentang Teori Ekonomi Pariwisata.....	33
2.2.1 Pariwisata Berbasis komunitas (<i>Community Base Tourism</i> atau CBT).....	43
2.2.3 Pengelolaan Pariwisata Berbasis Non-Komunitas (<i>Non Community Base Tourism/Non-CBT</i>).....	48
2.3 Makna Kesejahteraan Masyarakat Sebagai Implementasi Teori Kebutuhan Maslow Dan Implikasi Pembangunan Pariwisata.....	50
2.3.1 Makna Kesejahteraan Masyarakat.....	50
2.3.2 Kesejahteraan Dan Teori Kebutuhan Maslow.....	53
2.3.3 Implikasi Pembangunan Pariwisata Terhadap Kesejahteraan Masyarakat.....	55
2.4 Penelitian Terdahulu.....	58
2.5 Kerangka Pikir Penelitian.....	73

BAB III METODE PENELITIAN..... 75

3.1 Pendekatan Penelitian..... 75

3.1.1 Pendekatan Penelitian Studi Kasus..... 76

3.1.2 Fokus Penelitian..... 79

3.1.3 Situs Penelitian..... 79

3.2 Unit Analisis dan Pemilihan Informan..... 80

3.2.1 Unit Analisis..... 80

3.2.2 Pemilihan Informan..... 81

3.2.2.1 Masyarakat..... 81

3.2.2.2 Agen Travel/Swasta..... 84

3.2.2.3 Pemerintah..... 85

3.2.3 Penentuan Informan..... 88

3.3 Pengumpulan Data 88

3.3.1 Observasi..... 89

3.3.2 Wawancara Semi Terstruktur..... 90

3.3.3 Dokumentasi..... 91

3.3.4 *Focused Group Discussion* (FGD)..... 92

3.4 Interpretasi Data..... 93

3.5 Kredibilitas Data Penelitian..... 95

3.6 Desain Penelitian 98

BAB IV PARIWISATA COMMUNITY BASE (CBT) DI SITUS PANTAI TELUK KILUAN DALAM PERKEMBANGAN 99

4.1 Potret Situs Pantai Teluk Kiluan..... 99

4.2 Telaah Informan Penelitian..... 104

4.3 Kredibilitas Data Penelitian..... 104

4.4 Penerapan Konsep CBT di Pantai Teluk Kiluan..... 106

4.3.1 Dimensi Ekonomi: Pergeseran Kepemilikan Sumberdaya (Aset) Masyarakat Menjadi Aset Bisnis 110

4.3.2 Dimensi Budaya: Dinamika Budaya Lokal..... 118

4.3.3 Dimensi Sosial: Partisipasi Masyarakat Lokal..... 122

4.3.4 Dimensi Politik: Pelibatan Tokoh Masyarakat..... 127

4.3.5	Dimensi Lingkungan: Pendekatan Sustainability.....	128
-------	--	-----

4.4	Perkembangan Pariwisata di Pantai Teluk Kiluan.....	131
-----	---	-----

4.5	Diskusi Teori dan Hasil Temuan.....	140
-----	-------------------------------------	-----

BAB V PARIWISATA NON-COMMUNITY BASE (NON-CBT) DI SITUS

	PANTAI TANJUNG SETIA DALAM PERKEMBANGAN.....	158
--	---	------------

5.1	Potret Situs Pantai Tanjung Setia.....	158
-----	--	-----

5.2	Telaah Informan Penelitian.....	160
-----	---------------------------------	-----

5.3	Penerapan Konsep Non-CBT di Pantai Tanjung Setia.....	160
-----	---	-----

5.3.1	Kepemilikan : Pemodal Asing.....	162
-------	----------------------------------	-----

5.3.2	<i>Partner</i> Dalam Pengelolaan: Peran dan Kepemilikan	
-------	---	--

	Masyarakat Terbatas.....	169
--	--------------------------	-----

5.3.3	Daya Tarik Kebudayaan.....	172
-------	----------------------------	-----

5.3.4	Kepekaan Sosial Sosial.....	175
-------	-----------------------------	-----

5.4	Perkembangan Pariwisata di Pantai Tanjung Setia.....	166
-----	--	-----

5.5	Diskusi Teori dan Hasil Temuan.....	178
-----	-------------------------------------	-----

BAB VI IMPLIKASI PARIWISATA TERHADAP KESEJAHTERAAN

	MASYARAKAT SEKITAR.....	186
--	--------------------------------	------------

6.1	Implikasi Pariwisata Pantai Teluk Kiluan Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Sekitar.....	191
-----	---	-----

6.1.1	Implikasi Ekonomi.....	192
-------	------------------------	-----

6.1.1.1	Fasilitas Pendukung Pariwisata Bertambah.....	192
---------	---	-----

6.1.1.2	Pendapatan Meningkatkan.....	193
---------	------------------------------	-----

6.1.1.3	Pengangguran Terserap.....	195
---------	----------------------------	-----

6.1.1.4	Harga Produk Lokal Membaik.....	196
---------	---------------------------------	-----

6.1.1.5	Diversifikasi Mata Pencarian.....	196
---------	-----------------------------------	-----

6.1.1.6	Aksesibilitas.....	197
---------	--------------------	-----

6.1.2	Implikasi Non-Ekonomi.....	198
-------	----------------------------	-----

6.1.2.1	Wisata Konservasi.....	198
---------	------------------------	-----

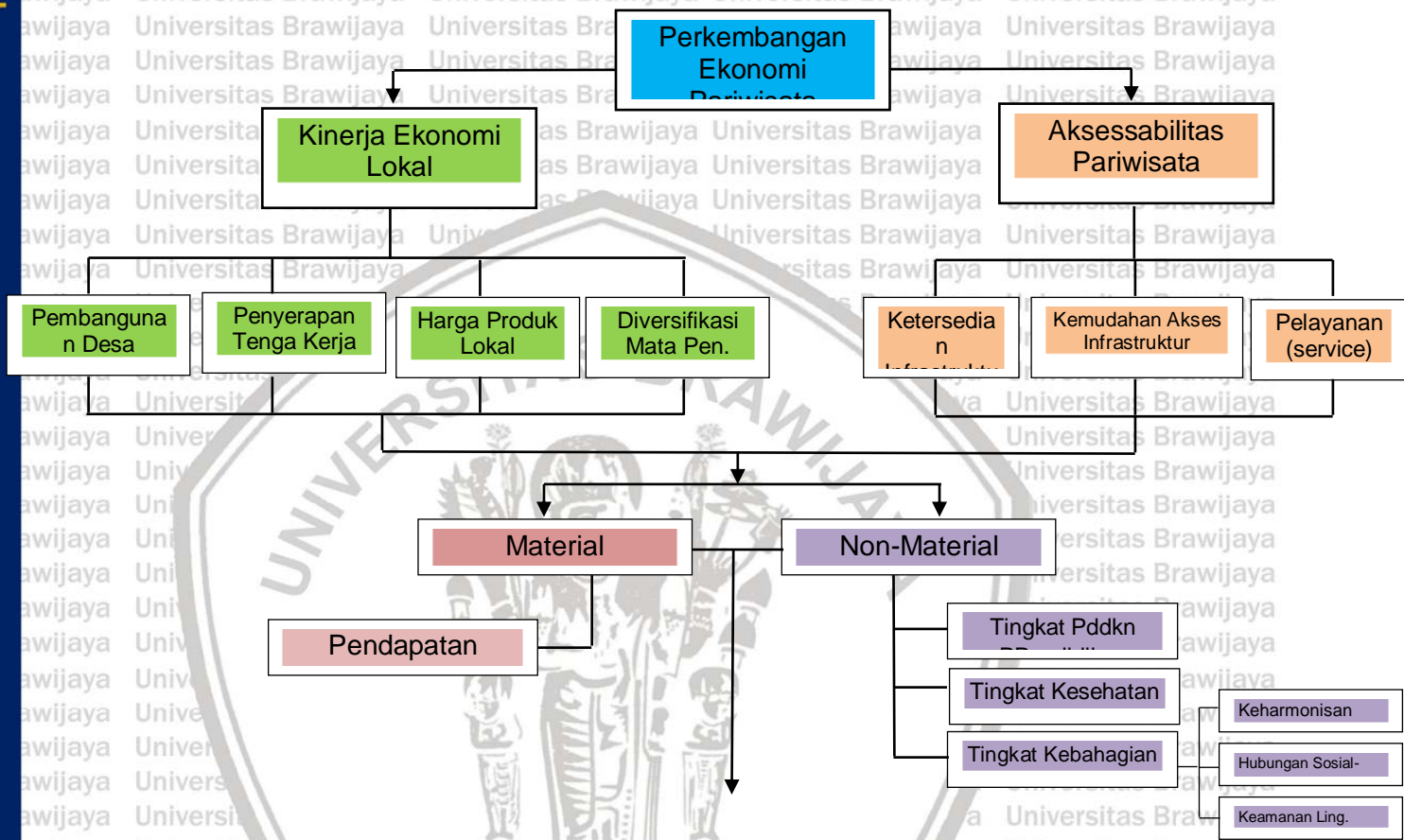
6.1.2.2	Peningkatan <i>Skill</i> , Pendidikan, dan Kesehatan...	201
6.1.2.3	Keamanan.....	202
6.2	Implikasi Perkembangan Pariwisata Pantai Tanjung Setia Terhadap Kesejahteraan masyarakat Sekitar.....	208
6.2.1	Implikasi Ekonomi.....	208
6.2.1.1	Terserap Tenaga Kerja.....	208
6.2.1.2	Perputaran Uang Cepat.....	211
6.2.1.3	Timbul Sumber Pendapatan Baru.....	214
6.2.2	Implikasi Non-Ekonomi.....	215
6.2.2.1	Implikasi Terhadap Budaya.....	215
6.2.2.2	Merangsang Inovasi.....	218
6.2.2.3	Aksesibilitas.....	221
6.2.2.4	Infrastruktur.....	222
6.3	Diskusi Teori, dan Hasil Temuan.....	229
BAB VII	DESAIN PERKEMBANGAN PARIWISATA DALAM MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT SEKITAR.....	239
7.1	Karakteristik Prinsip Pengelolaan Ekonomi Pariwisata Pantai Di Lampung.....	240
7.2	Desain Perkembangan Pariwisata Pantai di Lampung Dalam Rangka Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Sekitar.....	233
7.2.1	Peran Masyarakat.....	228
7.2.2	Peran Swasta.....	230
7.2.3	Peran Pemerintah.....	233
7.2.4	Implementasi <i>Agency Theory</i> Perspektif Ekonomi Pariwisata.....	243
7.2.4.1	Pemerintah-Swasta/Investor (<i>Principal-Agent</i>).....	246
7.2.4.2	Pemerintah-Masyarakat (<i>Principal-Agent</i>).....	249
7.3	Diskusi Teori dan Hasil Temuan.....	243
BAB VIII	KESIMPULAN, PROPOSISI DAN REKOMENDASI.....	282

8.1 Kesimpulan.....	282
8.2 Proposisi Penelitian.....	283
8.3 Implikasi Penelitian.....	285
8.4 Temuan (<i>Novelty</i>).....	286
8.5 Rekomendasi.....	302

DAFTAR PUSTAKA.....	285
----------------------------	------------

LAMPIRAN.....	292
----------------------	------------





DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 1.1 Jumlah Wisatawan di Provinsi Lampung Tahun 2004 – 2016.....	4
Tabel 1.2 Jumlah Hotel, Kamar, dan Tempat Tidur menurut Kabupaten/Kota, 2015.....	5
Tabel 2.1 Prinsip Pengembangan Pariwisata Berbasis Masyarakat (CBT).....	47
Tabel 2.2 <i>Mapping</i> Penelitian Terdahulu.....	60
Tabel 3.1 Kriteria Calon Informan.....	88
Tabel 3.2 Peta Informasi Penelitian.....	94
Tabel 4.1 Daftar Informan Pantai Teluk Kiluan.....	104
Tabel 5.1 Daftar Informan di Pantai Tanjung Setia.....	160
Tabel 6.1 Matriks Implikasi Ekonomi Pariwisata Pantai Teluk Kiluan Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Sekitar.....	207
Tabel 6.2 Matriks Implikasi Pariwisata Pantai Tanjung Setia Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Sekitar.....	228
Tabel 7.1 Karakteristik Dimensi Pengelolaan Ekonomi Pariwisata New-CBT.....	241
Tabel 7.2 Faktor-Faktor Penyebab Perkembangan yang lesu Pariwisata di Pantai Teluk Kiluan.....	246
Tabel 7.3 Penyebab Perkembangan Pariwisata di Pantai Tanjung Setia Belum Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat.....	247
Tabel 7.4 Peran Masyarakat Di Destinasi Pantai Teluk Kiluan dan Pantai Tanjung Setia.....	243
Tabel 7.5 Peran Swasta Di Destinasi Pantai Teluk Kiluan dan Pantai Tanjung Setia.....	259
Tabel 7.6 Peran Pemerintah Di Destinasi Pantai Teluk Kiluan dan Pantai Tanjung Setia.....	264
Tabel 7.7 Matriks Langkah eksekusi, eksekutor, dan Kendala Masyarakat, Swasta, dan Pemerintah Dalam Pengembangan Ekonomi Pariwisata di Pantai Teluk Kiluan.....	266
Tabel 7.8 Matriks Langkah eksekusi, eksekutor, dan Kendala Ekonomi	

	Pariwisata di Pantai Tanjung Setia Agar Berimplikasi Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Sekitar.....	268
Tabel 8.1	Matrik Temuan Karakteristik, Perkembangan, dan Implikasi, serta Konsep pengelolaan ekonomi pariwisata Perkawinan CBT dan Non-CBT....	287
Tabel 8.2	Karakteristik Prinsip Pengelolaan Ekonomi Pariwisata CBT Dan Non-CBT.....	289
Tabel 8.3	Penyebab Pariwisata di Pantai Teluk Kiluan Setia Perkembangannya Menurun.....	290
Tabel 8.4	Penyebab Pariwisata di Pantai Tanjung Setia Belum Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat.....	291
Tabel 8.5	Matriks Langkah Eksekusi dan Kendala oleh Pemangku Kepentingan Pariwisata Di Pantai Teluk Kiluan.....	291
Tabel 8.6	Matriks Langkah Eksekusi dan Kendala oleh Pemangku Kepentingan Pariwisata Di Pantai . Pantai Tanjung Setia.....	294



DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 1.1 Jumlah objek Wisata dan Peninggalan Sejarah di Provinsi Lampung.....	4
Gambar 1.2 Laju Pertumbuhan Ekonomi, Tingkat Kemiskinan dan Penganggurandi Provinsi Lampung (dalam%).....	7
Gambar 1.3. Kontribusi Sektor Pariwisata dalam Perekonomian Provinsi Lampung (dalam%).....	9
Gambar 1.4. Perbandingan Pertumbuhan Sektor Pariwisata dengan Pertumbuhan.....	10
Gambar 2.1 Ruang Lingkup Ekonomi Pariwisata Dalam Neraca Satelit Pariwisata Indonesia.....	40
Gambar 2.2 Teori Kebutuhan Menurut Maslow 1988).....	55
Gambar 2.3 Kerangka Pikir Penelitian.....	75
Gambar 3.1 Desain Penelitian	99
Gambar 4.1 Peta Teluk Kiluan (Pekon Negeri Kelumbayan).....	101
Gambar 4.2 Lokasi Pantai Teluk Kiluan.....	102
Gambar 4.3 Prifil Wisatawan di Pantai Teluk Kiluan.....	107
Gambar 4.4 Wawancara Mendalam dengan Pokdarwis.....	108
Gambar 4.5 Wisata Lumba-Lumba dan Laguna.....	109
Gambar 4.6 <i>Homestay</i> dan Persewaan perahu (Basis Komunitas).....	112
Gambar 4.7 Menu Makan Konten Lokal.....	113
Gambar 4.8 <i>Homestay</i> Perubahan.....	115
Gambar 4.9 Tari Sembah, Temui Mulei Meghanai dan Ngiring Penganten.....	119
Gambar 4.10 Kegiatan Ibu-ibu Belajar Pantun.....	120
Gambar 4.11 Perlengkapan <i>Homestay</i>	121
Gambar 4.12 Partisipatif Masyarakat dalam Musrenbang.....	125
Gambar 4.13. Partisipasi Gotong Royong.....	126
Gambar4.14 Ekosistem Terumbu Karang (<i>Dolphin Bay</i>).....	129

Gambar 4.15. Faktor Penyebab Lesunya Perkembangan Pariwisata Pantai Teluk Kiluan	140
Gambar 5.1. Fasilitas <i>Cottage</i> , Bilyard, dan Ombak Pantai Tanjung Setia.....	159
Gambar 5.2. Warung Sri Zanaria.....	162
Gambar 5.3. <i>Homestay</i> Tanjung Setia.....	167
Gambar 5.4. Pesta Adat Sakura.....	173
Gambar 5.5. Gulungan dan Ketinggian Ombak untuk Berselancar di Pantai Tanjung Setia.....	179
Gambar 5.6. Krui Pro Pesisir Barat, Krui Pro <i>Surfing Competition</i> tahun 2018.....	181
Gambar 6.1. Bandara Serai (M. Taufiq Kiemas).....	224
Gambar 6.2. Akses Jalan Tanjung Setia.....	226
Gambar 7.1. Dasar Pembentukan Desain Pariwisata.....	239
Gambar 7.2. Dimensi Pengembangan Pariwisata Pantai Di Lampung.....	243
Gambar 7.3. Komponen Desain Ekonomi Pariwisata Pantai Di Lampung.....	248
Gambar 7.4. Pemangku Kebijakan Dalam Pariwisata.....	250
Gambar 7.5. Desain New-CBT.....	252

BAB I

PENDAHULUAN

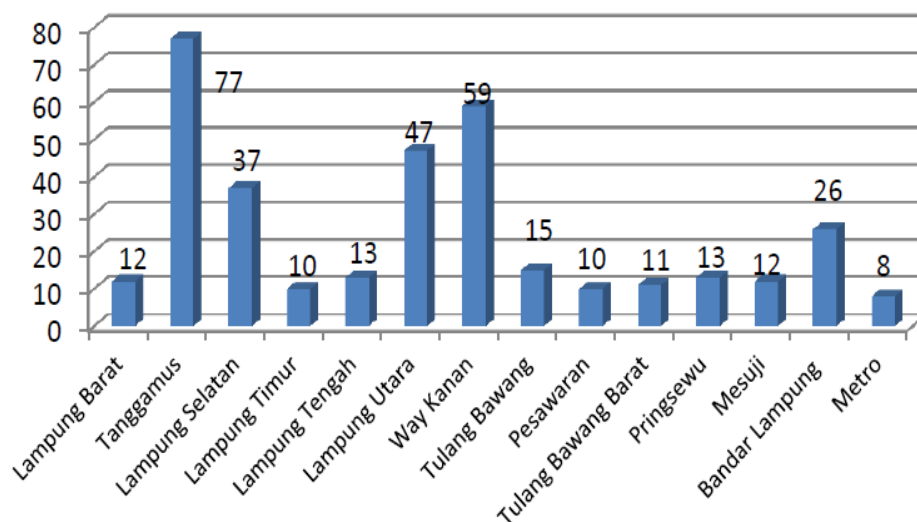
1.1 Latar Belakang

Istilah pariwisata dikatakan oleh Yoeti (2008:15) merupakan kegiatan usaha ekonomi kreatif yang cukup besar di dunia, dan saat ini tumbuh berkembang secara pesat. Seiring dengan berkembangnya alat transportasi yang lebih canggih, layanan model penginapan yang sangat variatif, perkembangan destinasi wisata, dan lain sebagainya, menjadikan daerah tujuan wisata yang sebelumnya dianggap jauh menjadi lebih dekat, dan mudah diakses atau dikunjungi. Konteks dampak positif pariwisata yang dipicu oleh *volume* perjalanan wisatawan tersebut meningkat, mendorong munculnya kebutuhan dan inovasi bagi penyediaan fasilitas-fasilitas pariwisata. Hal ini akan mendorong perekonomian wilayah yang menjadi tujuan wisata maupun wilayah pendukungnya (Sahrpley dan Tefler, 2015:1; Tan dan Tang; 2015:1; Untong; 2014:1). Tidak heran apabila pariwisata dianggap sebagai sektor yang dapat diandalkan dalam penerimaan devisa dan sangat berperan dalam meningkatkan pemerataan kesempatan berusaha, pendapatan masyarakat, serta pendapatan daerah. Bahkan pada berbagai negara di dunia, wisata dianggap sebagai industri vital yang mampu mendorong banyak dampak positif khususnya dalam mengembangkan perekonomian suatu negara (Hrubrocova *et al.*, 2016:1; Chulapan, dan Barhona, 2017:2).

Indonesia sebagai negara yang di dalamnya memiliki potensi pariwisata cukup besar, juga terus membangun dan berbenah untuk mempromosikan destinasi wisata yang ada. Tahun 2016, Bappenas setidaknya telah menetapkan 10 destinasi prioritas utama diantaranya: Danau Toba, Kepulauan Seribu, Kelayang, Wakatobi, Morotai, Lesung, Borobudur, Bromo Tengger Semeru,

Mandalika, dan Labuan Bajo (Bappenas, 2016:14). Sungguhpun usaha yang demikian dimaksudkan untuk mengembangkan wisata baru dan mengoptimalkan potensi wisata yang belum maksimal dalam mengembangkan perekonomian lokal. Namun kesan yang terlihat adalah “kesan klasik”, bahwa pemerintah masih mengandalkan wisata-wisata andalan yang sama, Misalnya Bali dengan wisata pantai, Jawa Tengah memiliki Candi Borobudur, Yogyakarta dengan Candi Prambanan dan banyak wisata pantai yang baru, Irian Jaya dengan Raja Ampatnya, Daerah Nusa Tenggara yang memiliki wisata pantau Gili Trawangan, Pulau Komodo, dan lain sebagainya (wisata terkenel sejenis di Indonesia). Oleh sebab itu pengembangan wisata di setiap daerah seluruh Indonesia, seharusnya dapat di bangun dengan level promosi dan semangat pariwisata yang sama agar dapat menciptakan pertumbuhan dan pembangunan ekonomi (Tugcu, 2014:1; Chulapan dan Barhona, 2017:2; Danesh *et al.*, 2017:2).

Provinsi Lampung dan sektor pariwisata di dalamnya, menjadi topik yang akan diangkat dalam penelitian ini. Sebab peranan sektor kepariwisataan dianggap telah ikut mendorong pertumbuhan ekonomi regional Provinsi Lampung. Berdasarkan data, selama kurun waktu lima tahun (2012-2017) pertumbuhan ekonomi Lampung mencapai 5 hingga 6 persen. Jika melihat kondisi di lapangan terhitung sejak tahun 2016, Provinsi Lampung memiliki 350 objek wisata berbentuk objek wisata alam maupun objek wisata buatan seperti: objek wisata hiburan umum berbentuk taman, sejarah, alam dan tirta, budaya, agamis religius, objek agro, bahari, serta objek wisata buatan. Objek atau destinasi wisata tersebut tersebar di 15 kabupaten/kota. Efek domino positif di dalamnya akan memacu pertumbuhan ekonomi, sebab akan mendorong munculnya hotel dan restoran, moda transportasi baik darat, laut dan udara, komoditas produk ekonomi kreatif UMKM, dan lain sebagainya. Kondisi tersebut dapat dilihat pada grafik data destinasi wisata Provinsi Lampung sebagai berikut:



Gambar 1.1 Jumlah dan Sebaran Objek Wisata di Provinsi Lampung, 2016
Sumber : Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi Lampung

Sebaran objek wisata paling banyak terdapat di Kabupaten Tanggamus, 77 objek wisata, diikuti dengan Kabupaten Way Kanan, 59 objek wisata, serta Kabupaten Lampung Utara dan Lampung Selatan masing-masing, 47 dan 37 objek wisata. Objek wisata di Tanggamus secara umum berupa objek wisata bahari (pantai) dan objek wisata alam tirta (air terjun), di Kabupaten Way Kanan berupa objek wisata alam, di Kabupaten Lampung Utara didominasi dengan objek wisata sejarah dan panorama alam, sementara objek wisata di Kabupaten Lampung Selatan didominasi dengan wisata pantai (bahari). Berdasarkan kondisi destinasi wisata yang beragam suatu wilayah seharusnya mampu memacu perekonomian melalui sektor pariwisata. Tugcu (2014:3) mengungkapkan bahwa kasus destinasi wisata yang beragam dapat dilihat di Wilayah Mediterania yang secara ekonomi mampu berkembang karena adanya objek wisata yang dapat dioptimalkan.

Beragam dan banyaknya objek wisata di Provinsi Lampung tersebut, telah berhasil menjadi magnet wisatawan asing (mancanegara) dan wisatawan

domestik (nusantara) bertandang ke Provinsi Lampung. Jumlah wisatawan nusantara dan wisatawan asing yang berkunjung ke Provinsi Lampung tahun 2004 tercatat sebanyak 577 ribu orang dan pada tahun 2013 jumlahnya mencapai 3,39 juta orang dan sampai dengan tahun 2017 meningkat menjadi 6,8 juta orang. Secara rata-rata mengalami kenaikan sekitar 26 persen per tahun.

Adapun data wisatawan yang berkunjung ke beberapa objek wisata di Propinsi Lampung pada periode 2004 – 2016 dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 1.1 Jumlah Wisatawan di Provinsi Lampung Tahun 2004 – 2016

Tahun	Wisatawan Nusanara	Wisatawan Mancanegara	Total	Pertumbuhan (%)
2004	577.804	3.626.	581.430	
2005	689.112	3.682	692.794	19,5
2006	843.768	6.893	850.661	22,79
2007	1.176.581	8.893	1.185.474	39,36
2008	1.448.059	10.028	1.458.087	23
2009	1.982.910	36.942	2.019.852	38,53
2010	2.136.103	37.503	2.173.606	7,61
2011	2.285.630	47.103	2.332.733	7,32
2012	2.581.165	58.205	2.639.370	13,14
2013	3.392.125	75.590	3.467.715	31,36
2014	4.777.174	95.759	4.681.415	35,08
2015	5.354.996	105.356	5.460.352	37,65
2016	7.381.774	115.053	7.496.827	38,07

Sumber: Neraca Satelit Pariwisata Daerah Propinsi Lampung 2016

Agar dapat membangun destinasi wisata Provinsi Lampung yang lebih optimal dalam menggerakkan perekonomian, saat ini telah dibentuk Kawasan Wisat Unggulan (KWU) yang di dalamnya diprioritaskan untuk dikembangkan KWU di Provinsi Lampung, terbagai ke dalam 7 (tujuh) kawasan meliputi: Kawasan Wisata Unggulan Kota Bandar Lampung, Kawasan Wisata Unggulan TNWK (Taman Nasional Way Kambas), Kawasan Wisata Unggulan Gunung Krakatau dan Pulau Sebesi, Kawasan Wisata Unggulan Menara Siger

Bakauheni, Kawasan Wisata Unggulan TNBBS (Taman Nasional Bukit Barisan Selatan) serta Kawasan Wisata Unggulan pantai Tanjung Setia, dan Kawasan Wisata Unggulan Teluk Kiluan. Sementara itu, untuk mengakomodasi meningkatnya kedatangan wisatawan ke Propinsi Lampung, pemerintah dan swasta juga telah membangun fasilitas penunjang pariwisata untuk kepentingan akomodasi. Adapun jumlah hotel, kamar, dan tempat tidur yang tersedia seperti terlihat pada Tabel 1.2. berikut ini

Tabel 1.2. Jumlah Hotel, Kamar, dan Tempat Tidur menurut Kabupaten/Kota, 2015

No	Kabupaten/Kota	Hotel	Kamar	Tempat Tidur
1	Lampung Barat	27	363	680
2	Tanggamus	8	68	266
3	Lampung Selatan	18	407	530
4	Lampung Timur	9	165	151
5	Lampung Tengah	19	290	379
6	Lampung Utara	5	195	367
7	Way Kanan	3	35	56
8	Tulang Bawang	13	298	567
9	Pesawaran	0	0	0
10	Tulang Bawang Barat	1	10	20
11	Pringsewu	6	107	163
12	Mesuji	1	-	-
13	Pesisir Barat	0	-	-
14	Bandar Lampung	68	2.314	4.316
15	Metro	9	152	313
	Jumlah	186	4.444	7.808

Sumber : BPS Provinsi Lampung

Tabel 1.2. menunjukkan perkembangan jumlah hotel, kamar, dan tempat tidur pada tahun 2015. Sebaran hotel, kamar, dan tempat tidur Kabupaten/Kota di Povinsi Lampung. Jumlah hotel terbanyak masih terpusat di Kotamadya Bandar Lampung; 68 hotel, 2,314 kamar, 4.316 tempat tidur, kemudian disusul Kabupaten Lampung Barat; 27 hotel, 363 kamar, 680 tempat tidur dan Kabupaten Lampung Tengah; 19 hotel, 290 kamar, 37 tempat tidur dan

Kabupaten Lampung Selatan; 18 hotel, 407 kamar, 530 tempat tidur, lalu sisanya menyebar di Kabupaten lainnya.

Pada tahun 2004 jumlah hotel bintang di Provinsi Lampung ada 6 hotel bintang dan pada tahun 2015 menjadi 11 hotel bintang. Untuk hotel non bintang, selama sepuluh tahun terakhir mengalami kenaikan hampir 30 persen dari 137 hotel tahun 2004 menjadi 177 hotel tahun 2015. Sementara itu, untuk jumlah kamar dan jumlah tempat tidur kenaikannya sejalan dengan kenaikan jumlah hotel. Jumlah kamar hotel non bintang naik sekitar 38 persen selama periode 2004 – 2015 atau mengalami kenaikan rata-rata 4,2 persen per tahun.

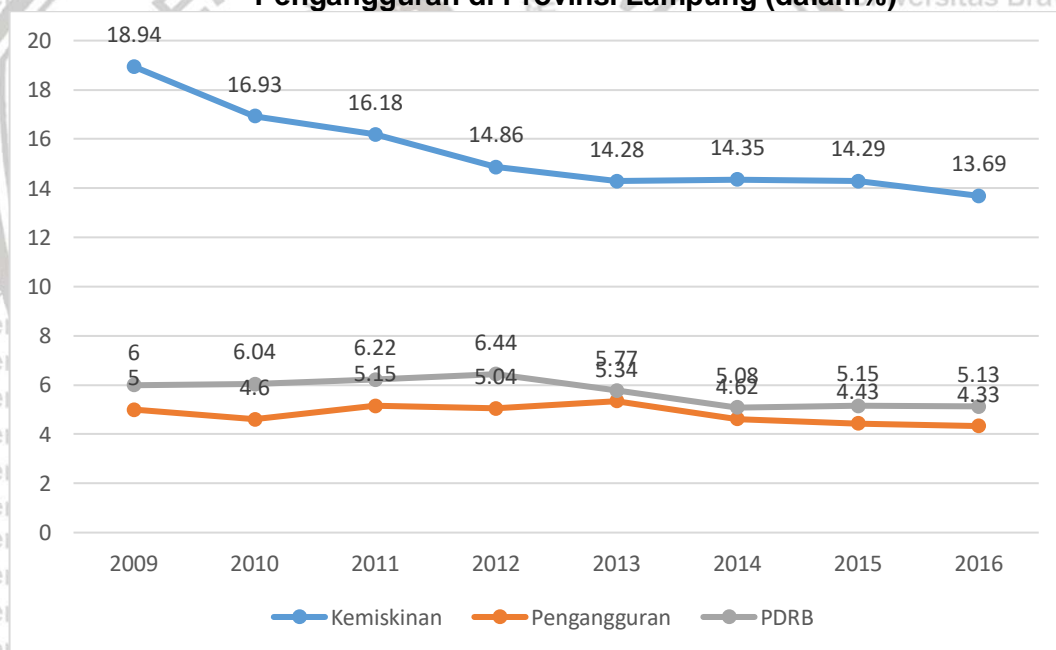
Selaras dengan hal-hal tersebut, prospek kunjungan wisatawan mancanegara dan wisatawan nusantara di suatu daerah merupakan penggerak ekonomi daerah tersebut, karena dapat menumbuhkembangkan hotel, perdagangan, cinderamata, rumah makan, transportasi dan kegiatan penunjang wisata lainnya akan menjadi berkembang. Pengeluaran konsumsi wisatawan terhadap produk-produk tersebut akan *linear* dengan lama dan banyaknya wisatawan berada di objek wisata, dan dampaknya adalah nilai konsumsi wisatawan terus meningkat yang secara umum berbanding lurus dengan pendapatan masyarakat sekitar (Pedrana, 2013).

Namun di tengah banyaknya destinasi wisata di Provinsi Lampung saat ini, ternyata kondisi kinerja perekonomian provinsi Lampung berdasarkan penyerapan tenaga kerja masih terlihat banyak penduduk usia kerja yang menganggur. Kondisi ini yang menyebabkan Provinsi Lampung masuk dalam 10 besar Provinsi dengan jumlah pengangguran terbesar di Indonesia. Terlihat kondisi tersebut cukup memiliki “tanda tanya” besar. Namun demikian kondisi ini sebenarnya banyak didukung oleh banyak penelitian sebelumnya yang menganggap bahwa sektor pariwisata belum tentu mampu mengembangkan

perekonomian/kinerja ekonomi (Ekanayake dan Long, 2012:3 ; Kumar dan Kumar, 2013:1; Tang dan Aboserda, 2016:3)

Lebih lanjut, berdasarkan PDRB (*product domestic regional brutto*) selama kurun waktu 2010-2016 kondisi kinerja perekonomian Provinsi Lampung memang mengalami peningkatan. Namun peningkatan PDRB ini belum membuat Provinsi Lampung keluar dari masalah kemiskinan. Tingkat kemiskinan Propinsi Lampung di Indonesia tergolong dalam 6 besar Provinsi yang menyandang predikat Provinsi termiskin. Kondisi ini memberikan pandangan menarik bahwa belum tentu wilayah dengan banyaknya dan variasi destinasi wisata, lantas sertamerta mampu mengembangkan perekonomian lokal (Ohlan, 2017).

Gambar 1.2 Laju Pertumbuhan Ekonomi, Tingkat Kemiskinan dan Pengangguran di Provinsi Lampung (dalam%)



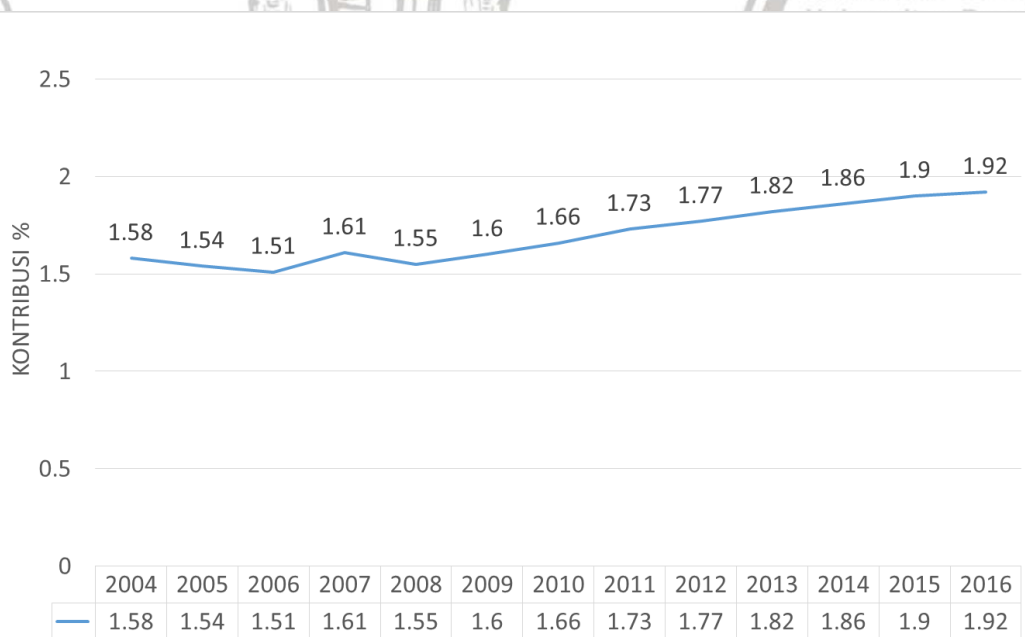
Sumber : BPS Lampung, (data diolah, 2017)

Gambar 1.2 di atas menjelaskan laju pertumbuhan ekonomi Provinsi Lampung yang mengalami *trend* negatif cenderung menurun. Pada tahun 2012 pertumbuhan ekonomi sampai pada level 6,44% namun 5 tahun terakhir pertumbuhan ekonomi Provinsi Lampung selalu mengalami penurunan tahun

2016 berada pada level 5.13%. Kondisi ini sedikit paradoks dengan trend data tingkat kemiskinan dan tingkat pengangguran Provinsi Lampung yang setiap tahun mengalami penurunan. Pada tahun 2012 tingkat kemiskinan berada pada level 14.86% tahun 2016 turun menjadi 13.69%. Sedangkan pengangguran tahun 2012 sebesar 5.04% tahun 2016 turun menjadi 4.33% (BPS Provinsi Lampung, 2017).

Jika melihat pada kemiskinan yang cenderung menurun, hal tersebut terbilang relevan jika membandingkan dengan perkembangan sektor pariwisata di Provinsi Lampung. Sebab tahun 2016, sektor pariwisata memberikan nilai tambah sebesar Rp. 3,12 trilyun atau memberikan kontribusi sekitar 1,92 persen terhadap PDRB. Jika membandingkan data selama kurun waktu 2004 hingga 2016, kontribusi sektor Pariwisata hanya naik 0,34 persen dari 1,58 persen tahun 2004 menjadi 1,92 persen tahun 2016, atau naik rata-rata 0,028 persen per tahun. Berkaitan dengan hal tersebut dapat dilihat pada gambar grafik berikut ini

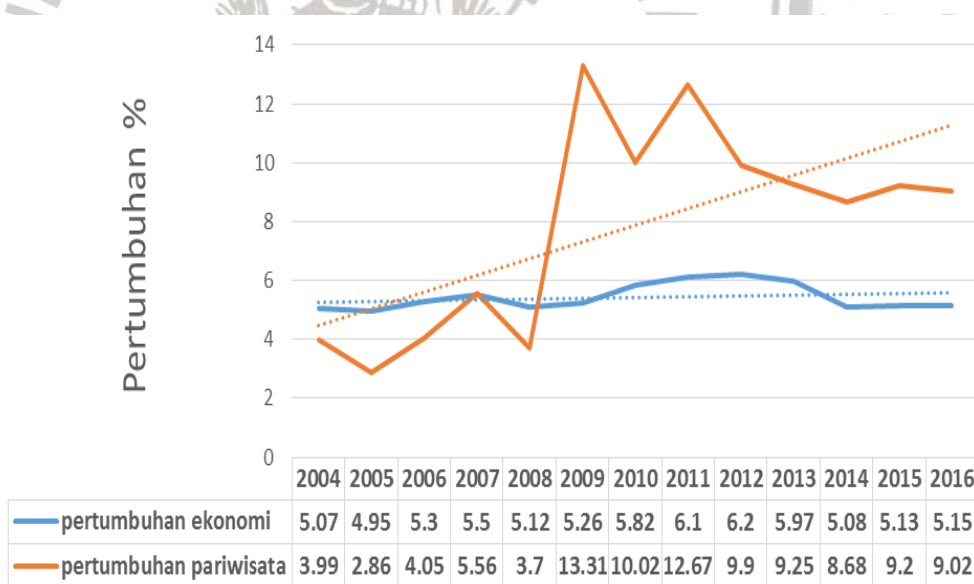
Gambar 1.3 Kontribusi Sektor Pariwisata dalam Perekonomian Provinsi Lampung (dalam%)



Sumber : BPS Lampung, (data diolah, 2017)

Kemudian jika melihat tren untuk sektor wisata dan sektor ekonomi (pertumbuhan), sebenarnya ada potensi besar yang dapat diharapkan dari sektor pariwisata di Provinsi Lampung. Data menunjukkan bahwa tahun 2016 untuk sektor Pariwisata tumbuh 9,02 persen. Pertumbuhan ini lebih tinggi bila dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi Lampung tahun 2016 yang tumbuh sebesar 5,15 persen. Kembali ke belakang, sejak tahun 2007 pertumbuhan sektor Pariwisata mulai melampaui pertumbuhan ekonomi Lampung. Walaupun pada tahun 2008 pertumbuhan sektor Pariwisata kembali melemah, namun sejak tahun 2009 –2016 sektor Pariwisata tumbuh di atas pertumbuhan ekonomi seluruh sektor. Berkaitan dengan hal tersebut dapat dilihat pada gambar grafik berikut ini.

Gambar 1.4. Perbandingan Pertumbuhan Sektor Pariwisata dengan Pertumbuhan Ekonomi Lampung (dalam%)



Sumber : BPS Lampung, (data diolah, 2017)

Pemaparan mengenai peran pariwisata dalam perekonomian masyarakat menjadi penting jika konteksnya diorientasikan untuk studi pada kawasan wilayah unggulan seperti di Provinsi Lampung. Sebab Provinsi Lampung memiliki

banyak destinasi wisata, namun belum banyak berperan dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat. Fenomena pengangguran dan kemiskinan yang dipaparkan sebelumnya setidaknya menjadi bukti mengenai dampak pariwisata terhadap perekonomian Provinsi Lampung yang belum memiliki arah baik. Kemudian, dalam memandang peran pariwisata yang seharusnya dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat tersebut, seharusnya tidak terlepas dari kesiapan provinsi Lampung dalam menyediakan aksesibilitas kepariwisataan, dan pertimbangan kinerja perekonomian lokal sebagai salah bentuk dampak positif pariwisata.

Penelitian pariwisata yang dikaitkan dengan ekonomi pada dasarnya telah banyak dilakukan. Secara umum banyak yang menganggap bahwa pariwisata mampu mendorong perekonomian suatu wilayah apabila dikelola dengan baik (Drăgulănescu dan Druțu, 2012; Nicely dan Palakurthi, 2012; Alegre dan Cladera, 2012; Pedrana, 2013; Vojnovic dan Knezevic, 2013; Kumar dan Hussain, 2014; Hrubcova, *et al.*, 2016; Chulaphan and Barahona, 2017; Ohlan, 2017; Patera, *et al.*, 2015). Pada sisi yang lain terdapat pula peneliti yang berpandangan sebaliknya. Bahwa ekonomilah yang berperan besar dalam membentuk suasana wisata dengan daya tarik tinggi, jumlah berkunjung wisatawan masif. Pariwisata akan dianggap tidak berkembang jika terdapat kondisi ekonomi yang cenderung terdepresiasi (Pleumarom, 2012; Kumar dan Husain, 2014; Hrubcova dan Loster, 2015). Namun demikian penelitian-peneiltian tersebut belum secara spesifik mempertimbangkan fenomena ekonomi dan pariwisata serta implikasinya terhadap kesejahteraan masyarakat.

Konteks pariwisata yang diharapkan berperan dalam perekonomian (kesejahteraan masyarakat) jika menelusuri kajian dan penelitian sebelumnya menunjukkan hasil yang cukup menarik. Misalnya saja penelitian yang dilakukan oleh Vojnovic dan Knezevic, (2013:1) dengan studi pada Inland Istria,

mengemukakan hasil bahwa pariwisata tidak memiliki dampak negatif pada ekonomi lokal. Bahkan pertimbangan terkait variabel pajak dianggap belum memberikan kontribusi terhadap sisi pendapatan anggaran kotamadya dan kota.

Sementara itu di Kroasia, Skuflic dan Stokovic (2011:2), hasil penelitiannya menunjukkan bahwa kegiatan pariwisata menciptakan implikasi positif seperti meningkatnya permintaan barang-barang konsumsi maupun barang-barang investasi yang pada gilirannya akan menimbulkan industri-industri baru untuk memproduksi barang dan jasa. Industri pariwisata juga menggerakkan kondisi aksesibilitas kepariwisataan ke arah pembenahan yang lebih baik. Selanjutnya dalam konteks yang sama Njole (2011) menggunakan variabel diantaranya *Local Activities; Human Capital; Social Capital; Tourism Related Outcomes; Physical Capital; Financial; Natural Capital*. Memecahkan hasil bahwa pariwisata telah dianggap memberikan kontribusi positif bagi mata pencaharian masyarakat setempat, sehingga perkembangan pariwisata tersebut memberikan kesempatan berusaha lebih besar bagi masyarakat miskin .

Begitu menariknya topik tentang pariwisata yang diulas dari berbagai sudut pandang dan alat analisis pada penelitian sebelumnya. Aspek-aspek ekonomi yang berhimpitan dengan pariwisata, kesejahteraan masyarakat, aksesibilitas kepariwisataan, dan kinerja perekonomian, akan menjadi satu paket variabel dalam penelitian ini. Pertimbangan berbagai aspek ekonomi pada pariwisata untuk kesejahteraan masyarakat, dengan memperhatikan aspek aksesibilitas kepariwisataan agar dampak ekonomi dari pariwisata lebih optimal, dan kinerja lokal dapat dikembangkan dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat, menjadi ciri khusus yang membedakan penelitian ini dan penelitian sebelumnya.

Pembahasan mengenai pariwisata menurut Oneteu dan Predonu (2013) adalah bagaimana suatu tatanan efisiensi pembangunan (untuk wisata) nantinya

memiliki integrasi antar kelompok kepentingan (masyarakat, investor, dan pemerintah). Sebab pariwisata dalam konsep fundamentalnya bukanlah untuk kepentingan golongan tertentu. Ditambah lagi jika pembahasan pariwisata studi kasusnya adalah untuk negara-negara yang beragam atau negara kecil yang banyak menumpang ekonomi dari sektor pariwisata. Dampak dari aktivitas pariwisata hanya akan optimal jika konflik dapat dikurangi, dan kesepakatan bersama menjadi kuncinya.

Membahas perkembangan pariwisata, tidak terlepas dari gagasan dan ide kreatif dalam membangun destinasi wisata dan layanan di dalamnya. Penelitian yang dilakukan *Zhu et al. (2017)* meyakini bahwa permintaan pariwisata yang naik tidak lepas dari *design* dan konten destinasi wisata yang ditawarkan. Dampak akan hal tersebut dalam perspektif pariwisata adalah memacu perekonomian lokal sehingga kesejahteraan dapat terstimulus. Usaha yang dilakukn *Zhu et al. (2017)* adalah memprediksi kemungkinan permintaan pariwisata yang naik selain hari liburan atau momen tertentu. Arahnya adalah membuat simulasi acara-acara *by design* apa yang mampu meningkatkan kunjungan wisata (studi kasus di Eropa) sehingga mampu menstimulus peningkatan standar konten wisata dan daya tariknya.

Kemudian, pertimbangan adanya dampak pariwisata pada kesejahteraan masyarakat adalah hal normatif yang sebenarnya diharapkan oleh setiap negara ataupun suatu wilayah. Selama ini pertimbangan kesejahteraan masyarakat memiliki indikator-indikator tertentu yang cukup berbeda antara peneliti satu dengan yang lainnya. Namun dalam penelitian ini pendekatan menilai indikator kesejahteraan masyarakat adalah dengan melihat modal manusia yang disesuaikan dengan indikator *Human Development Index (HDI)*, kemudian mempertimbangkan faktor pendidikan, kesehatan dan ekonomi. Kostakis dan Theodoropoulou (2017) mencoba membuktikan bahwa wisata dan

modal manusia mampu memacu kinerja perekonomian lokal yang di dalamnya, dihitung berdasarkan penyerapan tenaga kerja dan nilai pendapatan riil perkapita.

Pertimbangan ini tentu saja mendukung untuk menggunakan konteks kesejahteraan perekonomian masyarakat.

Sama halnya dengan penelitian Aref, F. (2010) yang mengungkapkan bahwa kesejahteraan akan terbentuk bila terdapat partisipasi masyarakat yang tinggi dalam membangun dan mengembangkan wisata. Penelitian yang dilakukan di Aref, F. (2010) di Negara Iraq tersebut seperti menjustifikasi bahwa tanpa partisipasi masyarakat yang tinggi, mustahil suatu wilayah wisata mampu mengembangkan ekonomi wisatanya sehingga mampu mensejahterakan masyarakat di dalamnya.

Kemudian kinerja perekonomian lokal yang dipertimbangkan dalam penelitian ini adalah memandang peranannya sebagai daya dukung pariwisata dan salah satu hal yang memperlihatkan dampak pariwisata terhadap masyarakat paling kentara yang ada di Provinsi Lampung. Zieba (2017) yang melakukan penelitian tentang kontribusi penduduk lokal dalam aktivitas ekonomi wisata, telah menemukan bahwa adanya sinergi yang menarik antara wisatawan luar negeri dengan penduduk Austria yang menyediakan *homestay* dan paket layanan wisata. Keramahtamahan yang dibentuk oleh penduduk lokal (area *homestay*) merupakan kebutuhan dan kewajiban yang harus dilakukan kepada para wisatawan. Sebab hal tersebut merupakan dari kunci utama dalam menggantungkan ekonomi dengan menyediakan jasa penginapan dan bentuk usaha yang berkaitan.

Penelitian lain yang dilakukan Tokarchuk *et al.* (2017) juga mengungkap bahwa pengembangan destinasi wisata di *German Magic Cities* (10 kota di Jerman yang menjadi prioritas destinasi wisatawan), mengungkap bahwa pariwisata mampu meningkatkan kulaitas dan taraf hidup yang tinggal di

dalamnya. Sementara itu Pejanović *et al.* (2017) menambahkan hal lain dari hasil penelitiannya. Bahwa metode *cluster* wisata menjadi salah satu cara untuk memacu perbaikan kinerja perekonomian lokal di *Republic of Serbia*, dengan tawaran khas dan keunikan yang memiliki daya tarik sendiri di setiap *clusternya*. Kondisi tersebut dapat dikaitkan dengan apa yang terjadi di Kota Wisata Batu. Saat ke Batu metode *cluster* wisata akan mudah dijumpai dengan karakter diantaranya: (1) wisata buatan; (2) wisata pertanian/agrowisata; (3) wisata alam; (4) wisata kuliner; (5) dan wisata *adrenaline*

Aspek aksesibilitas kepariwisataan juga dianggap hal yang vital dalam mendukung berkembangnya kawasan wisata. Balli dan Tsui (2016) meyakini bahwa negara Australia yang menjadi objek penelitiannya mampu memberikan layanan aksesibilitas ke setiap destinasi wisata yang ada di negara tersebut. Fokus penelitian adalah pada fasilitas bandara internasional di Australia, dengan temuan bahwa banyak wisatawan kemudian menerima *shock* terhadap konten-konten bandara yang di dalamnya mampu memicu wisatawan berkunjung ke wisata lain yang tidak direncanakan. Pusat informasi wisata, paket murah wisatawan, promosi yang menarik dianggap menjadi kunci sebagai aksesibilitas wisata di Australia.

Berdasarkan pada uraian latar belakang tersebut dapat dikerucutkan bahwa penelitian ini cukup berbeda dengan penelitian sebelumnya. Pertimbangan-pertimbangan variabel dalam penelitian ini didasarkan pada penelitiannya sebelumnya, dengan gambaran sebagai berikut: (1) Ekonomi Pariwisata (Oneteu dan Predonu, 2013; Pedrana, 2013; Vojnovic dan Knezevic, 2013; Kumar dan Hussain, 2014; Patera, *et al.*, 2015; Hrubcova, *et al.*, 2016; Chulaphan and Barahona, 2017; Ohlan, 2017; Zhu *et al.*, 2017); (2) Kesejahteraan Masyarakat (Kostakis dan Theodoropoulou, 2017; Aref, 2011); (3) Kinerja Perekonomian Lokal (Vojnovic dan Knezevic, 2013; Chulaphan and

Barahona, 2017; Zieba, 2017); (4) Aksesibilitas Kepariwisata (Dominguez *et al*, 2013; Tsui dan Balii, 2015; Michopoulou *et al*, 2015; Zajadacz, 2015; Bowtell, 2015; Gillovic dan McIntosh, 2015; Portales, 2015; Naniopoulos dan Tsalis, 2015; Naniopoulos *et al*, 2015; Lee *et al*, 2017)

Konteks dampak wisata pantai terhadap kesejahteraan masyarakat menjadi salah satu fokus yang akan digali dalam penelitian ini, dengan studi kasus di Provinsi Lampung. Pada dasarnya telah banyak yang menulis berkaitan dengan dampak pariwisata terhadap kesejahteraan masyarakat.

Misalnya penelitian yang dilakukan oleh Njole (2011). Penelitian yang dilakukan adalah untuk membuktikan secara empiris terkait dampak belanja rumah tangga, aset komunitas terhadap pengembangan pariwisata, dan identifikasi pariwisata apakah dapat meningkatkan pendapatan rumah tangga. Studi penelitian yang dilakukan di *Lake Manyara Park* tersebut menggunakan variabel diantaranya: *Local Activities, Human Capital, Social Capital, Tourism Related Outcomes, Physical Capital, Financial*, dan *Natural Capital*. Berdasarkan pada analisis menggunakan alat *Mix Method* (Kuantitatif dan Kualitatif) dengan data lapangan dalam bentuk *skala linkert* ditemukan hasil bahwa pariwisata telah memberikan kontribusi positif bagi mata pencaharian masyarakat setempat. Hal ini berarti dampak pariwisata dapat mengarah pada peningkatan kesejahteraan jika memang benar-benar dikelola dengan baik seperti yang terjadi dikawasan wisata *Lake Manyara Park*.

Kemudian, Al Alegre dan Cladera (2012) juga mengungkap temuan empiris yang tidak jauh berbeda. Kedua peneliti ini melakukan penelitian dengan cara menganalisis karakteristik wisata, perjalanan wisata, motivasi wisata sehubungan dengan keputusan untuk berpartisipasi dalam belanja wisata yang menjadi faktor penentu utama dari jumlah pengeluaran wisatawan. Temuan yang dihasilkan melalui Heckman Model, dengan basis *survey* yang dilakukan

menunjukkan hasil bahwa kegiatan ekonomi di daerah tujuan wisata yang dikunjungi, dan peningkatan harga produk di dorong oleh besarnya dollar yang dibelanjakan wisatawan mancanegara pada suatu daerah tujuan wisata yang dikunjungi. Konteks ini merujuk pada peningkatan kesejahteraan masyarakat sebab tren GDP riil per kapita juga meningkat.

Dukungan lain hadir dari Nurjaya (2014) yang melakukan penelitian dengan tujuan untuk menganalisis perekonomian yang dipengaruhi oleh pariwisata dan beberapa faktor yang mempengaruhi wisatawan berkunjung ke Negara-negara ASEAN+4. *Pearson Correlation Model* yang digunakan mengungkap hasil bahwa peningkatan *Gross Domestic Product* (GDP) riil perkapita dipengaruhi oleh pengeluaran wisatawan, investasi sektor pariwisata, dan total belanja pemerintah. Hal ini berarti bahwa tendensi ekonomi pariwisata mendorong munculnya kesejahteraan masyarakat yang ditandai dengan meningkatnya GDP riil per kapita. Atas temuan tersebut Nurjaya (2014) juga menambahkan temuan lain bahwa faktor fundamental peningkatan kunjungan wisatawan ke Negara-negara ASEAN+4 dipengaruhi oleh pelayanan publik, *total income*, perdagangan, harapan hidup dan *produk domestik bruto* di negara tersebut. Item-item tersebut dianggap mampu memberikan dorongan terhadap dampak positif ekonomi pariwisata. Namun ada hal yang patut diperhatikan misalnya temuan empiris bahwa penurunan kunjungan wisatawan dipengaruhi oleh faktor harga. Implikasi positif ekonomi pariwisata terhadap kesejahteraan juga dibuktikan oleh penelitian Chulapan dan Barahona (2017). Penelitiannya berusaha untuk mengungkap apakah ekspansi industri pariwisata memiliki kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi Thailand. Berdasarkan metode analisis VECM yang dilakukan, ditemukan hasil bahwa wisatawan asing asia selatan mendorong pertumbuhan ekonomi Thailand termasuk pula dari wisatawan Oceania.

Namun demikian berbeda halnya dengan Patera *et al* (2015:12) mengenai pengaruh pengembangan pariwisata pengentasan kemiskinan yang di dalamnya juga dirumuskan strategi kebijakan di Provinsi Bali. Walaupun penelitiannya menunjukkan bahwa pariwisata terbukti positif dan berdampak signifikan terhadap kinerja ekonomi, namun ternyata pada sisi yang lain kinerja ekonomi menunjukkan dampak negatif dan signifikan terhadap pengentasan kemiskinan. Sedangkan untuk pengembangan pariwisata dianggap memberikan dampak negatif dan signifikan terhadap pengentasan kemiskinan.

Kemudian Tsundoda dan Mlendinger (2009:1-2) dalam penelitiannya juga berusaha melihat implikasi negatif lain dari perkembangan wisata di Kota Peterborough (Inggris). Hasilnya menunjukkan bahwa ada konsekuensi dari perkembangan wisata bagi ekonomi lokal untuk kasus "*small town*", karena dianggap menimbulkan perbedaan kelas ekonomi yang semakin jauh antara pemilik modal di luar kota yang melakukan investasi di Kota Peterborough dan penduduk lokal Peterborough. Berdasarkan penelitian-penelitian tersebut, dalam penelitian ini juga akan membuktikan secara empiris bagaimana dampak wisata terhadap kesejahteraan terhadap kesejahteraan masyarakat di Provinsi Lampung, namun dengan pertimbangan pembentuk variabel yang berbeda.

Berdasarkan pada ulasan dan uraian mengenai latar belakang dalam penelitian ini. Fundamental dari hasil penelitian ini juga diharapkan dapat membentuk model atau desain ideal dalam mengembangkan pariwisata pantai di Provinsi Lampung. Oleh sebab itu, dari lima arahan penelitian yang telah diulas sebelumnya. Hal tersebut akan disusun menjadi bahan dasar dalam merumuskan kebijakan-kebijakan strategis untuk mengembangkan wisata pantai di Provinsi Lampung. Konsep dan pemikiran kebijakan strategis menjadi hal vital ke depannya, bukan saja sebagai cara mengembangkan wisata pantai yang ada

di Provinsi Lampung, namun juga sebagai aksi yang lebih nyata dalam memencapai tujuan pembangunan, berbangsa, dan bermegara.

1.2 Rumusan Masalah

Dari uraian di atas, pariwisata diharapkan mampu meningkatkan perekonomian masyarakat melalui penyerapan tenaga kerja di sekitar objek-objek wisata, menyebabkan terbuka peluang diversifikasi mata pencaharian, meningkatkan aksesibilitas kepariwisataan dan pada akhirnya meningkatkan kesejahteraan.

Apabila melihat kunjungan wisatawan di Provinsi Lampung yang cukup banyak dan memiliki tren meningkat dan potensi lain yang timbul akibat adanya destinasi wisata di Provinsi Lampung. Pada dasarnya terdapat konteks yang menarik di dalamnya. Sebab pariwisata di Provinsi Lampung belum mampu berperan dalam proses pengentasan kemiskinan dan menurunkan pengangguran, sehingga peranannya dianggap belum optimal. Penelitian sebelumnya banyak mempertimbangkan variabel ekonomi yang berdampak pada pariwisata, atau sebaliknya konteks pariwisatalah yang dianggap berperan dalam membangun kondisi perekonomian suatu wilayahnya. Penelitian ini disusun untuk mengungkap fenomena keterkaitan wisata pantai, kesejahteraan masyarakat, kinerja perekonomian lokal, dan aksesibilitas kepariwisataan. Oleh sebab itu, berdasarkan pada uraian latar belakang yang disajikan sebelumnya maka rumusan masalahnya dalam penelitian adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana perkembangan pariwisata pantai berbasis CBT di Pantai Teluk Kiluan dan perkembangan wisata pantai berbasis Non-CBT di Pantai Tanjung Setia.
2. Bagaimana implikasi pariwisata terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat sekitar Pantai Teluk Kiluan dan Pantai Tanjung Setia.

3. Bagaimana desain pariwisata dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitar Pantai Teluk Kiluan dan Pantai Tanjung Setia

1.3 Tujuan Penelitian

1. Untuk mengidentifikasi perkembangan pariwisata pantai berbasis CBT di Pantai Teluk Kiluan dan perkembangan pariwisata pantai berbasis Non-CBT di Pantai Tanjung Setia
2. Untuk mengidentifikasi implikasi pariwisata pantai terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat di sekitar Pantai Teluk Kiluan dan masyarakat sekitar Pantai Tanjung Setia
3. Untuk membuat desain pariwisata pantai dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitar pantai Teluk Kiluan dan Pantai Tanjung Setia

1.4. Manfaat Penelitian

1.4.1. Manfaat Secara Akademis:

- a) Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran, khususnya di bidang pariwisata pantai dengan pengelolaan berbasis CBT dan pengelolaan pariwisata pantai berbasis Non-CBT yang berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat sekitar.
- b) Penelitian ini diharapkan dapat melengkapi penelitian-penelitian terdahulu mengenai perkembangan ilmu ekonomi pembangunan khususnya pada topik pembangunan pariwisata pantai.

.Manfaat Secara Praktis:

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan usulan desain pengembangan wisata pantai khususnya pada objek wisata di Pantai Teluk Kiluan dan Pantai Tanjung Setia Provinsi Lampung yang lebih efektif untuk meningkatkan perkembangannya dan menciptakan kesejahteraan masyarakat sekitar.



BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif, melalui proses penelitian data deskriptif berupa perilaku, ucapan dan tulisan dengan mengamati subyek yang diteliti/orang/informan. Moleong (2004), menegaskan penelitian kualitatif dimaksudkan untuk memahami tentang apa yang dialami oleh subyek penelitian secara holistik dan dengan cara deskriptif dalam bentuk perkataan/ucapan dalam konteks khusus yang alamiah dengan landasan metode ilmiah.

Digunakannya penelitian kualitatif mengacu pada permasalahan dan tujuan yang ingin di jawab dalam penelitian, juga rekomendasi dari beberapa penelitian terdahulu. Penelitian kualitatif lebih menggali dan menjelaskan seluruh aspek yang melekat dengan fenomena sosial yang rumit, komprehensif, dan kompleks sehingga membutuhkan penjelasan dan interpretasi yang mendalam (Manzilati, 2009). Pendapat yang senada dikemukakan Yustika (2006), bahwa untuk mengorek secara lebih mendalam sebab akibat dari fenomena sosial agar dapat menemukan realitas sebenarnya dari pada sekedar hasil yang hanya muncul hanya dipermukaan.

Atas dasar pemikiran itulah maka penelitian ini menghendaki temuan yang mengeksplorasi bagaimanakah perkembangan, pariwisata pantai di Teluk Kiluan dan Pantai Tanjung Setia dengan pengelolaannya berbasis komunitas atau non komunitas. Selanjutnya juga menggali bagaimana implikasi dari perkembangan pariwisata pantai tersebut terhadap kesejahteraan masyarakat, tentunya dengan membandingkan pengelolaan pariwisata yang berbasis komunitas (CBT) dan non-komunitas (Non-CBT). Telusuran lebih jauh dan

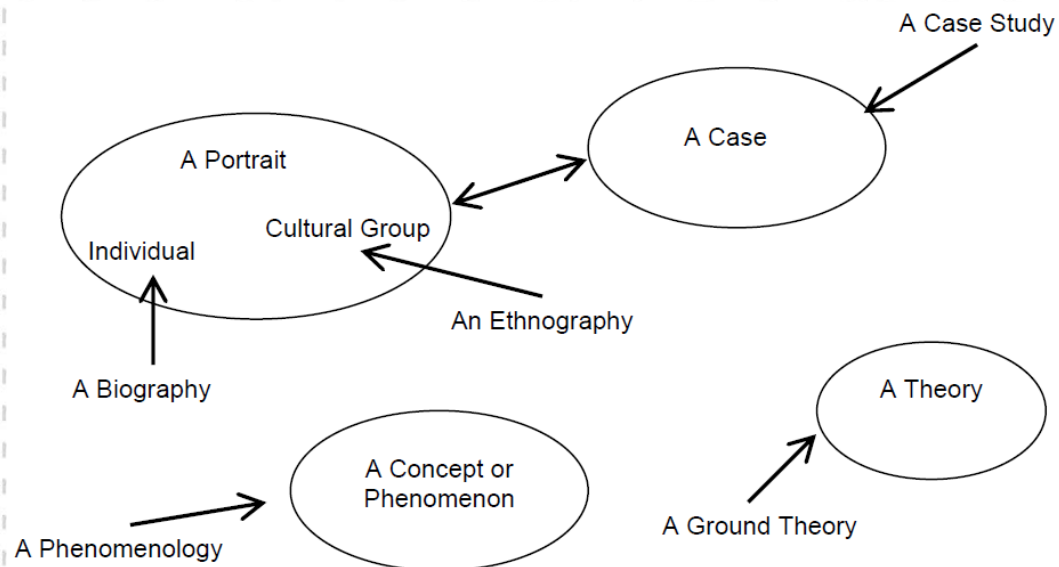
mendalam terhadap beberapa kelemahan/kekurangan/penghambat, atau kekuatan/pendukung perkembangan pariwisata maka akan dilahirkan suatu desain pariwisata pantai Teluk Kiluan dan Pantai Tanjung Setia dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitar.

3.1.1 Pendekatan Penelitian Studi Kasus

Metode penelitian kualitatif ialah suatu cara penelitian dengan menggali informasi tentang suatu gejala berdasarkan pengalaman, persepsi, atau kebutuhan-kebutuhan partisipan (Santoso dan Royanto, 2009). Menurut Denzin dan Lincoln (2011), kata kualitatif menyatakan penekanan pada proses dan makna yang tidak diuji, atau diukur dengan setepat-tepatnya, dalam istilah-istilah kuantitas, jumlah, intensitas, atau frekuensi. Menurut Patton (2005), metode kualitatif digunakan untuk memahami fenomena yang sedang terjadi secara alamiah (natural) dalam keadaan-keadaan yang sedang terjadi secara alamiah. Konsep ini lebih menekankan pentingnya sifat data yang diperoleh oleh penelitian kualitatif, yakni data alamiah. Data alamiah ini diperoleh dari hasil ungkapan langsung dari subjek peneliti. Patton (2005) menegaskan bahwa data kualitatif adalah apa yang dikatakan oleh orang-orang yang diajukan seperangkat pertanyaan oleh peneliti. Metode penelitian kualitatif juga sering disebut metode penelitian naturalistik karena penelitiannya dilakukan pada kondisi yang alamiah (Sugiyono, 2013).

Pada penelitian ini, desain pendekatan penelitian yang digunakan adalah studi kasus. Sebagaimana pendapat Creswell (2007) menjelaskan bahwa terdapat lima macam desain penelitian kualitatif, yaitu: etnografi, *grounded theory*, studi kasus, fenomenologi, dan naratif. Creswell (2007) memulai pemaparan studi kasus dengan gambar tentang kedudukan studi kasus dalam lima tradisi penelitian kualitatif yang dikemukakan dalam gambar di bawah ini.

Gambar 3.1 Desain Penelitian Kualitatif



Sumber : Creswell (2007)

Paparan gambar 3.1 di atas dapat diungkapkan bahwa fokus sebuah biografi adalah kehidupan seorang individu, dengan fokus fenomenologi untuk memahami sebuah konsep atau fenomena, fokus suatu teori dasar adalah seseorang yang mengembangkan sebuah teori, fokus etnografi adalah sebuah potret budaya dari suatu kelompok budaya atau suatu individu, dan fokus studi kasus adalah spesifikasi kasus dalam suatu kejadian baik itu yang mencakup individu, kelompok budaya ataupun suatu potret kehidupan masyarakat. Lebih lanjut Creswell (2003), mengemukakan beberapa karakteristik dari suatu studi kasus yaitu : (1) mengidentifikasi “kasus” untuk suatu studi; (2) Kasus tersebut merupakan sebuah “sistem yang terikat” oleh waktu dan tempat; (3) Studi kasus menggunakan berbagai sumber informasi dalam pengumpulan datanya untuk memberikan gambaran secara terinci dan mendalam tentang respons dari suatu peristiwa dan (4) Menggunakan pendekatan studi kasus, peneliti akan “menghabiskan waktu” dalam menggambarkan konteks atau setting untuk suatu

repository.ub.ac.id

kasus. Hal ini mengisyaratkan bahwa suatu kasus dapat dikaji menjadi sebuah objek studi (Stake, 1995) mempertimbangkan kasus menjadi sebuah metodologi. Bogdan & Biklen (1992) menyatakan penelitian studi kasus merupakan suatu kajian yang rinci tentang satu latar, atau subjek tunggal, atau satu tempat penyimpanan dokumen, atau suatu peristiwa tertentu. Stake (dalam Creswell, 2007) menjelaskan bahwa dalam desain penelitian studi kasus ini, kasus-kasus dibatasi oleh waktu dan aktivitas, dan peneliti mengumpulkan informasi secara lengkap dengan menggunakan berbagai prosedur pengumpulan data berdasarkan waktu yang telah ditentukan.

Berdasarkan paparan di atas, dapat diungkapkan bahwa studi kasus adalah sebuah eksplorasi dari “suatu sistem yang terikat” atau “suatu kasus/beragam kasus” yang dari waktu ke waktu melalui pengumpulan data yang mendalam serta melibatkan berbagai sumber informasi yang “kaya” dalam suatu konteks. Sistem terikat ini diikat oleh waktu dan tempat sedangkan kasus dapat dikaji dari suatu program, peristiwa, aktivitas atau suatu individu. Dengan perkataan lain, studi kasus merupakan penelitian dimana peneliti menggali suatu fenomena tertentu (kasus) dalam suatu waktu dan kegiatan (program, event, proses, institusi atau kelompok sosial) serta mengumpulkan informasi secara terinci dan mendalam dengan menggunakan berbagai prosedur pengumpulan data selama periode tertentu. Berdasarkan pemahaman tersebut, peneliti memilih pendekatan studi kasus karena peneliti ingin memperoleh informasi secara mendalam dan mendetail mengenai perilaku masyarakat mengenai pengelolaan ekonomi pariwisata berbasis komunitas atau berbasis non-komunitas, serta mengidentifikasi pengelolaan berbasis komunitas atau berbasis modal yang mampu mensejahterakan masyarakat disekitar objek wisata Pantai Tanjung Setia dan Pantai Teluk Kiluan.



3.1.2 Fokus Penelitian

Mengkaji secara mendalam ekonomi pariwisata berbasis masyarakat (*Community Base Tourism*) atau CBT dan berbasis non-masyarakat (*Non-Community Base Tourism*) atau Non-CBT, karena setiap individu memiliki pengetahuan dan pengalaman berbeda yang didasarkan pada keyakinan perilaku, keyakinan normatif maupun keyakinan bahwa perilaku dapat dilaksanakan.

CBT merupakan konsep pariwisata untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dengan melibatkan peran aktif masyarakat terutama masyarakat miskin, tinggal di desa-desa yaitu mereka yang secara tradisional hidup sebagai petani atau nelayan, tinggal secara turun temurun di daerah yang potensial untuk pengembangan pariwisata. Pengembangan pariwisata berbasis masyarakat dimaksudkan untuk memberi peluang kepada masyarakat setempat yang pada umumnya terdiri dari masyarakat asli setempat yang tidak memiliki kekuatan untuk mendapatkan berbagai akses yang tersedia di dunia pariwisata. Sedangkan pengelolaan non-CBT merupakan pengelolaan pariwisata yang pengelolannya lebih mengedepankan modal pada suatu kawasan wisata, dimana kawasan tersebut dibangun atau tersedia destinasi atau wahana wisata yang dikelola oleh badan usaha swasta yang dimiliki oleh seorang atau sekelompok orang, dikelola tanpa pelibatan kepemilikan oleh masyarakat luas, dan hasilnya untuk pemodal, biasanya tanpa memperhitungkan rasa keadilan dan *sustainable resources*.

3.2 Situs Penelitian

Lampung memiliki objek wisata lebih dari 350 objek wisata, diantaranya berupa: taman hiburan umum, peninggalan sejarah, objek wisata alam dan tirta, objek wisata budaya, objek wisata religius, objek wisata agro, objek wisata bahari, serta objek wisata buatan. Keberadaan objek wisata tersebut mampu

menarik wisatawan asing maupun domestik untuk melakukan kunjungan wisata ke provinsi tersebut. Objek wisata yang menjadi Kawasan Wisata Unggulan (KWU) di provinsi Lampung berturut-turut adalah 1) Pantai Tanjung Setia; 2) Pantai Teluk Kiluan; 3) Taman Nasional Bukit Barisan Selatan; 4) Taman Nasional Way Kambas; 5) Gunung Krakatau; 6) Bakauheni dan Menara Siger.

Dari keenam objek wisata yang paling populer di Provinsi Lampung, Pantai Tanjung Setia dan Pantai Teluk Kiluan merupakan objek wisata yang diminati pengunjung yang paling banyak setiap tahunnya. Selain itu, beberapa tahun terakhir pemerintah mempromosikan dua objek wisata untuk *go international* sebagai salah satu destinasi wisata terbaik di Indonesia. Hal ini cukup beralasan karena sarana dan prasarananya menunjang (mulai dari sarana kedatangan wisatawan sampai pada jasa/layanan wisata) tersedia di dua objek wisata tersebut.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka peneliti menentukan situs penelitian ini berada di situs Pantai Teluk Kiluan, Desa Kelumbayan Kabupaten Tanggamus, dan Pantai Tanjung Setia, Desa Tanjung Setia Kabupaten Pesisir Barat Provinsi Lampung.

3.3 Unit Analisis dan Pemilihan Informan

3.3.1 Unit Analisis

Mendasarkan pada pada argumentasi pada bab sebelumnya sekaligus memperhatikan hasil beberapa penelitian terdahulu, maka unit analisis pada penelitian ini adalah mengkaji secara mendalam tentang perkembangan, implikasi dan desain pariwisata Pantai berbasis CBT dan berbasis Non-CBT, terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat di sekitar objek wisata Pantai Teluk Kiluan dan Pantai Tanjung Setia, Provinsi Lampung. Identifikasi konsep pengelolaan CBT dan Non-CBT

pada 2 situs penelitian, dilanjutkan dengan mengetahui faktor-faktor yang menghambat perkembangan, serta memperhatikan kebijakan pariwisata dan harapannya ke masa yang akan datang, maka akan dibentuk suatu model/desain. Desain tersebut sebagai suatu konsep yang berupa gambar/bagan tentang bagaimana wisata Pantai Teluk Kiluan dan Pantai Tanjung Setia, di provinsi Lampung dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitar.

Selanjutnya untuk memperoleh hasil informasi yang akurat, berdasarkan unit analisis tersebut setidaknya diperlukan informan yang peneliti bagi menjadi tiga yaitu: Masyarakat, Swasta/ Agen Travel dan Pemerintah. Lebih jauh akan dijelaskan dalam sub-bab di bawah ini.

3.3.2 Pemilihan Informan

3.3.2.1 Masyarakat

a. Masyarakat Sekitar yang Menggantungkan Sumber Pendapatan Utama dari Objek Wisata Tanjung Setia dan Teluk Kiluan

Bagi mereka warga atau masyarakat sekitar yang tinggal di sekitar objek wisata Pantai Teluk Kiluan Desa Kelumbayan Kabupaten Tanggamus dan Pantai Tanjung Setia, Desa Tanjung Setia Kabupaten Pesisir Barat menggantungkan sumber pendapatan utama dari objek wisata tersebut, menjadi salah satu informan utama dalam penelitian ini. Konteks menggantungkan sumber pendapatan utama dalam hal ini mengarah pada warga yang berdagang di sekeliling objek wisata Pantai Teluk Kiluan dan Pantai Tanjung Setia, pengelola jasa wisata di sekitar objek seperti persewaan alat, *homestay*, *cottage*, penginapan, sewa

perahu, seni pertunjukan dan sejenisnya, bahkan dapat sampai ke pengelola parkir di sekitar objek wisata. Masyarakat yang demikian sangat diperlukan informasi dan penggalian pendapat/sarannya dalam merumuskan implikasi dan desain wisata Pantai Teluk Kiluan dan Pantai Tanjung Setia, terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat. Sebab kritik, masukan, saran, serta persepsi dan perspektif masyarakat terhadap pengelolaan, pengembangan, implikasi dan kebijakan terkait objek wisata Pantai Teluk Kiluan dan Pantai Tanjung Setia, menentukan bagaimana implikasi dan desain ekonomi pariwisata ke depannya.

Selain itu, juga memungkinkan untuk mencari informan atau warga masyarakat sekitar yang mengandalkan objek wisata Pantai Teluk Kiluan dan Pantai Tanjung Setia sebagai sumber pendapatan sampingan seperti: pemandu wisata yang sifatnya temporal, masyarakat yang akan berjualan bila saat musim liburan saja, dan lain sebagainya. Informan seperti ini walaupun bukan utama namun sebenarnya diperlukan informasinya agar implikasi dan desain wisata Pantai Teluk Kiluan dan Pantai Tanjung Setia, terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat lebih komprehensif.

b. Tokoh Masyarakat Desa di Sekitar Objek Wisata Tanjung Setia dan Teluk Kiluan

Tokoh masyarakat menjadi informan yang tidak kalah penting. Dalam hal ini, tokoh masyarakat yang dimaksud mengarah kepada mereka para warga yang memiliki pengaruh terhadap masyarakat di desa-desa sekitar objek wisata. Misalnya

dalam mengambil keputusan bersama, dihormati kedudukan dan statusnya, ulama, dan sejenisnya. Selain itu, tokoh masyarakat juga bisa mengarah pada spesifik informan yang mengetahui sejarah terbentuknya objek wisata Pantai Tanjung Setia dan Pantai Teluk Kiluan. Sejarah tersebut juga dapat dikerucutkan kepada pembahasan perbandingan kebijakan-kebijakan pengelolaan dan optimalisasi objek wisata yang pernah dilakukan selama ini.

Opsi tokoh masyarakat lain yang mungkin dapat dipilih adalah para aktivis lingkungan yang ada di sekitar objek wisata, dan telah *concern* untuk mengawal pengembangan objek wisata secara ramah lingkungan dan berkelanjutan. Patut diketahui bahwa objek wisata Pantai Tanjung Setia mengandalkan pesona semenanjung yang bersih, air laut yang biru/jernih, dan ombak untuk berselancar, sedangkan objek wisata Pantai Teluk Kiluan mengandalkan pesona bahari dan lomba-lomba serta kolam laguna. Oleh sebab itu pandangan dari para aktivis lingkungan yang peduli untuk mengawal keberlangsungan objek wisata dan terumbu karang tersebut patut digali dan didalami.

c. Paguyuban atau Kelompok Masyarakat yang Ada di Sekitar Objek Wisata Pantai Teluk Kiluan dan Pantai Tanjung Setia

Paguyuban atau kelompok masyarakat dalam hal ini mengarah pada informan yang menjadi ketua atau inti di dalam organisasi paguyuban atau kelompok masyarakat. Misalnya ketua paguyuban perdagangan di sekitar objek wisata, paguyuban jasa wisata di sekitar objek wisata, kelompok koperasi, tim inti

penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) dan sejenisnya. Informan tersebut diperlukan informasi dan datanya dalam perspektifnya sebagai kelompok masyarakat. Selain itu, jika memungkinkan pencarian informan yang bernaung pada kelompok masyarakat dapat menuju ke Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang memang berhubungan dengan objek wisata Pantai Tanjung Setia dan Pantai Teluk Kiluan.

3.3.2.2 Agen Travel/Swasta

a. Pengelola Agen Travel yang Mengandalkan Pesona Objek

Wisata Pantai Teluk Kiluan dan Pantai Tanjung Setia

Informan yang dapat dipilih diantaranya adalah para pebisnis yang bergerak di bidang *tour and travel* (pengelolanya), pemandu wisata (*tour guide*) yang ada pada agen *travel*. Dalam konteks ini pengelola jasa penginapan di sekitar objek wisata Pantai Teluk Kiluan dan Pantai Tanjung Setia yang telah bekerjasama dengan agen *travel* juga memungkinkan sebagai informan penelitian ini.

Informan yang demikian, diperlukan untuk mengetahui kondisi persaingan pasar, *trend*, dan perkembangannya selama ini. Belakangan ini muncul istilah atau konsep *leisure economy* yang di dalamnya memberikan fenomena bergesernya pola konsumsi yang tidak sekedar membeli namun juga diharapkan memberi nilai, pengalaman, bahkan pembelajaran untuk dibagi, dipamerkan, dan ditunjukkan kepada seseorang atau kelompok masyarakat. Pada poin ini, pandangan para agen *travel* perlu

digali lebih Pantai Teluk Kiluan dan Pantai Tanjung Setia tepat sesuai perkembangan yang terjadi saat ini.

b. **Pengelola Agen Travel Digital**

Belakangan ini Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) mengeluarkan *platform digital* berupa *booking.com*. Hal tersebut dilakukan sebagai respon berkembangnya ekonomi digital dalam mendukung dunia perhotelan dan restoran saat ini. Hal tersebut kemudian direspon oleh Asosiasi Tour dan *Travel Agent* (Asita) yang mengakomodir seluruh anggotanya dalam satu *platform digital* bernama Asita Go, dengan visi kita melindungi anggota yang tersebar seluruh Indonesia dengan *platform digital* tersebut.

Pada konteks yang demikian, pertimbangan perspektif digital untuk membentuk implikasi dan *design* pariwisata di objek wisata Pantai Tanjung Setia dan Pantai Teluk Kiluan perlu dilakukan. Oleh sebab itu diperlukan informan berupa pengelola agen *travel* atau pakar/praktisi IT di dalamnya khususnya pada bidang *tour and travel* untuk mengupas permasalahan dan solusi berkaitan dengan perkembangan pariwisata selama ini.

3.3.2.3 Pemerintah

a. **Pemerintah Desa**

Pemerintah Desa menjadi aktor terdekat pada pembangunan yang melibatkan peran serta masyarakat. Untuk mencapai hasil (keberhasilan) yang lebih baik, lebih efektif, dan lebih produktif, maka prinsip demokrasi pembangunan, yang

berasaskan pada pembangunan dari masyarakat, oleh masyarakat, dan untuk masyarakat menjadi penting khususnya dalam pengelolaan potensi desa dalam bentuk wisata. Oleh sebab itu informan pemerintah desa diperlukan dalam mendukung penelitian ini.

Informan perangkat desa dalam hal ini spesifik mengarah pada perangkat desa seperti Kepala Dusun, Kepala Desa, Sekretaris Desa, dan Pemerintah Desa terkait. Perspektif Pemerintah desa diperlukan karena peranannya sebagai pelayan masyarakat yang paling dekat bahkan berdampingan dengan masyarakat. Pada sisi yang lain, saat ini telah bergulir dana desa, dan perlunya pembentukan Badan Usaha Miliki Desa (Bumdes). Tentu orientasi dalam mengoptimalkan potensi desa seperti objek wisata menjadi topik yang saling terkait.

b. Pemerintah Kabupaten dan Provinsi (Dinas Pariwisata, Dinas UMKM, dan Dinas Perhubungan)

Pantai Pantai Teluk Kiluan dan Pantai Tanjung Setia pada dasarnya berada pada daerah yang berbeda. Jika Pantai Tanjung Setia berada di Kabupaten Pesisir Barat Barat, sementara Pantai Teluk Kiluan berada di Kabupaten Tanggamus. Oleh sebab itu pasti memiliki desain pengelolaan dan strategi pemasaran dan pemberdayaan yang berbeda. Pada masing-masing objek wisata tersebut informan dari sisi pemerintah kabupaten dapat engerucut kepada dinas yang sesuai dan terkait erat. Hal tersebut berupa informan yang dipilih dari Dinas Pariwisata, Dinas Koperasi dan

UMKM, dan Dinas Perhubungan. Ketiga Dinas ini diperlukan untuk menggali informasi yang spesifikasinya berbeda-beda.

Informan dari Dinas Pariwisata diorientasikan untuk mengungkap fakta di lapangan berkaitan dengan potret situs, konsep pengelolaan pariwisata, perkembangan yang terjadi, implikasi bagi kesejahteraan, dan desain pengelolaan dimasa yang akan datang.

Sementara itu, Dinas Koperasi dan UMKM untuk menggali informasi berkaitan dengan bagaimana desain pemberdayaan dan permodalan bagi pelaku UMKM yang mengantungkan pada objek wisata Pantai Tanjung Setia dan Pantai Teluk Kiluan. Sementara itu untuk Dinas Perhubungan dan Dinas Pekerjaan umum untuk menggali informasi berkaitan dengan desain implementasi pengadaan infrastruktur seperti jalan dan lain sebagainya sehingga potensi Pantai Teluk Kiluan dan Pantai Tanjung Setia dapat optimal. Perspektif informasi dari pusat (Pemerintah Provinsi) juga diperlukan dan tidak kalah penting untuk mendapatkan data dan fakta pengelolaan dan strategi pengembangan Pantai Teluk Kiluan dan Pantai Tanjung Setia sebagai objek wisata di Provinsi Lampung.

Berdasarkan pada tiga pemilihan informan di atas peneliti membuat kriteria untuk calon informan yang diharapkan memperoleh informan yang relevan sehingga bisa mendapatkan informasi tuntas tentang situs penelitian yang akan diteliti.

Tabel 3.1 Kriteria Informan

No	Informan	Jabatan/Profesi	Tingkat Pendidikan	Umur	Lama Tinggal	Lama Kerja dibidangnya
1.	Masyarakat					
	a) Tokoh	Orang yang dituakan	min SD	min 40 th	min 10 th	-
	b) Komunitas	Ketua/Pengurus	min SMA			-
	c) Individu	Masyarakat disekitar situs	min SD	min 30 th	min 5 th	min 5 th
2.	Swasta/Pengusaha					
	a) Investor	Pemilik/Pengurus	min SD	min 30 th	-	min 10 th
	b) Paguyuban	Ketua/Pengurus	min SD		-	min 5 th
	c) Individu	Usaha perorangan				
3.	Pemerintah					
	a) Kepala Desa	Ketua/Pengurus	min SMA		-	min 10 th
	b) Pemerintah Kabupaten	Kepala Dinas	min S1	min 30 th	-	min 10 th

3.2.3 Penentuan Informan

Penelitian ini menggunakan *Snowballing Sampling* dalam menentukan informan. Teknik *Snowballing Sampling* (bola salju) adalah suatu metode dimana informan diperoleh melalui proses bergulir dari satu responden ke responden yang lainnya, biasanya metode ini digunakan untuk menjelaskan pola-pola sosial atau komunikasi (sosiometrik) suatu komunitas tertentu. Atau dengan kata lain, dalam penentuan informan, pertama-tama di pilih satu atau dua orang, tetapi karena dengan dua orang ini belum merasa lengkap terhadap informasi yang di berikan, maka peneliti mencari orang lain yang di pandang lebih tahu dan dapat melengkapi informasi yang di berikan oleh dua orang sebelumnya. Begitu seterusnya, sehingga jumlah informan menjadi semakin banyak (Sugiyono, 2013).

3.4. Pengumpulan Data

Metode yang digunakan dalam pengumpulan data pada penelitian ini, adalah dengan teknik :

3.4.1 Observasi

Yaodih (dalam Satori dan Komariah, 2014) menyatakan bahwa observasi merupakan suatu teknik atau cara mengumpulkan data dengan jalan mengadakan pengamatan terhadap kegiatan yang sedang berlangsung. Jenis observasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah observasi partisipatif.

Dalam observasi partisipatif, peneliti terlibat dalam kegiatan subjek yang sedang diamati atau yang digunakan sebagai sumber data penelitian (Sugiyono, 2013).

Tindakan yang dilakukan oleh peneliti dalam observasi yaitu: (1) melakukan pengamatan awal dengan mencermati situasi di lingkungan situs penelitian secara langsung dan sistematis terhadap perkembangan pariwisata seperti arus kunjungan wisatawan, fasilitas dan aksesibilitas pariwisata, atraksi pariwisata, promosi, *event-event* yang dilakukan dengan skala nasional maupun internasional, sampai dengan perubahan-perubahan secara fisik perilaku masyarakat meliputi kegiatan ekonomi, budaya, sosial, politik, pegiat lingkungan, pemilik unit usaha. (2) mencatat, merekam dan mentranskrip fenomena atas setiap gejala penting dalam setiap kegiatan observasi untuk mendapatkan pemahaman mendalam tentang kejadian selama observasi, dengan merujuk kepada matriks peta informasi (3) menggunakan alat pembantu seperti kamera, alat untuk merekam kejadian yang terkait dengan tujuan penelitian.

3.4.2 Wawancara Semi Terstruktur

Wawancara (*interview*) adalah proses komunikasi interaksional antara dua pihak dimana salah satu pihak telah memiliki tujuan yang telah ditentukan sebelumnya atau tujuan yang serius, yang di dalamnya terdapat proses bertanya dan menjawab pertanyaan (Stewart & Cash, 2008).

Esterberg (dalam Sugiyono, 2013) mengemukakan beberapa macam wawancara, yaitu wawancara terstruktur, semiterstruktur, dan tidak terstruktur. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teknik wawancara semi terstruktur. Wawancara semi terstruktur termasuk dalam kategori *in-depth interview*, yaitu dalam pelaksanaannya lebih bebas dibandingkan dengan wawancara terstruktur (Sugiyono, 2013). Tujuan dari wawancara semi terstruktur ini adalah untuk menemukan permasalahan secara lebih terbuka, dimana pihak yang diajak wawancara diminta pendapat dan ide-idenya.

Dalam melakukan wawancara, peneliti perlu mendengarkan secara teliti dan mencatat apa yang dikemukakan oleh subjek penelitian atau informan. Satori & Komariah (2014) menyatakan bahwa pendekatan yang digunakan dalam wawancara semi terstruktur ini menggunakan petunjuk umum wawancara yang merupakan kombinasi wawancara terstruktur dan tidak terstruktur yang menggunakan beberapa inti pokok pertanyaan yang akan diajukan, yaitu peneliti membuat garis besar pokok-pokok pembicaraan, namun dalam pelaksanaannya peneliti mengajukan pertanyaan secara bebas, pokok-pokok pertanyaan yang dirumuskan tidak perlu dipertanyakan secara

berurutan dan pemilihan kata-katanya juga tidak baku, tetapi dimodifikasi pada saat wawancara berdasarkan situasinya.

Informan yang digunakan dalam penelitian ini merupakan masyarakat, agen *travel* dan pemerintah, dimana menggali pemaknaan dan persepsi narasumber tentang pariwisata dan kesejahteraan di sekitar objek wisata Pantai Tanjung Setia dan Pantai Teluk Kiluan dari nara sumber. Pokok-pokok pertanyaan yang dirancang berupa pertanyaan terbuka, mudah dimengerti, netral, dan tidak bersifat mengarahkan.

3.4.3 Dokumentasi

Dalam menggali data melalui observasi dan wawancara, peneliti juga menggunakan dokumentasi sebagai alat bantu yaitu dengan mencatat ketika peneliti menemukan fakta atau informasi yang dirasa penting dan menarik untuk digali lebih dalam. Menurut Sugiyono (2013) dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seorang. Dokumen yang berbentuk tulisan misalnya catatan harian, sejarah kehidupan (*life histories*), ceritera, biografi, peraturan, kebijakan. Dokumen yang berbentuk gambar misalnya foto, gambar hidup, sketsa dan lain-lain. Dokumen yang berbentuk karya misalnya karya seni, yang dapat berupa gambar, patung, film dan lain-lain. Studi dokumen merupakan pelengkap dari penggunaan metode observasi dan wawancara dalam penelitian kualitatif.

Hasil penelitian dari observasi dan wawancara, akan lebih kredibel atau dapat dipercaya kalau didukung oleh sejarah pribadi

kehidupan di masa kecil, sekolah, tempat kerja, masyarakat, dan autobiografi. Selain itu akan penelitian akan lebih kredibel apabila didukung oleh foto-foto atau karya tulis akademik dan seni yang telah ada.

3.4.4. *Focused Group Discussion (FGD)*

Diskusi kelompok terfokus merupakan salah satu panduan metode riset kualitatif untuk mendapatkan informasi dari permasalahan tertentu. Menurut *Focus Group Discussion* dilakukan melalui diskusi kelompok beranggotakan 6-8 orang. Dengan pimpinan seorang atau dua orang moderator sebagai pemandu diskusi. Dalam FGD akan dihadiri oleh tokoh masyarakat setempat, pelaku pariwisata (*agent tours*), pemerintah dan sebagai moderator.

Sebelum FGD dimulai terlebih dahulu disiapkan dokumen panduan diskusi, alat pencatat dan perekam. Teknik ini menghasilkan informasi hasil cek silang yang lebih akurat terhadap informasi yang tersedia sebelumnya. FGD merupakan pola yang paling disarankan untuk mendapatkan informasi kualitatif yang bermutu mengenai permasalahan lokal yang bersifat spesifik. Selain teknik wawancara, *Focus Group Discussion (FGD)* merupakan salah satu metode riset kualitatif yang dilakukan melalui diskusi secara sistematis dan terfokus untuk membahas persoalan yang tidak pasti atau suatu masalah yang tidak bisa digeneralisir dilakukan secara eksploratif.

3.5 Interpretasi Data

Banyak cara yang bisa dilakukan untuk menginterpretasi data hasil pengamatan di lapangan, diantaranya adalah analisis data studi kasus seperti yang disarankan oleh Spradley. Spradley (2007) mengemukakan bahwa data penelitian studi kasus dapat dianalisis melalui tahapan proses interpretasi:

- 1) Menyalin (*transcribing*) yakni menyalin hasil rekaman *audio* percakapan antara informan dan peneliti. Salinan hasil rekaman *audio* percakapan tersebut berbentuk transkrip yang kemudian akan dianalisis.
- 2) Memeriksa kembali transkrip yang ditulis, melalui mendengarkan kembali rekaman *audio* percakapan dan mencocokkannya
- 3) Pengkodean (*coding*) yaitu proses menciptakan kategori dan menandai data yang dipilih. Sering juga dikenal dengan pengindeksan, kategorisasi atau klasifikasi kemudian disusun secara sistematis dan selanjutnya akan disusun tema-tema berdasarkan hasil analisis data tersebut.
- 4) Ketajaman analisis diperlukan pijakan sekaligus pisau analisis dalam bentuk dukungan teori-teori yang relevan dan hasil penelitian terdahulu yang mendukung.

Selanjutnya peneliti membuat peta informasi yang didasarkan pada rumusan masalah dan tujuan penelitian. Peta informasi bertujuan untuk mengontrol dan menuntun peneliti agar tidak terlalu melebar diluar fokus permasalahan yang diteliti dan mencapai tujuan yang diharapkan. Selain itu untuk mempermudah pengumpulan data di lapangan dan nanti pada saat melakukan analisis data. Matriks peta informasi menyajikan fokus masalah di

situs penelitian, informan, metode, topik, target yang dicapai dan perkiraan informasi di sajikan di dalamnya.

Tabel 3.2 Peta Informasi Penelitian

Rumusan Masalah	Fokus Masalah/Situs	Informan	Metode	Target Dicapai
1. Bagaimana perkembangan pariwisata	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengelolaan Pariwisata dengan konsep CBT di Situs Pantai Teluk Kiluan 2. Perkembangan Pariwisata di Situs Pantai Teluk Kiluan 3. Pengelolaan Pariwisata dengan konsep Non-CBT di Situs Pantai Tanjung Setia 4. Perkembangan Pariwisata dengan konsep Non-CBT di Situs Pantai Tanjung Setia 	<p>Tokoh Masyarakat, Pedagang, Komunitas Masyarakat, Pemilik Travel, Pengelola unit usaha, Pemerintah</p>	<p>Observasi, Wawancara, dan Dokumentasi</p>	<p>Sejarah dan gambaran umum perkembangan pariwisata dari mulai awal sampai sekarang</p> <p>Mengetahui kecenderungan perkembangannya meningkat atau menurun</p> <p>Faktor-Faktor yang menyebabkannya</p> <p>Mengetahui konsep pengelolaan pariwisata berbasis CBT dan Non-CBT</p> <p>Prinsip-prinsip/karakteristik CBT dan Non-CBT</p>
2. Bagaimana implikasi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Implikasi Pariwisata berbasis (CBT) terhadap Kesejahteraan di Situs 	<p>Tokoh Masyarakat,</p>	<p>Observasi, Wawancara,</p>	<p>Menggali implikasi pariwisata</p>

pariwisata terhadap peningkatan kesejahteraan	Pantai Teluk Kiluan 2. Implikasi Pariwisata berbasis Non-CBT terhadap Kesejahteraan di Situs Pantai Tanjung Setia	Komunitas Masyarakat, Pedagang, Penyedia Jasa Wisata, Pengusaha	FGD, dan Dokumentasi	terhadap kesejahteraan masyarakat: - Ekonomi - Non Ekonomi
3. Desain pariwisata dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitar	Pengelolaan pariwisata antara pelaksanaan dan harapan Masalah-masalah yang terjadi Temuan-temuan: tentang perkembangan ekonomi pariwisata yang lesu dan meningkat, faktor penyebab perkembangan yang lesu dan meningkat, karakteristik cbt dan non-cbt, kebijakan yang menghambat dan kebijakan yang harus diambil, kebijakan yang sudah dilakukan dan kebijakan yang harus ditinggalkan			Membuat desain pariwisata pantai dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat <i>Action</i> masyarakat, swasta/investor, dan pemerintah

Sumber: Peneliti 2019

3.6 Kredibilitas Data Penelitian

Penelitian kualitatif dinyatakan absah apabila memiliki salah satunya yaitu derajat keterpercayaan (*credibility*). Kredibilitas merupakan ukuran kebenaran data yang dikumpulkan, yang menggambarkan kecocokan konsep peneliti dengan hasil penelitian (Satori & Komariah, 2014). Sugiyono (2013) menyatakan bahwa uji kredibilitas data atau kepercayaan terhadap data hasil penelitian kualitatif antara lain dapat dilakukan dengan enam cara, yaitu : perpanjangan pengamatan, peningkatan ketekunan dalam penelitian, triangulasi, diskusi dengan teman sejawat, analisis kasus negatif, *audit trail* dan *member checking*.

Pada penelitian ini, peneliti menggunakan *member checking*, *audit trail* triangulasi sebagai uji kredibilitas data. *Member checking* dilakukan dengan kembali pada informan untuk memverifikasi kredibilitas informasi. Menurut Sugiyono (2013) tujuan *member checking* adalah untuk mengetahui seberapa jauh data yang diperoleh sesuai dengan apa yang diberikan oleh pemberi data.

Apabila data yang ditemukan disepakati oleh para pemberi data berarti data tersebut valid, sehingga semakin kredibel/dipercaya. Tetapi apabila data yang ditemukan peneliti dengan berbagai penafsirannya tidak disepakati oleh pemberi data maka peneliti perlu melakukan diskusi dengan pemberi data, apabila perbedaannya tajam maka peneliti harus mengubah temuannya dan menyesuaikan dengan apa yang diberikan oleh pemberi data. Jadi tujuan *member check* adalah agar informasi yang diperoleh dan akan digunakan dalam penulisan laporan sesuai dengan apa yang dimaksud sumber data atau informan.

Triangulasi merupakan pengecekan data dari berbagai sumber dengan berbagai cara dan waktu (Satori & komariah, 2014), sehingga terdapat tiga teknik triangulasi, yaitu : triangulasi sumber, triangulasi teknik pengumpulan data, dan triangulasi waktu. 1) triangulasi sumber yaitu meningkatkan kepercayaan penelitian adalah dengan mencari data dari sumber yang beragam yang masih terkait satu sama lain. Peneliti melakukan eksplorasi untuk mengecek kebenaran data dari beragam sumber. Selain mendapatkan data dari subjek, peneliti juga melakukan wawancara pada informan yang memiliki kaitan dengan subjek penelitian. Pada penelitian ini, peneliti mewawancarai masyarakat, *agent travel* dan pemerintah yang menangani subjek yang peneliti rasa dapat memberikan informasi terkait dengan kondisi aktivitas pariwisata, pengelolaan objek-objek pariwisata serta kesejahteraan masyarakat dampak dari adanya aktivitas pariwisata. 2) triangulasi teknik adalah penggunaan beragam teknik

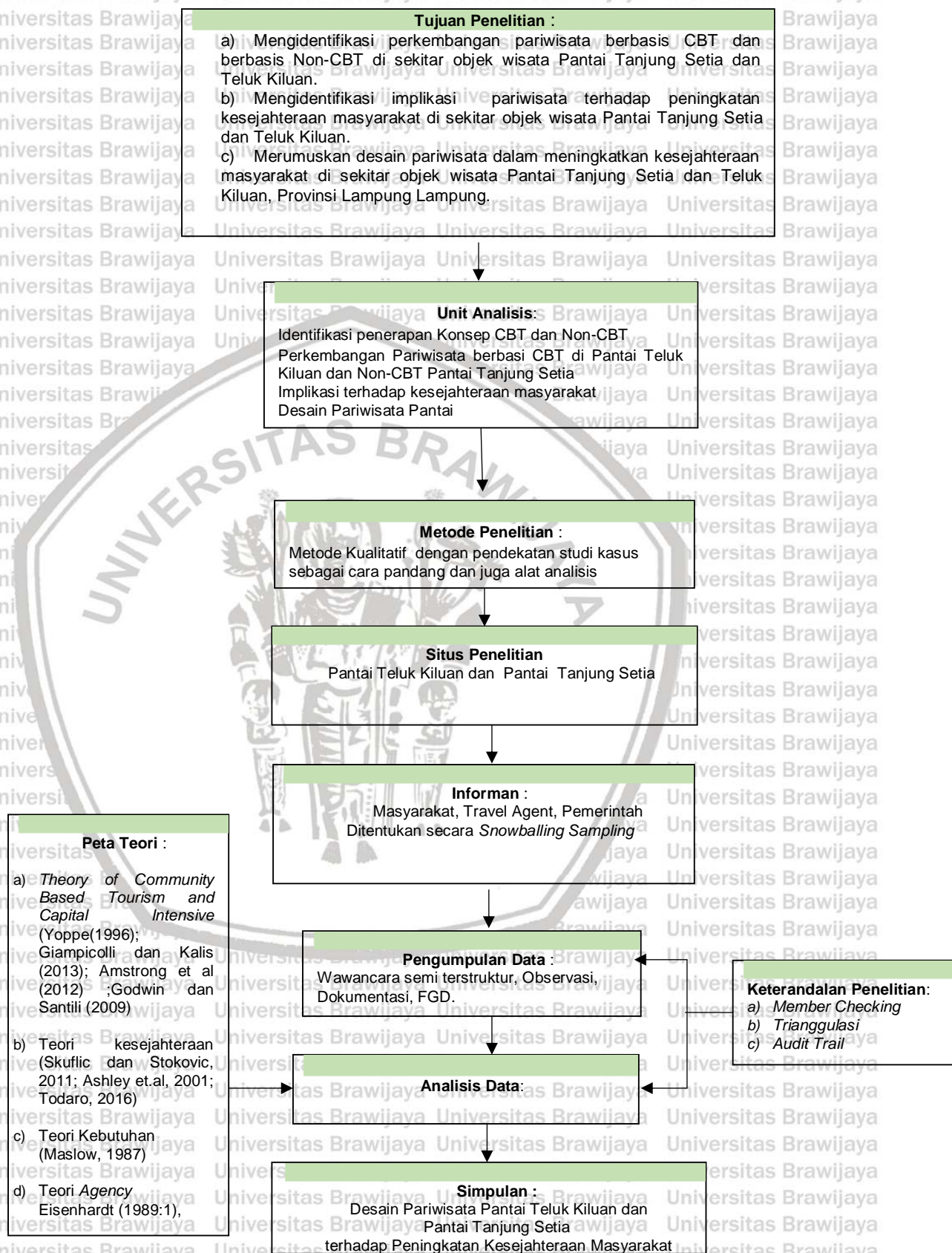
pengungkapan data yang dilakukan kepada sumber data, yaitu mengecek data kepada sumber yang sama dengan teknik yang berbeda. Dalam penerapannya, peneliti menggunakan teknik wawancara untuk mengetahui kondisi kebutuhan-kebutuhan psikologis subjek serta melakukan observasi selama kegiatan penelitian berlangsung. 3) triangulasi waktu triangulasi waktu dilakukan dengan cara mengumpulkan data pada waktu dan situasi yang berbeda. Wawancara dan observasi dilakukan beberapa kali sampai informasi atau data yang dibutuhkan dirasa cukup. Dalam kegiatan ini, peneliti akan melakukan wawancara yaitu terdapat beberapa pertanyaan yang menanyakan hal yang sama.

The audit trail dilakukan peneliti dengan cara mengkonsultasikan hasil temuan penelitian dengan pihak eksternal untuk menilai kredibilitas metode pengumpulan data, temuan dan interpretasi yang dibuat. Pihak eksternal yang dipilih adalah orang yang paham tentang penelitian studi kasus dan independen, mengenai konsep pariwisata dan kesejahteraan.

3.7 Desain Penelitian

Untuk memahami secara utuh rancangan penelitian, maka dapat dilihat pada Gambar 3.1.berikut

Gambar 3.1 Desain Penelitian



BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif, melalui proses penelitian data deskriptif berupa perilaku, ucapan dan tulisan dengan mengamati subyek yang diteliti/orang/informan. Moleong (2004), menegaskan penelitian kualitatif dimaksudkan untuk memahami tentang apa yang dialami oleh subyek penelitian secara holistik dan dengan cara deskriptif dalam bentuk perkataan/ucapan dalam konteks khusus yang alamiah dengan landasan metode ilmiah.

Digunakannya penelitian kualitatif mengacu pada permasalahan dan tujuan yang ingin di jawab dalam penelitian, juga rekomendasi dari beberapa penelitian terdahulu. Penelitian kualitatif lebih menggali dan menjelaskan seluruh aspek yang melekat dengan fenomena sosial yang rumit, komprehensif, dan kompleks sehingga membutuhkan penjelasan dan interpretasi yang mendalam (Manzilati, 2009). Pendapat yang senada dikemukakan Yustika (2006), bahwa untuk mengorek secara lebih mendalam sebab akibat dari fenomena sosial agar dapat menemukan realitas sebenarnya dari pada sekedar hasil yang hanya muncul hanya dipermukaan.

Atas dasar pemikiran itulah maka penelitian ini menghendaki temuan yang mengeksplorasi bagaimanakah perkembangan, pariwisata pantai di Teluk Kiluan dan Pantai Tanjung Setia dengan pengelolaannya berbasis komunitas atau non komunitas. Selanjutnya juga menggali bagaimana implikasi dari perkembangan pariwisata pantai tersebut terhadap kesejahteraan masyarakat, tentunya dengan membandingkan pengelolaan pariwisata yang berbasis komunitas (CBT) dan non-komunitas (Non-CBT). Telusuran lebih jauh dan

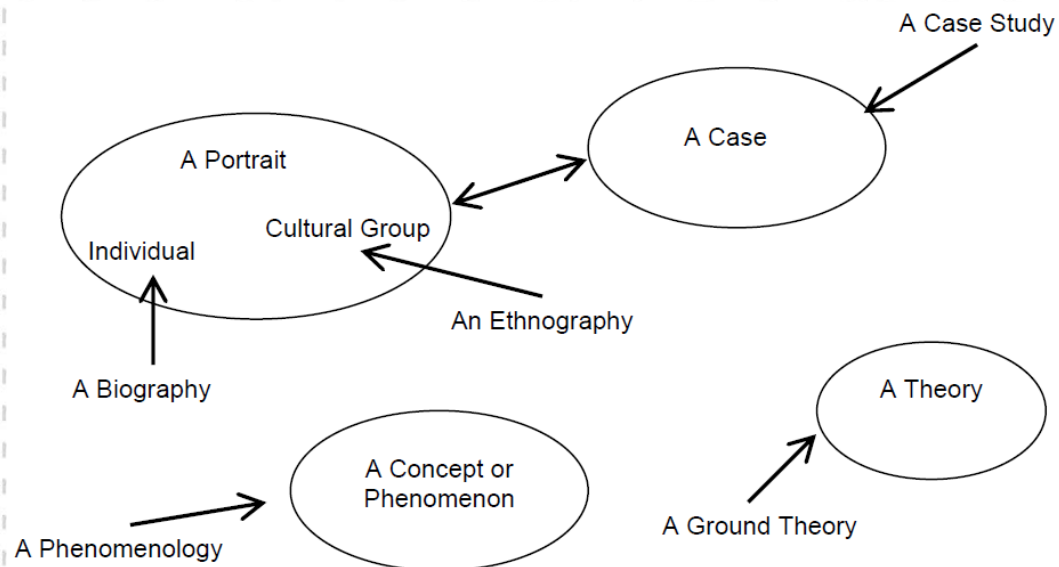
mendalam terhadap beberapa kelemahan/kekurangan/penghambat, atau kekuatan/pendukung perkembangan pariwisata maka akan dilahirkan suatu desain pariwisata pantai Teluk Kiluan dan Pantai Tanjung Setia dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitar.

3.1.1 Pendekatan Penelitian Studi Kasus

Metode penelitian kualitatif ialah suatu cara penelitian dengan menggali informasi tentang suatu gejala berdasarkan pengalaman, persepsi, atau kebutuhan-kebutuhan partisipan (Santoso dan Royanto, 2009). Menurut Denzin dan Lincoln (2011), kata kualitatif menyatakan penekanan pada proses dan makna yang tidak diuji, atau diukur dengan setepat-tepatnya, dalam istilah-istilah kuantitas, jumlah, intensitas, atau frekuensi. Menurut Patton (2005), metode kualitatif digunakan untuk memahami fenomena yang sedang terjadi secara alamiah (natural) dalam keadaan-keadaan yang sedang terjadi secara alamiah. Konsep ini lebih menekankan pentingnya sifat data yang diperoleh oleh penelitian kualitatif, yakni data alamiah. Data alamiah ini diperoleh dari hasil ungkapan langsung dari subjek peneliti. Patton (2005) menegaskan bahwa data kualitatif adalah apa yang dikatakan oleh orang-orang yang diajukan seperangkat pertanyaan oleh peneliti. Metode penelitian kualitatif juga sering disebut metode penelitian naturalistik karena penelitiannya dilakukan pada kondisi yang alamiah (Sugiyono, 2013).

Pada penelitian ini, desain pendekatan penelitian yang digunakan adalah studi kasus. Sebagaimana pendapat Creswell (2007) menjelaskan bahwa terdapat lima macam desain penelitian kualitatif, yaitu: etnografi, *grounded theory*, studi kasus, fenomenologi, dan naratif. Creswell (2007) memulai pemaparan studi kasus dengan gambar tentang kedudukan studi kasus dalam lima tradisi penelitian kualitatif yang dikemukakan dalam gambar di bawah ini.

Gambar 3.1 Desain Penelitian Kualitatif



Sumber : Creswell (2007)

Paparan gambar 3.1 di atas dapat diungkapkan bahwa fokus sebuah biografi adalah kehidupan seorang individu, dengan fokus fenomenologi untuk memahami sebuah konsep atau fenomena, fokus suatu teori dasar adalah seseorang yang mengembangkan sebuah teori, fokus etnografi adalah sebuah potret budaya dari suatu kelompok budaya atau suatu individu, dan fokus studi kasus adalah spesifikasi kasus dalam suatu kejadian baik itu yang mencakup individu, kelompok budaya ataupun suatu potret kehidupan masyarakat. Lebih lanjut Creswell (2003), mengemukakan beberapa karakteristik dari suatu studi kasus yaitu : (1) mengidentifikasi “kasus” untuk suatu studi; (2) Kasus tersebut merupakan sebuah “sistem yang terikat” oleh waktu dan tempat; (3) Studi kasus menggunakan berbagai sumber informasi dalam pengumpulan datanya untuk memberikan gambaran secara terinci dan mendalam tentang respons dari suatu peristiwa dan (4) Menggunakan pendekatan studi kasus, peneliti akan “menghabiskan waktu” dalam menggambarkan konteks atau setting untuk suatu

repository.ub.ac.id

kasus. Hal ini mengisyaratkan bahwa suatu kasus dapat dikaji menjadi sebuah objek studi (Stake, 1995) mempertimbangkan kasus menjadi sebuah metodologi. Bogdan & Biklen (1992) menyatakan penelitian studi kasus merupakan suatu kajian yang rinci tentang satu latar, atau subjek tunggal, atau satu tempat penyimpanan dokumen, atau suatu peristiwa tertentu. Stake (dalam Creswell, 2007) menjelaskan bahwa dalam desain penelitian studi kasus ini, kasus-kasus dibatasi oleh waktu dan aktivitas, dan peneliti mengumpulkan informasi secara lengkap dengan menggunakan berbagai prosedur pengumpulan data berdasarkan waktu yang telah ditentukan.

Berdasarkan paparan di atas, dapat diungkapkan bahwa studi kasus adalah sebuah eksplorasi dari “suatu sistem yang terikat” atau “suatu kasus/beragam kasus” yang dari waktu ke waktu melalui pengumpulan data yang mendalam serta melibatkan berbagai sumber informasi yang “kaya” dalam suatu konteks. Sistem terikat ini diikat oleh waktu dan tempat sedangkan kasus dapat dikaji dari suatu program, peristiwa, aktivitas atau suatu individu. Dengan perkataan lain, studi kasus merupakan penelitian dimana peneliti menggali suatu fenomena tertentu (kasus) dalam suatu waktu dan kegiatan (program, event, proses, institusi atau kelompok sosial) serta mengumpulkan informasi secara terinci dan mendalam dengan menggunakan berbagai prosedur pengumpulan data selama periode tertentu. Berdasarkan pemahaman tersebut, peneliti memilih pendekatan studi kasus karena peneliti ingin memperoleh informasi secara mendalam dan mendetail mengenai perilaku masyarakat mengenai pengelolaan ekonomi pariwisata berbasis komunitas atau berbasis non-komunitas, serta mengidentifikasi pengelolaan berbasis komunitas atau berbasis modal yang mampu mensejahterakan masyarakat disekitar objek wisata Pantai Tanjung Setia dan Pantai Teluk Kiluan.



3.1.2 Fokus Penelitian

Mengkaji secara mendalam ekonomi pariwisata berbasis masyarakat (*Community Base Tourism*) atau CBT dan berbasis non-masyarakat (*Non-Community Base Tourism*) atau Non-CBT, karena setiap individu memiliki pengetahuan dan pengalaman berbeda yang didasarkan pada keyakinan perilaku, keyakinan normatif maupun keyakinan bahwa perilaku dapat dilaksanakan.

CBT merupakan konsep pariwisata untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dengan melibatkan peran aktif masyarakat terutama masyarakat miskin, tinggal di desa-desa yaitu mereka yang secara tradisional hidup sebagai petani atau nelayan, tinggal secara turun temurun di daerah yang potensial untuk pengembangan pariwisata. Pengembangan pariwisata berbasis masyarakat dimaksudkan untuk memberi peluang kepada masyarakat setempat yang pada umumnya terdiri dari masyarakat asli setempat yang tidak memiliki kekuatan untuk mendapatkan berbagai akses yang tersedia di dunia pariwisata. Sedangkan pengelolaan non-CBT merupakan pengelolaan pariwisata yang pengelolaannya lebih mengedepankan modal pada suatu kawasan wisata, dimana kawasan tersebut dibangun atau tersedia destinasi atau wahana wisata yang dikelola oleh badan usaha swasta yang dimiliki oleh seorang atau sekelompok orang, dikelola tanpa pelibatan kepemilikan oleh masyarakat luas, dan hasilnya untuk pemodal, biasanya tanpa memperhitungkan rasa keadilan dan *sustainable resources*.

3.2 Situs Penelitian

Lampung memiliki objek wisata lebih dari 350 objek wisata, diantaranya berupa: taman hiburan umum, peninggalan sejarah, objek wisata alam dan tirta, objek wisata budaya, objek wisata religius, objek wisata agro, objek wisata bahari, serta objek wisata buatan. Keberadaan objek wisata tersebut mampu

menarik wisatawan asing maupun domestik untuk melakukan kunjungan wisata ke provinsi tersebut. Objek wisata yang menjadi Kawasan Wisata Unggulan (KWU) di provinsi Lampung berturut-turut adalah 1) Pantai Tanjung Setia; 2) Pantai Teluk Kiluan; 3) Taman Nasional Bukit Barisan Selatan; 4) Taman Nasional Way Kambas; 5) Gunung Krakatau; 6) Bakauheni dan Menara Siger.

Dari keenam objek wisata yang paling populer di Provinsi Lampung, Pantai Tanjung Setia dan Pantai Teluk Kiluan merupakan objek wisata yang diminati pengunjung yang paling banyak setiap tahunnya. Selain itu, beberapa tahun terakhir pemerintah mempromosikan dua objek wisata untuk *go international* sebagai salah satu destinasi wisata terbaik di Indonesia. Hal ini cukup beralasan karena sarana dan prasarananya menunjang (mulai dari sarana kedatangan wisatawan sampai pada jasa/layanan wisata) tersedia di dua objek wisata tersebut.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka peneliti menentukan situs penelitian ini berada di situs Pantai Teluk Kiluan, Desa Kelumbayan Kabupaten Tanggamus, dan Pantai Tanjung Setia, Desa Tanjung Setia Kabupaten Pesisir Barat Provinsi Lampung.

3.3 Unit Analisis dan Pemilihan Informan

3.3.1 Unit Analisis

Mendasarkan pada pada argumentasi pada bab sebelumnya sekaligus memperhatikan hasil beberapa penelitian terdahulu, maka unit analisis pada penelitian ini adalah mengkaji secara mendalam tentang perkembangan, implikasi dan desain pariwisata Pantai berbasis CBT dan berbasis Non-CBT, terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat di sekitar objek wisata Pantai Teluk Kiluan dan Pantai Tanjung Setia, Provinsi Lampung. Identifikasi konsep pengelolaan CBT dan Non-CBT

pada 2 situs penelitian, dilanjutkan dengan mengetahui faktor-faktor yang menghambat perkembangan, serta memperhatikan kebijakan pariwisata dan harapannya ke masa yang akan datang, maka akan dibentuk suatu model/desain. Desain tersebut sebagai suatu konsep yang berupa gambar/bagan tentang bagaimana wisata Pantai Teluk Kiluan dan Pantai Tanjung Setia, di provinsi Lampung dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitar.

Selanjutnya untuk memperoleh hasil informasi yang akurat, berdasarkan unit analisis tersebut setidaknya diperlukan informan yang peneliti bagi menjadi tiga yaitu: Masyarakat, Swasta/ Agen Travel dan Pemerintah. Lebih jauh akan dijelaskan dalam sub-bab di bawah ini.

3.3.2 Pemilihan Informan

3.3.2.1 Masyarakat

a. Masyarakat Sekitar yang Menggantungkan Sumber Pendapatan Utama dari Objek Wisata Tanjung Setia dan Teluk Kiluan

Bagi mereka warga atau masyarakat sekitar yang tinggal di sekitar objek wisata Pantai Teluk Kiluan Desa Kelumbayan Kabupaten Tanggamus dan Pantai Tanjung Setia, Desa Tanjung Setia Kabupaten Pesisir Barat menggantungkan sumber pendapatan utama dari objek wisata tersebut, menjadi salah satu informan utama dalam penelitian ini. Konteks menggantungkan sumber pendapatan utama dalam hal ini mengarah pada warga yang berdagang di sekeliling objek wisata Pantai Teluk Kiluan dan Pantai Tanjung Setia, pengelola jasa wisata di sekitar objek seperti persewaan alat, *homestay*, *cottage*, penginapan, sewa

perahu, seni pertunjukan dan sejenisnya, bahkan dapat sampai ke pengelola parkir di sekitar objek wisata. Masyarakat yang demikian sangat diperlukan informasi dan penggalian pendapat/sarannya dalam merumuskan implikasi dan desain wisata Pantai Teluk Kiluan dan Pantai Tanjung Setia, terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat. Sebab kritik, masukan, saran, serta persepsi dan perspektif masyarakat terhadap pengelolaan, pengembangan, implikasi dan kebijakan terkait objek wisata Pantai Teluk Kiluan dan Pantai Tanjung Setia, menentukan bagaimana implikasi dan desain ekonomi pariwisata ke depannya.

Selain itu, juga memungkinkan untuk mencari informan atau warga masyarakat sekitar yang mengandalkan objek wisata Pantai Teluk Kiluan dan Pantai Tanjung Setia sebagai sumber pendapatan sampingan seperti: pemandu wisata yang sifatnya temporal, masyarakat yang akan berjualan bila saat musim liburan saja, dan lain sebagainya. Informan seperti ini walaupun bukan utama namun sebenarnya diperlukan informasinya agar implikasi dan desain wisata Pantai Teluk Kiluan dan Pantai Tanjung Setia, terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat lebih komprehensif.

b. Tokoh Masyarakat Desa di Sekitar Objek Wisata Tanjung Setia dan Teluk Kiluan

Tokoh masyarakat menjadi informan yang tidak kalah penting. Dalam hal ini, tokoh masyarakat yang dimaksud mengarah kepada mereka para warga yang memiliki pengaruh terhadap masyarakat di desa-desa sekitar objek wisata. Misalnya

dalam mengambil keputusan bersama, dihormati kedudukan dan statusnya, ulama, dan sejenisnya. Selain itu, tokoh masyarakat juga bisa mengarah pada spesifik informan yang mengetahui sejarah terbentuknya objek wisata Pantai Tanjung Setia dan Pantai Teluk Kiluan. Sejarah tersebut juga dapat dikerucutkan kepada pembahasan perbandingan kebijakan-kebijakan pengelolaan dan optimalisasi objek wisata yang pernah dilakukan selama ini.

Opsi tokoh masyarakat lain yang mungkin dapat dipilih adalah para aktivis lingkungan yang ada di sekitar objek wisata, dan telah *concern* untuk mengawal pengembangan objek wisata secara ramah lingkungan dan berkelanjutan. Patut diketahui bahwa objek wisata Pantai Tanjung Setia mengandalkan pesona semenanjung yang bersih, air laut yang biru/jernih, dan ombak untuk berselancar, sedangkan objek wisata Pantai Teluk Kiluan mengandalkan pesona bahari dan lomba-lomba serta kolam laguna. Oleh sebab itu pandangan dari para aktivis lingkungan yang peduli untuk mengawal keberlangsungan objek wisata dan terumbu karang tersebut patut digali dan didalami.

c. Paguyuban atau Kelompok Masyarakat yang Ada di Sekitar Objek Wisata Pantai Teluk Kiluan dan Pantai Tanjung Setia

Paguyuban atau kelompok masyarakat dalam hal ini mengarah pada informan yang menjadi ketua atau inti di dalam organisasi paguyuban atau kelompok masyarakat. Misalnya ketua paguyuban perdagangan di sekitar objek wisata, paguyuban jasa wisata di sekitar objek wisata, kelompok koperasi, tim inti

penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) dan sejenisnya. Informan tersebut diperlukan informasi dan datanya dalam perspektifnya sebagai kelompok masyarakat. Selain itu, jika memungkinkan pencarian informan yang bernaung pada kelompok masyarakat dapat menuju ke Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang memang berhubungan dengan objek wisata Pantai Tanjung Setia dan Pantai Teluk Kiluan.

3.3.2.2 Agen Travel/Swasta

a. Pengelola Agen Travel yang Mengandalkan Pesona Objek

Wisata Pantai Teluk Kiluan dan Pantai Tanjung Setia

Informan yang dapat dipilih diantaranya adalah para pebisnis yang bergerak di bidang *tour and travel* (pengelolanya), pemandu wisata (*tour guide*) yang ada pada agen *travel*. Dalam konteks ini pengelola jasa penginapan di sekitar objek wisata Pantai Teluk Kiluan dan Pantai Tanjung Setia yang telah bekerjasama dengan agen *travel* juga memungkinkan sebagai informan penelitian ini.

Informan yang demikian, diperlukan untuk mengetahui kondisi persaingan pasar, *trend*, dan perkembangannya selama ini. Belakangan ini muncul istilah atau konsep *leisure economy* yang di dalamnya memberikan fenomena bergesernya pola konsumsi yang tidak sekedar membeli namun juga diharapkan memberi nilai, pengalaman, bahkan pembelajaran untuk dibagi, dipamerkan, dan ditunjukkan kepada seseorang atau kelompok masyarakat. Pada poin ini, pandangan para agen *travel* perlu

digali lebih Pantai Teluk Kiluan dan Pantai Tanjung Setia tepat sesuai perkembangan yang terjadi saat ini.

b. **Pengelola Agen Travel Digital**

Belakangan ini Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) mengeluarkan *platform digital* berupa *booking.com*. Hal tersebut dilakukan sebagai respon berkembangnya ekonomi digital dalam mendukung dunia perhotelan dan restoran saat ini. Hal tersebut kemudian direspon oleh Asosiasi Tour dan *Travel Agent* (Asita) yang mengakomodir seluruh anggotanya dalam satu *platform digital* bernama Asita Go, dengan visi kita melindungi anggota yang tersebar seluruh Indonesia dengan *platform digital* tersebut.

Pada konteks yang demikian, pertimbangan perspektif digital untuk membentuk implikasi dan *design* pariwisata di objek wisata Pantai Tanjung Setia dan Pantai Teluk Kiluan perlu dilakukan. Oleh sebab itu diperlukan informan berupa pengelola agen *travel* atau pakar/praktisi IT di dalamnya khususnya pada bidang *tour and travel* untuk mengupas permasalahan dan solusi berkaitan dengan perkembangan pariwisata selama ini.

3.3.2.3 Pemerintah

a. **Pemerintah Desa**

Pemerintah Desa menjadi aktor terdekat pada pembangunan yang melibatkan peran serta masyarakat. Untuk mencapai hasil (keberhasilan) yang lebih baik, lebih efektif, dan lebih produktif, maka prinsip demokrasi pembangunan, yang

berasaskan pada pembangunan dari masyarakat, oleh masyarakat, dan untuk masyarakat menjadi penting khususnya dalam pengelolaan potensi desa dalam bentuk wisata. Oleh sebab itu informan pemerintah desa diperlukan dalam mendukung penelitian ini.

Informan perangkat desa dalam hal ini spesifik mengarah pada perangkat desa seperti Kepala Dusun, Kepala Desa, Sekretaris Desa, dan Pemerintah Desa terkait. Perspektif Pemerintah desa diperlukan karena peranannya sebagai pelayan masyarakat yang paling dekat bahkan berdampingan dengan masyarakat. Pada sisi yang lain, saat ini telah bergulir dana desa, dan perlunya pembentukan Badan Usaha Miliki Desa (Bumdes). Tentu orientasi dalam mengoptimalkan potensi desa seperti objek wisata menjadi topik yang saling terkait.

b. Pemerintah Kabupaten dan Provinsi (Dinas Pariwisata, Dinas UMKM, dan Dinas Perhubungan)

Pantai Pantai Teluk Kiluan dan Pantai Tanjung Setia pada dasarnya berada pada daerah yang berbeda. Jika Pantai Tanjung Setia berada di Kabupaten Pesisir Barat Barat, sementara Pantai Teluk Kiluan berada di Kabupaten Tanggamus. Oleh sebab itu pasti memiliki desain pengelolaan dan strategi pemasaran dan pemberdayaan yang berbeda. Pada masing-masing objek wisata tersebut informan dari sisi pemerintah kabupaten dapat engerucut kepada dinas yang sesuai dan terkait erat. Hal tersebut berupa informan yang dipilih dari Dinas Pariwisata, Dinas Koperasi dan

UMKM, dan Dinas Perhubungan. Ketiga Dinas ini diperlukan untuk menggali informasi yang spesifikasinya berbeda-beda.

Informan dari Dinas Pariwisata diorientasikan untuk mengungkap fakta di lapangan berkaitan dengan potret situs, konsep pengelolaan pariwisata, perkembangan yang terjadi, implikasi bagi kesejahteraan, dan desain pengelolaan dimasa yang akan datang.

Sementara itu, Dinas Koperasi dan UMKM untuk menggali informasi berkaitan dengan bagaimana desain pemberdayaan dan permodalan bagi pelaku UMKM yang mengantungkan pada objek wisata Pantai Tanjung Setia dan Pantai Teluk Kiluan. Sementara itu untuk Dinas Perhubungan dan Dinas Pekerjaan umum untuk menggali informasi berkaitan dengan desain implementasi pengadaan infrastruktur seperti jalan dan lain sebagainya sehingga potensi Pantai Teluk Kiluan dan Pantai Tanjung Setia dapat optimal. Perspektif informasi dari pusat (Pemerintah Provinsi) juga diperlukan dan tidak kalah penting untuk mendapatkan data dan fakta pengelolaan dan strategi pengembangan Pantai Teluk Kiluan dan Pantai Tanjung Setia sebagai objek wisata di Provinsi Lampung.

Berdasarkan pada tiga pemilihan informan di atas peneliti membuat kriteria untuk calon informan yang diharapkan memperoleh informan yang relevan sehingga bisa mendapatkan informasi tuntas tentang situs penelitian yang akan diteliti.

Tabel 3.1 Kriteria Informan

No	Informan	Jabatan/Profesi	Tingkat Pendidikan	Umur	Lama Tinggal	Lama Kerja dibidangnya
1.	Masyarakat					
	a) Tokoh	Orang yang dituakan	min SD	min 40 th	min 10 th	-
	b) Komunitas	Ketua/Pengurus	min SMA			-
	c) Individu	Masyarakat disekitar situs	min SD	min 30 th	min 5 th	min 5 th
2.	Swasta/Pengusaha					
	a) Investor	Pemilik/Pengurus	min SD	min 30 th	-	min 10 th
	b) Paguyuban	Ketua/Pengurus	min SD		-	min 5 th
	c) Individu	Usaha perorangan				
3.	Pemerintah					
	a) Kepala Desa	Ketua/Pengurus	min SMA		-	min 10 th
	b) Pemerintah Kabupaten	Kepala Dinas	min S1	min 30 th	-	min 10 th

3.2.3 Penentuan Informan

Penelitian ini menggunakan *Snowballing Sampling* dalam menentukan informan. Teknik *Snowballing Sampling* (bola salju) adalah suatu metode dimana informan diperoleh melalui proses bergulir dari satu responden ke responden yang lainnya, biasanya metode ini digunakan untuk menjelaskan pola-pola sosial atau komunikasi (sosiometrik) suatu komunitas tertentu. Atau dengan kata lain, dalam penentuan informan, pertama-tama di pilih satu atau dua orang, tetapi karena dengan dua orang ini belum merasa lengkap terhadap informasi yang di berikan, maka peneliti mencari orang lain yang di pandang lebih tahu dan dapat melengkapi informasi yang di berikan oleh dua orang sebelumnya. Begitu seterusnya, sehingga jumlah informan menjadi semakin banyak (Sugiyono, 2013).

3.4. Pengumpulan Data

Metode yang digunakan dalam pengumpulan data pada penelitian ini, adalah dengan teknik :

3.4.1 Observasi

Yaodih (dalam Satori dan Komariah, 2014) menyatakan bahwa observasi merupakan suatu teknik atau cara mengumpulkan data dengan jalan mengadakan pengamatan terhadap kegiatan yang sedang berlangsung. Jenis observasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah observasi partisipatif.

Dalam observasi partisipatif, peneliti terlibat dalam kegiatan subjek yang sedang diamati atau yang digunakan sebagai sumber data penelitian (Sugiyono, 2013).

Tindakan yang dilakukan oleh peneliti dalam observasi yaitu: (1) melakukan pengamatan awal dengan mencermati situasi di lingkungan situs penelitian secara langsung dan sistematis terhadap perkembangan pariwisata seperti arus kunjungan wisatawan, fasilitas dan aksesibilitas pariwisata, atraksi pariwisata, promosi, *event-event* yang dilakukan dengan skala nasional maupun internasional, sampai dengan perubahan-perubahan secara fisik perilaku masyarakat meliputi kegiatan ekonomi, budaya, sosial, politik, pegiat lingkungan, pemilik unit usaha. (2) mencatat, merekam dan mentranskrip fenomena atas setiap gejala penting dalam setiap kegiatan observasi untuk mendapatkan pemahaman mendalam tentang kejadian selama observasi, dengan merujuk kepada matriks peta informasi (3) menggunakan alat pembantu seperti kamera, alat untuk merekam kejadian yang terkait dengan tujuan penelitian.

3.4.2 Wawancara Semi Terstruktur

Wawancara (*interview*) adalah proses komunikasi interaksional antara dua pihak dimana salah satu pihak telah memiliki tujuan yang telah ditentukan sebelumnya atau tujuan yang serius, yang di dalamnya terdapat proses bertanya dan menjawab pertanyaan (Stewart & Cash, 2008).

Esterberg (dalam Sugiyono, 2013) mengemukakan beberapa macam wawancara, yaitu wawancara terstruktur, semiterstruktur, dan tidak terstruktur. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teknik wawancara semi terstruktur. Wawancara semi terstruktur termasuk dalam kategori *in-depth interview*, yaitu dalam pelaksanaannya lebih bebas dibandingkan dengan wawancara terstruktur (Sugiyono, 2013). Tujuan dari wawancara semi terstruktur ini adalah untuk menemukan permasalahan secara lebih terbuka, dimana pihak yang diajak wawancara diminta pendapat dan ide-idenya.

Dalam melakukan wawancara, peneliti perlu mendengarkan secara teliti dan mencatat apa yang dikemukakan oleh subjek penelitian atau informan. Satori & Komariah (2014) menyatakan bahwa pendekatan yang digunakan dalam wawancara semi terstruktur ini menggunakan petunjuk umum wawancara yang merupakan kombinasi wawancara terstruktur dan tidak terstruktur yang menggunakan beberapa inti pokok pertanyaan yang akan diajukan, yaitu peneliti membuat garis besar pokok-pokok pembicaraan, namun dalam pelaksanaannya peneliti mengajukan pertanyaan secara bebas, pokok-pokok pertanyaan yang dirumuskan tidak perlu dipertanyakan secara

berurutan dan pemilihan kata-katanya juga tidak baku, tetapi dimodifikasi pada saat wawancara berdasarkan situasinya.

Informan yang digunakan dalam penelitian ini merupakan masyarakat, agen *travel* dan pemerintah, dimana menggali pemaknaan dan persepsi narasumber tentang pariwisata dan kesejahteraan di sekitar objek wisata Pantai Tanjung Setia dan Pantai Teluk Kiluan dari nara sumber. Pokok-pokok pertanyaan yang dirancang berupa pertanyaan terbuka, mudah dimengerti, netral, dan tidak bersifat mengarahkan.

3.4.3 Dokumentasi

Dalam menggali data melalui observasi dan wawancara, peneliti juga menggunakan dokumentasi sebagai alat bantu yaitu dengan mencatat ketika peneliti menemukan fakta atau informasi yang dirasa penting dan menarik untuk digali lebih dalam. Menurut Sugiyono (2013) dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seorang. Dokumen yang berbentuk tulisan misalnya catatan harian, sejarah kehidupan (*life histories*), ceritera, biografi, peraturan, kebijakan. Dokumen yang berbentuk gambar misalnya foto, gambar hidup, sketsa dan lain-lain. Dokumen yang berbentuk karya misalnya karya seni, yang dapat berupa gambar, patung, film dan lain-lain. Studi dokumen merupakan pelengkap dari penggunaan metode observasi dan wawancara dalam penelitian kualitatif.

Hasil penelitian dari observasi dan wawancara, akan lebih kredibel atau dapat dipercaya kalau didukung oleh sejarah pribadi

kehidupan di masa kecil, sekolah, tempat kerja, masyarakat, dan autobiografi. Selain itu akan penelitian akan lebih kredibel apabila didukung oleh foto-foto atau karya tulis akademik dan seni yang telah ada.

3.4.4. *Focused Group Discussion (FGD)*

Diskusi kelompok terfokus merupakan salah satu panduan metode riset kualitatif untuk mendapatkan informasi dari permasalahan tertentu. Menurut *Focus Group Discussion* dilakukan melalui diskusi kelompok beranggotakan 6-8 orang. Dengan pimpinan seorang atau dua orang moderator sebagai pemandu diskusi. Dalam FGD akan dihadiri oleh tokoh masyarakat setempat, pelaku pariwisata (*agent tours*), pemerintah dan sebagai moderator.

Sebelum FGD dimulai terlebih dahulu disiapkan dokumen panduan diskusi, alat pencatat dan perekam. Teknik ini menghasilkan informasi hasil cek silang yang lebih akurat terhadap informasi yang tersedia sebelumnya. FGD merupakan pola yang paling disarankan untuk mendapatkan informasi kualitatif yang bermutu mengenai permasalahan lokal yang bersifat spesifik. Selain teknik wawancara, *Focus Group Discussion (FGD)* merupakan salah satu metode riset kualitatif yang dilakukan melalui diskusi secara sistematis dan terfokus untuk membahas persoalan yang tidak pasti atau suatu masalah yang tidak bisa digeneralisir dilakukan secara eksploratif.

3.5 Interpretasi Data

Banyak cara yang bisa dilakukan untuk menginterpretasi data hasil pengamatan di lapangan, diantaranya adalah analisis data studi kasus seperti yang disarankan oleh Spradley. Spradley (2007) mengemukakan bahwa data penelitian studi kasus dapat dianalisis melalui tahapan proses interpretasi:

- 1) Menyalin (*transcribing*) yakni menyalin hasil rekaman *audio* percakapan antara informan dan peneliti. Salinan hasil rekaman *audio* percakapan tersebut berbentuk transkrip yang kemudian akan dianalisis.
- 2) Memeriksa kembali transkrip yang ditulis, melalui mendengarkan kembali rekaman *audio* percakapan dan mencocokkannya
- 3) Pengkodean (*coding*) yaitu proses menciptakan kategori dan menandai data yang dipilih. Sering juga dikenal dengan pengindeksan, kategorisasi atau klasifikasi kemudian disusun secara sistematis dan selanjutnya akan disusun tema-tema berdasarkan hasil analisis data tersebut.
- 4) Ketajaman analisis diperlukan pijakan sekaligus pisau analisis dalam bentuk dukungan teori-teori yang relevan dan hasil penelitian terdahulu yang mendukung.

Selanjutnya peneliti membuat peta informasi yang didasarkan pada rumusan masalah dan tujuan penelitian. Peta informasi bertujuan untuk mengontrol dan menuntun peneliti agar tidak terlalu melebar diluar fokus permasalahan yang diteliti dan mencapai tujuan yang diharapkan. Selain itu untuk mempermudah pengumpulan data di lapangan dan nanti pada saat melakukan analisis data. Matriks peta informasi menyajikan fokus masalah di

situs penelitian, informan, metode, topik, target yang dicapai dan perkiraan informasi di sajikan di dalamnya.

Tabel 3.2 Peta Informasi Penelitian

Rumusan Masalah	Fokus Masalah/Situs	Informan	Metode	Target Dicapai
1. Bagaimana perkembangan pariwisata	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengelolaan Pariwisata dengan konsep CBT di Situs Pantai Teluk Kiluan 2. Perkembangan Pariwisata di Situs Pantai Teluk Kiluan 3. Pengelolaan Pariwisata dengan konsep Non-CBT di Situs Pantai Tanjung Setia 4. Perkembangan Pariwisata dengan konsep Non-CBT di Situs Pantai Tanjung Setia 	<p>Tokoh Masyarakat, Pedagang, Komunitas Masyarakat, Pemilik Travel, Pengelola unit usaha, Pemerintah</p>	<p>Observasi, Wawancara, dan Dokumentasi</p>	<p>Sejarah dan gambaran umum perkembangan pariwisata dari mulai awal sampai sekarang</p> <p>Mengetahui kecenderungan perkembangannya meningkat atau menurun</p> <p>Faktor-Faktor yang menyebabkannya</p> <p>Mengetahui konsep pengelolaan pariwisata berbasis CBT dan Non-CBT</p> <p>Prinsip-prinsip/karakteristik CBT dan Non-CBT</p>
2. Bagaimana implikasi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Implikasi Pariwisata berbasis (CBT) terhadap Kesejahteraan di Situs 	<p>Tokoh Masyarakat,</p>	<p>Observasi, Wawancara,</p>	<p>Menggali implikasi pariwisata</p>

pariwisata terhadap peningkatan kesejahteraan	Pantai Teluk Kiluan 2. Implikasi Pariwisata berbasis Non-CBT terhadap Kesejahteraan di Situs Pantai Tanjung Setia	Komunitas Masyarakat, Pedagang, Penyedia Jasa Wisata, Pengusaha	FGD, dan Dokumentasi	terhadap kesejahteraan masyarakat: - Ekonomi - Non Ekonomi
3. Desain pariwisata dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitar	Pengelolaan pariwisata antara pelaksanaan dan harapan Masalah-masalah yang terjadi Temuan-temuan: tentang perkembangan ekonomi pariwisata yang lesu dan meningkat, faktor penyebab perkembangan yang lesu dan meningkat, karakteristik cbt dan non-cbt, kebijakan yang menghambat dan kebijakan yang harus diambil, kebijakan yang sudah dilakukan dan kebijakan yang harus ditinggalkan			Membuat desain pariwisata pantai dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat <i>Action</i> masyarakat, swasta/investor, dan pemerintah

Sumber: Peneliti 2019

3.6 Kredibilitas Data Penelitian

Penelitian kualitatif dinyatakan absah apabila memiliki salah satunya yaitu derajat keterpercayaan (*credibility*). Kredibilitas merupakan ukuran kebenaran data yang dikumpulkan, yang menggambarkan kecocokan konsep peneliti dengan hasil penelitian (Satori & Komariah, 2014). Sugiyono (2013) menyatakan bahwa uji kredibilitas data atau kepercayaan terhadap data hasil penelitian kualitatif antara lain dapat dilakukan dengan enam cara, yaitu : perpanjangan pengamatan, peningkatan ketekunan dalam penelitian, triangulasi, diskusi dengan teman sejawat, analisis kasus negatif, *audit trail* dan *member checking*.

Pada penelitian ini, peneliti menggunakan *member checking*, *audit trail* triangulasi sebagai uji kredibilitas data. *Member checking* dilakukan dengan kembali pada informan untuk memverifikasi kredibilitas informasi. Menurut Sugiyono (2013) tujuan *member checking* adalah untuk mengetahui seberapa jauh data yang diperoleh sesuai dengan apa yang diberikan oleh pemberi data.

Apabila data yang ditemukan disepakati oleh para pemberi data berarti data tersebut valid, sehingga semakin kredibel/dipercaya. Tetapi apabila data yang ditemukan peneliti dengan berbagai penafsirannya tidak disepakati oleh pemberi data maka peneliti perlu melakukan diskusi dengan pemberi data, apabila perbedaannya tajam maka peneliti harus mengubah temuannya dan menyesuaikan dengan apa yang diberikan oleh pemberi data. Jadi tujuan *member check* adalah agar informasi yang diperoleh dan akan digunakan dalam penulisan laporan sesuai dengan apa yang dimaksud sumber data atau informan.

Triangulasi merupakan pengecekan data dari berbagai sumber dengan berbagai cara dan waktu (Satori & komariah, 2014), sehingga terdapat tiga teknik triangulasi, yaitu : triangulasi sumber, triangulasi teknik pengumpulan data, dan triangulasi waktu. 1) triangulasi sumber yaitu meningkatkan kepercayaan penelitian adalah dengan mencari data dari sumber yang beragam yang masih terkait satu sama lain. Peneliti melakukan eksplorasi untuk mengecek kebenaran data dari beragam sumber. Selain mendapatkan data dari subjek, peneliti juga melakukan wawancara pada informan yang memiliki kaitan dengan subjek penelitian. Pada penelitian ini, peneliti mewawancarai masyarakat, *agent travel* dan pemerintah yang menangani subjek yang peneliti rasa dapat memberikan informasi terkait dengan kondisi aktivitas pariwisata, pengelolaan objek-objek pariwisata serta kesejahteraan masyarakat dampak dari adanya aktivitas pariwisata. 2) triangulasi teknik adalah penggunaan beragam teknik

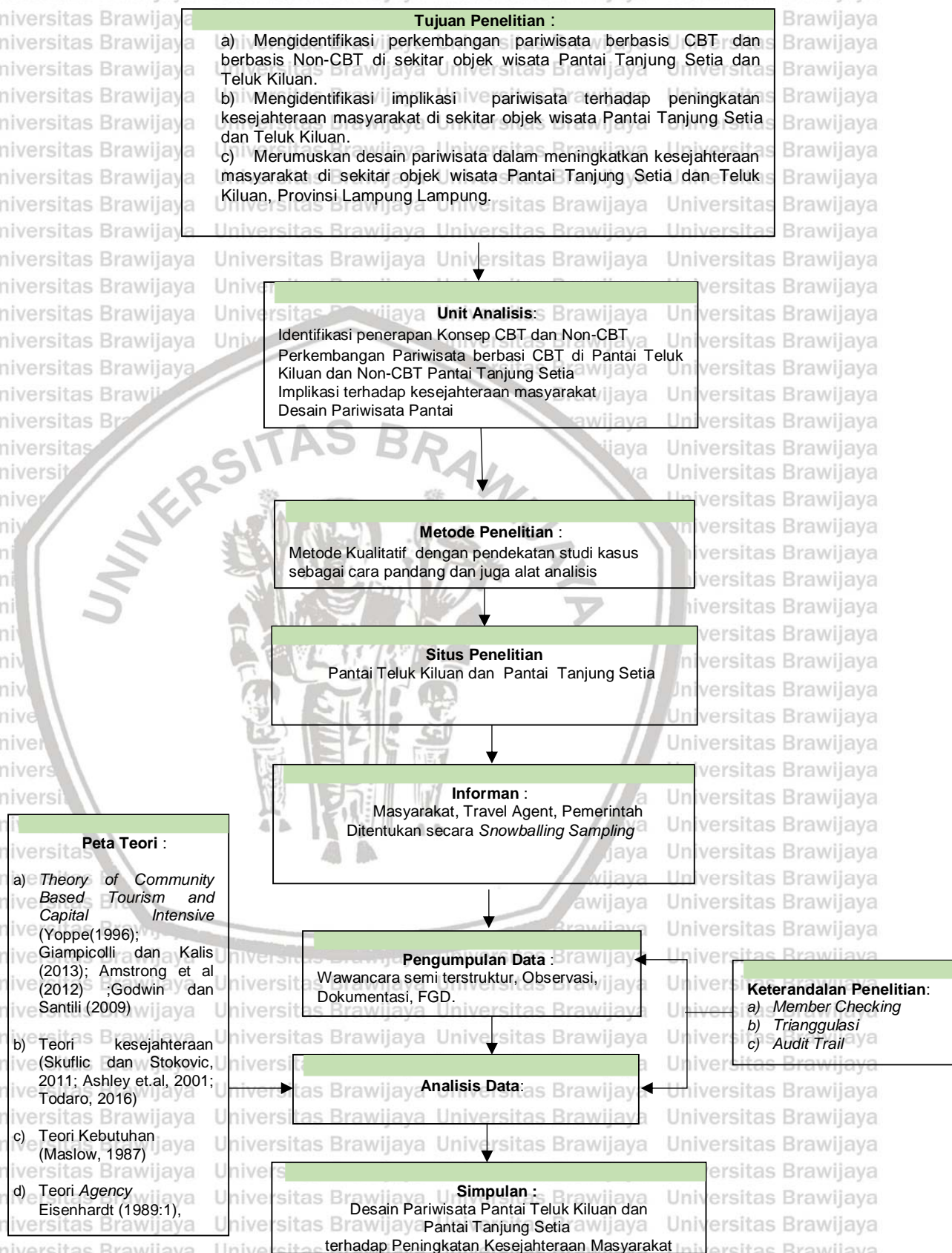
pengungkapan data yang dilakukan kepada sumber data, yaitu mengecek data kepada sumber yang sama dengan teknik yang berbeda. Dalam penerapannya, peneliti menggunakan teknik wawancara untuk mengetahui kondisi kebutuhan-kebutuhan psikologis subjek serta melakukan observasi selama kegiatan penelitian berlangsung. 3) triangulasi waktu triangulasi waktu dilakukan dengan cara mengumpulkan data pada waktu dan situasi yang berbeda. Wawancara dan observasi dilakukan beberapa kali sampai informasi atau data yang dibutuhkan dirasa cukup. Dalam kegiatan ini, peneliti akan melakukan wawancara yaitu terdapat beberapa pertanyaan yang menanyakan hal yang sama.

The audit trail dilakukan peneliti dengan cara mengkonsultasikan hasil temuan penelitian dengan pihak eksternal untuk menilai kredibilitas metode pengumpulan data, temuan dan interpretasi yang dibuat. Pihak eksternal yang dipilih adalah orang yang paham tentang penelitian studi kasus dan independen, mengenai konsep pariwisata dan kesejahteraan.

3.7 Desain Penelitian

Untuk memahami secara utuh rancangan penelitian, maka dapat dilihat pada Gambar 3.1.berikut

Gambar 3.1 Desain Penelitian



BAB IV

Pariwisata Berbasis *Community Base Tourism* (CBT)

Di Situs Pantai Teluk Kiluan Dalam Perkembangan

Uraian pada Bab IV Peneliti akan memaparkan beberapa hasil temuan yang berkaitan dengan masalah dan tujuan penelitian yaitu dengan memaparkan perkembangan pariwisata di situs Pantai Teluk Kiluan. Sebelum memaparkannya lebih jauh perlu juga dijelaskan pada bagian ini tentang potret situs Pantai Teluk Kiluan, siapa saja yang terlibat menjadi informan sebagai sumber informasi, bagaimana keabsahan informasi dilakukan, dan dimensi apa saja yang di terapkan dalam konsep pengelolaan berdasarkan *Community Base Tourism* (CBT). Semua penjelasan sesuai dengan informasi yang peneliti terima di situs penelitian, dan diakhiri dengan diskusi teori dan hasil Temuan.

4.1. Potret Situs Pantai Teluk Kiluan

Lampung merupakan salah satu provinsi terlahir sejak tahun 1964, letaknya dibagian paling selatan pulau sumatra. Letak Provinsi di ujung pulau Sumatera dan dekat dengan ibukota Indonesia ini, memiliki 350 distnasi wisata yang tersebar di 15 kabupaten dan kota. Destinasi wisata tersebut meliputi taman hiburan, peninggalan sejarah, objek wisata alam, objek wisata budaya, objek wisata religius, objek wisata agro, objek wisata bahari dan objek wisata buatan. Objek wisata menurut jenisnya terpilah dalam 3 jenis yaitu: 1) man made (buatan), 2) alam, dan 3) Budaya. Berangkat dari klasifikasi jenis objek wisata, maka di Lampung objek wisatanya didominasi oleh wisata alam jenis pantai.

Provinsi dengan ibukota Bandar Lampung, nmemiliki penduduknya variatif, kebanyakan mereka pendatang dari suku Jawa, Bali, Batak, dan Minang Kabau. Penduduk asli masyarakat Lampung hanya sepertiga bagian saja. Suku

Lampung memiliki bahasa berdialek “O” dan berdialek “A”, dialek O dikenal sebagai Lampung pepadun dan berdialek A dikenal dengan sebutan Lampung peminggir. Variasi pendatang dan dialektika aliran bahasa Lampung serta cerita sejarah transmigrasi pendatang dari Jawa telah menggiring penggunaan bahasa Indonesia dan bahasa Jawa dalam kesehariannya.

Nelayan dan bercocok tanam padi, jagung serta perkebunan sawit, kakao, tebu, kelapa, lada, kopi, pegawai, buruh, adalah cara warga mempertahankan hidupnya. Namun sebagian besar warga adalah petani perkebunan. Akibat letak geografis di pintu gerbang pulau Sumatera maka terdapat dua pelabuhan laut besar yaitu pelabuhan laut panjang dan pelabuhan laut Bakauhuni. Melengkapi akses mobilisasi arus orang/wisatawan dan barang didirikan pula Bandar udara Radin Inten II di perbatasan Kotamadya dan Kabupaten Lampung Selatan juga Bandar udara perintis M. Taufik Kiemas di Krui Kabupaten pesisir Barat. Disamping itu pula pelabuhan untuk para nelayan.

Berkaitan dengan penelitian ini, peneliti menggunakan objek wisata pantai sebagai situs penelitian untuk melihat bagaimana objek wisata pantai tersebut mampu meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat yang ada di sekitar. Dua objek wisata pantai yang menjadi studi dalam pendekatan penelitian ini merupakan Kawasan Wisata Unggulan (KWU) di Lampung, yaitu Pantai Teluk Kiluan. Sejarah singkat keberadaan Teluk Kiluan sendiri tidak terlepas dari Marga Kelumbayan yang kini menjadi kecamatan yang sudah ada, dan dibentuk sejak zaman Belanda melalui sistem teritorial untuk mengelompokkan masyarakat. Berdasarkan keterangan sejumlah tokoh masyarakat setempat termasuk para pamong pekon (setingkat desa) setempat menyebutkan jika nama Kiluan diambil dari bahasa Lampung Peminggir yang berarti “minta” atau permintaan dari induk kata “kilu” yang ditambah dengan imbuhan „an” hingga akhirnya menjadi Kiluan atau bisa dimaknakan sebuah permintaan, sampai saat ini pemaknaan Kiluan

terhadap daerah ini masih belum jelas. Banyak versi yang menyebutkan sejarah Pantai Teluk Kiluan sendiri, sejumlah tokoh masyarakat khususnya masyarakat asli Lampung ada yang menyebutkan jika penamaan daerah ini dengan nama Kiluan adalah karena pada zaman dahulu masyarakat Marga Kelumbayan begitu mengandalkan tingginya potensi perikanan di daerah ini dan setiap hendak menggelar hajatan baik perorangan atau untuk kepentingan bersama mereka selalu meminta ikan (kilu iwa) di daerah ini hingga akhirnya daerah ini dinamai Kiluan atau yang terkenal sekarang dengan Teluk Kiluan yang kini masuk dalam wilayah Pekon Kiluan Negeri setelah dimekarkan pada tahun 2007 dari pekon induknya yakni, Pekon Negeri Kelumbayan.

Gambar 4.1 Peta Teluk Kiluan (Pekon Negeri Kelumbayan)



Sumber: Monografi Desa Tahun 2018

Pantai Teluk Kiluan memiliki kedalaman antara 10-20 m dan merupakan perairan yang relatif tenang karena terlindung oleh Pulau Kelapa dan Pulau

Tungtungkalik. Teluk Kiluan berada di wilayah Teluk Semaka dan sebagian besar merupakan wilayah Kabupaten Tanggamus, memiliki daerah berupa pesisir pantai hingga perbukitan, dengan luas wilayah sekitar 276,1 km² atau sekitar 2.761 ha, dan dengan batas wilayah sebagai berikut : a) Sebelah Utara berbatasan dengan Hutan Register 25 Gunung Tanggang dan Desa Bawang, Kecamatan Punduh Pidada, Kabupaten Pesawaran b) Sebelah Selatan berbatasan dengan Teluk Kelumbayan, Teluk Semaka dan Selat Legundi c) Sebelah Barat berbatasan dengan Pekon Negeri Kelumbayan, Kecamatan Kelumbayan, Kabupaten Tanggamus d) Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Bawang, Kecamatan Punduh Pidada, Kabupaten Pesawaran.

Gambar 4.2 Lokasi Pantai Teluk Kiluan



**Foto Pintu Gerbang Lokasi Pantai Teluk Kiluan yang Curam
Sumber: Dokumentasi Penelitian**

Jumlah penduduk di wilayah Pekon Kiluan Negeri tercatat sebanyak 1.349 jiwa dalam 368 keluarga yang terdiri dari penduduk laki-laki sebanyak 722 jiwa dan perempuan sebanyak 627 menyebar ke 6 Dusun: Kiluan Balak, Teluk

Bekhak, Sukamahi, Bandung Jaya, Teluk Baru, dan Rawong. Tiap Dusun rata-rata kepadatan penduduknya sebesar 41,74 jiwa/km².

Pantai Teluk kiluan merupakan salah satu pantai dengan panorama alam yang sangat indah. Pantai Teluk Kiluan ini terletak di desa Kiluan, Kecamatan Kelumbayan, Kabupaten Tanggamus. Jarak tempuh untuk mencapai objek wisata tersebut kurang lebih 80 km atau 2,5 sd 3 jam perjalanan dari Bandar Lampung. Topografi dari Pantai Teluk Kiluan ini berbukit dan berlembah, sehingga akses menuju objek wisata tersebut bisa dibilang masih belum mulus. Namun, kondisi tersebut justru memberi tantangan tersendiri bagi para petualang untuk berkunjung ke objek wisata Pantai teluk Kiluan tersebut.

Pantai Teluk kiluan ini juga terkenal dengan keindahan alamnya sekaligus surga bagi para penyelam. Tidak hanya itu, Pantai Teluk kiluan terkenal dengan ikan lumba-lumba dan Laguna. Karena Pantai Teluk Kiluan ini merupakan tempat migrasi dua jenis ikan lumba-lumba, diantaranya lumba-lumba hidung botol (*Tursiops Truncatus*) dan lumba-lumba paruh panjang (*Stenella Longirostis*). Kedua jenis ikan limba-lumba tersebut cukup akrab dengan manusia, tak sedikit dari mereka mendekati perahu wisatawan yang melintas di laut. Fenomena inilah yang menjadi salah satu daya tarik wisatawan yang ingin berkunjung ke Pantai Teluk Kiluan. Sehingga, jumlah wisatawan semakin lama semakin meningkat. Kondisi ini dimanfaatkan oleh masyarakat untuk meningkatkan perekonomian mereka dengan cara membuka lapangan pekerjaan di sekitar objek wisata tersebut. Peneliti tertarik untuk meneliti lebih dalam bagaimana sektor pariwisata mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat, mengurangi angka pengangguran, dan angka kemiskinan yang ada di Provinsi Lampung.

4.2 Telaah Informan Penelitian

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan informan sebagai penyedia informasi untuk memberikan gambaran umum terkait perkembangan, implikasi dan desain pariwisata terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat di Pantai Teluk Kiluan. Informan tersebut meliputi wisatawan dan masyarakat sekitar Teluk Kiluan, pelaku usaha wisata, dan pemangku kebijakan. Informasi ini diperoleh dari pemahaman serta praktik yang dilakukan oleh masyarakat dan wisatawan melalui wawancara mendalam yang dapat dilihat pada lampiran (*Transkript wawancara*). Berikut daftar informan yang digunakan dalam penelitian ini:

Tabel. 4.1 Daftar Informan Pantai Teluk Kiluan

No.	Nama Informan	Kode Informan	Pekerjaan/ Jabatan
1	Marhasan Samba	MS	Pemkab Disparta
2	Eliyati	EL	Ibu PKK
3	Rico Stefanus	RC	Ketua Pokdarwis
4	Suwito	SW	Tokoh Masyarakat
5	Nia	N	Wisatawan

Sumber: Data diolah peneliti, 2018

4.3 3.5 Kredibilitas Data Penelitian

Kredibilitas merupakan ukuran kebenaran data yang dikumpulkan, yang menggambarkan kecocokan konsep penelitian dengan hasil penelitian. Penelitian kualitatif dinyatakan absah apabila memiliki salah satunya yaitu derajat keterpercayaan (*credibility*).

Kecocokan konsep penelitian dengan hasil penelitian, dilakukan peneliti seperti yang disarankan Sugiyono (2013) bisa melalui *member checking*, triangulasi, dan *audit trail*. *Member checking* dilakukan dengan kembali pada informan untuk memverifikasi kredibilitas informasi dan informasi yang diperoleh

sesuai dengan apa yang diberikan oleh pemberi data. Semua informasi yang ditemukan telah disepakati oleh para pemberi data (informan) berarti data pada penelitian ini secara metodologi valid sehingga semakin kredibel/dipercaya. Beberapa data yang ditemukan peneliti dengan berbagai penafsirannya tidak disepakati oleh pemberi data maka peneliti melakukan diskusi dengan pemberi data, untuk data yang perbedaannya tajam maka peneliti telah mengubah temuan dan menyesuaikan dengan apa yang diberikan oleh pemberi data. Dengan demikian, informasi yang diperoleh dan digunakan dalam penulisan laporan penelitian sesuai dengan apa yang dimaksud sumber data atau informan.

Triangulasi merupakan pengecekan data dari berbagai sumber dengan berbagai cara dan waktu (Satori & komariah, 2014). Triangulasi sumber yaitu meningkatkan kepercayaan penelitian adalah peneliti mencari data dari sumber yang beragam yang masih terkait satu sama lain. Peneliti melakukan eksplorasi untuk mengecek kebenaran data dari beragam sumber. Selain mendapatkan data dari subjek, peneliti juga melakukan wawancara pada informan yang memiliki kaitan dengan subjek penelitian. Pada penelitian ini, peneliti mewawancarai masyarakat individu, LSM pencinta lingkungan (Cikal), pokdarwis, ibu rumah tangga, tokoh masyarakat, wisatawan, *agent travel* dan pemerintah yang menangani subjek yang peneliti rasa dapat memberikan informasi terkait dengan kondisi aktivitas pariwisata, pengelolaan objek-objek pariwisata serta kesejahteraan masyarakat akibat dampak dari adanya aktivitas pariwisata. Triangulasi teknik dan waktu yang dilakukan adalah penggunaan beragam teknik pengungkapan data yang dilakukan kepada sumber data, yaitu mengecek data kepada sumber yang sama dengan teknik yang berbeda seperti teknik wawancara tidak terstruktur/ tidak menggunakan kuesioner yang dilakukan sewaktu-waktu tanpa direncanakan sebelumnya. Dalam kegiatan ini, peneliti

melakukan wawancara dengan beberapa pertanyaan yang menanyakan hal yang sama.

The audit trail dilakukan peneliti dengan cara mengkonsultasikan hasil temuan penelitian dengan pihak eksternal untuk menilai kredibilitas metode pengumpulan data, temuan dan interpretasi yang dibuat. Pihak eksternal yang dipilih adalah orang yang paham tentang penelitian studi kasus dan independen, mengenai konsep pariwisata dan kesejahteraan. Bentuk *The audit trail* yang dilakukan melalui *Forum Group Discussion* (FGD). FGD yang dilakukan melibatkan perwakilan beberapa unsur masyarakat individu, LSM pencinta lingkungan (Cikal), pokdarwis, ibu rumah tangga, tokoh masyarakat, *agent travel* dan pemerintah dan wisatawan.

Tindakan kredibel lainnya yang peneliti lakukan: 1) dengan menekankan kepada proses dan bukan hasil sehingga tampak informasi yang ditemukan secara spesifik dari dalam diri manusia, persepsi, *mindset*, sikap dan kepercayaan atau sering dikenal dengan istilah data emik, 2) menempatkan informan dalam kondisi *unobstrusive* (Kresna, S.R., 2010).

4.3 Penerapan Konsep CBT di Pantai Teluk Kiluan

Jumlah wisatawan di provinsi Lampung semakin meningkat setiap tahunnya. Neraca satelit pariwisata daerah provinsi Lampung menunjukkan bahwa pada tahun 2016 jumlah wisatawan nusantara mencapai 7.381.1774 orang, sedangkan jumlah wisatawan mancanegara mencapai 115.053 orang. Selain itu, menurut Marhasan kepala bidang pemasaran dan destinasi wisata, dinas pariwisata provinsi Lampung, Kabupaten Tanggamus, menyatakan bahwa pada awal tahun 2017 kunjungan wisatawan mencapai 12 ribu orang, sedangkan pada awal tahun 2018 meningkat sebanyak 15 ribu orang. Kondisi ini

mengakibatkan permintaan akan barang dan jasa turunannya semakin meningkat. Permintaan ini berupa fasilitas layanan jasa dan konsumsi. Sejalan dengan, dengan *deman-side tourism*, menyatakan bahwa permintaan atas barang dan jasa akan muncul akibat adanya kegiatan pariwisata.

Salah satu penyumbang wisatawan yang datang ke Lampung adalah wisata Pantai Teluk Kiluan dengan wisata Lumba-Lumba dan Laguna. Pada tahun 2014-2015 terjadi *booming* wisatawan ke Pantai Teluk Kiluan mencapai 300-500 pengunjung per-hari dan biasanya spesifikasi wisatawan terdiri dari kumpulan/grup/komunitas. Berikut penjelasan dari Dinas Pariwisata Tanggamus Marhasan Samba dan gambar profil wisatawan Pantai Teluk Kiluan.

“...tahun 2014 sampai tahun 2015 itu banyak wisatawan yang datang dari lokal maupun dari luar yang local biasanya berbentuk komunitas, grup atau perkumpulan.....”

Gambar 4.3 Profil Wisatawan di Pantai Teluk Kiluan



Foto Profil Wisatawan Pantai Teluk Kiluan Kabupaten Tanggamus
Sumber: Dokumentasi penelitian

Hal serupa juga dipaparkan oleh Ketua Pokdarwis (Kelompok Sadar Wisata) yang juga ketua Yayasan Cikal (Pecinta Lingkungan) di Kabupaten Tanggamus, Rico Stefanus;

Gambar 4.4 Wawancara Mendalam dengan Pokdarwis



Foto wawancara tentang *Booming* Pariwisata di Homestay Rico Stefanus

Sumber: Dokumentasi Penelitian

“....pernah ada booming wisatawan disini tahun eeee 2014 sampai 2015, sampai-sampai teras rumah warga laku dijual (untuk mengingap)...”

Di bawah ini adalah gambar lumba-lumba hidung botol (*Tursiops Truncatus*) dan lumba-lumba paruh panjang (*Stenella Longirostis*), serta laguna Gayau (kolam yang terbentuk akibat terjangan air laut ke batu-batuan) yang telah menjadi magnet kedatangan wisatawan ke Pantai Teluk Kiluan.

Gambar 4.5 Wisata Lumba-Lumba dan Laguna



Foto Lumba-lumba Paruh Panjang dan Lumba-lumba Botol, serta Kolam Laguna

Sumber : Dokumentasi Penelitian

Konsep wisata berbasis masyarakat awalnya dicetuskan oleh Rico Stefanus dengan mendirikan Yayasan Cikal sebagai pelopor terbentuknya wisata di Pantai Teluk Kiluan. Wisata pantai ini merupakan konsep pariwisata yang mencerminkan kecintaan terhadap lingkungan, keseimbangan alam, dan kelestarian lingkungan disebut ekowisata (Damanik & Weber, 2006:38). Ekowisata sendiri merupakan bentuk tanggung jawab dengan cara melakukan konservasi lingkungan dan alam dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat lokal. Berikut keuntungan yang akan diperoleh dari adanya kegiatan ekowisata ini, diantaranya adalah: 1) timbulnya rasa peduli terhadap alam dan

budaya, 2) menumbuhkan rasa cinta terhadap lingkungan alam dan budaya, 3) menghormati nilai-nilai budaya dan agama masyarakat sekitar, 4) pengembangan sektor wisata harus melalui musyawarah dan disetujui oleh masyarakat setempat, 5) taat peraturan perundang-undangan, 6) memberikan kepuasan bagi warga sekitar dan para wisatawan. Yayasan Cikal mengajak masyarakat untuk ikut serta dalam menjalankan wisata di Teluk Kiluan dengan menyewakan perahu kepada wisatawan yang ingin menyeberang laut dan melihat lumba-lumba.

Beberapa hal yang menjadi landasan penerapan konsep CBT di Pantai Teluk Kiluan adalah: pergeseran kepemilikan sumberdaya (aset) masyarakat menjadi aset bisnis, dinamika budaya lokal, partisipatif masyarakat lokal, pelibatan tokoh masyarakat, dan pendekatan *sustainability*

4.3.1 Dimensi Ekonomi: Pergeseran Kepemilikan Sumberdaya (aset) Masyarakat Menjadi Aset Bisnis

Pengembangan pariwisata yang telah *booming* di Pantai Teluk Kiluan telah mendorong dan menggerakkan masyarakat sekitar berimajinasi dan berkreasi menemukan sumber pendapatan baru melalui kepemilikan sumberdaya yang tersedia seperti: rumah, perahu, keahlian memasak, keahlian mengendarai mobil, kemampuan bahasa asing, dan sebagainya. Gerakan masyarakat ini menimbulkan konsekuensi terjadinya pergerakan perekonomian. Hal ini diungkapkan oleh Rico Stefanus dalam wawancara sebagai berikut:

“.....Tahun 2005 saya dengan kelompok *Cikal* (Cinta Lingkungan) mengajak masyarakat untuk mengembangkan wisata berkonsep ekowisata yang berbasis masyarakat (CBT) dengan menjadikan

lumba-lumba menjadi objek utama. Seiring waktu, masyarakat mendapatkan pendapatan dengan menjadi *tour guide*, para nelayan menyewakan perahu, rumah tangga menjadikan rumahnya untuk *homestay*. Dari situ mulai terlihat ada pergerakan perekonomian.....” (RC)

Masyarakat sekitar teluk kiluan memanfaatkan kondisi ini untuk menyediakan fasilitas layanan jasa dan konsumsi dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan. Fasilitas yang diperlukan oleh wisatawan diantaranya meliputi, penginapan (*homestay*), transportasi darat (akses menuju Pantai Teluk Kiluan) dan transportasi laut berupa kapal/perahu untuk para wisatawan yang ingin menikmati pemandangan laut di sekitar teluk kiluan, hiburan, pemandu (*tour guide*), serta konsumsi yang dapat mereka nikmati ketika berada di objek wisata tersebut. Hal ini didukung oleh pernyataan Marhasan Samba, sebagai berikut.

“...saat ini masyarakat banyak menjadikan rumahnya sebagai *homestay* beserta paket makan, dan menyewakan perahu mereka kepada pengunjung yang datang.” (MS).

Homestay, yang merupakan rumah masyarakat dapat dilihat pada pada gambar 4.6

Gambar 4.6 Homestay dan Persewaan perahu (Basis Komunitas)



**Foto Persewaan Perahu dan Homestay untuk wisatawan
Sumber: Dokumentasi Penelitian**

Banyaknya wisatawan yang berkunjung ke Pantai Teluk Kiluan memberi kesempatan kepada masyarakat di sekitar untuk menawarkan berbagai macam pelayanan terbaik mereka. Diantaranya adalah terdapat banyak *homestay* yang tersebar disepanjang Pantai Teluk Kiluan. *Homestay* tersebut bervariasi, ada yang dibangun di pesisir pantai dan ada juga yang dibangun di atas air tepi Pantai Teluk Kiluan. Harganya pun bervariasi, tergantung fasilitas yang disediakan oleh pengelola, berkisar Rp. 150.000 sampai Rp. 500.000 per malam nya. Selain itu, toko kecil yang menjual berbagai macam *snack* dan minuman di Pantai Teluk Kiluan masih sangat sedikit, toko kecil yang menjual aneka macam makanan kecil dan minuman tersebut hanya terdapat di sekitar jalan menuju Pantai Teluk Kiluan saja. Sehingga, para wisatawan dapat memesan makanan dan minuman secara langsung di tempat penginapan yang disediakan oleh pengelola. Tarif per-porsinya berkisar Rp. 20.000 hingga ratusan ribu sesuai dengan pesanan yang diminta oleh pengunjung. Hal ini didukung oleh pernyataan Eliyati pemilik *Homestay* sebagai berikut;

“... harga *homestay* per-malamnya ya sekitar Rp. 150.000 sampai Rp. 500.000. untuk makanan ya sekitar Rp. 20.000 sampai ratusan ribu sesuai banyaknya macam menu yang dipesan.” (EL)

Di bawah ini ditampilkan beberapa menu yang di sajikan secara sederhana dengan memanfaatkan bahan-bahan yang tersedia secara lokal di sekitar Pantai Teluk Kiluan pada gambar 4.7

Gambar 4.7 Menu Makan Konten Lokal



Foto Menu Makan Sederhana dengan konten lokal di *Homestay*
Sumber: Dokumentasi Penelitian

Untuk transportasi sendiri masyarakat di sekitar Pantai Teluk Kiluan menyediakan layanan berupa jasa travel dari bandar lampung menuju Pantai Teluk Kiluan. Dengan membayar tarif sebesar Rp. 1.000.000 untuk 8 orang, atau membayar Rp. 1.600.000 untuk paket pulang pergi per harinya. Dengan membayar sejumlah nominal di atas, wisatawan sudah bisa menikmati fasilitas penginapan, snorkling, kapal, dan kolam renang alami/laguna gayau, sambil menikmati pulau kelapa yang ada di Pantai Teluk Kiluan.

Partisipasi masyarakat dengan menyewakan perahu dan menjadi *tour guide* bukanlah mata pencaharian utama, hanya sebagai mata pencaharian tambahan ketika masyarakat sedang istirahat melaut karena tidak mencari ikan.

“...Konsep ekowisata ini menjadi tambahan penghasilan, bukan menjadi mata pencaharian utama. Mata pencaharian utama tetap bertani, berkebun, nelayan.....” (RC)

Pariwisata merupakan usaha ekonomi kreatif yang berkembang sangat pesat (Yoeti, 2008:15). Dengan adanya pariwisata, mendorong masyarakat sekitar untuk mengembangkan akses layanan penyedia fasilitas-fasilitas pariwisata. Pariwisata dianggap sebagai sektor yang dapat diandalkan dalam meningkatkan pemerataan kesempatan berusaha, meningkatnya pendapatan masyarakat, serta pendapatan daerah. Hal ini didukung pernyataan Eliyati sebagai berikut;

“ ...mereka bisa mengelola *homestay*, sehingga penghasilannya meningkat paling sedikit 1 juta, kalau lagi ramai bisa mencapai 3-4 juta rupiah. Begitupun para nelayan, mereka yang memiliki perahu memiliki penghasilan yang sama seperti mereka yang memiliki *homestay*.” (EL)

Dari pernyataan di atas, dapat diketahui bahwa kesempatan yang dimiliki oleh masyarakat untuk membuka lapangan pekerjaan sangatlah besar. Masyarakat bisa memanfaatkan kondisi tersebut sebagai penyedia layanan jasa kepada para wisatawan yang datang, dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan. Sehingga, kehidupan masyarakat di sekitar objek wisata tersebut semakin hari semakin baik. Hal ini diperkuat oleh pernyataan dari informan Eliyati sebagai berikut.

“ ...kebanyakan untuk daerah pesisir, kesejahteraannya meningkat akibat adanya pariwisata, sehingga kehidupan mereka

lebih makmur..... rumah-rumah juga sudah semakin permanen” (EL).

rumah-rumah setelah permanen yang dijadikan *homestay* dapat dilihat di gambar 4.8

Gambar 4.8 Homestay Perubahan



Foto Tampilan Homestay Perubahan
Sumber: Dokumentasi Penelitian

Perubahan tampilan secara fisik bangunan *homestay* dipicu dengan adanya kemauan untuk bersaing memikat kedatangan wisatawan. Masyarakat sekitar Pantai Teluk Kiluan melengkapi beberapa kekurangan fasilitas yang dibutuhkan wisatawan. Kondisi seperti ini ditanggapi positif oleh pemerintah. Pemerintah memberikan bantuan berupa kipas angin, *spring bed*, dan bedah kamar mandi. Seperti yang diungkap dalam wawancara dengan Marhasan Samba sebagai berikut;

“..... ya itulah kami sangat konsen dengan pariwisata yang berbasis masyarakat ini....tentunya pe..pemerintah mempunyai kewajiban moral memberi dukungan sepenuhnya baik berbentuk promosi maupun bantuan material berbentuk fasilitas, bisa juga bimbingan....” (MS)

Dalam pengembangannya, pariwisata melibatkan tiga pelaku utama, diantaranya adalah pemerintah, swasta, dan masyarakat lokal. Pariwisata berbasis lokal (*Community Based Tourism*) merupakan konsep dimana masyarakat lokal ikut serta berpartisipasi dalam perencanaan, pengelolaan, dan pengambilan keputusan. Hal ini sejalan dengan pandangan Housler (2009) yang menyatakan bahwa “CBT merupakan bentuk pariwisata yang memberikan kesempatan kepada masyarakat lokal untuk terlibat secara langsung serta melakukan pengendalian dalam manajemen pengelolaan pariwisata. Hal ini dikatakan oleh informen Suaiman sebagai berikut.

“... Mulai mengajak masyarakat untuk terlibat secara langsung, seperti menjadi pemandu, menyiapkan konsumsi, mengambil keputusan” (S)

Sesuai dengan pernyataan dari Marhasan Samba selaku perwakilan Dinas Pariwisata Kabupaten Tanggamus bahwa wisata Pantai Teluk Kiluan telah dicanangkan sebagai pariwisata berbasis komunitas

“....ini ya.. wisata basisnya masyarakat, partisipasinya ya dari masyarakat, mereka yang berperan, mengelola dan hasilnya untuk mereka....” (MS)

Pengembangan pariwisata Pantai Teluk Kiluan tidak melibatkan campur tangan investor. Masyarakat berinisiatif mendirikan fasilitas untuk wisatawan karena melihat potensi yang besar untuk meningkatkan perekonomian masyarakat. Pernyataan lain ditambahkan oleh Marhasan Samba dalam wawancara mendalam;

“ini dari masyarakat sekitar Pantai Teluk Kiluan , nanti hasilnya ya untuk masyarakat sekitar Pantai Kiluan lagi.....kan memang yang mau usaha itu orang-orang sini” (MS)

Dari pernyataan Marhasan Samba dapat diperoleh informasi bahwa partisipasi masyarakat sangat terlihat dengan membeli perahu untuk disewakan, memoles rumah untuk dijadikan *Homestay* dan menjadi *Tour Guide*, menyatakan pendapat jika urun rembug pada pertemuan-pertemuan bagi wisatawan yang datang.

Penyediaan fasilitas bagi turis yang datang mampu meningkatkan pendapatan bagi masyarakat sekitar Pantai Teluk Kilun yang awalnya hanya bekerja sebagai petani dan nelayan. Pendapatan sebagai petani dan nelayan hanya diperoleh setiap masa panen, sehingga pada saat tidak panen masyarakat sekitar Pantai Teluk Kiluan hidup dengan ekonomi yang pas-pasan. Dengan adanya wisatawan yang datang, maka masyarakat sekitar Pantai Teluk Kiluan mendapatkan tambahan pendapatan 3 kali lipat yang lebih dari pendapatan dari menjadi nelayan.

Peningkatan pendapatan yang dirasakan oleh masyarakat sekitar Pantai Teluk Kiluan telah memenuhi prinsip CBT dengan indikator ekonomi. Pencanaan Teluk Kiluan sebagai daerah wisata telah membuka lapangan pekerjaan bagi masyarakat menjadi *Tour Guide*, selain itu untuk masyarakat yang tidak memiliki home stay bisa membantu dengan menjadi pegawai di *Homestay* saat ada wisatawan datang. Seperti pernyataan dari Eliyati, selaku Ketua PKK.

“.....disini ada yang bantu, ada yang di dapur masak, ada yang di depan memberi penjelasan ke pada tamu, mengantar tamu melihat lomba-lomba.
Sehari bisa dapat 100 ribu...” (EL)

Emik-emik di atas sejalan dengan temuan studi Hrubcova, *et al* (2016) di negara sedang berkembang, yang menghasilkan temuan bahwa pariwisata telah menjadi mesin penggerak perekonomian. Prinsip pariwisata berbasis masyarakat dikategorikan sebagai unit kegiatan perekonomian yang memberikan manfaat ekonomi ke pada masyarakat (Goodwin dan Santilli, 2009:5-6).

4.3.2 Dimensi Budaya: Dinamika Budaya Lokal

Sebagai sebuah bentuk pariwisata berbasis komunitas yang konsen dan beririsan serta bersinggungan secara langsung dengan masyarakat pedesaan dan masyarakat yang hidup di kota-kota kecil, masyarakat miskin dan tradisional, dan masyarakat hidup dengan standar hidup yang rendah serta kental dengan budaya lokal. Di fihak lain wisatawan yang datang dengan karakter budaya yang beragam sesuai budaya dan tradisi dari mana wisatawan berasal menyebabkan keadaan tersebut sangat mempengaruhi dinamika budaya lokal.

Di bawah ini disajikan gambar 4.9 tentang tari-tarian dan pawai budaya sebagai aset budaya masyarakat Tanggamus

Gambar 4.9 Tari Sembah, Temui Mulei Meghanai dan Ngiring Penganten



Foto Tari Sembah, Temui Mulei Meghanai dan Ngiring Penganten
Sumber: Dokumentasi Penelitian

Kebanyakan wisatawan lokal dan mancanegara yang berkunjung umumnya saling menghargai perilaku dan kebiasaan yang dianut oleh masyarakat Pantai Teluk Kiluan. Mereka senang dengan persembahan pentas seni yang di suguhkan oleh masyarakat, seperti dikatakan oleh wisatawan Nia yang berasal dari Jakarta:

“.....Kami senang dan merasa kagum dengan upacara yang dilakukan masyarakat sekitar Pantai Teluk kiluan....pas ada acara pesta perkawinan kami diundang, dan kami datang....acara adatnya merupakan atraksi wisata tambahan buat kami....pakaian-pakaian yang digunakan bagus, dinamis, etnik dan menarik.... (N)

Apresiasi dari wisatawan terhadap suguhan atraksi kebudayaan masyarakat sekitar Pantai Teluk Kiluan menyemangati, dan menumbuhkembangkan rasa kebanggaan komunitas dan

mempertahankan keunikan budaya lokal, dan menambah ketrampilan berbahasa Inggris seperti yang dituturkan Eliyati,

“.....Sekarang anak-anak remaja makin giat latihan nari, ibu-ibu juga semangat untuk latihan pantun....karena ingin berkomunikasi dengan wisman para pemudanya mulai mempelajari bahasa Inggris...walau seadanya... (EL)

Keunikan budaya lokal masyarakat sekitar Pantai Tanjung Setia yang dilakukan ibu-ibu dalam berpantun seperti ditunjukkan pada gambar 4.10

Gambar 4.10 Kegiatan Ibu-ibu Belajar Pantun



Foto Ibu-ibu Belajar Pantun
Sumber: Dokumentasi Penelitian

Wisatawan yang datang juga telah merubah banyak kemandirian dan menghilangkan ketergantungan masyarakat sekitar Pantai Teluk Kiluan terhadap bagaimana menerima dan menjamu tamu yang baik, mulai dari menata kamar, rumah, menyediakan fasilitas mck, dan lain-lain sesuai dengan kebiasaan orang-orang kota melalui hasil yang diterima atas menjual *homestay*, seperti yang dikatakan oleh Sulaiman;

“..... sekarang kebiasaan menabung dari hasil yang diterima sudah menjadi keharusan, karena kita harus membeli peralatan seperti kipas angin, spring bed, keramik, dan peralatan masak dan makan agar wisatawan bisa menjadi pelanggan...kalau ngandelin bantuan yaa...masih kurang...”(S).

Gambar 4.11 Perlengkapan *Homestay*



Foto: Perlengkapan Kamar di *Homestay*
Sumber: Dokumentasi Penelitian

Potret lain dari sisi pengaruh budaya yang kurang menguntungkan bagi masyarakat sekitar Pantai Teluk Kiluan adalah perubahan perilaku berpakaian, perilaku kehidupan yang ke kota-kotaan telah menggerus keunikan budaya lokal. Masyarakat sudah tidak canggung lagi menggunakan rok pendek dan celana pendek, *make-up*, menggunakan alat komunikasi *hand-phone* (HP), hidup konsumtif. Penuturan ini diungkap oleh informan Suwito;

“.....para remaja sudah gak canggung lagi make celana pendek, rok pendek, berdandan menor, sebagian besar memaksa beli HP bukan buat komunikasi tapi buat main *game*...” (SW)

Joppe (1996), Goodwin dan Santili (2009), mengatakan *Community Base Tourism* (CBT) mewujudkan pelestarian budaya, mempertahankan keunikan karakter dan budaya lokal dan harus memfasilitasi berkembangnya budaya lokal serta menghormati perbedaan budaya yang datang. Senada dengan Afandi, Aang (2004)

yang melakukan studi pariwisata berkelanjutan di kota Batu menghasilkan temuan bahwa konsep CBT tetap mempertahankan prinsip budaya lokal sebagai bagian yang utuh dari karakter untuk membangun pariwisata.

4.3.3 Dimensi Sosial: Partisipatif Masyarakat Lokal

Masyarakat lokal berperan penting dalam pengembangan wisata karena sumber daya dan keunikan tradisi dan budaya yang melekat pada komunitas tersebut merupakan unsur penggerak utama kegiatan wisata. Di lain pihak, komunitas lokal yang tumbuh dan hidup berdampingan dengan suatu objek wisata menjadi bagian dari sistem ekologi yang saling kait mengait. Keberhasilan pengembangan wisata tergantung pada tingkat penerimaan dan dukungan masyarakat lokal (Wearing, 2001). Pernyataan Wearing (2001) tersebut diperkuat juga oleh informasi dari informan Marhasan Samba;

“..... mulanya semua kegiatan pariwisata di Pantai Teluk Kiluan semuanya dilakukan oleh warga sekitar, dari menentukan atraksi/aktivitas wisata, tarif, dan pengelolaan Pemda tidak tau menau....tetapi dalam perkembangannya Pemda tentunya berkewajiban memberi bantuan untuk mengembangkannya..apalagi sekarang jadi kawasan wisata unggulan” (MS)

Masyarakat lokal berperan sebagai tuan rumah dan menjadi pelaku penting dalam pengembangan wisata dalam keseluruhan tahapan mulai tahap perencanaan, pengawasan, dan implementasi. Ilustrasi yang dikemukakan Wearing (2001) tersebut menegaskan bahwa masyarakat lokal berkedudukan sama penting dengan pemerintah dan swasta sebagai salah satu pemangku kepentingan dalam pengembangan pariwisata.

Perlunya melibatkan masyarakat dalam pengambilan keputusan dengan mengakomodasi keinginan dan tujuan masyarakat lokal dalam pembangunan serta kemampuannya dalam menyerap manfaat pariwisata. Masyarakat yang berada di wilayah pengembangan harus didorong untuk mengidentifikasi tujuannya sendiri dan mengarahkan pembangunan pariwisata untuk meningkatkan pemenuhan kebutuhan masyarakat lokal. Informan Sulaiman memberikan informasi tentang hal ini sebagai berikut;

“..... gak lah Kades, Sekdes...gak pernah ngatur ngatur.....Pokdarwis, LSM, pegiat lingkungan, *Tour guide*, pemilik *Homestay*, pemilik perahu, pengelola oleh-oleh, penanggung jawab kolam Laguna, kelompok seni budaya...secara sendiri sendiri diberi keleluasaan untuk berkreasi....nentuin tarif atau harga bebas bebas aja...tapi kan pasti liat-liat tarif orang lain. Untuk perahu juga begitu.... bentuk dan modelnya sesuai selera....” (S)

Pandangan ini serupa dengan Goodman dan Santili (2009) yang berpendapat bahwa pengikutsertaan masyarakat dalam suatu proses pembangunan merupakan kesempatan masyarakat menggunakan hak, bukan kewajiban. Hak masyarakat diantaranya hak untuk meminta dan mendapatkan informasi, memperoleh pelayanan, menyampaikan aspirasi, memilih dan dipilih, dan mendapatkan pengayoman dan perlindungan dari gangguan ketenteraman, serta berkreasi dan improvisasi. Hal ini sudah dinyatakan dalam deklarasi PBB mengenai hak asasi manusia (Bab 21), bahwa setiap warga negara mempunyai hak untuk berperan serta dalam urusan pembangunan, baik secara langsung maupun tidak langsung.

Selanjutnya prinsip sosial dalam CBT di Pantai Teluk Kiluan terkoneksi juga dengan pengembangan dan pengelolaan pariwisata dengan pendekatan partisipatif, artinya pengembangan dan pengelolaan yang memposisikan masyarakat sekitar Pantai Teluk Kiluan sebagai subyek atas program pembangunan pariwisata yang diperuntukkan bagi kepentingan mereka sendiri, pelibatan masyarakat mulai dari tahap perencanaan-pelaksanaan-monitoring-evaluasi.

“..... masyarakat dilibatkan dalam musyawarah rencana pembangunan desa (musrenbangdes)...cikal di undang, pokdarwis juga diundang, posyandu, ibu-ibu PKK dan semua unsur yang menjadi perangkat pasti diikutsertakan dalam musrenbangdes.....” (S)

Ungkapan lanjutan Sulaiman ini memaknai bahwa tujuan dari pendekatan partisipatif ini bukan hanya terlihat demokratis tetapi ada asa yang lebih jauh yaitu terjadi perbaikan dan peningkatan kondisi dan taraf hidup masyarakat sekitar Pantai Teluk Kiluan yang berkualitas, termotivasinya masyarakat sekitar Pantai Teluk kiluan untuk berpartisipasi dalam pembangunan desanya sendiri, dan tumbuhnya kemampuan masyarakat sekitar Pantai Teluk Kiluan untuk berkembang secara mandiri.

Pendapat Informen ini diperkuat oleh Yoppe (1996) bahwa, partisipasi sebagai *power* masyarakat untuk mengatasi persoalannya pada masa kini guna mencapai kehidupan yang lebih baik pada masa mendatang. Dijelaskan bahwa partisipasi merupakan redistribusi kekuatan, yang memungkinkan kaum terpinggirkan secara ekonomi dan politik untuk dilibatkan dalam perencanaan pembangunan masa depan.

Sulaiman juga menambahkan dalam uraian tentang pendekatan partisipatif sebagai berikut

.....” bukan begitu juga....musrenbang bukan agenda sekedar kumpul kumpul silahturrahmi biasa tapi kami saling berbagi, informasi, merumuskan tujuan, menentukan kebijakan, pengalokasian dana, ...terus....bicara apa manfaatnya buat kita.....” (S)

Gambar 4.12 Partisipatif Masyarakat dalam Musrenbang



**Foto Partisipatif Masyarakat
Sumber: Dokumentasi Cikal**

Strategi pelaksanaan partisipasi dicapai dengan cara melibatkan masyarakat dalam *sharing* informasi, merumuskan tujuan, menentukan kebijakan, mengalokasikan sumber-sumber pendanaan, mengoperasikan program, serta mendistribusikan manfaat yang diperoleh. Masyarakat dilibatkan sejak tahap perencanaan hingga implementasi dan pemerataan hasil-hasilnya. Partisipasi masyarakat lokal merupakan pijakan awal terhadap berbagai dampak strategis yang terkait dalam pengembangan desa wisata berbasis masyarakat. Partisipasi masyarakat menjadi penting bagi pencapaian desa wisata yang berkelanjutan dan bagi realisasi desa wisata yang berkualitas.

Pendekatan partisipatif dalam pengelolaan pariwisata menimbulkan kepekaan/kesadaran (*social Awareness*). *social Awareness* ialah sebagai kesadaran akan masalah-masalah yang dihadapi oleh masyarakat dan komunitas yang berbeda setiap hari untuk menyadari kesulitan masyarakat atau menyadari keadaan orang lain (empati). Seperti uraian dari informan Suwito;

.....” kalau ada apa apa yang menyangkut pekerjaan kami bersama-sama saling bantu membantu, misalnya membuat perahu, gotong royong kebersihan lingkungan, menjenguk warga yang sakit, juga membuat rumah.....” (SW)

Gambar 4.13 Partisipasi Gotong Royong



Foto: Gotong Royong Warga Desa Kelumbayan
Sumber: Dokumentasi Penelitian

Kesadaran diri atau yang di sebut dengan *Self Awareness* merupakan modal dasar yang didalamnya menjelaskan tugas lain dari bermasyarakat. Menurut Amstrong (2012), kesadaran sosial mutlak dibutuhkan didalam mengelola pariwisata yang berbasis komunitas (CBT). Aref (2010) menegaskan bahwa *sense of community and participation for tourism development* merupakan suatu aspek kebersamaan yang dapat menjadi katalis dalam industri pariwisata suatu

daerah, bahkan menurut Marre dan Weber (2007) memotivasi masyarakat dalam kegiatan pariwisata

4.3.4 Dimensi Politik: Pelibatan Tokoh Masyarakat

Setiap tindakan dan perilaku yang diperbuat seseorang atau organisasi yang akan membawa suatu perubahan atau adalah bagian dari politik, artinya kegiatan dalam sistem pembangunan negara melalui pembagian-pembagian kekuasaan atau pendapatan untuk suatu *goals* dalam kesepakatan, termasuk kesepakatan pada pengembangan pariwisata. Pertimbangan politik harus beriringan dengan pelibatan tokoh masyarakat dan komitmen peran dari pemerintah (Yoppe, 1966). Informan Suwito menuturkan bahwa;

.....” emang betul demikian, saya tinggal di sini sebelum objek wisata ini jadi KWU, waktu itu seingat saya... saya diajak pemerintah Kabupaten ngomong-ngomong soal pengembangan objek wisata Pantai Teluk kiluan ini,mungkin karena saya dianggap tokoh msyarakat, katanya saya banyak tau....” (SW)

Kemudian diperkuat juga dengan informan Marhasan Samba yang mewakili pemerintah Kabupaten Tanggamus, beliau ungkap demikian;

.....” harus itu bu... pelibatan tokoh masyarakat wajib untuk mengorek informasi lebih dalam....” (MS)

Narasi yang terurai oleh Sulaiman salah satu warga yang cukup sepuh dan tinggal di desa Kelumbayan boleh dikatakan paling lama, menguatkan bahwa pembangunan pariwisata di Desa Kelumbayan memperhatikan dan melibatkan tokoh masyarakat. Pelibatan tokoh masyarakat bukan sekedar pelengkap unsur-unsur pengambil kebijakan tetapi informasi yang dimiliki tokoh masyarakat merupakan lentera dalam kegelapan pengembangan pariwisata.

Pengelolaan dan pengembangan pariwisata berbasis CBT dari sisi peran pemerintah tidak terlalu dominan karena prinsip dasar CBT itu dari (milik), dikelola, sebagai *partner*, dan untuk masyarakat. Dengan demikian pemerintah sama sekali bukan merupakan peranan utama tetapi penting karena dalam proses politik dukungan, arahan, bantuan serta koordinasi pembangunan pariwisata yang kebijakannya di buat oleh komunitas maupun pemerintah daerah harus merupakan gayung bersambut. Artinya dari hilir ke hulu atau dari hulu ke hilir akan terkuak suatu benang merah bagaimana pengembangan pariwisata dimasa yang akan datang.

4.3.5 Dimensi Lingkungan: Pendekatan *Sustainability*

Tourism for Sustainable Local Livelihood and Nature Conservation, studi yang dilakukan oleh Moses Njole (2011), menemukan bahwa pariwisata yang berwawasan lingkungan membawa implikasi yang menukik pada masyarakat berpenghasilan rendah, di pedesaan atau kota-kota kecil. Implikasi yang dimaksudkan meliputi penghidupan masyarakat setempat lebih berkualitas, menimbulkan kesadaran dukungan lokal untuk konservasi, dan akibat adanya konservasi sumber pendapatan baru terbentuk menjadi lebih variatif.

Kondisi yang tidak begitu berbeda dengan Pantai Teluk Kiluan, sebagai pantai ekowisata, utamanya penyelamat terumbu karang, menyelamatkan ikan kecil (makanan lumba-lumba), dan penyelamat lumba-lumba. Seperti dikemukakan oleh informan Rico Stefanus bahwa;

.....” saya dkk pencinta lingkungan (cikal) terus mempertahankan supaya Pantai Teluk Kiluan ini bukan hanya objek wisata tetapi tempat konservasi lumba-lumba....jangan sampai lumba-lumba

ini punah, makanya saya kesal jika ada kapal penangkap ikan datang dari Kota Agung, sudah dilarang, sampai sampai warga berantem..karena kalau ikan kecil berkurang lumba-lumba akan pergi ke tempat lain yang ada ikannya....” (RC)

Paparan di atas tentang konsep konservasi sebenarnya telah ada dan diperkenalkan kepada manusia sejak dahulu kala, meskipun konsep konservasi tersebut masih bersifat konservatif dan eksklusif (kerajaan). Konsep yang konservatif dan eksklusif adalah konsep kuno konservasi tapi cikal bakal dari konsep modern konservasi. Artinya konsep modern konservasi menekankan pada upaya memelihara dan memanfaatkan sumberdaya alam secara bijaksana dengan tujuan kelestarian lingkungan.

Gambar 4.14 Ekosistem Terumbu Karang (*Dolphin Bay*)



**Foto Ekosistem Terumbu Karang (*Dolphin Bay*)
Sumber: Dokumentasi Rico Stefanus**

Menjaga kelestarian lingkungan di sekitar objek wisata tidak hanya sebatas menjaga pantai dan isinya, tetapi juga perlu mendapat

perhatian sisa buangan aktivitas manusia berupa sampah. Banyaknya wisatawan berarti pula banyaknya *product* turunan yang dikonsumsi oleh wisatawan, maka makin banyak juga buangan/sampah akibat *product* turunan itu yang jika tidak di kelola mengotori dan menjadi bahan pencemar air pantai dan pada akhirnya merusak ekosistem. Apakah masyarakat komit dengan prinsip lingkungan, suatu prinsip yang melekat pada konsep CBT. Di bawah ini transkript yang bersumber dari informen Rico Stefanus (RC);

"..... tadinya gak kepikiran kalo sampah ini akan menjadi masalah di Kiluan...eee pas wisatawan *booming*, baru ngeh kalo sampahnya juga banyak berceceran, maka pokdarwis ambil sikap membuat tempat-tempat pembuangan sampah dari drum, dikumpulkan, kemudian diangkut ke TPS tapi ada juga yang di bakar...." (RC)

Jadi prinsip lingkungan pada CBT sangat penting, karena masyarakat merupakan bagian dari lingkungan tersebut, yang hidup dan berinteraksi di dalamnya, jika lingkungannya terganggu maka akan terganggu juga warga yang berada di sekitarnya. Berbeda jika pengelolaan pariwisata dengan konsep non-CBT, dimana investor sebagai *owner*, bertempat tinggal di luar desa Kelumbayan tentunya tidak merasakan langsung kondisi ini kecuali megeruk untung sebanyak banyaknya.

Prinsip pengelolaan pariwisata CBT dari, milik, dan untuk masyarakat harus berkeadilan dan memperhatikan kelestarian lingkungan (alam). Temuan Afandi, Aang (2014), tentang pariwisata dikota Batu Malang, masyarakat yang berada di sekitar objek wisata yang dikelola oleh konsep CBT dari prinsip lingkungan akan lebih sejahtera dibandingkan dengan masyarakat yang berada di sekitar objek wisata yang dikelola dengan konsep non-CBT.

4.4 Perkembangan Pariwisata di Pantai Teluk Kiluan

Pantai Teluk Kiluan sudah memiliki daya tarik dan pesonanya tersendiri secara alami. Pantai yang memiliki beberapa pulau dengan pantai yang indah disekitarnya, keindahan karang yang membentuk sebuah kolam (Laguna), keindahan biota dalam laut yang dapat dijadikan tempat snorkling. Selanjutnya Pantai Teluk Kiluan yang memiliki keunikan keindahan alam pantai dan pegunungan, daerah singgah mamalia laut seperti lumba-lumba, paus pilot, dan juga aneka ikan *blue marlin* atau ikan tuhuk dan habitat-habitat laut lainnya seharusnya dapat sangat memikat dan menjadi magnet hati wisatawan. Namun kita ketahui secara pasti pengunjung Pantai Teluk Kiluan tidak cukup optimal. Hal itu dapat terlihat dari sepi pengunjung, seperti yang di kemukakan Rico Stefanus tentang wisatawan yang datang ke Pantai Teluk Kiluan 3 tahun terakhir,

“....dalam 22 buah villa dan *homestay* serta wilayah *camping ground* selama setahun hanya mampu menarik sekitar 3.000 orang wisatawan nusantara dan 1.800 orang wisatawan....” (RC)

Ibu-ibu rumah tangga yang biasanya ikut ke sawah hanya mendapatkan 30.000/ per hari yang bisa didapatkan ketika masa panen. Sehingga dengan ramainya wisatawan yang datang, mereka mampu memperoleh pendapatan 3 kali lipat dari biasanya. Selain itu perahu-perahu yang menepi dan tidak digunakan untuk melaut, bisa digunakan untuk mengantarkan wisatawan yang ingin melihat lumba-lumba yang sedang beratraksi di laut lepas di tengah laut.

Masih banyak potensi yang bisa dikembangkan oleh masyarakat untuk berperan aktif dalam memajukan wisata Pantai Teluk Kiluan. Potensi itu mengolah ikan hasil tangkapan nelayan menjadi abon atau

ikan kering. Hasil tangkapan ikan nelayan Pantai Teluk Kiluan sangat melimpah sehingga harga ikan merosot dan kurang menguntungkan nelayan. Terkadang pemilik *homestay* memberikan secara cuma-cuma sebagian tangkapannya kepada wisatawan. Meskipun Pantai Teluk Kiluan terkenal dengan makanan khasnya yaitu Ikan bumbu sate, namun makanan tersebut tidak bisa dijadikan oleh-oleh yang dibawa wisatawan luar kota karena akan basi di tengah perjalanan.

Oleh karena itu salah satu warga memiliki inisiatif untuk mengolah hasil tangkapan ikan menjadi abon dan ikan kering. Mulanya banyak masyarakat yang ikut-ikutan untuk membuat abon ikan namun lambat laun masyarakat tidak berani karena khawatir tidak ada pembeli.

Pemerintah telah memberikan fasilitas kepada masyarakat Pantai Teluk Kiluan berupa mesin pengolah ikan yang diberikan oleh Dinas Koperasi berikut pelatihan setiap bulannya dengan menggandeng Pokdarwis. Namun dalam perjalanannya masyarakat terbentur pasar untuk menjual hasil olahan ikan berbentuk abon tersebut.

Informasi dari salah satu pengunjung Nia, wisatawan lokal dari Jakarta mengatakan bahwa wisata Pantai Teluk Kiluan kurang menarik karena atraksi/aktivitas wisatanya kurang banyak akibatnya kurang menyenangkan, ditambah lagi apabila pengunjung yang sudah datang ke Pantai Teluk Kiluan tidak menemukan lumba-lumba sebagai ikon di pantai ini.

“....wisata disini bagus, saya dari Jakarta, sekali *Trip* paket biayanya 1,5 juta, tapi saya tadi gak ketemu lumba-lumba waktu nyeberang. Disini juga kurang atraksi wisata/aktivitas wisatanya, ya kalau untuk tenangnya nyaman sih kan di Jakarta bising” (N)

Wisatawan merasa tidak puas karena kurangnya aktivitas di Pantai Teluk Kilaun. Wisatawan berharap adanya spot *selfie* atau permainan yang menantang seperti *Flyng Fox* sehingga wisatawan yang berada di Pantai Teluk Kiluan tidak hanya datang istirahat dan makan saja. Hal ini diperkuat dengan pernyataan dari Sulaiman selaku sekretaris Desa:

“.....disini ini kurang atraksi/aktivitas wisata, gak ada tempat *selfie*, trus yang nyebrang gunain perahu juga cuma lihat lomba-lumba atau pergi renang ke kolam Laguna.....” (S)

Karakteristik dan prilaku wisatawan lokal dan wisatawan mancanegara memiliki keunikan tersendiri. Tempat yang sunyi, medan yang penuh tantangan, ombak yang tinggi, penuh cerita sejarah, etnik adalah beberapa tempat yang digandrungi oleh wisatawan mancanegara. Wisatawan mancanegara cenderung kurang suka dengan keramaian, banyaknya atraksi/aktivitas wisata dan *shopping* (Nesparnas, 2017). Karakter lainnya, dari sudut pandang yang terbalik: objek wisata ramai dikunjungi oleh wisatawan, atraksi/aktivitas wisata mumpuni, banyak pentas seni, biasanya wisata keluarga, senang kuliner, dan melakukan *shopping* terutama oleh-oleh (*souvenir*)

Berkurangnya jumlah wisatawan, tentu membuat masyarakat lebih khawatir untuk mengembangkan kegiatan usaha wisata mereka karena takut tidak laku. Akhirnya masyarakat hanya fokus dalam pendirian *homestay*, menjadi *Tour Guide*, dan menyewakan perahu, menyediakan makan.

Penyebab utama berkurangnya wisatawan, karena lomba-lumba yang menjadi ikon wisata Pantai Teluk Kiluan sudah jarang muncul di

perairan Pantai Teluk Kiluan. Hal ini disebabkan karena makanan lumba-lumba yaitu ikan-ikan kecil (ikan plagis) sebagai nutrisi dalam pusaran (*up-welling*) telah habis diburu oleh kapal besar. Berikut penjelasan dari Rico Stefanus selaku ketua Pokdarwis (Kelompok sadar wisata).

”...sekarang lumba-lumba jarang terlihat, karena pakan utama lumba-lumba sudah habis diambil sama kapal besar, sekali ambil bisa 1,5 Ton...” (RC)

Dari penjelasan emik tersebut bahwa kapal besar telah mengambil sebagian besar pakan lumba-lumba sehingga lumba-lumba mencari tempat lain yang banyak ikannya di perairan lain. Tentunya hal ini sangat disayangkan oleh Rico Stefanus yang menginisiasi Pantai Teluk Kiluan sebagai ekowisata yang berbasis lingkungan. Oleh karena Rico Stefanus berharap wilayah Pantai Teluk Kiluan segera ditetapkan sebagai wilayah konservasi. Berikut penjelasan Rico Stefanus:

“...saya berharap Pantai Teluk Kiluan ini segera ditetapkan menjadi kawasan konservasi, sebenarnya konsep sudah ada, sudah diberikan ke Kementrian, tapi masih diproses. Penetapan kawasan ini (1). Suaka alam (2) taman wisata perairan (3) taman nasional supaya ada regulasi kapal yang mau masuk, sehingga tidak merusak habitat...” (RC)

Dari emik diatas dapat disimpulkan bahwa keresahan tengah dirasakan oleh Rico Stefanus sebagai inisiator yang mendirikan wisata Teluk Kilaun. Rico Stefanus mengharapkan adanya campur tangan pemerintah untuk menetapkan kawasan Pantai Teluk Kiluan sebagai kawasan konservasi, sehingga kapal besar tidak bebas untuk masuk ke wilayah perairan Pantai Teluk Kiluan.

Selain berkurangnya lumba-lumba yang melewati perairan Pantai Teluk Kiluan, berkurangnya jumlah wisatawan diakibatkan

lingkungan sekitar kiluan yang semakin kotor, akibat banyaknya wisatawan yang meninggalkan sampah. Khususnya wisatawan yang berasal dari dalam negeri/lokal. Berikut penjelasan dari Eliyati;

“.....gitu ..lah banyak sampah sekarang, plastik-plastik , banyak turis yang mengeluh, kalo daun-daun mereka gak papa. Biasanya wisatawan yang berasal dari Indonesia. Kalo turis biasanya sampahnya ditaruh tas sampai ketemu tempat sampah...”(EL)

Perkembangan wisata di Pantai Teluk Kilun saat ini belum mengalami peningkatan, karena selain wisata lumba-lumba dan kolam lagunan tidak ada hal lain yang bisa menarik wisatawan untuk berkunjung. Pariwisata Pantai Teluk Kilun seharusnya juga menawarkan wisata budaya seperti di Tabanan Bali yang menawarkan wisata budaya Bali, sehingga wisatawan, khususnya wisatawan asing tertarik untuk berkunjung ke Pantai Teluk Kilun. Berikut penjelasan informen Sulaiman selaku sekretaris desa.

“.....tari-tari an ada juga disini, banyak turis yang cari dan mau latihan, cuma belum menjadi atraksi wisata ...” (S)

Ketika ditanya kapan tarian-tarian tersebut ditampilkan, Sulaiman menjawab sebagai berikut:

“.....kalo pas ada gubernur atau tamu dari Bandar Lampung datang, kita tari selamat datang...atau digunakan pada acara pesta perkawinan” (S)

Kondisi ini berbanding terbalik dengan keinginan Nia;

“..... inginnya sih kita dari jakarta ini ingin tau pentas budaya khusus daerah lampung.....” (N)

Dari emik di atas, dapat diambil kesimpulan, bahwa budaya bisa menjadi daya tarik bagi wisatawan untuk datang ke Pantai Teluk Kilun. Sayangnya masyarakat Kiluan belum bisa menangkap potensi ini. Tari-tarian khas Lampung ditampilkan hanya pada saat pejabat daerah yang berkunjung. Ditambah lagi masyarakat mulai mengikuti budaya

wisatawan yang datang berkunjung. Berikut Penjelasan Marhasan Samba:

“...iyaa bu, orang-orang disini sudah meningkat gaya hidupnya, sudah ada yang punya isi rumah bagus-bagus, punya mobil, bajunya juga ikut-ikutan wisatawan...” (MS)

Seiring dengan peningkatan pendapatan, terjadi perubahan gaya hidup pada masyarakat Kiluan. Bahkan cara berpakaian masyarakat Sekitar Pantai Teluk Kiluan juga sudah mulai mengikuti cara berpakaian wisatawan. Berikut penjelasan Eliyati:

“.....orang sini dulu pake sarung semua, turis pake celana pendek, sekarang orang sini ikut-ikutan...”(EL)

Perubahan gaya hidup terjadi akibat banyaknya wisatawan dari daerah lain yang berkunjung ke Pantai Teluk Kiluan. Kurangnya aktivitas wisata di Pantai Teluk Kiluan juga mengakibatkan menurunnya persepsi popularitas yang selama ini punya nilai jual.

Potret kegiatan masyarakat yang bergerak merespon fenomena untuk menangkap peluang dan potensi wisata yang dapat di tingkatkan melupakan koordinasi dengan masyarakat atau unit usaha lainnya lainnya maupun pemerintah. Seperti penjelasan dari Marhasan Samba:

“...itu kan tanahnya sendiri, kalo mau bangun *homestay* yah gak perlu lapor. Banyak yang seperti itu, rumahnya dipake buat nginap turis....jadi unit usaha kebanyakan jalan sendiri sendiri dan sama.....” (MS)

Banyaknya masyarakat yang mendirikan usaha *homestay* mengakibatkan persaingan usaha di Pantai Teluk Kiluan semakin ketat, Ketatnya persaingan menimbulkan banyak masyarakat yang mengalami penurunan pendapatan. Menurut Okazaki (2013) dalam menerapkan

CBT seharusnya memperhatikan prinsip manajemen, dimana masyarakat bersama-sama untuk membuat perencanaan dan pengorganisasian untuk memajukan wisata.

Prinsip manajemen juga dibutuhkan untuk mengorganisir *travel-travel* yang membawa wisatawan. Kurangnya koordinasi antar *travel* dan masyarakat sekitar mengakibatkan wisatawan yang datang “kecewa” ketika sudah datang di Pantai Teluk Kiluan. Berikut pernyataan dari Rico Stefanus

“...kita mengharapkan ada kerjasama *travel* dengan warga, seperti di Jogja, sehingga *travel* juga bisa mempromosikan Pantai Teluk Kiluan tidak hanya ke Pahawang”

Akibat kurangnya kerjasama dengan *travel* banyak wisatawan yang merubah tujuan yang awalnya ingin ke Pantai Teluk Kiluan beralih ke Pahawang. Hal tersebut disebabkan karena Pahawang lebih dekat dengan Bandar Lampung dan aksesnya lebih mudah. Rico Stefanus mengharapkan wisata Pantai Teluk Kiluan nantinya akan seperti wisata di Yogyakarta sehingga antar pelaku wisata bisa saling kerjasama dan mendukung perkembangan obyek wisata.

Di samping itu belum ada dukungan yang maksimal dari pemerintah untuk memperbaiki jalan di sekitar PantaiTeluk Kiluan dan wisatawan harus menempuh medan yang sulit juga lama untuk sampai di Pantai Teluk Kiluan. Berikut penjelasan dari Rico Stefanus:

“...akses untuk kesini masih susah, jalan masih banyak yang belum diperbaiki, berlubang Sudah ada dana desa, tapi dana desa tidak digunakan untuk pariwisata, saya berharap dana desa bisa digunakan untuk mengembangkan pariwisata....” (RC)

Berikutnya Rico Stefanus juga penuh harap terhadap dana desa untuk pengembangan pariwisata;

“....beberapa desa wisata di Indonesia telah menggunakan dana desa untuk memperbaiki infrastruktur di sekitar lokasi wisata. Hal ini mampu meningkatkan perkembangan lokasi pariwisata jadi wisatawan yang datang berkunjung....” (RC)

Permasalahan lain yang mempengaruhi perkembangan wisata Pantai Teluk Kiluan selain menurun yaitu akses jalan menuju Pantai Teluk Kiluan, juga belum cukupnya pasokan listrik dan sinyal internet yang masuk ke Pantai Teluk Kiluan. Dengan jarak tempuh antara 3 sampai 7 jam dari Bandar Lampung ke PantaiTeluk Kiluan mengharuskan wisatawan harus bermalam untuk dapat melihat Lumba-Lumba yang muncul sekitar pukul 5 pagi. Oleh karena itu fasilitas yang memadai sangat dibutuhkan oleh wisatawan.

Dengan kondisi ini bagi wisatawan untuk menikmati wisata Pantai Teluk Kiluan harus mengorbankan waktu dan biaya yang banyak. Fenomena ini ditangkap wisatawan dan calon wisatawan *trip* ke Pantai Teluk Kiluan mahal. Keluhan ini disampaikan Oleh Nia wisatawan asal Jakarta

“.... saya kesini menggunakan *travel agent* mulai dari penjemputan di bandara Radin Inten lampung ke destinasi, *homestay*, makan, ke kolam laguna gayau, nyeberang melihat lumba-lumba, *snorkling*, dan kembali ke bandara Radin Inten II.....per orang biayanya 1,5 juta rupiah....minep 1 malam....” Nia)

Faktor-faktor yang mengakibatkan lesunya perkembangan wisata Pantai Teluk Kiluan tentunya bukan berasal dari seluruh pelaku wisata saja yaitu swasta, masyarakat dan pemerintah. Kepala Dinas Pariwisata Bali Pitana, mengungkapkan bahwa untuk memajukan wisata. salah satu masalah internal besar, mendasar, dan kasatmata adalah masih suburnya "*gulma*" egosentris di antara pilar utama kepariwisataan itu

sendiri. Antara pemerintah (selaku pemegang kebijakan), industri sebagai pelaku pariwisata. Pembangunan kepariwisataan di Indonesia mencakup 4 pilar pembangunan kepariwisataan yakni: (1) destinasi; (2) pemasaran; (3) industri, dan (4) kelembagaan. Keempat pilar tersebut merupakan upaya perwujudan azas pembangunan dengan memerhatikan keanekaragaman, keunikan dan kekhasan budaya dan alam, serta kebutuhan manusia untuk berwisata.

Aspek kelembagaan meliputi perilaku sosial yang kajiannya adalah tentang nilai (*value*), norma (*norm*), *custom*, *folkways*, *usage*, kepercayaan, gagasan, doktrin, keinginan, kebutuhan, orientasi dan lain-lain. Sedangkan aspek keorganisasian meliputi peran, aktivitas, hubungan antar peran, integrasi sosial, struktur umum, struktur kewenangan atau kekuasaan, hubungan antar kegiatan dengan tujuan yang hendak dicapai. Kelembagaan harus terintegrasi dan saling menguatkan dengan 3 pilar lainnya (destinasi, pemasaran, dan industri).

Hal yang sama seperti diutarakan oleh Marhasan Samba;

“..... betul ...memang harus ada suatu kelembagaan sebagai badan pengelola wisata di sana, kami sebagai fihak pemda mengaminkan saja...terserah dengan kemufakatan warga kiluan.....” (MS)

Uraian di atas menyimpulkan pendapat bahwa lesunya perkembangan pariwisata di Pantai Teluk Kiluan penyebabnya adalah seperti tampilan gambar 4.15 di bawah ini

Gambar 4.15. Faktor Penyebab Lesunya Perkembangan Pariwisata di Pantai Teluk Kiluan



Sumber: Olahan penulis, 2019

4.5 Diskusi Teori dan Hasil Temuan

Pendapat Tasci *et al* (2003: 10-11) sejalan dengan pendapat Goodwin dan Santili (2009:5-6) yang menyatakan bahwa konsep pariwisata berbasis masyarakat (*Community Based Tourism*) dimaksudkan untuk meningkatkan

pertumbuhan ekonomi dengan melibatkan masyarakat miskin, yaitu mereka yang secara tradisional hidup sebagai petani atau nelayan, tinggal secara turun temurun di daerah yang potensial untuk pariwisatanya menjadi suatu sumber pendapatan. Pengembangan pariwisata berbasis masyarakat yang dimaksud untuk memberi peluang kepada masyarakat sekitarnya dengan kekuatan terbatas untuk mendapatkan berbagai akses yang tersedia di dunia pariwisata.

Pandangan selanjutnya dilontarkan Yoeti (2008:15), beliau mengatakan pariwisata merupakan usaha ekonomi kreatif yang berkembang sangat pesat di seantero dunia. Bermunculannya objek-objek pariwisata, akan mendorong masyarakat sekitarnya untuk mengembangkan akses layanan penyedia fasilitas-fasilitas pariwisata. Pariwisata dianggap sebagai sektor yang dapat diandalkan dalam meningkatkan pemerataan kesempatan berusaha, meningkatnya pendapatan masyarakat, serta pendapatan daerah maupun produksi secara nasional.

Pendapat Tasci *et al* (2003: 10-11) dan Goodwin dan Santilli (2009:5-6),serta Yoeti (2008:15), telah mendukung hasil temuan dalam penelitian ini, bahwa Ekonomi pariwisata yang tumbuh dan berkembang telah memberikan banyak manfaat kepada penduduk sekitar Pantai Teluk Kiluan dalam bentuk: meningkatkan pendapatan masyarakat, dengan menawarkan fasilitas keberadaan rumahnya sebagai *homestay* wisatawan, menyewakan perahu, terlibat dalam memandu wisata. Semakin banyak kreasi masyarakat berinteraksi dengan kebutuhan wisatawan makin potensial membuka kesempatan berusaha memajukan ekonomi kreatif dan secara *aggregate* menambah pendapatan daerah dan sedikit menggeser masyarakat miskin lebih bermartabat. Sejalan dengan temuan beberapa studi di atas, Hrubcova, *et al* (2016) dengan melakukan studi pariwisata di negara sedang berkembang, menghasilkan

temuan yang hampir tidak berbeda bahwa aktivitas pariwisata telah menjadi mesin penggerak perekonomian.

Konsep pengelolaan *Community Base Tourism* (CBT) yang mengedepankan pengelolaan partisipasi masyarakat mengatur tatakelola seluruh yang berkaitan dengan aktivitas pariwisata dari masyarakat, untuk masyarakat, termasuk komunitas yang berbaur di tengah masyarakat. Artinya masyarakatlah sebagai pemilik, *patner*, dan penikmat manfaatnya. Hasil temuan menunjukkan partisipasi masyarakat di sekitar Pantai Teluk Kiluan mulanya penuh dilakukan oleh masyarakat. Keterlibatan masyarakat dengan berbekal pengetahuan dan ketrampilan seadanya, *subsistence*, tradisional, justru kondisi ini membuat keeratan hubungan diantara masyarakat karena masing-masing pihak saling ketergantungan, teposeliro, gotongroyong, dan saling membutuhkan.

Yoppe (1996), Goodwin dan Santili (2009), mengatakan *Community Base Tourism* (CBT) mewujudkan pelestarian budaya, mempertahankan keunikan karakter dan budaya lokal dan harus memfasilitasi berkembangnya budaya lokal serta menghormati perbedaan budaya yang datang. Senada dengan Afandi, Aang (2004) yang melakukan studi pariwisata berkelanjutan di kota Batu menghasilkan temuan bahwa konsep CBT tetap mempertahankan prinsip budaya lokal sebagai bagian yang utuh dari karakter untuk membangun pariwisata. Todaro, 2009 menekankan terkadang pembangunan non fisik seperti budaya bersifat *intangibel* (tidak berwujud seperti *character building, social capital dan culture capital*). Pembangunan non fisik sering kali terabaikan karena sifatnya yang tidak mudah diukur. Tidak dapat dipungkiri, baik para ekonom maupun masyarakat awam sering kali menilai keberhasilan pembangunan ekonomi dari sudut pandang sektoral (variabel endogen) seperti tingkat output atau tingkat produksi sebagai dampak dari perubahan variabel eksogen seperti pengeluaran pemerintah, investasi dan konsumsi. Pembangunan ekonomi tidak

dapat terlepas dari faktor budaya. Budaya pada masyarakat pra industri berpegang pada nilai-nilai religius dengan perubahan yang lambat. Budaya pada masyarakat moderen lebih sekuler, rasional dan terbuka terhadap perubahan. Budaya yang berpegang pada nilai-nilai religius sering dipandang sebagai penghambat pembangunan ekonomi yang lebih mengedepankan nilai-nilai materialis. Pada kenyataannya tidak ada nilai-nilai religius yang bertentangan dengan pembangunan ekonomi. Apa yang sebenarnya terjadi adalah bagaimana sistem norma yang menjadi pegangan masyarakat tidak berkembang. Sistem norma sosial menentukan anggota masyarakat tertentu menempati posisi tertentu. Adanya keuntungan sepihak mendorong terjadinya mekanisme sosial politik masyarakat untuk mempertahankan sistem norma tertentu walaupun sudah tidak sesuai dengan perkembangan jaman. Perubahan sistem norma masyarakat yang mengubah strata sosial tidak harus mengubah karakter yang menjadi ciri khas masyarakat yang tercermin dari tata cara atau adat istiadat. Walaupun budaya tidak termasuk kedalam variabel yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi, pada kenyataannya budaya menjadi faktor *intangibile* yang berpengaruh pada variabel endogen dan eksogen. Bagaimana menempatkan budaya dalam pembangunan ekonomi adalah langkah strategis untuk memecahkan polemik keterkaitan ekonomi-budaya. Keikutsertaan masyarakat mengaitkan budaya lokal dengan pariwisata adalah wujud atas peran dalam pembangunan budaya.

Ditegaskan kembali oleh Yoppe (1996) bahwa, partisipasi sebagai *power* masyarakat untuk mengatasi persoalannya pada masa kini guna mencapai kehidupan yang lebih baik pada masa mendatang. Dijelaskan juga bahwa partisipasi merupakan redistribusi kekuatan, yang memungkinkan kaum terpinggirkan secara ekonomi dan politik untuk dilibatkan dalam perencanaan pembangunan masa depan.

Strategi pelaksanaan partisipasi dalam pengembangan pariwisata di Pantai Teluk Kiluan dengan cara melibatkan masyarakat dalam *sharing* informasi, merumuskan tujuan, menentukan kebijakan, mengalokasikan sumber-sumber pendanaan, mengoperasikan program, serta mendistribusikan manfaat yang diperoleh. Masyarakat dilibatkan sejak tahap perencanaan hingga implementasi dan pemerataan hasil-hasilnya. Partisipasi masyarakat lokal merupakan pijakan awal terhadap berbagai dampak strategis yang terkait dalam pengembangan pariwisata berbasis masyarakat. Partisipasi masyarakat menjadi penting bagi pencapaian pariwisata yang berkelanjutan dan berkualitas.

Menurut Wearing (2001) pengembangan ekonomi pariwisata karena sumber daya dan keunikan tradisi dan budaya yang melekat pada komunitas tersebut merupakan unsur penggerak utama kegiatan wisata memerlukan peran masyarakat lokal. Di lain pihak, komunitas lokal yang tumbuh dan hidup berdampingan dengan suatu objek wisata menjadi bagian dari sistem ekologi yang saling kait mengait. Keberhasilan pengembangan ekonomi pariwisata tergantung pada tingkat penerimaan dan dukungan dari masyarakat lokal.

Pendekatan partisipatif dalam pengelolaan pariwisata menimbulkan kepekaan/kesadaran (*social Awareness*). *social Awareness* ialah sebagai kesadaran akan masalah-masalah yang dihadapi oleh masyarakat dan komunitas yang berbeda setiap hari untuk menyadari kesulitan masyarakat atau menyadari keadaan orang lain (empati).

Setiap tindakan dan perilaku yang diperbuat seseorang atau organisasi yang akan membawa suatu perubahan adalah bagian dari politik, artinya kegiatan dalam sistem pembangunan negara melalui pembagian-pembagian kekuasaan atau pendapatan untuk suatu *goals* dalam kesepakatan, termasuk kesepakatan pada pengembangan pariwisata. Pertimbangan politik harus

beriringan dengan pelibatan tokoh masyarakat dan komitmen peran dari pemerintah (Yoppe, 1966).

Dalam pengembangannya, pariwisata melibatkan tiga pelaku utama, diantaranya adalah pemerintah, swasta, dan masyarakat lokal. Pariwisata berbasis lokal (*Community Based Tourism*) merupakan konsep dimana masyarakat lokal ikut serta berpartisipasi dalam perencanaan, pengelolaan, dan pengambilan keputusan. Hal ini sejalan dengan pandangan Housler (2009) yang menyatakan bahwa "CBT merupakan bentuk pariwisata yang memberikan kesempatan kepada masyarakat lokal untuk terlibat secara langsung serta melakukan pengendalian dalam manajemen pengelolaan pariwisata.

Pengelolaan dan pengembangan pariwisata berbasis CBT dari sisi peran pemerintah tidak terlalu dominan karena prinsip dasar CBT itu dari (milik), dikelola, sebagai *partner*, dan untuk masyarakat. Dengan demikian pemerintah sama sekali bukan merupakan peranan utama tetapi penting karena dalam proses politik dukungan, arahan, bantuan serta koordinasi pembangunan pariwisata yang kebijakannya di buat oleh komunitas maupun pemerintah daerah harus merupakan gayung bersambut. Artinya dari hilir ke hulu atau dari hulu ke hilir akan terkuak suatu benang merah bagaimana pengembangan pariwisata dimasa yang akan datang.

Konsep wisata berbasis masyarakat awalnya dicetuskan oleh Rico Stefanus dengan mendirikan Yayasan Cikal sebagai pelopor terbentuknya ekowisata di Pantai Teluk Kiluan. Ekowisata merupakan konsep pariwisata yang mencerminkan kecintaan terhadap lingkungan, keseimbangan alam, dan kelestarian lingkungan (Damanik & Weber, 2006:38). Ekowisata sendiri merupakan bentuk tanggung jawab dengan cara melakukan konservasi lingkungan dan alam dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat lokal. Berikut keuntungan yang akan diperoleh dari adanya kegiatan ekowisata

ini, diantaranya adalah: 1) timbulnya rasa peduli terhadap alam dan budaya, 2) menumbuhkan rasa cinta terhadap lingkungan alam dan budaya, 3) menghormati nilai-nilai budaya dan agama masyarakat sekitar, 4) pengembangan sektor wisata harus melalui musyawarah dan disetujui oleh masyarakat setempat, 5) taat peraturan perundang-undangan, 6) memberikan kepuasan bagi warga sekitar dan para wisatawan. Yayasan Cikal mengajak masyarakat untuk ikut serta dalam menjalankan wisata di Teluk Kiluan dengan menyewakan perahu kepada wisatawan yang ingin menyeberang laut dan melihat lumba-lumba.

Paparan di atas tentang konsep konservasi sebenarnya telah ada dan diperkenalkan kepada manusia sejak dahulu kala, meskipun konsep konservasi tersebut masih bersifat konservatif dan eksklusif (kerajaan). Konsep yang konservatif dan eksklusif adalah konsep kuno konservasi tapi cikal bakal dari konsep modern konservasi. Artinya konsep modern konservasi menekankan pada upaya memelihara dan memanfaatkan sumberdaya alam secara bijaksana dengan tujuan kelestarian lingkungan. Selanjutnya masih dalam acuan Todaro (2009) mengatakan bahwa pertumbuhan ekonomi adalah peningkatan kemampuan suatu negara (daerah) untuk menyediakan barang-barang ekonomi termasuk kebutuhan akan layanan dan produk pariwisata bagi penduduknya, yang terwujud dengan adanya kenaikan *output* nasional secara terus-menerus yang disertai dengan kemajuan teknologi serta adanya penyesuaian kelembagaan, sikap dan ideologi yang dibutuhkannya. Dengan kata lain pengembangan pariwisata pantai merupakan bagian faktor produksi, atau ujud barang modal yang dapat menciptakan kembali produk-produk turunan, serta investasi dalam pembangunan

Banyaknya masyarakat yang mendirikan usaha *homestay* mengakibatkan persaingan usaha di Pantai Teluk Kiluan semakin ketat, Ketatnya persaingan menimbulkan banyak masyarakat yang mengalami penurunan pendapatan.

Menurut Okazaki (2013) dalam menerapkan CBT seharusnya memperhatikan prinsip manajemen, dimana masyarakat bersama-sama untuk membuat perencanaan dan pengorganisasian untuk memajukan wisata.

Prinsip manajemen juga dibutuhkan untuk mengorganisir *travel-travel* yang membawa wisatawan. Kurangnya koordinasi antar *travel* dan masyarakat sekitar mengakibatkan wisatawan yang datang “kecewa” ketika sudah datang di Pantai Teluk Kiluan. Akibat kurangnya kerjasama dengan *travel* banyak wisatawan yang merubah tujuan yang awalnya ingin ke Pantai Teluk Kiluan beralih ke Pahawang. Hal tersebut disebabkan karena Pahawang lebih dekat dengan Bandar Lampung dan aksesnya lebih mudah. Rico Stefanus mengharapkan wisata Pantai Teluk Kiluan nantinya akan seperti objek wisata di Yogyakarta sehingga antar pelaku wisata bisa saling kerjasama dan mendukung perkembangan obyek wisata. Kolaborasi yang kurang kuat antar komunitas, antar destinasi, pemerintah daerah, swasta dan individu penyebab asimetris informasi. Informasi yang asimetris melahirkan problematika pariwisata: tingginya biaya pengelolaan, jarak tempuh menjadi lama, sulit menggandeng investor, dan berujung pada penurunan wisatawan yang berkunjung.

Penguatan Kelembagaan pariwisata menjadi penting karena selain asosiasi, amanah UU 10 tahun 2009 terdapat 2 lembaga pariwisata yang harus dibentuk di daerah diantaranya Badan Promosi Pariwisata Daerah dan Gabungan Industri Pariwisata (GIPI). Kedudukan kelembagaan pariwisata yang tidak kalah penting lainnya adalah Kelompok Sadar Wisata, LSM pencinta lingkungan, badan pengelola pariwisata di tingkat daerah dan di tingkat destinasi serta pengelola daya tarik wisata. Sektor pariwisata merupakan usaha yang pada umumnya sangat menjanjikan untuk meraih pendapatan di daerah. Meskipun di level pedesaan secara ekonomi pendapatan dari pariwisata belum signifikan namun secara umum telah membawa telah ikut mendorong pertumbuhan

ekonomi regional Provinsi Lampung. Berdasarkan data, selama kurun waktu lima tahun (2012-2017) pertumbuhan ekonomi Lampung mencapai 5 hingga 6 persen. Jika melihat kondisi di lapangan terhitung sejak tahun 2016, Provinsi Lampung memiliki 350 objek wisata berbentuk objek wisata alam maupun objek wisata buatan seperti: objek wisata hiburan umum berbentuk taman, sejarah, alam dan tirta, budaya, agamis religius, objek agro, bahari, serta objek wisata buatan. Objek atau destinasi wisata tersebut tersebar di 15 kabupaten/kota. Hal ini perlu mendapatkan perhatian khusus sebagai peluang usaha yang menghasilkan *multiplier effects* yang luas dibandingkan dengan usaha berbasis pengelolaan industri hasil bumi seperti minyak atau kayu. Dalam perkembangannya usaha-usaha pariwisata mempunyai karakteristik dalam pelayanan dan standar operasional yang berbeda namun tetap mengacu pada standar industri. Sebagai contoh usaha akomodasi telah terbagi menjadi beberapa golongan, mulai dari *homestay*, hotel melati sampai dengan hotel berbintang.

Namun demikian, dari semua jenis usaha tersebut akan saling terintegrasi pada produk paket wisata. Usaha perjalanan wisata menawarkan paket yang berisikan daya tarik, atraksi wisata, dan usaha jasa lainnya. Diperlukan jalinan kemitraan yang sinergis antara pemerintah dan para pelaku wisata agar pariwisata dapat berkembang dengan baik dalam wadah kelembagaan pariwisata. Oleh karena itu, perlu adanya bentukan badan pengelola dan disusun pelatihan kelembagaan pariwisata yang bertujuan untuk memberikan pengetahuan dan kemampuan agar mampu membuat perencanaan pengembangan kelembagaan pariwisata yang sesuai dengan karakteristik daerah.

Sinergitas *Stakeholder* dalam pengembangan pariwisata melalui perencanaan pariwisata terintegrasi dan kebutuhan kelembagaan pariwisata, membangun kemitraan dan SDM pariwisata, pembinaan usaha jasa pariwisata

dan pembentukan asosiasi dan lembaga pendukung pariwisata, adalah beberapa hal yang perlu penguatan dalam sebuah kelembagaan berbentuk badan pengelola pariwisata.

Faktor-faktor yang mengakibatkan penurunan perkembangan wisata Pantai Teluk Kiluan tentunya bukan berasal dari seluruh pelaku wisata saja yaitu swasta, masyarakat dan pemerintah. Kepala Dinas Pariwisata Bali Pitana, mengungkapkan bahwa untuk memajukan wisata. salah satu masalah internal besar, mendasar, dan kasatmata adalah masih suburnya egosentris di antara pilar utama kepariwisataan itu sendiri. Antara pemerintah (selaku pemegang kebijakan), industri sebagai pelaku pariwisata. Pembangunan kepariwisataan di Indonesia mencakup 4 pilar pembangunan kepariwisataan yakni: (1) destinasi; (2) pemasaran; (3) industri, dan (4) kelembagaan. Keempat pilar tersebut merupakan upaya perwujudan azas pembangunan dengan memerhatikan keanekaragaman, keunikan dan kekhasan budaya dan alam, serta kebutuhan manusia untuk berwisata.

Menurut Suansri (2003) ada lima prinsip dasar CBT yang meliputi prinsip ekonomi, sosial, budaya, politik dan lingkungan.

1. Prinsip ekonomi yaitu: (a) terciptanya lapangan pekerjaan sektor pariwisata, (b) timbulnya sumber pendapatan masyarakat lokal dari pengembangan pariwisata, (c) adanya dana untuk pengembangan komunitas, (d) pengentasan kemiskinan, (e) meningkatnya kualitas hidup, dan (f) distribusi keuntungan secara adil.
2. Prinsip sosial yaitu (a) peningkatan kebanggaan komunitas, (b) pembagian peran yang adil dalam komunitas terkait dengan gender dan antar generasi, (c) pendekatan partisipatif, (d)

- melibatkan komunitas, (e) meningkatkan kesadaran sosial masyarakat.
3. Prinsip budaya yaitu (a) mendorong pertukaran budaya, (b) mempertahankan keunikan karakter budaya lokal, (c) penghormatan masyarakat pada budaya yang lain yang berbeda, (d) kemandirian dalam pemberdayaan budaya, dan (e) pelestarian budaya.
 4. Prinsip politik yaitu (a) peningkatan partisipasi penduduk lokal, (b) peningkatan kekuasaan komunitas yang lebih luas dan (c) mekanisme yang menjamin hak masyarakat dalam pengelolaan sumber daya alam, dan (d) peran pemerintah.
 5. Prinsip lingkungan yaitu (a) pengembangan daya dukung (b) sistem pembuangan sampah yang ramah lingkungan dan (c) kepedulian kepada lingkungan

Berangkat dari uraian di atas maka dapat dikatakan pengelolaan ekonomi pariwisata di Pantai Teluk Kiluan secara umum mengikuti konsep *Community Based Tourism (CBT)*. Beberapa karakteristik yang melekat dalam CBT adalah: prinsip ekonomi, budaya, sosial, dan politik serta lingkungan. Namun ada karakteristik ikut berafiliasi seperti tumbuh pemilik modal bermain dalam mengembangkan ekonomi pariwisata di Pantai Teluk Kiluan. Selain pemilik modal perlu juga campurtangan karakteristik lain yakni manajemen (koordinasi) dan badan pengelola sebagai lembaga yang bertanggungjawab.

Faktor-faktor penghambat perkembangan ekonomi pariwisata di Pantai Teluk Kiluan juga didukung dengan pendapat G.A. Schmoll dalam Yoeti (2008) yang mengatakan bahwa kepuasan wisatawan tidak akan bisa hanya dilayani dengan a *single services*, tetapi membutuhkan bermacam-macam pelayanan. Beberapa pelayanan tersebut seperti: (1) *movement*, pelayanan selama

perjalanan; memerlukan transportasi dari dan ke destinasi, melihat lihat dan berwisata (2) *accomodation*, pelayanan setelah tiba di destinasi membutuhkan penginapan, hotel, *camping sites* atau *homestay* (3) *catering*, pelayanan makan minum (4) *activities at destination*, atraksi dan suguhan di destinasi. Namun beberapa harapan akan kebutuhan pelayanan untuk wisatawan belum bisa memaksimalkan kepuasannya dikarenakan keterbatasan.

Fariborz, Aref (2011) studi penelitiannya menemukan aspek kebersamaan (*sense of community*) dalam hal komitmen terhadap menjaga lingkungan, saling melengkapi, koordinasi dalam menjalankan jenis usaha, mempertahankan budaya menjadi katalis terhadap pengembangan ekonomi pariwisata. Seirama juga dengan Marre & Weber (2007) yang mengatakan kebersamaan merupakan modal utama dalam partisipasi masyarakat untuk mendorong perkembangan pariwisata.

Selanjutnya aksesibilitas yang baik menuju destinasi seperti jalan raya, akan mempengaruhi jarak tempuh, dan pada akhirnya akan mempengaruhi biaya yang dikeluarkan wisatawan. Balli dan Tsui (2016) temuan penelitiannya mengatakan bahwa aspek aksesibilitas dianggap hal yang vital untuk mendukung berkembangnya suatu kawasan pariwisata, karena *shock* pada aksesibilitas yang baik mampu memicu wisatawan berkunjung ke destinasi lain yang tidak direncanakan.

Faktor-faktor yang mengakibatkan lesunya perkembangan wisata Pantai Teluk Kiluan tentunya bukan berasal dari seluruh pelaku wisata saja yaitu swasta, masyarakat dan pemerintah. Pitana (Kepala Dinas Pariwisata Bali) pada saat pengukuhan guru besarnya, mengungkapkan bahwa untuk memajukan wisata. salah satu masalah internal besar, mendasar, dan kasatmata adalah masih suburnya "*gulma*" egosentris di antara pilar utama kepariwisataan itu

sendiri. Antara pemerintah (selaku pemegang kebijakan), industri (sebagai pelaku pariwisata).

Berdasarkan penyebab perkembangan pariwisata di Pantai Teluk Kiluan lesu, semua bermuara pada apakah ada badan pengelola pariwisata, dan bagaimana peran dan fungsinya badan pengelola pariwisata itu, serta apakah sikap, norma, aturan dan sebagainya yang melekat pada *institutional frame work* telah menjadi *rule of the game*. Menata kerangka institusi membuat pembangunan pariwisata berkembang dan berimplikasi positif terhadap masyarakat.

Teluk Kiluan telah dicanangkan oleh Pemerintah Kabupaten Tanggamus menjadi salah satu wisata yang berbasis komunitas dengan mengedepankan partisipasi masyarakat. Namun dalam penerapannya harus tidak bisa dilepas begitu saja harus juga mengagandeng investor, padunya masyarakat dengan investor menambah stamina dan amunisi dalam mengelola pariwisata. Problematika utama wisata alam adalah jarak, ini yang mendorong infrastruktur segera disediakan.

Pembangunan infrastruktur dan pengembangan ekonomi (pembangunan pariwisata) seharusnya memiliki hubungan timbal balik, karena pembangunan infrastruktur menimbulkan ekspansi ekonomi melalui efek rembetan. Sementara ekspansi ekonomi menimbulkan kebutuhan untuk memperluas infrastruktur yang ada, untuk menyerap makin besarnya aliran barang dan orang yang beredar atau bersirkulasi di seluruh perekonomian. Namun, kalau infrastrukturnya tidak dapat menyerap peningkatan kegiatan ekonomi (dan tidak cukup banyak infrastruktur baru yang dikembangkan) maka akan terjadi masalah, seperti pembuluh darah arteri yang tersumbat dalam tubuh manusia, yang menyebabkan kondisi bahaya yang mengancam kehidupan karena darahnya tidak bisa mengalir.

Suman, A (2009) mengatakan infrastruktur harus dijejer dalam jejeran pembangunan paling depan. Ketika kondisi jalan baik maka lirikan investorpun datang menghampiri, kemudian hasrat menyediakan atraksi pariwisata dan sebagainya muncul karena layak dan *feasible*. Todaro (2009) menempatkan infrastruktur sebagai faktor produksi modal dalam fungsinya meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Ketika keadaan infrastruktur di sebuah negeri lemah, itu berarti bahwa perekonomian negara itu berjalan dengan cara yang sangat tidak efisien. Biaya logistik yang sangat tinggi, berujung pada perusahaan dan bisnis pariwisata yang kekurangan daya saing (karena biaya bisnis yang tinggi). belum lagi adengan munculnya ketidakadilan sosial, misalnya, sulit bagi sebagian penduduk untuk berkunjung menikmati fasilitas rekreasi, karena perjalanannya terlalu susah atau mahal.

Demand Function for Croatian Tourist Product: A Panel Data Approach oleh Skufflic dan Stokovic (2011) merupakan studi yang mengkaji pariwisata adalah sektor yang melibatkan banyak kegiatan ekonomi yang merespons permintaan yang berbeda dengan karakteristik spesifik di tingkat nasional dan internasional. Menurut hasil yang diperoleh disimpulkan bahwa pendapatan di negara mitra dagang utama secara positif terkait dengan permintaan pariwisata, dengan elastisitas jangka panjang sekitar 3,3. Hasilnya juga menunjukkan bahwa kenaikan harga akomodasi menurunkan permintaan produk wisata. Koefisien elastisitas harga menunjukkan bahwa pelanggan sensitif terhadap harga tinggi karena koefisiennya adalah 0,7. Perusahaan wisata harus mempertimbangkan kualitas situs mereka sendiri dan menyediakan kesempatan untuk pemesanan secara *online*. Dengan memperhatikan model konsumen modern semakin terpengaruh oleh internet, dan yang kurang penting adalah cara iklan klasik. Berikutnya infrastruktur yang kurang layak mengurangi kunjungan wisatawan juga ditunjukkan data riil kunjungan wisatawan ke Pantai Teluk Kiluan cenderung

menurun pada tahun 2016-2018 rata-rata pertahun dikunjungi sekitar 3000-3500 wisatawan yang sebelumnya sempat “booming” pada tahun 2008-2015 rata-rata wisatawan yang berkunjung pertahun dalam kisaran 10.000-12000 wisatawan.

Menurut Okazaki (2013) wisata CBT menuntut partisipasi masyarakat tidak hanya sebagai pelaku wisata, tetapi juga sebagai pembuat rencana dan pembuat keputusan mengenai wisata di daerahnya. Artinya harus terkolaborasi dengan *stake holder* lainnya. Geoff Wall dari University of Waterloo, Canada, menyatakan masih terdapat kesenjangan antara teori dan kenyataan dalam mengikutsertakan komunitas lokal untuk pembangunan pariwisata. Ahli pariwisata berkelanjutan itu mengatakan komunitas yang memiliki cara hidup dan potensi berbeda-beda di setiap tempat pada dasarnya adalah modal utama dalam industri pariwisata. Namun pada kenyataannya, keterlibatan komunitas, pemerintah dan investor lokal dalam suatu kelembagaan sebagai badan pengelola kepariwisataan sangat diperlukan. Keberadaannya dengan harapan akan merencanakan dan melaksanakan kemudian mengevaluasi baik organisasi yang terlibat maupun penyesuaian tatakelola agar terjadi peningkatan perkembangan pariwisata berkelanjutan yang mengutamakan peningkatan kualitas kehidupan masyarakat setempat secara ekonomi dan non-ekonomi.

Tinjauan teoritis pertumbuhan ekonomi dapat didefinisikan sebagai: perkembangan kegiatan dalam perekonomian yang menyebabkan barang dan jasa yang diproduksi dalam masyarakat bertambah. Perkembangan kemampuan memproduksi barang dan jasa sebagai akibat pertambahan faktor-faktor produksi pada umumnya tidak selalu diikuti oleh pertambahan produksi barang dan jasa yang sama besarnya. Pertambahan potensi memproduksi kerap kali lebih besar dari pertambahan produksi yang sebenarnya. Dengan demikian perkembangan ekonomi adalah lebih lambat dari potensinya.

Menurut Adam Smith, sumber-sumber alam merupakan wadah yang paling mendasar dari kegiatan produksi suatu masyarakat. Jumlah sumber-sumber alam yang tersedia merupakan batas maksimal bagi pertumbuhan perekonomian tersebut. Artinya, selama sumber-sumber ini belum sepenuhnya dimanfaatkan maka pertumbuhan ekonomi masih tetap bisa ditingkatkan. Selanjutnya unsur jumlah penduduk dan stok kapital menentukan besarnya output masyarakat dari tahun ke tahun. Tetapi apabila output terus meningkat, sumber-sumber alam akhirnya akan sepenuhnya dimanfaatkan (dieksploitasi) hingga batas ketersediaannya. Tingkat ketersediaan sumber daya alam ini akan menjadi batas atas dari pertumbuhan suatu perekonomian. Pertumbuhan ekonomi (dalam arti pertumbuhan output dan pertumbuhan penduduk) akan berhenti apabila batas atas ini dicapai.

Unsur yang kedua adalah sumber daya manusia atau jumlah penduduk. Dalam proses pertumbuhan output, unsur ini dianggap mempunyai peranan pasif, dalam arti bahwa jumlah penduduk akan menyesuaikan dengan kebutuhan tenaga kerja. Misalnya apabila stok kapital yang tersedia membutuhkan pekerja 1 juta orang untuk menggunakannya, sementara jumlah tenaga kerja yang tersedia hanya 900 ribu orang maka jumlah penduduk yang akan menempati pekerjaan itu akan cenderung meningkat sehingga tenaga kerja yang tersedia akhirnya akan mencapai 1 juta orang. Unsur produksi yang ketiga yaitu stok kapital, yang secara aktif menentukan output. Smith memang memberikan peranan sentral kepada pertumbuhan stok kapital atau akumulasi kapital dalam proses pertumbuhan output. Apa yang terjadi dengan tingkat output tergantung pada apa yang terjadi pada stok kapital. Di samping itu laju pertumbuhan output juga tergantung pada laju pertumbuhan stok kapital. Pertumbuhan itu akan terus melaju hingga akan dibatasi oleh ketersediaan sumber daya alam dan dukungan

sumber daya manusia yang terampil. Peranan modal dalam teori pertumbuhan menempati posisi sentral yang biasanya terakumulasi melalui tabungan.

Dalam memproduksi *output*, faktor modal dan tenaga kerja biasanya dikombinasikan dalam berbagai model kombinasi. Teori-teori mengenai pertumbuhan yang sudah dikenal luas salah satunya adalah teori pertumbuhan neoklasik yang dikembangkan oleh Solow. Teori ini dibuat sebagai respon atas model Harrod-Domar yang mengasumsikan rasio *capital-output* konstan. Model Solow mendefinisikan fungsi produksi yang memiliki sifat bahwa faktor-faktornya saling bersubstitusi secara kontinyu, dan diasumsikan tiap faktor produksi mengalami *diminishing return*. Solow memulai dengan membentuk fungsi produksi:

$$Y = F(K, L)$$

Dimana

Y : Output
K : Kapital
L : Tenaga Kerja

Solow mengasumsikan fungsi produksi ini merupakan *constant return to scale*, yang berarti bahwa jika semua input dinaikkan dengan pengalihan tertentu, output akan naik dengan pengalihan yang sama.

Semakin banyak *Input* yang digunakan semakin besar *Output* barang dan jasa yang dihasilkan dari sisi produksi kinerja meningkat penyebabnya perekonomian tumbuh. Menurut Adam Smith, proses pertumbuhan akan terjadi secara simultan dan memiliki hubungan keterkaitan satu dengan yang lain. Timbulnya peningkatan kinerja pada satu sektor (sektor pariwisata) akan meningkatkan daya tarik bagi pemupukan modal, mendorong kemajuan teknologi, meningkatkan spesialisasi, dan memperluas pasar. Hal ini akan

mendorong pertumbuhan ekonomi menjadi semakin pesat. Pertumbuhan ekonomi satu Negara akan mulai mengalami perlambatan jika daya dukung alam dan keterampilan penduduk tidak mampu lagi mengimbangi aktivitas ekonomi yang sedang berlangsung. Keterbatasan sumber daya merupakan faktor yang dapat menghambat pertumbuhan ekonomi pariwisata, bahkan dalam perkembangannya hal tersebut justru menurunkan tingkat pertumbuhan ekonomi. Penurunan pertumbuhan ekonomi akan terus terjadi dikarenakan mata rantai tabungan, akumulasi modal, dan investasi tetap terjalin dan berkaitan erat satu sama lain. Jika investasi rendah maka kemampuan menabung akan turun sehingga akumulasi modal akan mengalami penurunan pula. Begitu pula, jika penduduk tidak memiliki keahlian yang relevan untuk menjalankan produksi maka laju investasi juga akan rendah dan akan menurunkan pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi yang lamban mengancam perkembangan pembangunan pariwisata.

BAB V

PARIWISATA NON-COMMUNITY BASE (NON-CBT) DI SITUS PANTAI TANJUNG SETIA DALAM PERKEMBANGAN

Bagian ini penulis akan sajikan potret situs Pantai Tanjung Setia, telaah informan penelitian, penerapan konsep Non-CBT, dan perkembangan pariwisata.

Potret situs pariwisata akan menguraikan bagaimana letak secara geografis, daya tarik wisatawan, serta fasilitas yang ada di situs Pantai Teluk Kiluan.

Penerapann konsep Non-CBT di situs Pantai Tanjung Setia menjelaskan beberapa prinsip atau indikator dari konsep pengelolaan pariwisata Non-CBT.

Selanjutnya bagaimana pariwisata itu berkembang atau tidak dapat dilihat pada sub-bagian perkembangan pariwisata di situs Pantai Tanjung Setia. Diakhir pemaparan akan didiskusikan teori dan hasil temuan.

5.1 Potret Situs Pantai Tanjung Setia

Pantai Tanjung Setia yang terletak di Pesisir Barat dari Provinsi Lampung memiliki garis pantai yang cukup panjang sehingga banyak yang menjuluki sebagai negeri seribu pantai. Tanjung Setia merupakan pantai yang berada di jalur Samudera Hindia memiliki ombak yang cukup stabil, hal ini tentunya menarik para peselancar untuk menikmati ombak yang ada di pantai tersebut.

Selain itu, panorama yang ada disekitar Pantai Tanjung Setia yang sangat indah, memiliki hamparan terumbu karang yang cantik serta terdapat berbagai jenis hewan laut semakin memperindah kawasan ini.

Hal lain yang menarik minat wisatawan untuk berkunjung ke Pantai Tanjung Setia adalah pemandangan sunset yang begitu memukau. Hal yang

paling menarik minat wisatawan adalah ombak yang dimiliki Tanjung Setia. Hal ini menjadi daya tarik utama bagi wisatawan yang sangat menyukai olahraga berselancar. Bahkan banyak sumber yang menyatakan bahwa ombak di pantai Tanjung Setia merupakan ombak terbaik di dunia.

Tanjung Setia yang berada di ujung barat Lampung menyebabkan akses menuju pantai ini mulanya cukup sulit, namun seiring berjalannya waktu kondisi perlahan-lahan berubah, sudah mulai banyak fasilitas angkutan yang digunakan untuk mempermudah wisatawan menuju pantai Tanjung Setia. Wisatawan yang berkunjung di daerah ini dapat menikmati fasilitas yang ada di daerah Tanjung Setia. Terdapat beberapa jenis penginapan seperti losmen, *cottage*, motel ataupun hotel mewah, bilyard, kolam renang, tenis meja. Beberapa fasilitas tersebut seperti pada gambar 5.1

Gambar 5.1 Fasilitas Cottage, Bilyard, dan Ombak Pantai Tanjung Setia



Foto Fasilitas Cottage, Bilyard, dan Ketinggian Ombak Pantai Tanjung Setia
Sumber: Dokumentasi Penelitian

5.2 Telaah Informan Penelitian

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan 6 informan sebagai penyedia informasi untuk memberikan gambaran umum terkait perkembangan, implikasi dan desain pariwisata terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat di Pantai Tanjung Setia. Informan tersebut meliputi wisatawan dan masyarakat sekitar Pantai Tanjung Setia, pelaku usaha wisata, dan pemangku kebijakan. Informasi ini diperoleh dari pemahaman serta praktik yang dilakukan oleh masyarakat dan wisatawan melalui wawancara mendalam. Berikut daftar informan yang digunakan dalam penelitian ini:

Tabel. 5.1 Daftar Informan di Pantai Tanjung Setia

No.	Nama Informan	Kode Informan	Pekerjaan/ Jabatan
1.	Robert dan Nia	RB	Wisatawan Asing
2.	Dulhayyin	DY	Masyarakat/Sesepuh
3.	Sri Zahara	SZ	Pemilik Warung
4.	Rina	RN	Ibu Rumah Tangga
5.	John Eduar	JE	Pemkab
6.	Amin	A	Supir/Pemilik Travel

(Sumber: Data diolah peneliti, 2018)

5.3. Penerapan Konsep Non-CBT di Pantai Tanjung Setia

Neraca satelit pariwisata daerah provinsi Lampung menunjukkan bahwa jumlah wisatawan di provinsi Lampung semakin meningkat setiap tahunnya pada tahun 2016 jumlah wisatawan nusantara mencapai 7.381.1774 orang, sedangkan jumlah wisatawan mancanegara mencapai 115.053 orang. Selain itu, menurut Jhon Eduar pegawai pemerintah Kabupaten Pesibar, menyatakan bahwa pada awal tahun 2017 kunjungan wisatawan mencapai 12 ribu orang,

sedangkan pada awal tahun 2018 meningkat sebanyak 15 ribu orang. Kondisi ini mengakibatkan permintaan akan barang dan jasa turunannya semakin meningkat. Permintaan ini terlihat berupa fasilitas layanan jasa dan konsumsi.

Besarnya kunjungan wisatawan ke Pantai Tanjung Setia umumnya didominasi oleh wisatawan asing untuk menikmati pemandangan sunset yang begitu memukau, dan gulungan ombak baginya wisatawan mancanegara cocok untuk olahraga berselancar. Bahkan banyak sumber yang menyatakan bahwa ombak di pantai Tanjung Setia merupakan ombak terbaik di dunia. Dikutip dari pendapat Jhon Eduar terkait dengan jenis wisatawan yang datang ke Pantai Tanjung Setia

“....tahun 2014 sampai tahun 2017 itu banyak wisatawan yang datang dari lokal tapi kalo dibandingin dengan mancanegara ...ya lebih banyak wisatawan mancanegara....” (JE)

Hal serupa juga dipaparkan oleh Sri Zahara dengan menggunakan bahasa daerah lampung pesisir, beliau adalah pemilik warung pertama di sekitar Pantai Tanjung Setia;

“..... nyak perhatikan turis sai mit Pattai lamon turis anjak luagh negeri (saya perhatikan wisatawan yang datang ke Pantai banyak wisatawan dari luar negeri)....” (SZ)

Sri Zahara sebuah potret kecil saja bentuk partisipasi masyarakat, bagisn kecil juga dari masyarakat yang melihat pariwisata merupakan peluang/potensi ekonomi. Meskipun Pantai Tanjung Setia dikelola dengan konsep Non-CBT, tentunya harapan besar masyarakat jangan sampai sepenuhnya didominasi pemilik modal. Hal lain yang membuat ironis masyarakat ketika ingin berpartisipasi terkendala dengan ketrampilan, pendidikan, pendanaan, bahasa dan sebagainya.

Gambar 5.2 Warung Sri Zanaria



Foto Warung Sri Zanaria (kerudung coklat)

Sumber: Dokumentasi Penelitian

Uniknya di Lampung pada umumnya masyarakat berbahasa Indonesia, karena Lampung merupakan daerah yang sangat majemuk dan beragam suku bangsa. Masyarakat asli Lampung jumlahnya sedikit, hanya sekitar 25-30 persen (Lampung Dalam Angka, 2018) dibandingkan dengan pendatang/transmigran umumnya dari pulau Jawa. Hal ini menyebabkan komunikasi di daerah Lampung banyak menggunakan bahasa Indonesia bahkan cenderung bahasa Jawa. Berdasarkan data emik yang telah digali dari beragam informan mengatakan bahwa pengelolaan pariwisata di situs Pantai Kiluan sebagai berikut;

5.3.1 Kepemilikan : Pemodal Asing

Konsep pengelolaan wisata di Pantai Tanjung Setia adalah pariwisata berbasis Non-Komunitas merupakan konsep penggunaan dana atau modal baru untuk dapat mendukung perkembangan ekonomi dengan mengesampingkan aspek-aspek lainnya (sosial, budaya, lingkungan). Konsep pariwisata berbasis non-komunitas yang berorientasinya pada keuntungan pemilik modal utamanya. Konsep ini tentu memiliki dampak terhadap destinasi wisata, dan menyebabkan keadilan ekonomi yang akan timpang antara pemilik modal dan masyarakat sekitar.

Para wisatawan mancanegara yang berkunjung ke Pantai Tanjung Setia selain melakukan kegiatan wisata alam, ternyata juga mengamati potensi yang bisa digali dari tempat wisata tersebut untuk dijadikan ladang bisnis mereka. Terbukti dengan didirikannya beberapa *villa*, hotel, dan *homestay* disekitar pantai. Timbul dan tumbuhnya banyak *villa*, hotel, dan *homestay* membuat masyarakat di Pesibar khususnya mulai terbelalak, tergerak dan melek terhadap potensi wisata Pantai Tanjung Setia yang sebelumnya tidak pernah ditoleh apalagi terpikirkan akan menjadi mesin pencetak uang. Dulharryin yang merupakan masyarakat asli Tanjung Setia mengungkapkan bahwa;

“.....kita terlambat bangun *villa-villa*...turis sudah lebih duluan, mereka itu rupanya sudah punya hak milik pribadi... tanahnya yang di sepanjang pantai....taunya sudah jadi bangunan....” (DY)

Berikutnya Dulharryin memperjelas kembali uraiannya sebagai berikut;

“.....diam diam make nama penduduk sini untuk beli tanah, make nama temannya yang tinggal di kota Bandar Lampung....” (DY)

Emik di atas menjelaskan bahwa pengelolaan Pantai Tanjung Setia telah dilakukan oleh beberapa pihak yang memiliki modal, dan pemilik modal tersebut sebagian besar berasal dari luar negeri. Beberapa nama yang digunakan sebagai merk hotel, *cottage*, *villa*, *homestay*, restoran, *cafe*, dan bar oleh pemilik modal merupakan nama-nama yang sudah familier bagi wisatawan mancanegara karena nama-nama tersebut pernah dijumpai di Bali atau destinasi lain. Nama-nama yang digunakan seperti: Lovina, Paradise, Cabana, dan sebagainya

Dari emik di atas menunjukkan bahwa Wisatawan mancanegara melihat potensi yang dijual oleh pantai ini adalah ombaknya yang

menantang buat peselancar, mereka gemar melakukan aktifitas selancar air (*surfing*) dan jarang sekali menemukan ombak sebagus ini. Menurut mereka ombak di Pantai Tanjung Setia sangat ideal karena tinggi sampai dengan 7 m dan stabil, bahkan digolongkan menjadi nomor 2 terbaik di dunia. Warga asing yang memiliki modal membeli tanah yang dimiliki masyarakat lokal. Dulharryin juga menambahkan bahwa banyak masyarakat asing yang memperistri masyarakat lokal yang ada di sana, sehingga banyak tanah yang diatas namakan masyarakat lokal padahal yang memiliki modal adalah masyarakat asing. Saat ditanya sebaiknya seperti apa pembagian modal yang diharapkan, beliau menjawab:

“....Semestinya sistem sewa kayak di Bali, tapi banyak juga yang bikin sendiri di jual separuh, jadi bule nginap di tempat kita, dibagi.. memang sudah ada.. tapi yang di jual yang dekat pantai, yang dekat dengan ombak betul sekitar 10 meter dari pantai....”
(DH)

Hal ini sejalan dengan pendapat dari Jhon Eduar pegawai pemerintah kabupaten Pesisir Barat (Pesibar), menurut beliau terdapat alasan utama mengapa tanah atau bangunan yang ada di Tanjung Setia banyak dimiliki oleh masyarakat asing, beliau menjelaskan bahwa:

“....Yang banyak itu investor yang masuk, ada satu hal yang kita tidak pahami dari awal berkaitan karakter wilayah kita yang kebetulan disukai dengan orang luar, jadi kita ini disadarkan oleh orang luar. Jadi mereka tau duluan kalau ini akan besar, akibatnya banyak orang luar dari tahun 90-an udah memulai membeli tanah Awalnya pusatnya di tanjung setia, ada beberapa spot yang didaerah tersebut berkembang....” (JE)

Beliau menambahkan bahwa:

“Secara kebetulan yang diminati oleh turis ini, yang tidak kita minati sehingga investor masuk, harga tanah kita naik masyarakat hanya mengambil manfaat, sepanjang itu akan

dikuasai mereka semua. Kalau perbandingan sekitar 75:25, orang asing yang memperistri orang lokal”

Dari emik di atas terlihat bahwa menurut pegawai pemerintah kabupaten Pesibar yang menjadi awal penanaman modal asing di Tanjung Setia adalah ketidak sadaran masyarakat lokal mengenai potensi keindahan pantai dan ombak yang dimiliki oleh daerah mereka. Sebagian masyarakat atau wisatawan lokal menganggap Pantai Tanjung Setia kurang menarik dan kurang mempunyai nilai jual, selain itu juga waktu tempuh yang kurang memadai karena jarak tempuhnya memakan waktu 5-6 jam dari kota. Sehingga membuat masyarakat kurang peduli terhadap objek wisata Pantai Tanjung setia ini. Pembangunan fasilitas pariwisata yang dilakukan oleh investor ini tentunya menimbulkan kesalahpahaman. Seperti diungkapkan oleh pegawai pemerintah kabupaten Pesibar bahwa;

“.....Ada kesalahan dari awal saat penataan lokasi pariwisata, UU lingkungan hidup mengatakan 100 meter dari pinggir laut tidak boleh dimiliki masyarakat, pada kenyataannya banyak yang merasa sat beli tanah beli laut atau pantai juga, namun sampai saat ini belum ada tindak lanjut karena SDM kita yang kurang mumpuni.....” (JE)

Pegawai pemerintah kabupaten (JE) menambahkan bahwa saat ini pemerintah daerah terus berusaha untuk mengajak masyarakat untuk tidak menjual tanah yang dimiliki tetapi membentuk sebuah sistem yang dapat membuat kerjasama yang lebih baik dengan investor.

Sejalan dengan penjelasan di atas, Dulhayyin juga menambahkan:

“....Pantai itu... hotel itu... bule-bule tuh yang beli, yang datang sewaktu-waktu, orang Amerika, Autralia, orang kita ada juga tapi hanya beberapa, ada tiga yang orang kitanya, yang orang bule itu banyak....” (DH)

Dari emik di atas dapat dipahami bahwa dibandingkan dengan masyarakat lokal kepemilikan tanah lebih banyak dimiliki oleh orang

asing. Dulhayyin juga menambahkan bahwa kepemilikan tanah di Tanjung Setia oleh orang asing terjadi merupakan kerjasama antara orang asing dengan warga asli, yang membeli merupakan orang asing hanya saja di atas namakan masyarakat lokal, bahkan ada beberapa orang yang menikah dengan orang asli Tanjung Setia. Dulhayyin menambahkan:

“...jadi mahal di sini tanah, milyaran sekarang.. dulunya itu sekitar 50 juta satu rantai, tahun 2017/2018 sudah 1 milyaran sekarang satu rantainya....” (DH)

Selanjutnya informan Rina menjelaskan pandangannya terkait awal mula Pantai Tanjung Setia dimiliki banyak pemodal asing dibandingkan masyarakat lokal. Beliau menjelaskan bahwa:

“....Tahun 2012 awalnya terkenal, sebelunya udah ada dari tahun 2008 tapi baru satu *cottage*, kemudian ada lagi yang bangun, nambah lagi, nambah lagi, mereka itu memang sudah turis celaknya orang kita ini jual tanah bukan dimanfaatkan, seharusnya bagaimana caranya agar tanah itu jangan hilang, mereka bermitralah dengan kita, jangan sampai mereka ambil secara keseluruhan dibeli gitu, kerjasama seharusnya. Sehingga kita tetap menghasilkan per bulannya itu tadi, kontrak atau saham tergantung MoU dari awal. Belum ada yang model mitra kayak gitu. SDM, Faktor ekonomi, dengan di iming-imingi harga mahal....” (R)

Hal ini juga semakin memperjelas bahwa pemodal asing bertunas dengan cepat di daerah Pantai Tanjung Setia disebabkan karena banyak masyarakat lokal yang dengan senang hati menjual tanah yang dimiliki dibandingkan mengelola tanah tersebut untuk jangka panjang, beliau menambahkan bahwa pada akhirnya nanti masyarakat lokal akan menjadi penonton dari kesuksesan pemodal asing yang semakin banyak.

Pandangan yang sama juga diutarakan oleh informan Amin, mereka menjelaskan bahwa kepemilikan penginapan, *cottage*, hotel losmen

terlalu banyak dikuasai oleh asing dengan alasan mereka dengan mudah melakukan promosi yang dilakukan secara *online*, dan mereka berpengalaman sebagai pemain pariwisata ditempat lain yang sangat piawai dan banyak jaringan. Amin menjelaskan bahwa

“.....kepemilikan losmen itu kan dari asing, mereka usaha mereka...kayak losmen, penginapan, hotel, *cottage* memasarkan lewat *online* itu.... jadi kalau mau sewa sepeda mtor untuk angkut alat-alat surfing juga langsung dari losmen itu..... satu paket.....” (A)

Informan pemilik *travel* lokal juga menambahkan bahwa banyak orang asing yang memperistri/bersuami orang sini (Pesibar) atau berteman baik dengan masyarakat lokal kemudian saat mereka membeli tanah dengan mengatasmamakan masyarakat lokal.

Gambar 5.3 Homestay Tanjung Setia



Foto Homestay

Sumber: Dokumentasi Penelitian

Dari emik-emik di atas dapat disimpulkan bahwa usaha wisata yang dilakukan oleh investor di Tanjung Setia berbasis modal berorientasi pada kepemilikan tanah yang dijual dari masyarakat lokal dan dibeli oleh orang asing. Beberapa kegiatan pembangunannya terkesan tertutup dan

hal tersebut memudahkan orang asing untuk mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya tanpa memperhatikan kesejahteraan masyarakat sekitar daerah wisata Tanjung Setia.

Konsep pengelolaan pariwisata dengan basis modal asing, bisa bersifat individu, sekelompok orang cenderung abai terhadap kepentingan komunitas atau masyarakat. Konsep pengelolaan dengan banyak menggunakan modal ini identik dengan *capital intensive*, menurut Endang Prasetyo (2014) cenderung mengefisiensikan biaya, tanpa memperhitungkan toleransi sosial, aktivitas sosial, keberlanjutan lingkungan, dan pada akhirnya menguras keuntungan yang banyak.

Konsep pengelolaan pariwisata dengan basis modal asing, abai terhadap keadilan, dan dapat membuat jurang antara masyarakat miskin, masyarakat berpendapatan rendah yang tinggal dikota-kota kecil dan pedesaan tempat suatu destinasi muncul. Suansri (2003:14) memperjelas lagi tentang pengelolaan yang *unpartisipatif* mengejar keuntungan individu atau kelompok karena tidak memberi kesempatan kepada masyarakat lokal untuk mengontrol dan terlibat dalam manajemen pariwisata.

Berdasarkan akibat negatif yang ditimbulkan dengan adanya konsep pengelolaan pariwisata dengan basis modal asing adalah terbengkalainya sektor pertanian akibat tersedotnya tenaga kerja disektor pertanian lari bekerja ke industri pariwisata, terbengkalainya sektor pertanian menyebabkan lahan-lahan produktif berkurang dan berubah menjadi lahan marginal. Selanjutnya menguras sumberdaya alam secara berlebihan dan membawa keuntungannya terbang ke negara asal.

Tidak adanya kesempatan masyarakat untuk terlibat dalam aktivitas pariwisata, abai dengan lingkungan, abai dengan keadilan, terbengkalai sektor pertanian, berkurangnya lahan-lahan produktif, terkuras sumberdaya alam, dan membawa keuntungan ke luar negeri maka semakin jauh *trickle down effect* dan multiplier effect dari pariwisata tersebut mendekati masyarakat.

5.3.2 Partner Dalam Pengelolaan: Peran dan Kepemilikan Masyarakat Terbatas

Telah di ketahui oleh kita semua bahwa, menggerakkan sektor pariwisata di suatu daerah dibutuhkan kondisi ekonomi yang kondusif dan stabil. Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia (BI) Mirza Adityaswara menjelaskan prospek ekonomi makro yang kondusif dan stabil, dan didukung juga oleh perbaikan iklim investasi. Investasi yang terus terjadi di Indonesia bisa menjadi momentum yang tepat untuk mengundang para investor untuk berinvestasi di sektor yang mempunyai nilai tambah, termasuk sektor pariwisata".

Semua pihak pasti faham bahwa investasi asing di destinasi wisata juga merupakan hal yang saling menguntungkan untuk para investor dan untuk membantu perekonomian di sekitar masyarakat destinasi, dengan adanya investasi asing dan melakukan pembangunan atau dengan melakukan suatu proyek selain membantu perekonomian itu sendiri, dengan melakukan investasi asing juga dapat membantu mengurangi tingkat pengangguran yang sulit untuk diatasi di Indonesia terutama para remaja yang sedang menganggur dapat melamar

pekerjaan dan mengisi kekosongan waktu dengan bekerja dan menghasilkan uang, sehingga tingkat pengangguran dapat teratasi.

Dulhayyin merupakan salah satu informan yang merupakan masyarakat asli Tanjung Setia bekerja di kebun kesehariannya, mengamati terserapnya tenaga kerja di kegiatan destinasi Pantai Tanjung Setia, begini penuturannya;

“..... lumayan juga ... warga sini terutama remaja-remaja, ibu-ibu, ya laki-laki juga ada yang kerja di sana.....kerjanya Cuma bagian-bagian masak di dapur, ngebersihin *homestay*, tukang cuci satpam, ngojek motor....buka warung rokok dan es dugan” (DY)

Keberadaan investor menciptakan *Multiplier effect* atau efek rembetan pada peran masyarakat yang minim. Minimnya peran masyarakat lokal atas usaha-usaha pengembangan pariwisata dikarenakan masyarakat tidak memiliki kemampuan secara finansial dan keahlian yang berkualitas untuk mengelolanya atau terlibat langsung dalam kegiatan pariwisata yang berbasiskan alam dan budaya. Sehingga perlunya partisipasi aktif masyarakat untuk menjadi tuan rumah yang baik, menyediakan sesuatu yang terbaik sesuai kemampuan, ikut menjaga keamanan, ketentraman, keindahan dan kebersihan lingkungan, memberikan kenangan dan kesan yang baik bagi wisatawan dalam rangka mendukung program pariwisata.

Pernyataan peran masyarakat sangat kecil telah diungkap pada emik di atas sebelum ini, lalu kepemilikan masyarakat terhadap fasilitas, atraksi, destinasi, dan sebagainya dipaparkan Sri Zanaria dalam bahasa Lampung peminggir;

“.....paling-paling ampai 4 tahun ini masyarakat ngebangun penginopan ... mawatlah, lamon modal ni kik haga guai hotel, ini kan beguyur, pelan-pelan.....” (SZ)

“....paling-paling sampe 4 tahun ini masyarakat membangun penginapan....enggaklah, banyak modalnya kalau mau buat hotel, ini kan pelan-pelan.....” (SZ)

Ungkapan yang senada tentang kepemilikan oleh masyarakat yang terbatas fasilitas wisata di Pantai Tanjung Setia di jelaskan pula oleh Jhon Eduar;

“....masyarakat pada umumnya gak bisa menjadi pelaku wisata di sini...wisatawan asing itu lebih dari separo pengeluarannya lari lagi ke investor, gimana enggak buat makan, hotel, transportasi, sewa alat surfing, sewa motor, ini semua yang punya investor dari luar, udah pesen langsung dari negaranya.....” (JE)

Sederhananya, konsep pembangunan beririsan dengan konsep partisipasi, yaitu “keterlibatan suatu pihak dalam kegiatan yang dilakukan oleh pihak lain”. Menurut Joppe (1996: 475) partisipasi merupakan sebuah proses dimana masyarakat sebagai *stakeholders*, terlibat mempengaruhi dan mengendalikan pembangunan di tempat mereka masing-masing. Masyarakat turut serta secara aktif dalam memprakarsai kehidupan mereka, melalui proses pembuatan keputusan dan perolehan sumberdaya dan penggunaannya.

Ashley *et al* (2001), menguatkan pendapat Yoppe bahwa masyarakat minim kemampuan secara finansial dan *skill* dalam mengelola atau terlibat langsung pada kegiatan pariwisata tetap sebagai *partner*. Sebagai partner pembangunan di bidang pariwisata membantu masyarakat memberdayakan kepemilikan aset pribadi atau kelompok, menumbuhkan kebanggaan komunitas dan percaya diri, mendistribusikan keuntungan dan pendapatan secara adil dan bijaksana.

Berkaitan dengan hal tersebut diatas, keterlibatan investor/swasta dalam pembangunan pariwisata akan membawa tuntutan bagi partisipasi masyarakat bertumburan dengan tujuannya investor yaitu

menjaminan keberlangsungan bisnis, mengembangkan usaha, mencegah persaingan baru, mendapat penghasilan tetap, mencari keuntungan besar.

Sudah sepatutnya perlu ditumbuhkan pemahaman atau persepsi yang sama dari *stakeholders* terkait dan memberikan ruang yang seluas-luasnya bagi masyarakat sebagai pelaku utama pengembangan pembangunan wisata. Melakukan investasi asing mampu sebagai stimulus meringankan beban masyarakat karena penguasaan wilayah kita sendiri oleh negara asing, bukti masyarakat kesulitan untuk mengolahnya. Namun demikian setidaknya kita berharap masih mendapatkan sedikit keuntungan dengan dilakukannya investasi asing.

5.3.3 Daya Tarik Kebudayaan

Kebudayaan merupakan hal yang berlangsung turun temurun dan menjadi hal yang wajar bagi masyarakat yang menganutnya.

Tempat wisata Pantai Tanjung Setia merupakan kawasan yang mempertahankan warisan budaya agar tidak punah berupa tari-tarian, adat istiadat masyarakat serta keramah tamahannya. Hal ini tentu

juga bisa menjadi daya tarik tersendiri bagi wisatawan. Para pengunjung yang datang akan disuguhi oleh berbagai kegiatan budaya, mulai dari tari-tarian sambutan, kuliner khas daerah serta aktivitas masyarakat yang masih asli pada kesehariannya. Menurut

James J. Spillane (2003) bahwa produk pariwisata budaya juga memiliki segmen khusus yaitu para *mature tourist* atau wisatawan yang berpengalaman, dalam hal ini mereka melakukan perjalanan atau kunjungan ke kawasan lain dengan tujuan tidak hanya bersifat

rekreasi semata tetapi lebih bermotivasi untuk menimba pengalaman melalui interaksi langsung dengan aktivitas kehidupan dan tradisi serta budaya masyarakat lokal. Kebudayaan juga merupakan ciri khas masyarakat tertentu yang masing-masing memiliki bentuk tersendiri, melalui proses adaptasi lingkungan. Dulhayyin mengatakan:

“.....kebudayaan memang senang dia orang itu, kalau mau ketemu banyak tarian-tarian anak sekolah/masyarakat, kalau ada pesta-pesta diundang mereka datang.....” (DY)

Gambar pesta budaya diminati wisatawan asing “Sakuraan”

Gambar 5.4 Pesta Adat Sakura



Foto Partisipasi Dalam Pesta Adat Sakura Tahun 2017
Sumber: Dokumentasi Pemda Pesibar

Kecenderungan bahwa wisatawan ingin memahami budaya diluar lingkungannya inilah yang mendasari kenapa pengunjung di Pantai Tanjung setia lebih didominasi oleh pengunjung dari

manca negara selain daya tarik dari ombaknya yang bagus, seperti yang telah diungkapkan Dulhayyin bahwa:

“....Sekitar 4 tahun 5 tahun terlihat berkembang pesat, Wisatawan lokal ada juga, tetapi banyak asing....ternyata daya tarik bagi mereka adalah budaya disamping ketinggian ombak....” (DY)

Perbedaan kebudayaan akan menimbulkan rasa ingin tahu suatu masyarakat untuk mengenal budaya yang berbeda. Akan tetapi dilain sisi pengaruh dari meningkatnya pengunjung mancanegara, secara sadar atau tidak mereka juga akan membawa budaya mereka pada kunjungannya. Karena hal tersebut adalah bagian dari kebiasaan dan belum tentu budaya mereka diterima atau sesuai dengan budaya yang ada di masyarakat. Efek negatifnya akan mempengaruhi dan merubah pola perilaku masyarakat, hal ini terjadi karena budaya yang dibawa wisatawan asing dianggap lebih maju, keren serta modern.

“....dampak negatif dengan datangnya wisatawan asing otomatis budaya kita mungkin ada yang berubah karena dipengaruhi oleh budaya asing tadi....” (RN)

Rina melengkapi penuturannya

“.....Pada akhirnya sebagian penduduk lokal akan sedikit demi sedikit akan mengikuti pola dan gaya hidup mereka. Hal ini dibuktikan dengan maraknya remaja putri yang berpakaian terbuka, luntarnya budaya kesopanan dan bahkan juga ditemukan kasus obat-obatan terlarang....” (RN)

Pemda juga berharap agar wisatawan asing maupun wisatawan lokal yang datang tetap menjaga nama Pesibar dengan motto negeri yang cinta ulama, begini penjelasannya Jhon Eduar;

“....lebih maju, lebih terkenal di mancanegara supaya semakin banyak wisatawan masuk kemari, tetapi harapan pemda penjagaannya cukup ketatlah mengenai masuknya narkoba dsb, kemudian seperti pakaian yang kurang sopan untuk sekarang udah bagus sih, tetapi peraturan itu

jangan sampai luntur, tetap ditegakkan jangan sampai kalah dengan budaya mereka, mau disamakan dengan Bali kita tidak setuju, memang bali luar biasa perkembangan wisatanya, cuma kan akidahnya gak sama dengan kita, kalau kita mayoritas Islam.....” (JE)

Kemudian, pengembangan pariwisata di suatu daerah wajib memberikan rasa aman bagi wisatawan, sikap keramahmatan penduduk juga salah satu poin penting dalam kenyamanan rekreasi. Wisatawan juga akan menilai dari bagaimana sikap masyarakat disana, karena hal ini dirasa amat penting terkait adaptasi sebagai pengunjung pada lingkungan sosial di tempat wisata dan akan mempengaruhi kenyamanan serta preferensi untuk kembali lagi pada kesempatan yang lain. Nia mengungkapkan bahwa:

“... the diference with Bali, very busy, many people.. and here still nice, empty and cheep.....” (N)

Dari emik tersebut disimpulkan dengan adanya industri pariwisata yang menciptakan kenyamanan bagi pengunjung diharapkan mampu mendorong pengembangan pariwisata budaya daerah, namun perlu juga disadari jika pengembangan tersebut harus tetap menjaga kelestarian dan keberlanjutan budaya tersebut agar tetap orisinil.

5.3.4 Kepekaan Sosial

Menurut Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2009, kesejahteraan Sosial adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial warga negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya, dan penyelenggaraan kesejahteraan sosial adalah upaya

yang terarah, terpadu, dan berkelanjutan yang dilakukan Pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat dalam bentuk pelayanan sosial guna memenuhi kebutuhan dasar setiap warga negara, yang meliputi rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, dan perlindungan sosial. Dimana dalam penyelenggaraannya dilakukan atas dasar kesetiakawanan, keadilan, kemanfaatan, keterpaduan, kemitraan, keterbukaan, akuntabilitas, partisipasi, profesionalitas dan keberlanjutan.

Jhon Eduar menjelaskan bahwa:

“.....Peran Koperindag dalam mendukung pariwisata masih sekitar 10% dari sisi makan minum, usaha-usaha souvenir, peluangnya masih cukup besar, kalau kita bicara bahwa pembangunan dari desa memang anggaran di desa lebih berfokus pada infrastruktur.....” (JE)

Menurut Cox dalam Gde Pitana (2009:81), pengelolaan pariwisata harus memperhatikan prinsip-prinsip berikut: *Pertama*, Pembangunan dan pengembangan pariwisata haruslah didasarkan pada kearifan lokal dan *special local sense* yang merefleksikan keunikan peninggalan budaya dan keunikan lingkungan. *Kedua*, Preservasi, proteksi, dan peningkatan kualitas sumber daya yang menjadi basis pengembangan kawasan pariwisata. *Ketiga*, Pengembangan atraksi wisata tambahan yang mengakar pada khasanah budaya lokal. *Keempat*, pelayanan kepada wisatawan berbasis keunikan budaya dan lingkungan local dan *kelima*, memberikan dukungan dan legitimasi pada pembangunan dan pengembangan pariwisata jika terbukti memberikan manfaat positif, tetapi jika sebaliknya mengendalikan atau menghentikan aktivitas pariwisata tersebut jika melampaui ambang batas.

Perlu nya membahas tentang prinsip pariwisata, yang mana menyangkut tentang kepemilikan industri pariwisata oleh masyarakat sekitar yang harus dijamin dalam pengembangannya. Anggota masyarakat yang tidak memiliki usaha pariwisata tetap harus mendapatkan keuntungan baik berupa materiil ataupun non-materiil yang berasal dari adanya sektor wisata dikawasan sekitar melalui mekanisme yang ditetapkan bersama antara pemerintah, pemilik fasilitas wisata serta masyarakat itu sendiri. Meskipun demikian, bahwa keberhasilan pengembangan sektor pariwisata lebih banyak ditentukan oleh peran kebijakan pemerintah yang ikut serta secara aktif membangun regulasi untuk pengembangan kepariwisataan (Jeffries, 2001).

5.4 Perkembangan Pariwisata di Pantai Tanjung Setia

Pariwisata berbasis Non-Komunitas merupakan konsep penggunaan dana atau modal baru untuk dapat mendukung perkembangan ekonomi dengan mengesampingkan aspek-aspek lainnya (sosial, budaya, dsb). Konsep pariwisata berbasis non-komunitas yang berorientasinya pada keuntungan pemilik modal utama tentunya memiliki dampak terhadap destinasi wisata, kondisi ini menyebabkan keadilan ekonomi yang akan timpang antara pemilik modal dan masyarakat sekitar.

Para wisatawan mancanegara yang berkunjung, selain melakukan kegiatan wisata alam, ternyata juga mengamati hal-hal apa yang bisa digali dari tempat wisata tersebut. Terbukti dengan didirikannya beberapa villa atau hotel disekitar pantai, membuat masyarakat mulai tergerak dan melek terhadap potensi wisata yang

sebelumnya tidak terpikirkan akan diapakan. Hal ini terjadi di Pantai Tanjung Setia, seperti yang diungkapkan Dulhayyin yang merupakan masyarakat asli Tanjung Setia bahwa:

“.....yang punya orang bule tapi atas namanya orang sini, jadi kerjasama dengan orang sini yang punya.....” (DY)

Dari emik di atas menunjukkan bahwa Wisatawan mancanegara melihat potensi yang dijual oleh pantai ini adalah ombaknya tersebut, mereka gemar melakukan aktifitas selancar air (*surfing*) dan jarang sekali menemukan ombak sebgus ini. Menurut mereka ombak di pantai tanjung setia sangat ideal untuk olah raga berselancar karena tinggi dan stabil, bahkan digolongkan menjadi nomor 2 terbaik di dunia. Warga asing yang memiliki modal membeli tanah yang dimiliki masyarakat lokal. Dulhayyin juga menambahkan bahwa banyak masyarakat asing yang memperistri masyarakat lokal yang ada di sana, sehingga banyak tanah yang diatas namakan masyarakat lokal padahal yang memiliki modal adalah masyarakat asing. Saat ditanya sebaiknya seperti apa pembagian modal yang diharapkan, beliau menjawab:

“.....semestinya sistem sewa kayak di Bali, tapi banyak juga yang bikin sendiri di jual separuh, jadi bule nginap di tempat kita, dibagi.. memang sudah ada.. tapi yang di jual yang dekat pantai, yang dekat dengan ombak betul sekitar 10 meter dari pantai.....” (DY)

Hal ini sejalan dengan pendapat dari bapak pegawai pemerintah kabupaten, menurut beliau terdapat alasan utama mengapa tanah atau bangunan yang ada di Tanjung Setia banyak dimiliki oleh masyarakat asing, beliau menjelaskan bahwa:

“.....Yang banyak itu investor yang masuk, ada satu hal yang kita tidak pahami dari awal berkaitan karakter wilayah kita yang kebetulan disukai dengan orang luar, jadi kita ini disadarkan oleh orang luar. Jadi mereka tau duluan kalau ini akan besar, akibatnya banyak orang luar dari tahun 90 udah memulai membeli tanah Awalnya pusatnya di tanjung setia, ada beberapa spot yang didaerah tersebut berkembang.....” (DY)

Pasti tak sedikit traveler yang sudah mengenal Pantai Tanjung

Setia di Provinsi Lampung. Ternyata, pantai ini sudah dikenal oleh para

peselancar dunia. Mereka pecinta selancar suka sekali menaklukan

ombak di pantai Tanjung Setia di Lampung ini. Pantai Tanjung Setia

merupakan salah satu pantai indah yang berada di pesisir barat Provinsi

Lampung. Namun, pantai ini lebih populer karena keindahan ombaknya

yang bergulung gulung cukup besar dan rapi sehingga menjadi daya tarik

bagi para peselancar dari Indonesia bahkan peselancar dari dunia.

Ombak yang bisa di katakan sempurna merupakan ciri khas dari Pantai

Tanjung Setia ini, di tunjukan dari ketinggian ombaknya yang mencapai

hingga 6 sampai 7 meter, ombak yang tinggi nan sempurna dipantai ini

biasanya berlangsung pada bulan Juni hingga bulan Agustus. Gulungan

ombak tersebut dapat di lihat pada gambar 5.4 di bawah ini;

Gambar 5.5 Gulungan dan Ketinggian Ombak untuk Berselancar di Pantai Tanjung Setia



Foto Gulungan dan Ketinggian Ombak di Pantai Tanjung Setia
Sumber Dokumen Penelitian

Ombak yang ada di pantai ini tidak hanya tinggi, namun juga

panjang yang mencapai sekitar 200 meter. Menurut Nia wisatawan asal

Jerman, Pantai Tanjung Setia merupakan ombak yang sangat eksotis dan

merupakan ombak terbaik didunia. Walaupun pantai ini memiliki

keunggulan dari segi ombaknya yang sempurna, akan tetapi wisatawan

yang datang masih sedikit jika di bandingkan dengan pantai kute yang

ada dibali. Pantai Tanjung setia memberikan lingkungan alam yang masih

terjaga kealamiannya dan pemandangan yang menakjubkan serta

menyenangkan.

Selain diburu oleh pecinta Selancar, Pantai Tanjung Setia ini juga

banyak di kunjungi oleh pengunjung yang suka dengan pantai, bila sore

hari pengunjung dapat melihat matahari tenggelam yang indah di padu

dengan deburan ombak yang menari-nari. Di tepi Pantai Tanjung Setia

terdapat pepohonan palem yang cukup rimbun bisa digunakan untuk

beristirahat. Berikut komentar Nia wisatawan asal Jerman;

“.....good... we like being quiet because bali is noisy, the beach is clean and the cost of living is cheapthe population is friendly.....” (N)

(bagus.... kami senang karena masih sunyi, pantainya bersih, biaya hidup juga murah....dan masyarakatnya ramah)

Berselancar menjadi ciri khas di pantai yang mempesona ini,

karena wisatawan yang datang dari penjuru dunia ingin mencari sensasi

ombak yang terkenal ganas dan menantang adrenalin. Pencinta sensasi

ganasnya ombak dan menantang adrenalin dijumpai di Pantai Tanjung

Setia setiap tahunnya bertepatan agenda Pesona Krui Pesisir Barat, Krui

Pro *Surfing Competition*. Di bawah ini tersaji Gambar 5.5 agenda Pesona

Krui Pesisir Barat, Krui Pro *Surfing Competition* tahun 2018

**Gambar 5.6 Krui Pro Pesisir Barat,
Krui Pro Surfing Competition tahun 2018**



Foto Pesona Krui Pesisir Barat, Krui Pro Surfing Competition 2018
Sumber: Dokumentasi Pemkab Pesibar

Ungkapan tentang pantai yang baik buat surfing, selanjutnya juga dikatakan oleh Nia;

“....Pantainya bagus, *and good waves*, ombaknya bagus, *its good for surfing, there are not so very heavy sometimes and little bit mellow its good combination...*” (N)

“....(Pantainya bagus, ombaknya bagus, sangat baik untuk bermain selam, cuacanya kadang terasa panas kadang mendung, kombinasi yang sangat bagus)....”

Krui Pro adalah sebuah *event* olahraga surfing internasional yang melibatkan keikutsertaan atlet surfing mancanegara. Diadakan di pantai Tanjung Setia tepatnya di Ujung Bocur Surfing Spot, Krui Pro bekerja sama dengan *World Surf League (WSL) & Asian Surf Chamionship (ASP)* sebagai promotor dan pelaksana resmi perlombaan surfing di Asia dan dunia.

Kejuaraan selancar internasional, *Krui Pro Surfing Competition* dilaksanakan sejak tahun 2017, telah mendatangkan 86 Surfer dari 10 negara, peserta surfing meningkat di tahun 2018, menjadi 96 Surfer

berasal dari 17 negara dan 2019 peserta surfing menjadi 150 Surfer dari 30 negara. Kedatangan surfer diajang *International Surfing Competition* menyebabkan peningkatan pada ekonomi pariwisata di Pantai Teluk Kiluan khususnya atau Pesibar secara umum.

Dari sisi permintaan ekonomi pariwisata, *International Surfing Competition* berimplikasi menarik wisatawan lokal dan mancanegara sebagai penonton, pelatih, team manager, pendamping, dan dipastikan akan mengalami tren kenaikan di tahun-tahun.. Kondisi ini mengakibatkan permintaan akan barang dan jasa yang dibutuhkan semakin meningkat. Permintaan ini berupa fasilitas layanan jasa dan konsumsi.

Hal ini sejalan dengan teori ekonomi yang erat kaitannya dengan pariwisata adalah teori penyediaan tenaga kerja. Semakin banyak jumlah wisatawan yang berkunjung maka permintaan akan barang dan jasa semakin meningkat. Sehingga, peluang masyarakat untuk membuka lapangan pekerjaan semakin besar. Masyarakat juga telah merasakan dampak yang terjadi akibat kenaikan permintaan terhadap kebutuhan wisatawan disebabkan oleh peningkatan fasilitas layanan jasa. Seperti yang ungkap oleh Jhon Eduar sebagai berikut;

“ya dengan adanya destinasi Pantai Tanjung Setia ini membuat masyarakat lebih mudah,... ya mudah dapat uang, maksudnya... jadinya sumber penghasilan gak dari cari ikan aja gitu....” (JE)

Dari sisi penawaran (*supply-side tourism*) konsep ekonomi pariwisata memfokuskan pada struktur *output* barang dan jasa yang disediakan oleh unit-unit ekonomi untuk memenuhi permintaan konsumsi wisatawan. Dalam hal ini, fasilitas yang disediakan oleh masyarakat yang ada di sekitar Pantai Tanjung Setia ada beberapa jenis jasa transportasi seperti, *travel* dan ojek. Kemudian juga menawarkan

jasa penginapan berupa, *homestay*, villa, *losmen* dan hotel. Serta dibidang barang juga menyediakan penyewaan sepeda motor, papan *surfing* serta warung makan dan minuman disekitar objek wisata. Masyarakat juga menawarkan jasa *tour guide* pada wisatawan lokal ataupun mancanegara.

Kompetisi surfing dalam kejuaraan selancar internasional Krui Pro dari tahun ketahun mengalami perkembangan secara kualitas. Mula-mula kategori kompetisi surfing di level QS 1000 pada tahun 2017, berubah menjadi level QS 1500 pada tahun 2018, dan 2019 levelnya ditingkatkan melalui kategori *world surf league (WSL)-Qualification Series* (QS) 3000. Peningkatan level QS 3000 untuk menjaring surfer kelas dunia. Dengan berkelanjutannya kejuaraan ini, dipastikan akan mendorong lahirnya surfer-surfer lokal handal karena termotivasi dengan kesuksesan surfer tingkat dunia yang selama ini memanfaatkan Pantai Tanjung Setia sebagai lokasi favoritnya. Kompetisi surfer memicu tumbuhnya fasilitas baru untuk melengkapi fasilitas yang sudah ada di destinasi Pantai Tanjung Setia. Makin banyak fasilitas yang sesuai dengan surfer dan wisatawan lainnya makin banyak daya pikat dan magnet yang diciptakan untuk menarik wisatawan.

5.5 Diskusi Teori dan Hasil Temuan

Rohendi (2015) sangat sepakat bahwa investasi yang dilakukan pemilik modal adalah urat nadi ekonomi, termasuk urat nadi ekonomi bangsa. Oleh sebab itu, maka semua negara memerlukan kebutuhan akan investasi untuk menggerakkan perekonomian. Sulit membayangkan adanya pertumbuhan ekonomi bila tidak ada kaum pemodal.

Oleh sebab itu pula semua negara, tak terkecuali pariwisata di Lampung, seperti berlomba untuk menciptakan strategi yang semenarik mungkin buat investor. Investasi bisa berasal dari dalam negeri maupun dari luar negeri.

Pemerintah telah mengeluarkan sejumlah paket investasi dalam rangka mendongkrak investor. Kemudahan berusaha, kemudahan perizinan, kecepatan pelayanan, merupakan bagian tak terpisahkan dari upaya mempermudah dan memperbanyak investasi. Sayangnya, bila kita cermati lebih jauh, investasi tertentu tidak selalu berdampak bagus bagi perekonomian secara keseluruhan.

Dampak buruk dalam investasi bisa berupa dampak lingkungan, dampak terhadap kepentingan konsumen, persaingan tidak sehat, terganggunya hajat hidup masyarakat luas, dan sebagainya.

Oleh sebab itu, pemerintah di tiap-tiap negara memiliki ketentuan khusus yang terkait dengan pengaturan investasi. Peraturan biasanya cukup ketat untuk investasi yang melibatkan modal asing. Di Indonesia, misalnya, dikenal daftar negatif investasi atau DNI. Ketentuan ini mengatur bidang-bidang apa saja yang dibatasi untuk investasi asing dan seberapa besar porsi kepemilikan perusahaan asing dalam berinvestasi di bidang-bidang tertentu. Ini untuk memberi kesempatan kepada pemilik modal lokal untuk berkembang dan dapat bersaing secara sehat. Akan tetapi, ada peraturan selalu ada titik lemah. Ada saja upaya untuk mencari dalam investasi ini. Salah satu yang sering terjadi adalah praktik pinjam nama atau “perjokian” dalam investasi asing. Praktik ini biasa dikenal dengan nama *nominee*. Secara sederhana, *nominee* dalam investasi adalah menggunakan

nama orang Indonesia tetapi secara de facto perusahaan tersebut dikuasai oleh investor asing. Sejatinya hal semacam ini sudah dilarang. Dalam Undang-Undang No. 25/2007 tentang Penanaman Modal, dinyatakan larangan penanam modal dalam negeri dan penanam modal asing untuk membuat perjanjian dan/atau pernyataan yang menegaskan bahwa kepemilikan saham dalam perusahaan terbatas untuk dan atas nama orang lain.

Konsep pengelolaan pariwisata berbasis modal ini bisa disepadankan dengan konsep *capital intensive*, yakni sebuah usaha ekonomi yang merupakan anjuran ekonomi barat melalui penerapan “*economic of scale*” atau suatu batas minimum bagi industri untuk bias beroperasi secara ekonomi dan menguntungkan suatu perekonomian. (Kuncoro, M, 2014). Menurut Sukirno 2006), pengertian investasi adalah aktivitas pengeluaran atau pembelanjaan penanam modal untuk membeli barang-barang modal dan juga perlengkapan-perengkapan produksi dengan tujuan menambah kemampuan memproduksi barang dan jasa yang tersedia dalam perekonomian.

Dari konsep tersebut jelas bahwa usaha wisata yang berbasis modal maka orientasi utamanya adalah keuntungan bahkan memungkinkan keuntungan yang sebesar-besarnya. Bila orientasinya tersebut, maka yang pengelolaan pariwisata dilakukan oleh pengusaha/investor arahnya efisiensi biaya, penghematan sumber daya yang digunakan dan mengabaikan bentuk-bentuk aktivitas sosial atau bentuk toleransi sosial. Sehingga segala sesuatu dihitung dengan cermat dan teliti untuk pencapaian keuntungan. Tentunya, keuntungan tersebut adalah bagi pemodal atau pemiliknya. Dengan kondisi seperti ini, maka

memungkinkan keadilan dalam berekonomi tidak akan tercipta, kebersamaan pemodal besar dan masyarakat tidak dapat diraih, sehingga peluang pengabaian pada masyarakat lokal dimungkinkan terjadi. Selanjutnya pengertian pariwisata berbasis modal ini dalam pelaksanaannya mengabaikan prinsip-prinsip pelestarian lingkungan dan terciptanya rasa keadilan, sektor pertanian terbengkalai, lahan produktif berkurang, hasil usaha mengalir ke negara investor, dan pengurasan sumberdaya alam.

Adapun dampak negatif yang ditimbulkan dari adanya kegiatan oleh pemodal, secara terperinci dapat diurai sebagai berikut:

- a. Terbengkalainya sektor pertanian. Penanaman modal asing banyak dilakukan di sektor industri. Hal ini berarti banyak tenaga kerja yang tersedot ke dalam sektor tersebut. Keberadaan industri yang lebih menjanjikan secara pendapatan, mendorong banyak tenaga kerja beralih ke sektor industri. Akibatnya, kegiatan di sektor-sektor penunjang industri menjadi terbengkalai. Akhirnya sektor-sektor non-industri mengalami kekurangan tenaga kerja.
- b. Kerusakan lingkungan, salah satu komponen yang akan muncul dalam kegiatan industri adalah pencemaran lingkungan. Pencemaran ini dapat berupa limbah maupun pencemaran udara. Makin banyak perusahaan asing di Indonesia, makin meningkatkan produksi limbah. Limbah yang tidak dikelola dengan baik akan merusak lingkungan. Misalnya terjadinya polusi udara, pencemaran tanah, dan pencemaran sungai. Pencemaran pada lingkungan bisa mengganggu kesehatan manusia, serta kehidupan hewan dan tumbuhan. Maka dari itu perlu ditegakkan aturan yang jelas mengenai pengelolaan limbah industri.

- c. Berkurangnya lahan produktif. Dampak negatif lain dari berkembangnya perusahaan asing di Indonesia adalah berkurangnya lahan produktif. Areal yang dapat digunakan sebagai lahan produktif seperti untuk usaha pertanian akan habis karena dimanfaatkan untuk mendirikan pabrik. Hal ini berkaitan dengan berkurangnya tenaga kerja di bidang pertanian. Makin banyak tenaga kerja yang tersedot di sektor industri, menyebabkan berkurangnya tenaga kerja pertanian. Pada saat tidak ada lagi tenaga kerja di bidang pertanian, maka pemilik lahan lebih memilih mengalokasikan lahan untuk kepentingan industri.
- d. Eksplorasi sumber daya alam secara berlebihan. Beberapa perusahaan asing melakukan eksplorasi sumber daya alam secara berlebihan. Akibatnya sumber daya alam di Indonesia habis atau rusak.
- e. Hasil usaha lebih banyak dibawa ke negara asalnya. Dalam beberapa penanaman modal asing memberikan keuntungan yang lebih besar kepada penanam modal. Hasil usaha penanaman modal asing banyak yang dibawa ke negara investor. Untuk itulah pemerintah perlu mempertimbangkan faktor keuntungan dan kerugian secara cermat. Itulah dampak-dampak yang ditimbulkan atas maraknya Investasi, bagaimanapun juga suatu negara dalam menerima investasi baik dalam negeri maupun asing harus pintar-pintar memanfaatkan dampak positif yang ditimbulkannya, dan sebisa mungkin untuk meminimalisir dampak negatifnya.

Pembangunan secara fisik membutuhkan modal yang relatif. Besarannya tergantung pada jumlah fasilitas yang akan disediakan. Tersedianya fasilitas, aksesibilitas, dan sarana pariwisata secara baik dan berkualitas di Pantai Tanjung Setia dan sekitarnya menunjukkan

pengelolaan ekonomi pariwisata yang ada di Pantai Tanjung Setia mengalami perkembangan. Endar Prasetyo (2014) mengatakan majunya pusat-pusat pariwisata ditandai kelengkapan fasilitas pariwisata menandakan banyaknya wisatawan yang menggunakan fasilitas tersebut atau dengan kata lain terjadi perkembangan pariwisata.

Pengelolaan pariwisata jika dilakukan dengan menggabungkan kedua konsep pengelolaan CBT dan Non-CBT maka akan saling melengkapi kekurangan. Artinya secara ideal pengelolaan pariwisata adalah kombinasi keduanya, yakni pelibatan masyarakat/komunitas dengan pelibatan modal yang memadai untuk melakukan usaha secara bersama-sama.

Fariborz, Aref (2011) telah menguji bahwa terdapat hubungan yang kuat antara pemahaman yang sama di dalam komunitas dengan tingkat partisipasi dalam kegiatan pariwisata. Diperkuat oleh Aang (2014) bahwa masyarakat di destinasi wisata berbasis komunitas merasakan lebih menikmati keberlanjutan ekonominya ketimbang pada masyarakat yang tinggal di destinasi wisata berbasis modal. Hal ini terjadi karena masyarakat di sekitar destinasi wisata dengan pengelolaan berbasis CBT memiliki kecenderungan keterlibatan yang besar dan aksesibilitas yang memadai pada aktivitas wisata, namun tidak dipungkiri bahwa pengelolaan destinasi wisata dengan keterpaduan investor (pemilik modal) secara fisik akan menambah gemerlap desa/kota dan menambah perbaikan pada aksesibilitasnya seperti: pasar semakin ramai dan lengkap, jalan raya semakin baik kualitasnya, jumlah ATM, toko, *lounry*, rumah sakit dan sebagainya makin berkembang.

Makna pembangunan ekonomi itu sangat luas bukan hanya sekedar bagaimana meningkatkan produksi barang dan jasa, perbaikan pada aksesibilitasnya pariwisata seperti: pasar semakin ramai dan lengkap, jalan raya semakin baik kualitasnya, jumlah ATM, toko, *loun*dry, rumah sakit dan sebagainya makin berkembang. Pembangunan ekonomi itu bersifat multidimensi yang mencakup berbagai aspek, karenanya harus mengevolusi makna pembangunan ekonomi sebagai suatu proses yang tidak hanya melahirkan pembangunan fisik tetapi ada perbaikan kerangka kelembagaan (*institutional framework*).

Menurut Yustika (2006), menyelaraskan kelembagaan, pertumbuhan ekonomi dan strategi pembangunan tidak sederhana karena indikator kinerja ekonomi pada sistem kelembagaan adalah peningkatan produktivitas kerja dengan spesialisasi ataupun pembagian kerja yang nantinya berhubungan dengan biaya transaksi. Dalam jangka panjang sistem kelembagaan mempengaruhi beberapa aspek bahkan termasuk budaya. Peran ekonomi kelembagaan pada level makro adalah menyiapkan kerangka dasar (infrastruktur kelembagaan) agar pembangunan pariwisata berjalan sesuai yang diinginkan.

Kerangka kelembagaan yang baik memiliki mekanisme penegakan atau pelaksanaan (*enforcement*) yang terarah dan konsisten, jauh dari berbagai pertimbangan. Sisipan kepentingan sepihak, pribadi atau golongan tertentu yang biasanya pula mengorbankan kepentingan pihak lain. Suatu kerangka kelembagaan yang baik juga memiliki mekanisme pelaksanaan yang kukuh, yang mampu menopang dan mewujudkan berbagai aturan, rencana di atas kertas jadi kenyataan.

Proses pertumbuhan ekonomi pada dasarnya ditentukan dan dipengaruhi oleh dua faktor yaitu faktor ekonomi dan non-ekonomi. Pada Bab IV kajian tentang bagaimana faktor ekonomi mendorong pertumbuhan. Namun, dalam pertumbuhan ekonomi ilalai memperhitungkan adanya penambahan penduduk dan disertai dengan perubahan fundamental dalam struktur ekonomi suatu negara dan pemerataan pendapatan.

Teori Pertumbuhan Lewis (dalam Todaro, 2009) menjelaskan transformasi struktur perekonomian dari pola perekonomian pertanian subsisten tradisional ke perekonomian yang lebih modern hanya akan pengalihan tenaga kerja, serta pertumbuhan *output* dan peningkatan penyerapan tenaga kerja di sektor modern. Pelaksanaannya strategi ini ternyata tidak menjamin adanya pemerataan distribusi pendapatan nasional bahkan lebih banyak merugikan masyarakat bawah karena hasil pembangunan lebih terkonsentrasi pada sekelompok orang saja. Hal ini ditandai dengan meningkatnya jumlah pengangguran, urbanisasi desa-kota, marginalisasi kemiskinan dan kerusakan lingkungan. Paradigm pembangunan seperti di atas yang hanya mengejar pertumbuhan yang tinggi karena terbukti hanya akan menghasilkan ketidakmerataan distribusi pendapatan dan makin memperparah terjadinya kerusakan lingkungan, timbulnya ketidakadilan, moral hazard, merusak tradisi dan budaya, menggurita praktik-praktik KKN, pelecehan penegakan hukum, serta mengganggu jalannya tatakelola organisasi.

BAB VI**IMPLIKASI PARIWISATA****TERHADAP KESEJAHTERAAN MASYARAKAT SEKITAR**

Khalayak akademisi maupun masyarakat tradisional sudah sangat paham bahwa pariwisata merupakan salah satu kegiatan yang mampu mendorong perekonomian wilayah sehingga mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat setempat. Tidak heran apabila pariwisata dianggap sebagai sektor yang dapat diandalkan dalam penerimaan devisa dan sangat berperan dalam meningkatkan pemerataan kesempatan berusaha, pendapatan masyarakat, serta pendapatan daerah. Provinsi Lampung yang menjadi topik utama dalam penelitian ini merupakan salah satu wilayah yang memiliki banyak destinasi wisata pantai yang sampai terdengar ke ranah mancanegara. Pariwisata alam berbentuk pantai ini merupakan 2 pantai yang menjadi bagian Kawasan Unggulan Pariwisata (KWP) Lampung yaitu: (1) Pantai Teluk Kiluan dengan wisata lumba-lumba dan kolam Laguna, (2) Pantai Tanjung Setia dengan wisata ombak, sangat diminati oleh surfer internasional.

Dalam bab VI penulis akan mengidentifikasi implikasi pariwisata terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat di sekitar Pantai Teluk Kiluan dan Pantai Tanjung Setia. Pengelolaan destinasi pantai katagori KWP (Kawasan Wisata Unggulan) di Lampung ini cukup unik dan menarik untuk dikaji karena latar belakang pengelolaannya yang berbeda. Pantai Teluk Kiluan dikelola dengan basis komunitas (masyarakat) atau dikenal dengan istilah *Community Base Tourism* (CBT) dan Pantai Tanjung Setia dikelola dengan basis Non-CBT. Lalu bagaimana Implikasinya terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat sekitar?

6.1. Implikasi Pariwisata Pantai Teluk Kiluan Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Sekitar

6.1.1 Implikasi Ekonomi

6.1.1.1 Fasilitas Pendukung Pariwisata Bertambah

Implikasi pariwisata terhadap kesejahteraan masyarakat di Pantai Teluk Kiluan ini dapat kita lihat dari sarana dan prasarana yang sudah ada. Sejak tahun 2005 pemerintah menyalurkan bantuan berupa sarana dan prasarana untuk memudahkan masyarakat dalam mengelola kekayaan alam yang ada di Pantai Teluk Kiluan. Hal ini didukung dari pernyataan informan sebagai berikut.

“...pemerintah provinsi memberikan dukungan berupa pembuatan pendopo, gazebo, bantuan perahu dan *spring bad*....” (MS)

Gambaran informasi dari Marhasan Samba selaku Pemkab Kabupaten Tanggamus kepada kita bahwa masyarakat seharusnya dapat memanfaatkan fasilitas yang ada untuk mengembangkan Pantai Teluk Kiluan menjadi objek wisata yang menguntungkan baik secara finansial maupun non finansial. Namun pada praktiknya masyarakat masih belum memahami bagaimana cara memanfaatkan fasilitas yang ada menjadi objek yang menguntungkan. Hal ini dapat dilihat dari informasi yang diberikan oleh Eliyati ketua tim Penggerak PKK desa sebagai berikut:

“...kurangnya pelatihan untuk masyarakat terkait dengan cara memberikan pelayanan pariwisata yang baik....” (EL).

6.1.1.2. Pendapatan Meningkat

Berdasarkan peraturan daerah kabupaten Tanggamus No. 16 tahun 2011 tentang rencana tata ruang wilayah kabupaten tanggamus tahun 2011-2031 (Perda RTRW) Pasal 32 menetapkan peruntukan kawasan pariwisata dibagi menjadi tiga kategori, diantaranya adalah; 1)

Kawasan peruntukan wisata alam, 2) Kawasan peruntukan wisata budaya, dan 3) Kawasan peruntukan wisata buatan. Pantai Teluk kiluan merupakan suatu kawasan alam suaka margasatwa yang saat ini masih dalam tahap pengembangan. Sejak tahun 2005 pemerintah sudah memberikan bantuan berupa fasilitas yang dapat dikembangkan oleh masyarakat untuk menyediakan layanan jasa dalam rangka meningkatkan pendapatan melalui sektor pariwisata. Bantuan yang diberikan oleh pemerintah berupa pendopo, gazebo, perahu, kipas angin, keramik dan *spring bad*. Dengan bantuan dari pemerintah ini kesempatan yang diperoleh masyarakat dalam membuka lapangan pekerjaan semakin baik.

Saat ini banyak dari penduduk sekitar Pantai Teluk Kiluan membangun *homestay* dan rumah makan disekitar pesisir Teluk Kiluan untuk memfasilitasi para wisatawan, setiap rumah juga sudah ada MCK, serta memperindah bangunan rumah mereka untuk menarik perhatian pengunjung. Sehingga pembangunan yang ada di desa saat ini semakin meningkat diiringi dengan jumlah wisatawan yang terus meningkat setiap tahunnya.

Seiring meningkatnya pendapatan masyarakat akibat berkembangnya pariwisata, hal tersebut berdampak pada meningkatnya

daya beli masyarakat sehingga banyak pemilik *homestay* yang mulai membeli kendaraan mulai dari motor dan mobil yang sederhana sampai dengan model motor dan mobil keluaran terbaru. Selain itu masyarakat yang ekonominya terangkat memiliki pandangan untuk menyekolahkan anaknya di jenjang yang lebih tinggi. Hal ini sejalan dengan Teori Piramida Maslow (1988) dimana masyarakat membutuhkan penghargaan dan pencapaian status ketika kebutuhan dibawahnya telah terpenuhi.

Dalam memenuhi kebutuhan seseorang dihadapkan pada tingkatan kebutuhan. Maslow (1988) menganggap bahwa kebutuhan yang paling rendah harus dipenuhi terlebih dahulu dari kebutuhan menengah sampai kebutuhan paling tinggi. Hirarki kebutuhan Maslow tergambar dari sebuah piramida yang berisi tingkatan kebutuhan. Ada enam tingkatan, yaitu kebutuhan fisiologi, rasa aman, rasa memiliki dan kasih sayang, penghargaan, serta aktualitas diri.

Dari tingkat kebutuhan tersebut, Maslow menggambarkan sebagai tingkatan atau tangga kebutuhan. Maslow berpendapat bahwa setelah manusia memenuhi kebutuhan paling bawah, manusia akan memenuhi kebutuhan di tingkat berikutnya. Apabila manusia memenuhi kebutuhan pada tingkat atas tetapi tingkat bawah belum terpenuhi, maka manusia akan kembali lagi pada kebutuhan sebelumnya. Menurut Maslow, adanya hierarki kebutuhan tersebut didorong oleh dua kekuatan, yaitu motivasi kekurangan dan motivasi perkembangan atau pertumbuhan. Motivasi kekurangan bertujuan untuk mengatasi ketegangan manusia akan kekurangan kebutuhan yang ada. Motivasi perkembangan atau kebutuhan didasarkan atas kapasitas manusia untuk tumbuh dan

berkembang. Dua kapasitas tersebut merupakan kapasitas bawaan manusia, sehingga manusia tidak bisa lepas dari dua kapasitas itu.

6.1.1.3 Pengangguran Terserap

Teori ekonomi penyediaan tenaga kerja berkaitan dengan dunia pariwisata. Teori ini menyatakan, bahwa waktu yang tersedia pada prinsipnya terbatas hanya 24 jam sehari atau 365 hari dalam setahun yang dapat dialokasikan untuk dua kegiatan. (Nicholson, 2005: 666) mengatakan kegiatan yang pertama adalah menghasilkan pendapatan, dan kegiatan yang kedua untuk menikmati pendapatan. Potensi pendapatan yang diperoleh akan semakin besar bila banyak waktu yang dialokasikan untuk mencari nafkah semakin besar. Artinya orang akan mengurangi waktu istirahatnya untuk memperbanyak waktu untuk bekerja. Meningkatnya pendapatan masyarakat secara potensial dapat melakukan kunjungan ke destinasi-destinasi pariwisata.

Dengan bertambahnya jumlah kunjungan pariwisata mendorong masyarakat untuk menyediakan fasilitas pariwisata yang semakin baik. Artinya masyarakat, swasta, dan pemerintah memiliki kesempatan untuk membuka lapangan pekerjaan yang lebih besar. Dengan adanya kesempatan tersebut, maka jumlah tenaga kerja yang terserap pun semakin meningkat. Menurut BPS Lampung jumlah pengangguran setiap tahunnya mengalami penurunan. Pada tahun 2012 tingkat pengangguran sebesar 5,04% turun menjadi 4,33% pada tahun 2016. Meskipun tidak terlalu banyak, namun cukup memberikan gambaran bahwa saat ini pembangunan dan perkembangan pariwisata di Lampung telah berkontribusi terhadap pembangunan daerah karena telah mampu mengurangi angka pengangguran.

6.1.1.4. Harga Produk Lokal Membaik

Implikasi perkembangan ekonomi pariwisata berikut ini adalah harga produk lokal di Pantai Teluk Kiluan semakin membaik. Membaiknya harga produk lokal akibat pengaruh adanya bantuan yang diberikan oleh pemerintah melalui pelatihan-pelatihan, dan sarana transportasi yang baik. Masyarakat sudah mulai mengembangkan produk lokal dengan memanfaatkan sumber daya alam yang melimpah seperti ikan dan buah pepaya dengan membuat abon pepaya, dan teri ikan tongkol. Produk hasil olahan ini menjadi produk makanan khas tersendiri, namun jumlahnya terbatas masih untuk kalangan terbatas juga. Pengembangan produk lokal ini dalam perjalanannya terbata-bata mengingat belum ada *market* nya. Untuk meneruskan membuat makanan khas tersebut masyarakat masih pikir-pikir, mereka khawatir tidak ada wisatawan yang membeli. Sejak tahun 2015 wisatawan yang datang ke Pantai Teluk Kiluan kecenderungannya menurun sampai saat ini.

6.1.1.5. Diversifikasi Mata Pencarian

Mayoritas masyarakat di sekitar Pantai Teluk kiluan adalah petani, berkebun, dan nelayan. Kondisi ini mencerminkan bahwa pariwisata masih hanya sebatas pekerjaan sampingan, atau sebagai tambahan penghasilan. Kondisi ini mungkin terjadi akibat kurangnya pemahaman dan keterampilan yang cukup dalam mengelola ekonomi pariwisata yang ada di teluk kiluan. Atau lapangan pekerjaan yang dikembangkan tidak mampu menyerap jumlah tenaga kerja yang ada. Artinya antara lapangan pekerjaan dan jumlah tenaga kerja tidak sebanding. Namun, meskipun mayoritas bekerja sebagai petani dan nelayan namun masyarakat tetap dilibatkan secara partisipatif untuk tetap berkontribusi aktif di sektor

pariwisata. Pelibatan masyarakat seperti dalam mengelola perahu, *homestay*, kolam Laguna, *travel*, dan *Tour guide*, hal ini dilakukan guna untuk meningkatkan kesejahteraan bersama.

6.1.1.6 Aksesibilitas

Aksesibilitas pariwisata di Pantai Teluk Kiluan saat ini sudah terbilang cukup baik, Topografi dari Pantai Teluk Kiluan ini berbukit dan berlembah, sehingga akses menuju objek wisata tersebut bisa terbilang masih belum mulus. Namun, kondisi tersebut justru memberi tantangan tersendiri bagi para petualang untuk berkunjung ke objek wisata tersebut.

Pemerintah provinsi Lampung melalui dinas pekerjaan umum dan penataan ruang (PUPR) melakukan pembangunan ruas jalan simpang Teluk Kiluan. Hal ini dilakukan untuk mendukung pembangunan destinasi pariwisata Pantai Teluk Kiluan. Akses menuju Pantai Teluk Kiluan bisa terbilang cukup menantang. Kondisi geografis menuju objek wisata tersebut sangat curam, berbatuan, dan licin akibat lumpur becek di jalan.

Namun masyarakat di sekitar Pantai Teluk Kiluan tersebut menyediakan fasilitas transportasi menuju lokasi tersebut, menggunakan mobil untuk *off road* seperti Jeep atau Luv, sehingga para wisatawan tetap bisa berkunjung dengan mudah.

Dampak kinerja ekonomi lokal dan aksesabilitas ekonomi di sekitar Pantai Teluk Kiluan memberikan dampak positif terhadap peningkatan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat. Menurut Todaro dan Stephen C. Smith (2006:22), kesejahteraan masyarakat menunjukkan ukuran hasil pembangunan masyarakat dalam mencapai kehidupan yang lebih baik yang meliputi peningkatan kemampuan dan

pemerataan distribusi kebutuhan dasar seperti makanan, perumahan, kesehatan, dan perlindungan, peningkatan tingkat kehidupan, tingkat pendapatan, pendidikan yang lebih baik, dan peningkatan atensi terhadap budaya dan nilai-nilai kemanusiaan, dan memperluas skala ekonomi dan ketersediaan pilihan sosial dari individu dan bangsa. Kesejahteraan masyarakat tidak hanya berhubungan dengan hal yang bersifat ekonomi namun berhubungan dengan beberapa faktor non ekonomi seperti faktor sosial, budaya, dan politik.

Akibat aktivitas sektor pariwisata, masyarakat di sekitar Pantai Teluk Kiluan mendapatkan keuntungan dari segi ekonomi maupun non ekonomi, dari segi ekonomi masyarakat sekitar Teluk Kiluan memperoleh keuntungan dari kebutuhan harga pokok yang semakin meningkat. Penghasilan dari *homestay*, transportasi, konsumsi, *tour guide*, dan sebagainya. Selain itu, pembangunan ekonomi sektor pariwisata juga mempermudah sarana dan prasarana dalam melakukan berbagai macam aktivitas kebutuhan manusia. Diantaranya adalah, pembangunan ruas jalan, bertambahnya bangunan berupa *homestay* di sekitar pesisir pantai, rumah makan, dan sebagainya.

6.1.2 Implikasi Non-Ekonomi

6.1.2.1 Wisata Konservasi

Mayoritas masyarakat di sekitar Pantai Teluk Kiluan adalah petani, berkebun, dan nelayan. Kondisi ini mencerminkan bahwa pariwisata masih hanya sebatas pekerjaan sampingan. Kondisi ini mungkin terjadi akibat kurangnya pemahaman dan keterampilan yang cukup dalam mengelola pariwisata yang ada di Pantai Teluk Kiluan. Atau lapangan

pekerjaan yang dikembangkan tidak mampu menyerap jumlah tenaga kerja yang ada. Artinya antara lapangan pekerjaan dan jumlah tenaga kerja tidak sebanding. Sehingga masyarakat lebih memilih untuk bertani, berkebun dan menjadi nelayan. Perbedaan persepsi dan kesadaran masyarakat dalam mengelola objek wisata inipun masih sangat kurang.

Kurangnya SDM yang berkualitas dalam mengelola sektor pariwisata masih sangat terbatas. Hal ini didukung dari pernyataan informan sebagai berikut.

“.....konsep ekowisata ini menjadi tambahan penghasilan bagi warga sekitar, bukan menjadi mata pencarian utama. Mata pencarian utama tetap bertani, berkebun, dan nelayan.....” (RC).

“.....terkadang masih belum ada kesamaan pemahaman dari masyarakat karena terbentur masalah SDM, kurangnya kesadaran dari pihak desa juga masih sangat kurang.....” (RC).

Meskipun mayoritas masyarakat sekitar di Pantai Teluk Kiluan berprofesi sebagai petani, namun sektor pariwisata tetap membawa dampak yang positif dalam meningkatkan perekonomian dan pembangunan yang ada di sekitarnya. Menurut badan pusat statistik (BPS) Lampung, tahun 2016 perkembangan sektor pariwisata di provinsi Lampung memberikan nilai tambah sebesar Rp. 3,12 triliun atau memberikan kontribusi sekitar 1,92% terhadap PDRB. Jika membandingkan data selama kurun waktu 2004 hingga 2016, kontribusi sektor Pariwisata hanya naik 0,34% dari 1,58% menjadi 1,92% pada tahun 2016, atau naik rata-rata 0,028% per tahun. Data ini cukup memberikan informasi kepada kita bahwa sektor pariwisata mampu

meningkatkan perekonomian masyarakat sekitar teluk kilauan. Hal ini dibuktikan dengan informasi dari salah satu informan sebagai berikut.

“.....kebanyakan untuk daerah pesisir, ningkatlah sejahtera, pendapatannya meningkat akibat adanya pariwisata, sehingga kehidupan mereka lebih makmur.....” (EL).

Masyarakat yang ada di Pantai Teluk Kiluan ingin menjadikan kawasan tersebut sebagai kawasan konservasi. Hal ini dilakukan sebagai salah satu upaya yang dilakukan oleh masyarakat untuk melestarikan lingkungan. Dengan adanya kawasan konservasi ini diharapkan mampu melindungi ekosistem yang ada serta mencegah kerusakan yang timbul akibat wisatawan maupun masyarakat sekitar Pantai Teluk Kiluan. Sehingga kesempatan dimasa yang akan datang untuk mengembangkan pariwisata khususnya untuk meningkatkan penghasilan dan taraf hidup semakin besar. Hal ini didukung dari pernyataan informan sebagai berikut.

“.....menjadikan Pantai Teluk Kiluan sebagai kawasan konservasi perairan daerah sudah dilakukan sejak tahun 2012, sekaligus mengajak masyarakat untuk melestarikan lumba-lumba dengan menjadikannya sebagai objek wisata”.... (RC)

Ekowisata merupakan konsep pariwisata yang mencerminkan wawasan lingkungan, keseimbangan, dan kelestarian lingkungan (Damanik & Weber, 2006). Ekowisata sendiri merupakan bentuk tanggungjawab dengan cara melakukan konservasi lingkungan dan alam untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat lokal. Berikut keuntungan yang akan diperoleh dari adanya kegiatan ekowisata ini, diantaranya

201
adalah: 1) timbulnya rasa peduli terhadap alam dan budaya, 2) menumbuhkan rasa cinta terhadap lingkungan alam dan budaya, 3) menghormati nilai-nilai budaya dan agama masyarakat sekitar, 4) pengembangan sektor wisata harus melalui musyawarah dan disetujui oleh masyarakat setempat, 5) menaati peraturan perundang-undangan, 6) memberikan kepuasan bagi warga sekitar dan para wisatawan.

6.1.2.2 Peningkatan Skill, Pendidikan dan Kesehatan

Masyarakat sekitar Pantai Teluk Kiluan mulai mencoba mengembangkan keterampilannya dibidang makanan, yaitu membuat abon dari pepaya, teri, ikan tongkol. Hasil laut yang melimpah dimanfaatkan oleh para nelayan menjadi sebuah usaha yang sangat menguntungkan. Pemerintah juga ikut andil dalam melakukan pelatihan-pelatihan secara insentif kepada masyarakat dengan tujuan untuk membuka lapangan pekerjaan yang dapat menyerap tenaga kerja, sehingga angka pengangguran menjadi berkurang dan perekonomian masyarakat pun semakin meningkat.

“.....adanya pelatihan memasak seperti abon pepaya, dan abon dari ikan teri,ikan tongkol.....” (EL).

Banyaknya wisatawan yang berkunjung ke Pantai Teluk Kiluan memberi kesempatan kepada masyarakat untuk membuka wawasan terkait ilmu pengetahuan dan keanekaragaman bahasa. Masyarakat disekitar teluk kilauan termotivasi untuk mengenal lebih dalam budaya asing maupun bahasa asing. Tidak sedikit dari mereka yang fasih menggunakan bahasa Inggris akibat sering berinteraksi dengan para wisatawan mancanegara. Terutama mereka yang bekerja sebagai *tour*

guide. Hal ini memberi dampak positif terhadap masyarakat sekitar untuk memahami dan mengetahui budaya asing, serta ilmu pengetahuan yang lebih luas. Hal ini didukung oleh salah satu informan sebagai berikut.

“...Kebanyakan masyarakat mulai belajar bahasa Inggris, karena semakin lama, semakin banyak turis asing yang berkunjung.

Terutama anak-anak muda sangat antusias belajar bahasa Inggris.” (EL)

6.1.2.3 Keamanan

Dari wacana di atas, keinginan seseorang untuk berkembang sejalan dengan teori kebutuhan Maslow (1988), dimana teori ini menyatakan bahwa Manusia diposisikan sebagai makhluk yang lemah dan terus berkembang, memiliki potensi diri untuk suatu pencapaian dan dipengaruhi oleh lingkungan untuk dapat tumbuh tinggi, lurus, dan indah. Selain itu, teori ini merupakan konsep aktualisasi diri yang merupakan keinginan untuk mewujudkan kemampuan diri atau keinginan untuk menjadi apapun yang mampu dicapai oleh setiap individu.

Seperti yang kita ketahui, bahwa sektor pariwisata sangat berkontribusi dalam meningkatkan perekonomian masyarakat. Namun tentu saja aktivitas ini tidak terlepas dari dampak negatif yang ditimbulkan akibat perbuatan yang dilakukan oleh masyarakat maupun wisatawan.

Salah satunya berkaitan dengan keamanan, perkembangan sektor pariwisata yang cepat sering kali memicu kekhawatiran terhadap situasi keamanan dan kenyamanan wisatawan maupun masyarakat lokal.

Perkembangan pariwisata yang begitu cepat sering kali tidak diikuti dengan pola pikir masyarakat terhadap dampak yang akan ditimbulkan

setelah kawasan tersebut dijadikan sebagai destinasi pariwisata. Selain itu sampah yang ditimbulkan akibat dari konsumsi wisatawan yang berlebihan jika tidak diolah dengan baik, maka akan mengganggu kenyamanan dari wisatawan maupun masyarakat lokal itu sendiri. Hal ini disampaikan oleh salah satu informan sebagai berikut.

“.....keamana di desa harus diperkuat agar masyarakat tidak resah, dan seharusnya sampah yang mereka (wisatawan) buang tidak menjadi beban kita (masyarakat sekitar Pantai Teluk Kilauan”.....

(EL)

Upaya yang dilakukan dalam menjaga sistem keamanan dan kenyamanan di daerah sekitar teluk kilauan mengacu kepada teori Max Weber (dalam Ritzer, 1992) yang membedakan tindakan sosial yang sering kali memicu terjadinya di masyarakat, diantaranya adalah: 1) rasionalitas instrumental, yaitu tindakan yang diarahkan secara rasional untuk mencapai tujuan tertentu, 2) rasionalitas nilai, yaitu tindakan yang didasarkan atas dasar keyakinan individu pada nilai-nilai etis, etis, dan keagamaan, 3) tindakanyang dipengaruhi emosi, tindakan ini dipengaruhi oleh emosi dan perasaan seseorang kepada orang lain, 4) dan tindakan karena kebiasaan, yaitu tindakan yang didasarkan pada tradisi yang sudah baku.

Teluk kilauan merupakan objek wisata yang dibangun berdasarkan nilai-nilai budaya masyarakat lokal. Kunjungan masyarakat terus mengalami peningkatan sehingga tidak heran jika masyarakat terus meningkatkan sistem keamanan, dengan tujuan untuk melindungi masyarakat lokal dan para wisatawan itu sendiri. Sehingga wisatawan

yang ingin berlibur keteluk kilauan tidak perlu resah, masyarakat pun merasa diuntungkan dengan adanya peningkatan jumlah pengunjung.

Pariwisata merupakan sebuah industri yang mempunyai prospek yang sangat besar dan menjanjikan di masa yang akan datang.

Pariwisata menjadi salah satu sektor yang berperan penting dalam meningkatkan perekonomian suatu daerah. Menurut undang-undang

No.10 tahun 2010 tentang kepariwisataan, yang menyatakan bahwa:

1. Sumber daya alam menjadi modal kepariwisataan, dimanfaatkan secara optimal melalui penyelenggaraan kepariwisataan untuk meningkatkan pendapatan nasional.
2. Memperluas kesempatan berusaha dan membuka lapangan pekerjaan.
3. Mendorong pembangunan kepariwisataan daerah.
4. Memperkenalkan dan mendayagunakan daya tarik wisata dan destinasi.

Berdasarkan peraturan di atas, maka secara tidak langsung tujuan dikembangkannya sektor pariwisata di sekitar teluk kilauan tidak lain hanyalah untuk kepentingan dalam rangka meningkatkan perekonomian masyarakat itu sendiri. Berikut perkembangan kinerja ekonomi lokal sektor pariwisata di teluk kilauan.

Dari segi non material, dilihat dari tingkat pendidikan masyarakat sekitar teluk kilauan meningkat dengan baik, hal ini disebabkan oleh sektor pariwisata mampu membuka wawasan masyarakat untuk berkembang. Akibat sering berinteraksi dengan banyak wisatawan, sekaligus menjadi motivasi mereka untuk menjadi masyarakat yang lebih maju. Kegiatan pariwisata juga menambah penghasilan dari segi finansial

yang dapat mereka gunakan untuk menyekolahkan putra dan putri mereka.

Dilihat dari tingkat kesehatan, masyarakat disekitar teluk kiluan sudah sangat baik, karena sektor pariwisata mendorong masyarakat untuk menjaga pola kehidupan yang sehat. Masyarakat harus menjaga kebersihan lingkungan, rumah, dan konsumsi yang mereka makan. Hal ini mereka lakukan agar menarik minat wisatawan yang ingin berkunjung apabila keadaan lingkungan sekitar menjadi bersih, bebas dari sampah, sehingga menambah keindahan panorama alam di sekitar daerah teluk kiluan. Menyediakan makanan yang sehat sudah menjadi keharusan bagi masyarakat sendiri maupun untuk para pengunjung. Kebutuhan akan MCK juga sudah terpenuhi dengan baik, sehingga kebersihan lingkungan semakin terjaga dari berbagai macam penyakit. Bertambahnya penghasilan dari segi finansial juga membantu masyarakat untuk berobat apabila mereka sakit.

Dengan adanya pengelolaan di sektor pariwisata, kesejahteraan masyarakat di sekitar teluk kiluan bisa dibilang cukup baik. Kebutuhan dasar yang mereka inginkan seperti makanan, pakaian, tempat tinggal sudah terpenuhi dengan baik. Sehingga tingkat kebahagiaan maupun perasaan senang yang dirasakan oleh masyarakat teluk kiluan semakin terasa. Namun aktivitas pariwisata ini juga tidak terlepas dari dampak negatif yang ditimbulkannya akibat dari perbedaan persepsi yang semakin lama semakin berkembang. Masyarakat sekitar resah dengan adanya pengaruh dari budaya asing yang masuk. Sehingga mempengaruhi pemuda-pemudi yang ada di teluk kiluan tersebut. Diantaranya melalui gaya hidup, budaya, dan lain sebagainya.

Kunjungan masyarakat terus mengalami peningkatan sehingga tidak heran jika masyarakat terus meningkatkan sistem keamanan, dengan tujuan untuk melindungi masyarakat lokal dan para wisatawan itu sendiri.

Sehingga wisatawan yang ingin berlibur ke teluk kilauan tidak perlu resah, masyarakat pun merasa diuntungkan dengan adanya peningkatan jumlah pengunjung.

Kehidupan masyarakat dari segi pendidikan, kesehatan, kesejahteraan sudah dibidang cukup baik, meskipun terdapat beberapa masih banyak yang perlu mendapat perhatian lebih mendalam terutama berkaitan dengan sistem keamanan dan keharmonisan sesama penduduk lokal dan wisatawan. Hal ini sejalan dengan teori kebutuhan Maslow (1988), terdapat lima tingkatan kebutuhan dasar manusia, diantaranya adalah: 1) *Basic Needs*, yaitu kebutuhan fisiologi, kebutuhan yang paling penting seperti kebutuhan akan makanan. 2) *Safety Needs* atau kebutuhan akan keselamatan, merupakan kebutuhan yang meliputi keamanan, kemantapan, ketergantungan, kebebasan dari rasa takut, cemas dan kekalutan; kebutuhan akan struktur, ketertiban, hukum, batas-batas kekuatan pada diri, pelindung dan sebagainya. 3) *Love needs*, atau kebutuhan rasa memiliki dan rasa cinta, merupakan kebutuhan yang muncul setelah kebutuhan fisiologis dan kebutuhan keselamatan telah terpenuhi. 4) *Esteem needs*, atau kebutuhan akan harga diri. Semua orang dalam masyarakat mempunyai kebutuhan atau menginginkan penilaian terhadap dirinya yang mantap, mempunyai dasar yang kuat yang biasanya bermutu tinggi akan rasa hormat diri atau harga diri dan penghargaan dari orang lain.

Kesejahteraan masyarakat dapat kita lihat salah satunya dengan melihat adanya pembangunan serta pertumbuhan ekonomi baik di sektor

pariwisata maupun sektor lainnya. Artinya aktivitas tersebut tidak diukur dari kenaikan produksi barang dan jasa yang berlaku dari tahun ke tahun tetapi juga perlu diukur dengan perubahan lain yang berlaku dalam beberapa aspek kegiatan ekonomi seperti perkembangan pendidikan, infrastruktur yang tersedia, dan peningkatan dalam pendapatan dan kemakmuran masyarakat.

Beberapa variabel hasil temuan penulis atas implikasi ekonomi pariwisata Pantai Teluk Kiluan terhadap kesejahteraan masyarakat sekitar yang di kelola dengan CBT secara ringkas dapat dilihat pada tabel 6.1 di bawah ini

Tabel 6.1 Matriks Implikasi Pariwisata Pantai Teluk Kiluan Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Sekitar

No	Implikasi Ekonomi Pariwisata	
	Ekonomi	Non-Ekonomi
1	Pendapatan	Wisata Konservasi yang Peduli lingkungan Taat aturan/UU Cinta Lingkungan (Love needs) Menghargai Nilai Budaya Kepuasan Kebanggaan
2	Tenaga Kerja	Peningkatan <i>Skill</i>
3	Diversifikasi Mata Pencaharian	Pengembangan Diri
4	Aksesibilitas	Keamanan (<i>Safety needs</i>)
5	Bantuan Fasilitas	Pendidikan
6	Harga Produk Lokal	Kesehatan

Sumber: Olahan Hasil Penelitian, 2019

6.2 Implikasi Perkembangan Pariwisata Pantai Tanjung Setia Terhadap Kesejahteraan masyarakat Sekitar

6.2.1 Implikasi Ekonomi

6.2.1.1 Terserap Tenaga Kerja

Pembangunan ekonomi yang tidak saja diukur dari kenaikan produksi barang dan jasa tetapi perlu diukur dengan perubahan lain seperti pengembangan infrastruktur serta peningkatan dalam kesejahteraan masyarakat. Pembangunan ekonomi pariwisata dengan konsep non-komunitas tentunya memiliki dampak ekonomi yang cukup besar terhadap masyarakat sekitar Tanjung Setia. Seluruh pelaku ekonomi akan merasakan dampak yang dapat dirasakan langsung ataupun tidak langsung terkait pembangunan ekonomi yang terjadi. Seperti diungkap Dulhayyin masyarakat lokal di Tanjung Setia:

“Dampak positifnya ya itu, banyak tenaga kerja yang terserap di sini..”

Pernyataan di atas memberi pemahaman bagi masyarakat, bahwa pembangunan ekonomi pariwisata berdampak positif sebagai salah satu jalan yang dapat digunakan untuk memperluas lapangan pekerjaan.

Dulhayyin merupakan salah satu informan yang merupakan masyarakat asli Tanjung Setia. Setiap harinya Dulhayyin bekerja di kebun, tidak merasakan langsung dampak yang diberikan atas perkembangan Pantai Tanjung Setia namun dari penjelasan yang diberikan terlihat bahwa beliau pun mengamati perkembangan tersebut. Hal ini sesuai dengan penelitian Fandeli (1995) yang menjelaskan bahwa penilaian keberhasilan pengembangan pariwisata suatu daerah salah satunya

adalah berdasarkan daya serap tenaga kerja baik berskala kecil dan menengah. Hal tersebut diperjelas oleh penjelasan Rina pegawai pemerintah Kabupaten Pesibar yang menjelaskan:

“.....Tenaga kerja mereka ngambil dari sini, tetapi untuk manager kan belum mampu karena masyarakat sini masih unskill, dari losmen dan hotel kan ada pajak tahunan ada pajak penghasilan, pajak penghasilan itu satu persen dari omset secara keseluruhan.....” (RN)

Pernyataan informan di atas memastikan bahwa penyerapan tenaga kerja yang ada di Pantai Tanjung Setia hanya berdasarkan kesediaan tenaga kerja yang minim kemampuan (*low skill*). Oleh karena itu, untuk mendukung hal tersebut tentunya diperlukan peran pemerintah untuk menanganinya. Hal ini juga sesuai dengan pendapat Jhon Eduar yang menjelaskan bahwa:

“.....Para pengusaha jangan melepaskan kearifan lokal, bisa naik kelas gak yang lokal ini? kalo mereka tidak mau meningkatkan kompetensi mereka kita tidak bisa, terutama pengetahuan bahasa mereka, kemampuan dari *skill* mereka bisa naikkan, bagaimana menyusun perlindungan (terhadap tenaga kerja), BPJS kesehatan harus melindungi tenaga kerja lokal, karena yang kami dapatkan hari ini adalah hanya bagaimana masyarakat kami bisa menikmati hasil pariwisata untuk kehidupan mereka, gak lebih dari itu kok.....” (JE)

Selain terbukanya lapangan pekerjaan bagi warga sekitar Pantai Tanjung Setia terdapat faktor lain yang dapat memberikan dampak

terhadap kesejahteraan masyarakat, yaitu jam kerja. Dulhayyin menjelaskan:

“....Ya kalau kerja jaga penginapan ya mungkin sekitar 7jam/hari, jadi ya di gaji tergantung sama berapa jam dia kerja itu....” (DY)

Penjelasan tambahan dilontarkan lagi oleh Dulhayyin

“....Tergantung yang punya juga sih, sama tergantung juga sama orang yang datang kesana, ya kalau sepi gak sampe lah seharian, paling cuma bersih-bersih aja....” (DY)

Penjelasan informan di atas memastikan bahwa penduduk yang bekerja di losmen, *cottage* atau hotel memiliki pendapatan berdasarkan jam kerja, semakin lama bekerja maka pendapatan yang didapatkan akan semakin besar. Menurut Basir (1990:51), terdapat hubungan positif antar jam kerja dengan produktivitas kerja dan kesejahteraan tenaga kerja. Penduduk Pantai Tanjung Setia yang memiliki jam kerja lebih rendah akan memiliki pendapatan yang rendah juga, hal ini tentu menjadi salah satu faktor yang nantinya akan menyebabkan pengangguran, hal ini disebabkan karena jika selama satu hari penduduk hanya bekerja beberapa jam saja, dan selain jam tersebut penduduk tidak melakukan kegiatan yang bermanfaat bagi perekonomian makan dapat digolongkan menjadi penduduk setengah menganggur (Yoeti, 1996) Menurut Kuznets, salah satu karakteristik proses pertumbuhan ekonomi yaitu tingginya kenaikan produktivitas tenaga kerja. Ini dapat terlihat jelas dari kondisi yang saat ini dirasakan oleh masyarakat sekitar Tanjung Setia. Terlihat perbedaan yang sangat

menonjol antara pekerjaan yang dimiliki masyarakat dahulu sebelum Pantai Tanjung Setia dikenal banyak orang dibandingkan dengan pekerjaan yang ada saat ini

“.....Kerjanya sebagai satpam, pembantu, tourguide, pemandu wisata, banyak anak kita yang sudah pintar bahasa inggris sekarang, sehari ojek dapat 50 ribu.....” (RN)

6.2.1.2 Perputaran Uang Cepat

Keberadaan Pantai Tanjung Setia menurut emik di atas memiliki implikasi terhadap perekonomian masyarakat sekitar. Implikasi terhadap masyarakat sekitar dapat dilihat dari semakin banyaknya lapangan pekerjaan. Seperti diungkap oleh Rina pegawai pemerintah kabupaten di Tanjung Setia:

“.....dampak positifnya semakin maju pariwisata semakin banyak wisatawan baik mancanegara maupun lokal, dengan banyaknya mereka datang kemari kan otomatis perputaran uang di pesisir barat akan meningkat karena mereka datang itu pasti belanja, menginap, makan.....” (RN)

Efek positif yang dimiliki dari keberadaan Pantai Tanjung Setia seperti yang diungkap oleh salah satu pegawai pemerintah kabupaten bisa dijadikan sebuah indikasi bahwa majunya pariwisata di Tanjung Setia ini telah menarik banyak pihak dari wisatawan lokal maupun mancanegara. Hasil dari perkembangan pariwisata ini diharapkan bisa memberikan pemasukan yang cukup besar terhadap penerimaan daerah yang berasal dari pajak, devisa dari para wisatawan asing, serta retribusi. Rina mengatakan:

“...kalau pajak tahunan masuk ke pemkab, ke dispenda, kalau pajak penghasilan yang 1% ada aturan baru dari tahun 2016, pemerintah pusat permen (peraturan menteri) kalo gak salah harus setor ke pusat, baik *online* maupun langsung....” (RN)

Informan Amin sebagai supir *travel* juga menambahkan :

“....Pemda ya pasti dapat pajak retribusi....” (RN)

Informasi Rina tersebut mengandung pengertian bahwa pemerintah daerah juga mendapat pengaruh positif dari berkembangnya pariwisata Pantai Tanjung Setia, maka kontribusi Pemerintah Daerah juga diharapkan untuk terus mendorong sektor pariwisata ini. Menurut Timothy (1999:372) partisipasi masyarakat dalam pariwisata terdiri dari dua perspektif yaitu dalam partisipasi lokal dalam proses pengambilan keputusan dan partisipasi lokal berkaitan dengan keuntungan yang diterima masyarakat akibat pembangunan pariwisata.

Efek domino bagi masyarakat sekitar Pantai Tanjung Setia atau efek domino yang lebih luas akibat berkembangnya wisata ini adalah luasnya lapangan pekerjaan yang muncul. Lapangan kerja yang luas tentunya mempermudah masyarakat dalam mendapatkan penghasilan, hal ini disebabkan karena semakin mudahnya masyarakat mendapat pekerjaan. Seperti diutarakan oleh Dulhayyin:

“....Sekarang pendapatan masyarakat meningkat seperti ikan harganya lebih mahal di sini dari pada di Tanjung Karang, jadi ya nelayan nambahlah pendapatannya....” (DY)

“...Kalau ke kebun hariannya 70 ribu, kalau ikan lebih banyak untungnya, kalau yang penampung jutaan kalau yang eceran yang motoran ya nggak juga sekitar 100-500 ribu....” (DY)

Ungkapan Dulhayyin di atas menunjukkan bahwa sebelum Pantai Tanjung Setia memiliki perkembangan di bidang pariwisata, harga jual ikan yang ada tidak setinggi seperti sekarang. Tidak hanya yang berprofesi sebagai nelayan saja, kegiatan keseharian masyarakat sendiri adalah berkebun, bahkan bisa menghabiskan hampir setengah harinya disana, entah sebagai pemilik kebun atau hanya sebagai pekerja juga merasakan dampak positif yang diberikan oleh ekonomi pariwisata Pantai Tanjung Setia. Dulhayyin juga mencontohkan:

“....Ya terutama sebagian kalau misal kita punya kebun, agak mahal hasilnya, ya gitu aja, kayak sawit, kelapa bisa mahal gitu aja untuk masyarakat....” (DY)

Hal diatas dapat diartikan bahwa mereka masih berpikir bahwa sektor berkebun lebih menghasikan daripada objek wisata pantai tersebut namun belum sampai berpikir untuk mengembangkan yang sebenarnya itu adalah potensi besar dengan tujuan menggerakkan perekonomian, khususnya untuk masyarakat sekitar

Masyarakat lain yang sadar akan potensi wisata merasakan dampak secara langsung terhadap perkembangan wisata Pantai Tanjung Setia seperti yang disampaikan oleh *travel* lokal:

“....kalau berlipat-lipat kayaknya enggak, soalnya gini makin lama makin tambah banyak travel-travel itu, mobil tambah banyak, kalau penumpang paling ada peningkatan-peningkatan sedikit....” (A)

Dari emik di atas mengartikan bahwa keberadaan Pantai Tanjung Setia saat ini memberikan dampak terhadap perkembangan usaha travel, memiliki dampak positif terkait peningkatan omset dari usaha jasa transportasi tersebut.

6.2.1.3 Timbul Sumber Pendapatan Baru

Selain pelaku usaha travel, masyarakat yang merasakan langsung dari perkembangan ekonomi di Pantai Tanjung Setia adalah pemilik warung di sekitar lokasi, semakin banyaknya wisatawan yang datang secara otomatis akan menambah pendapatan yang dimiliki oleh masyarakat. Seperti yang disampaikan oleh Sri Zahara, pemilik warung bahwa:

“....ke tulong...nge buka waghung pak tahun inji” (SZ)
(tertolong....dalam usaha buka warung selama 4 tahun ini)

Informan tersebut menambahkan dengan dikembangkannya objek wisata ini juga akan memperluas kesempatan kerja bagi masyarakat sekitar dan akan memunculkan berbagai sektor usaha baru yang saling terkait sebagai pelengkap kebutuhan disekitar objek wisata, seperti halnya penyewaan *homestay*, warung makan, *travel*, penyewaan alat-alat surfing dan termasuk usaha rental sepeda motor, Sri Zahara menambahkan:

“....kik nyewako motor hargani 65 ribu per-ghani, harga nyiwa losmen wat si ghua ratus ribu per-ghani, wat si telu ratus ribu per-ghani.....” (SZ)

(Kalau menyewakan motor dengan harga 65 ribu sehari, harga sewa losmen ada yang 250 ribu/ per-hari ada yang 300 ribu per-hari)

Kesimpulannya adalah masyarakat sekitar Pantai Tanjung Setia mendapatkan keuntungan secara finansial, namun terdapat beberapa dampak negatif yang diberikan akibat adanya pariwisata di Tanjung Setia.

6.2.2 Implikasi Non-Ekonomi

6.2.2.1 Implikasi Terhadap Budaya

Menurut Wahab (2008), pengembangan pariwisata seharusnya dapat meningkatkan peran masyarakat dalam ikut serta memberikan nilai yang sudah ada di masyarakat daerah tersebut sebagai sebuah identitas. Namun hal tersebut sepertinya belum diterapkan oleh masyarakat Pantai Tanjung Setia, seperti yang disampaikan informen Rina sebagai berikut:

“.....dan juga kepada turis itu juga, jaga adat kita, seperti pakai baju, jangan sampai gak pakai baju gitu kita gak senangnya....”

(RN)

Rina melanjutkan pernyataannya mengenai budaya ke barat-baratan masyarakat yang ngadopsi dari perilaku wisatawan asing;

“.....Dampak negatifnya ini, banyak anak orang orang kita ini yang ikut mereka jadi kebarat-baratan, jadi ya kita ini bekal anak kita dengan ilmu agama terutama perempuan banyak yang kebawa enggak enggak lah....” (RN)

Pernyataan wawancara di atas, dapat disimpulkan bahwa masyarakat merasa tidak nyaman terhadap nilai yang ditularkan oleh wisatawan asing, ini juga menunjukkan bahwa masyarakat belum mampu secara tegas memberikan arahan kepada wisatawan asing yang melakukan sesuatu tidak sesuai dengan norma yang dijunjung oleh masyarakat, Rina menambahkan;

“.....lebih maju, lebih terkenal di mancanegara supaya semakin banyak wisatawan masuk kemari, tetapi harapannya penjagaannya cukup ketatlah mengenai masuknya narkoba dsb, kemudian seperti pakaian yang kurang sopan untuk sekarang udah bagus sih, tetapi peraturan itu jangan sampai luntur, tetap ditegakkan jangan sampai kalah dengan budaya mereka, mau disamakan dengan Bali kita tidak setuju, memang bali luar biasa perkembangan wisatanya, cuma kan akidahnya mereka gak sama dengan kita, kalau kita mayoritas Islam.....” (RN)

Kemudian Rina menambahkan keterangannya, Eksternalitas yang terjadi atas perkembangan ekonomi pariwisata atau pengaruh negatif lainnya yang ditimbulkan wisatawan terhadap budaya biasanya anak-anak muda untuk nenteng minuman keras dan menggunakan narkoba;

“.....contoh anak-anak muda, kalau dulu mereka kan gak kenal namanya narkoba dengan datangnya mereka di Tanjung Setia ini sudah ada yang tertangkap, ada tujuannya yang baik untuk surfing tapi mungkin juga ada yang tujuannya jelek, pengen masukin hal-hal negatif seperti itu, yang jelas dulu masyarakat

masih awam dengan minuman keras sekarang sudah terjadi....”

(RN)

Penuturan Rina berikutnya tentang perubahan gaya hidup (budaya) berpakaian masyarakat;

“... yang biasanya sopan pakaiannya, sekarang mereka udah niru gaya barat, yang celananya cuma segini hanya empat jari dari lekukan ini (sambil nunjuk ke dada), mereka gak malu lagi ke pasar pake begituan pake yuken...” (RN)

Selanjutnya Rina menyatakan kembali;

“.....pakaian anak-anak sekarang juga mengikuti turis itu, saya yakin pasti ada yang berpengaruh itu, walaupun gak terang-terangan.....” (RN)

Hal ini menunjukkan bahwa ternyata kehadiran wisatawan asing tidak selamanya memberikan dampak positif terhadap masyarakat sekitar. Wisatawan mancanegara tersebut juga membawa dampak eksternal, yaitu banyak budaya masyarakat yang mulai berubah terutama dalam cara berpakaian anak muda dan juga terkait dengan penggunaan barang-barang terlarang yang sebelumnya tidak terjadi.

Spillane (1987) menjelaskan bahwa jika seseorang datang ke sebuah tempat pariwisata dan berhubungan dengan budaya masyarakat, harusnya terdapat motivasi seperti mempelajari adat-istiadat dari budaya di daerah tersebut. Hal ini sesuai dengan informasi yang didapatkan dari Jhon Eduar;

218
...kita tidak bisa menghindari datangnya mereka memiliki dampak, seperti nenteng minuman di jalan sudah gak malu lagi, walaupun belum berdampak begitu besar, jadi seharusnya kita bisa menata....” (JE)

Jhon Eduar sebagai Informen menambahkan penjelasannya mengenai jargon Pemkab “Negeri Para Sebatin dan Para Ulama”, telah ditumbur dengan gerakan gerakan pariwisata.

“.....seperti *Krui Fair* (Krui Pro) itu mengundang artis tapi pakaiannya harus sopan lho, kita kan menikmati suaranya, sementara filosofi dari bupati “Negeri para sebatin dan para ulama”, yang perlu ditanyakan ulama yang dimaksud itu seperti apa, nah itu semua tergantung para pimpinan, mau seperti apa sih wisata di sini.....” (JE)

Emik dini merupakan hal positif yang perlu mendapat respon, karena merupakan bentuk dari kepedulian masyarakat maupun pimpinan di daerah tersebut terkait dengan mempertahankan budaya lokal masyarakat guna menjaga *local culture* ang asli yang memang seharusnya tetap dipertahankan. Mempertahankan *local culture* sama juga menjaga kearifan lokal

6.2.2.2 Merangsang Inovasi

Secara sederhana, inovatif bisa diartikan sebagai bagaimana bisa mengembangkan ide maupun gagasan lalu membuatnya menjadi sebuah karya yang menarik serta memiliki manfaat untuk orang lain. Sebuah usaha ketika tidak dilandasi dengan upaya kreatif dan inovatif rata-rata tidak bisa berkembang abadi. Apalagi lingkungan yang begitu dinamis

menuntut sebuah kreativitas untuk selalu adaptif serta mencari terobosan baru. Kreatif dan inovatif sebenarnya bisa diterapkan secara sederhana. Kuncinya sebenarnya adalah kepekaan dalam mencium peluang serta kemampuan dalam membaca pasar supaya bisa tepat sasaran.

Pendapat ini dikemukakan Jhon Eduar kepada masyarakat, swasta dan pemerintah sebagai pemangku kepentingan yang terlibat langsung dengan kegiatan ekonomi pariwisata di Pantai Tanjung Setia;

“.....sebenarnya banyak peluang yang bisa ditangkap oleh kita...kita jangan jadi penonton di tempat sendiri sementara wisatawan datang menjadi pemainnya....kita punya ikan banyak, produk kain tapis sudah mendunia, budaya yang unik.....alhamdulillah ” (JE).

Dulhayyin juga menjelaskan menjelaskan bahwa

“.....memang ada itu, seperti istri bupati itu dia beli tanah di sini, masyarakat yang punya tanah warisan, mereka bikin hotel kecil-kecil itu kan supaya masyarakat jangan jual tanah, ikan tuhuk (*blue merlin*) sudah dibuat sop ikan yang merupakan kuliner khas.....” (DY)

Penjelasan berikutnya;

“.....walaupun jual tanah tapi pintar jugauang yang didapat dibelikan lagi kebun damar, kelapa yang masih produktif....” (DY)

Emik di atas menyampaikan penjelasan bahwa pariwisata secara langsung telah memberikan edukasi kepada masyarakat bahwa tanah yang dimiliki oleh masyarakat sebaiknya tidak dijual dan lebih baik diinvestasikan, menciptakan inovasi untuk menggeser konsentrasi tetap pada perkebunan dan asilnya di persembahkan untuk bahan olahan wisatawan. Pemerintah memfasilitasi memberi dukungan dengan kewenangannya dalam pelaksanaannya.

Menurut Garrod (2001) menyampaikan elemen-elemen dari perencanaan pariwisata yang sukses yaitu: *pertama*, membutuhkan kepemimpinan yang efektif yaitu pemimpin yang memiliki kredibilitas sebagai orang yang memahami, empati dan peduli dengan pendapat stakeholder, memiliki kredibilitas sebagai seseorang yang memiliki keahlian yang dibutuhkan di daerah tersebut, mandiri, memiliki kemampuan mengidentifikasi masalah yang nyata dan tidak nyata, memiliki kemampuan mengatur partisipan, bersedia mengembangkan kelompok), mampu mengarahkan keterlibatan yang sifatnya *top down ke bottom up*) *Kedua*, pengembangan masyarakat/komunitas lokal. *Ketiga*, mengkaitkan keuntungan ekonomi dengan konservasi. *Keempat*, melibatkan *stakeholder* lokal dalam setiap tahapan proyek. Kemudian yang *Kelima*, adanya partisipasi lokal dalam monitoring dan evaluasi proyek.

Bramwell dan Lane (Gde Pitana 2009), menyatakan beberapa manfaat yang didapatkan dari pelibatan semua pemangku kepentingan (*stakeholders*) yaitu:

- Pelibatan beragam *stakeholder*, termasuk dari kepentingan non-ekonomi, akan memperkuat pertimbangan dari sisi lingkungan,

221 sarana dan prasarana fisik, SDM yang dibutuhkan untuk menjamin keberlanjutan demi kesejahteraan di masa depan

- Keterlibatan *stakeholder* dari beragam bidang aktivitas memungkinkan adanya pendekatan integratif dan holistik dalam proses pengambilan keputusan, sedangkan *partnership* juga dapat membantu merefleksikan kesaling ketergantungan antara pariwisata dan aktivitas lainnya

- Beragam *stakeholder* yang terlibat dalam proses kebijakan pariwisata memungkinkan lebih adilnya pendistribusian keuntungan dan biaya, Partisipasi juga memicu kepedulian dan kesadaran akan dampak pariwisata yang mungkin terjadi sehingga diharapkan melandasi pengambilan keputusan yang lebih baik.

- Partisipasi yang luas dalam pembuatan kebijakan kepariwisataan dapat mendemokratisasi pengambilan keputusan, memberdayakan partisipan untuk memperkuat *capacity building* dan *skill acquisition* bagi mereka yang diwakili.

6.2.2.3 Aksesibilitas

Aksesibilitas merupakan dukungan sistem transportasi yang meliputi rute atau jalur transportasi, fasilitas terminal, bandara, pelabuhan dan transportasi lain (Wanhill, 1998). Aksesibilitas tidak hanya menyangkut kemudahan transportasi bagi wisatawan untuk mencapai sebuah tempat wisata, akan tetapi juga waktu yang dibutuhkan, tanda penunjuk arah menuju lokasi wisata dan perangkat terkait lainnya Upaya yang dilakukan oleh pemerintah daerah terkait aksesibilitas pariwisata

salah satunya dengan meningkatkan status bandara nasional Raden Inten II menjadi bandara internasional. Selain itu Bandara Raden Inten telah diperluas dan tiap terminal diperpanjang *runway* dari 2500 m menjadi 3000 m, hal ini akan mempermudah landasan pesawat besar.

Selain itu, pemerintah daerah telah membangun dermaga penyeberangan eksekutif dari Merak - Bakauheuni yang bertujuan untuk mempercepat waktu penyeberangan, biasanya ditempuh 5 jam dengan menggunakan penyeberangan eksekutif bisa menjadi 1,5 jam.

Ukuran kinerja ekonomi lokal selain dilihat dari penyerapan tenaga kerja serta diversifikasi mata pencaharian, terdapat faktor lain seperti perubahan budaya, aksesibilitas pariwisata. Hal ini disebabkan karena apabila pembangunan serta pertumbuhan ekonomi meningkat maka masyarakat serta pemerintah akan membuat daerahnya menjadi lebih baik dengan alasan agar dapat semakin menarik wisatawan lokal maupun asing untuk datang ke Pantai Tanjung Setia. Seperti diungkap

Amin bahwa;

“..... akses jalan memang bagus, itu dari dulu,, itu jalan provinsi.....” (A)

6.2.2.4 Infrastruktur

Infrastruktur merupakan salah satu faktor penting yang harus diperhatikan dalam pengembangan pariwisata di Pantai Tanjung Setia, karena dengan mudahnya akses menuju Pantai Tanjung Setia akan mempermudah dan menambah daya tarik wisatawan. Seperti yang diungkap oleh pegawai pemerintah kabupaten:

“...Pemerintah wajib hukumnya untuk menyiapkan segala sesuatu yang mendukung pariwisata, infrastruktur wajib bandara akan runway, dari 900 sekarang 1300, waktu susi air yang hanya bisa mendarat kita kesulitan karena seluruh biaya operasional yang menanggung kita....”

Dari keterangan di atas dapat dilihat bahwa pemerintah kabupaten juga sangat memperhatikan infrastruktur yang ada dan berusaha terus mengembangkan hal tersebut, tujuannya sama yaitu agar mempermudah wisatawan. Banyaknya wisatawan yang datang tentunya akan semakin menambah nilai dari Pantai Tanjung Setia, ungkap Jhon Eduar

“....Bandara kita, andai kata ini jadi didukung oleh kabupaten lain, pemerintah sudah coba menyiapkan, imigrasi juga, perbankan, bicara masalah money changer dan ATM katanya birokrasinya panjang, oleh karena itu kita bekerjasama dengan pihak asuransi, jadi mereka yang akan bekerjasama dengan perbankan untuk membuka ATM di sini....” (JE)

Menurut penjelasan lebih lanjut mengatakan bahwa pemerintah telah melakukan banyak usaha agar semakin mempermudah wisatawan saat berada di Tanjung Setia, salah satunya saat penyediaan mesin ATM untuk mempercepat terjadinya transaksi, karena perlu proses mekanisme yang panjang untuk dapat menyediakan ATM di sekitar Pantai Tanjung Setia maka pemerintah akhirnya bekerjasama dengan pihak ketiga (asuransi) terkait pengadaan mesin ATM. Hal ini merupakan salah satu bentuk cara pemerintah untuk menunjang infrastruktur di sekitar Pantai Tanjung Setia.

Akses lokasi yang mudah dijangkau adalah hal yang perlu diperhatikan dalam upaya menumbuhkan perekonomian daerah wisata. Pertumbuhan ekonomi memang merupakan hal yang tidak bisa ditangani hanya pada satu pihak perlu adanya kerjasama antara masyarakat dan pemerintah dalam mewujudkan hal tersebut. Perlahan wisatawan mulai terbantu dengan adanya rute penerbangan yang mengarahkan langsung wisatawan pada tanjung setia tanpa perlu menggunakan transportasi darat yang melelahkan, menjenuhkan dan membutuhkan waktu yang lama. Informen tersebut menambahkan bahwa:

“.....Dengan adanya bandara serai, otomatis transportasi turis lancar, kalau gak ada harus lewat darat ...5-6 jam, nah kalo itu cuma ...15 menit cuman gak tiap hari, untuk sementara ini kita kontrak dengan susy air bandara masih diperpanjang landasannya untuk setelah itu kontrak dengan lion air.....” (JE)

Gambar 6.1 Bandara Serai (M. Taufiq Kiemas)



**Foto Bandara Serai (M. Taufiq Kiemas) dan Pesawat Susi Air
Sumber: Dokumentasi Penelitian 2019**

Hal tersebut menunjukkan keterlibatan pemerintah dalam memberikan aksesibilitas pariwisata terhadap wisatawan lokal maupun asing, selain itu pemerintah daerah juga terus berupaya untuk dapat memberikan harga yang terjangkau dari tiket yang di jual, seperti yang disampaikan salah satu informen:

“....Bukan hanya turis, lokal juga bisa. Kalo gak salah 300 ribuan harga tiketnya....” (JE)

Harga tiket pesawat dapat dibilang cukup murah dapat memberikan kemudahan kepada wisatawan untuk lebih cepat sampai ke daerah wisata, hal ini juga memberikan daya tarik bagi wisatawan untuk semakin sering mengunjungi Tanjung Setia. Jhon Eduar melanjutkan penjelasannya;

“....Jalan itu saja baru kita buat sekitar tahun 2005, jalan poros yang dari laut dan itu pun bukan dari daerah tetapi dari masyarakat yang merasakan manfaat kehadiran mereka....”
(JE)

Waluyo (1993) menyatakan, tentunya pemerintah memiliki peran yang cukup besar terhadap pengembangan potensi sumberdaya yang dimiliki bagi kepentingan pembangunan ekonomi daerah. Wanhill (1998) juga menjelaskan bahwa komponen utama yang diperlukan dalam pengembangan wisata, salah satunya adalah *accessibility* yang mencakup dukungan sistem transportasi. Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah kabupaten di lokasi Pantai Tanjung Setia telah memberikan kemudahan bagi wisatawan, hal tersebut tentunya akan memberikan dampak positif terhadap pengembangan pariwisata Tanjung Setia. Oleh

karena itu diperlukan adanya peningkatan pembangunan fisik seperti membangun jalan raya, bandara secara terintegrasi. Komitmen eksekusi dari berbagai kesepakatan ekonomi yang selama ini dijalankan pemerintah dirasakan tidak ada artinya. Bagaimana tidak, berbagai komitmen yang disepakati secara nalar dan logika juga membutuhkan persiapan serta modal yang kuat. Salah satu persoalan adalah tragedi infrastruktur yang masih dipandang sebelah mata dalam perspektif prioritas kebijakan. Pembangunan infrastruktur seyogyanya tidak hanya dipandang dari logika untung dan rugi dalam konteks uang dan tender, hingga berorientasi jangka pendek (*short term*). Seharusnya logika yang dipakai adalah berkelanjutan (*sustainability*), sehingga berdampak rembetan (*multiplier effect*) yang luar biasa bagi perekonomian dalam negeri. Sulit dibayangkan bahwa infrastruktur yang tak kunjung membaik bisa menawarkan daya saing perekonomian, khususnya bila berbicara masalah perkembangan pembangunan di segala bidang (Suman, A. 2011).

Gambar 6.2 Akses Jalan Tanjung Setia



Sumber : Olahan Dokumentasi Peneliti, 2019

Salah satu kekuatan wisata dengan panorama alam adalah ketergantungan yang besar pada sumber daya alam dan budaya sekitar atau setempat. Di mana aset yang dimiliki tersebut dikelola oleh seluruh anggota masyarakat, baik secara individu maupun kelompok atau komunitas, termasuk yang tidak memiliki sumber daya keuangan. Hal itu bisa menumbuhkan kepedulian, tanggung jawab dan kebanggaan pada seluruh anggota masyarakat pada objek pariwisata. Dengan demikian sumber daya yang ada menjadi lebih meningkatkan nilai, harga dan menjadi alasan mengapa pengunjung ingin datang ke destinasi.

Berikutnya apakah Pantai Tanjung setia telah memberikan *Trickle down effect* yang deras ke masyarakat sekitar?. Efek yang deras sangat tergantung pada besarnya keterlibatan masyarakat dalam memiliki *skill*, pemodal, aset, terlibat mengelola, mengetahui potensi, berkreasi, agar berkesempatan melakukan peran dalam pengembangan ekonomi pariwisata.

Implikasi ekonomi pariwisata Pantai Tanjung Setia terhadap kesejahteraan masyarakat yang telah diurai pada bagian ini akan diperjelas dalam tabel 6.2

Tabel 6.2 Matriks Implikasi Pariwisata Pantai Tanjung Setia Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Sekitar

No	Implikasi Ekonomi Pariwisata	
	Ekonomi	Non-Ekonomi
1	Pendapatan retribusi, pendapatan masyarakat, upah karyawan, warung, dan sewa fasilitas meningkat	Budaya Menghargai Nilai Budaya lokal Kepuasan Kebanggaan, agamis
2	Tenaga Kerja Terserap	Peningkatan <i>Skill</i>
3	Diversifikasi Mata Pencarian	Pengembangan Diri
4	Aksesibilitas lebih berkualitas	Keamanan (<i>Safety needs</i>)
5	Bantuan Fasilitas	Pendidikan meningkat
6	Harga produk Lokal: Harga tanah dan harga ikan membaik	Kesehatan meningkat
7	Merangsang Inovasi	-
8	Perputaran Uang	-

Sumber: Olahan Hasil Penelitian, 2019

Tabel 6.2 di atas menunjukkan bahwa pembangunan pariwisata telah memberikan peningkatan kesejahteraan masyarakat baik dari sisi ekonomi maupun dari sisi non-ekonomi. Peningkatan kesejahteraan masyarakat adalah suatu kondisi yang memperlihatkan tentang keadaan kehidupan masyarakat yang dapat dilihat dari standar kehidupan masyarakat yang lebih berkualitas.

Todaro dan Stephen C. Smith (2006:22), mengatakan kesejahteraan masyarakat menunjukkan ukuran hasil pembangunan masyarakat dalam mencapai kehidupan yang lebih baik yang meliputi peningkatan kemampuan dan pemerataan distribusi kebutuhan dasar

seperti makanan, perumahan, kesehatan, dan perlindungan, peningkatan tingkat kehidupan, tingkat pendapatan, pendidikan yang lebih baik, dan peningkatan atensi terhadap budaya dan nilai-nilai kemanusiaan, dan memperluas skala ekonomi dan ketersediaan pilihan sosial dari individu dan bangsa.

Pandangan tersebut menekankan bahwa tingkat kesejahteraan seseorang sangat tergantung pada tingkat kepuasan dan kesenangan yang diraih dalam kehidupannya. Tingkat kesejahteraan yang tinggi dapat dicapai apabila suatu perilaku mampu memaksimalkan tingkat kepuasan sesuai dengan dengan sumber daya yang dimiliki.

Kesejahteraan masyarakat digambarkan sebagai suatu keadaan yang tidak menempatkan satu aspek lebih penting dari pada lainnya.

Kesejahteraan masyarakat tidak hanya berhubungan dengan hal yang bersifat ekonomi namun berhubungan dengan beberapa faktor non ekonomi seperti faktor sosial, budaya, dan politik (Kuncoro, 2010).

6.3 Diskusi Teori dan Hasil Temuan

Perubahan besar yang bersifat multidimensional dalam suatu negara baik terhadap perubahan struktur ekonomi, perubahan sosial, budaya, menurunnya jumlah kaum miskin, mengurangi *gap* antara si kaya dan kaum proletar (disparitas) dan pengangguran disebut Todaro (2009) adalah suatu proses yang terjadi dalam pembangunan ekonomi. Selanjutnya Sukirno (2006) mendefinisikan pembangunan ekonomi sebagai suatu proses yang menyebabkan pendapatan per kapita riil penduduk suatu masyarakat meningkat dalam jangka panjang.

Menurut Sukirno (2006:245), apabila pembangunan sudah terjadi, maka proses tersebut akan berlangsung terus menerus secara

kumulatif. Perkembangan pasar, spesialisasi, dan pembagian kerja yang terjadi akan menimbulkan kenaikan produktivitas dan pendapatan nasional. Kenaikan pendapatan nasional dan perkembangan penduduk yang terjadi secara bersama-sama akan memperluas pasar (*vent for surplus*) dan menciptakan tabungan yang digunakan untuk kebutuhan investasi. Di samping itu, spesialisasi dan pembagian kerja akan menciptakan inovasi produk dan inovasi proses. Proses yang berlangsung dari waktu ke waktu tersebut menimbulkan perkembangan ekonomi dan meningkatkan pendapatan per kapita.

Akhirnya disadari bahwa definisi pembangunan ekonomi itu sangat luas bukan hanya sekedar bagaimana meningkatkan produksi barang dan jasa per tahun saja. Pembangunan ekonomi itu bersifat luas dimensinya yang mencakup berbagai aspek dalam kehidupan masyarakat, bukan hanya salah satu aspek (ekonomi) dalam kenaikan pendapatan dan produksi saja. Pembangunan ekonomi dapat didefinisikan sebagai setiap kegiatan yang dilakukan suatu negara dalam rangka mengembangkan kegiatan ekonomi dan taraf hidup masyarakatnya menjadi sejahtera.

Sudah menjadi suatu keniscayaan dalam pembangunan ekonomi bahwa pembangunan pariwisata merupakan salah satu sektor penyumbang pendapatan negara yang cukup potensial dan sering diandalkan untuk mendobrak perekonomian daerah atau negara. Pertumbuhan pariwisata menurut Fridgen, (1996) antara lain; *Increase in employment, Stimulation of business activity, Increase business diversity, Increase tax collection, Increase in sales of good and services, Increase in community pride and concern for community history, culture attraction, and artifacts, Enhancement of community appearances,*

Conservation or restoration of historic sites or attractions, dan

Conservation of natural resources and tourist attraction

Nesparnas (2017) membagi ekonomi pariwisata tersebut dalam tiga elemen, yaitu: 1) wisatawan adalah konsumen yang

mengkonsumsi barang dan jasa selama melakukan perjalanan wisata,

2) transaksi untuk memperoleh barang dan jasa dimaksud baik dalam

perjalanan maupun di tempat tujuan wisata, dan 3) unit ekonomi yang

menyediakan barang dan jasa untuk memenuhi aktivitas pariwisata.

Pembangunan pariwisata adalah besaran ekonomi yang diciptakan atas

transaksi yang dilakukan oleh para wisatawan baik asing ataupun

wisatawan mancanegara (terkait dengan pengeluarannya) dengan

sektor-sektor ekonomi penyedia barang dan jasa.

Mencermati hakekat pembangunan sektor pariwisata yang

berkembang tentu saja akan menimbulkan *multiplier effect* (efek

rembetan) dengan sebaran *forward linkage* (rembetan ke depan) dan

backward linkage (rembetan ke belakang). Artinya ketika pembangunan

sektor pariwisata berada naik pada ketinggian tertentu mengimbas

secara positif pada sektor ekonomi lainnya. Akibat imbas rembetan yang

positif tersebut selanjutnya merembet pada kenaikan pendapatan,

mempertebal percaya diri, menumbuhkembangkan kebanggaan,

merubah orientasi berfikir. Jika kondisi ini yang terjadi maka

pembangunan ekonomi telah membawa kesejahteraan masyarakat.

Lebih sejahtera lagi buat masyarakat bila pembangunan pariwisatanya

bersifat partisipatif yang banyak melibatkan komunitas setempat, maka

tentunya ini mempunyai efek rembetan yang lebih besar, karena dimiliki,

direncanakan, dilakukan, dan menghasilkan untuk

komunitas/masyarakat.

Konsep *Community Based Tourism* (CBT) menekankan pada partisipasi dan kesadaran masyarakat setempat melalui pemberdayaan dan kemandirian masyarakat untuk mengembangkan pariwisata secara berkelanjutan (*sustainable tourism*). Strategi pengembangan CBT dilakukan secara terpadu seperti dalam penanganan konservasi alam dan lingkungan di daerah yang potensial sebagai daerah tujuan wisata, dengan melibatkan masyarakat setempat. Dengan memberikan pendidikan dan pelatihan-pelatihan secara berkelanjutan, masyarakat dipersiapkan untuk memasuki dunia pariwisata dan berperan aktif di dalam kegiatan pariwisata.

Secara konseptual pariwisata berbasis masyarakat didasarkan atas beberapa hal sebagai berikut : (1) pendekatan partisipatif kepada masyarakat dan mengikut sertakan kepemilikan masyarakat sebagai *partner* pengembangan pariwisata, (2) melibatkan mereka sebagai pengelola aktif dan, (3) hasil pariwisata dimanfaatkan untuk meningkatkan kesejahteraan untuk mengentaskan kemiskinan (Armstrong, 2012: 2; Giampiccoli dan Kalis, 2012: 174; Sebele, 2010: 137).

Berkembangnya alat-alat transportasi yang lebih canggih, layanan model penginapan yang sangat variatif, pembangunan dan perkembangan destinasi wisata yang menakjubkan apalagi ditambah dengan pariwisata digital, menciptakan daerah tujuan wisata yang sebelumnya dianggap jauh menjadi lebih dekat, dan mudah diakses atau mudah dijangkau/dikunjungi. Impikasi positif pariwisata yang timbul sebagai akibat dari meningkatnya *volume* perjalanan wisatawan tersebut, mendorong munculnya kebutuhan wisatawan akan barang dan jasa serta inovasi bagi penyediaan fasilitas-fasilitas pariwisata. Hal ini akan mendorong perekonomian wilayah yang menjadi tujuan wisata maupun

wilayah pendukungnya (Sahrpley dan Tefler, 2015:1; Tan dan Tang, 2013:1; Untong; 2014:1).

Pernyataan di atas memaknai bahwa perkembangan pada suatu kawasan, daerah, destinasi pariwisata membawa konsekuensi terjadinya kemajuan ekonomi, artinya ada hubungan yang searah ketika pariwisata berkembang dengan kemajuan ekonomi daerah tersebut.

Namun demikian coba kita telaah apa yang telah terjadi di Pantai Teluk Kiluan dan Pantai Tanjung Setia. mengapa ekonomi pariwisata di Pantai Teluk Kiluan belum berkembang padahal telah dikelola secara partisipatif, dan mengapa ekonomi pariwisata di Pantai Teluk Kiluan belum berimplikasi terhadap kesejahteraan masyarakat sekitarnya.

Arsyad (2010), mengatakan kesejahteraan masyarakat menjadi semakin tinggi jika dibarengi dengan suatu proses dalam pembangunan. Proses pembangunan yang dimaksud adalah proses yang mencakup pembentukan institusi-institusi baru, pembangunan industri-industri alternatif, perbaikan kapasitas tenaga kerja yang ada untuk menghasilkan produk dan jasa yang lebih baik, identifikasi pasar-pasar baru, alih ilmu pengetahuan, dan pengembangan perusahaan-perusahaan baru. Pembangunan ekonomi juga menurut Suman, A (2010) diartikan sebagai serangkaian usaha untuk mengembangkan infrastruktur lebih banyak tersedia. Kresna, S.R (2010) menemukan aspek budaya menopang pembangunan di daerah. Berangkat dari pandangan tersebut maka inilah sebabnya pembangunan itu disebut multidimensi. Makin banyak perusahaan dan semakin berkembang infrastruktur, taraf pendidikan semakin tinggi dan teknologi semakin meningkat, ditunjang budaya yang adaptif serta tatakelola yang mantap maka makin mantap

pembangunan ekonomi suatu daerah membawa pada kesejahteraan rakyatnya.

Penentu utama kesejahteraan dan pertumbuhan dalam pembangunan dalam jangka panjang menurut Nort (1996) adalah pembenahan dalam kerangka kelembagaan (*instutisional framework*).

Telah dibuktikan bahwa Negara/wawasan yang landasan kelembagaannya kuat, baik dan konsisten pada masa lalu adalah Negara/wawasan yang sekarang lebih makmur. Ada dua hal yang dilahirkan oleh *instutisional framework* yang baik, kuat dan konsisten yaitu segala lapisan masyarakat memperoleh ruang gerak yang luas untuk berpartisipasi dan berbagai kelompok kekuatan tak bisa leluasa mengambil alih atau "merampok" pendapatan dan investasi pihak lain. Dengan demikian tak ada ruang bagi praktik-praktik kotor bagi pemburu rente.

Pendapat Nort (1996) dan arsyad (2010) yang menggarisbawahi bahwa perlu adanya pembenahan dalam *instutisional framework* dalam pengelolaan pariwisata nampaknya selaras dalam memberikan alasan mengapa pariwisata Pantai Teluk Kiluan belum berkembang padahal telah dikelola secara partisipatif, dan mengapa pariwisata di Pantai Teluk Kiluan yang berkembang belum berimplikasi terhadap kesejahteraan masyarakat sekitarnya. Beberapa hasil temuan seperti pengembangan pariwisata *un-partisipatif*, *Base on investor*, respon pemerintah terlambat, abai terhadap pelestarian lingkungan, masyarakat belum melihat pariwisata sebagai potensi yang berimplikasi terhadap kesejahteraan, dan kepemilikan lahan beralih kepada warga negara asing merupakan potret buram dari pelaksanaan suatu kelembagaan di sana (Williamson, Oliver E., 2000).

Selanjutnya dikatakan juga aturan informal belum kompatibel dalam mendukung aturan formal. Aturan informal yang merupakan tradisi, norma, adat, agama, dan kebiasaan baik yang bersifat produktif maupun tidak produktif, merupakan budaya primordialisme, *patron-klien*, raja-raja kecil, *pangreh praja*, dan upeti yang melekat (*embeddedness*) sebagai *mindset* perilaku pelaku birokrasi menciptakan biaya tinggi. Budaya transaksional masih menonjol.

Perilaku yang terbatas (*bounded rationality*) dan perilaku yang oportunistik (*opportunistic behaviour*) menyebabkan hubungan kontrak tidak jelas di organisasi publik, berakibat meningkatkan biaya transaksi ekonomi (*transaction cost economics*). Kebijakan birokrasi kontinu dan diskontinu telah menggeser pola penyalahgunaan kekuasaan "*abuse of power*" oleh segelintir oknum di lembaga publik.

Kompleksitas permasalahan di organisasi publik seperti ketidakjelasan aturan kepemilikan kewenangan (*institutional environment*) dan ketidakjelasan tata kelola (*institutional governance*), seperti ketidakjelasan kontrak-kontrak hubungan kewenangan, dan ketidakjelasan hubungan *principal-agent* menghasilkan ketidakjelasan struktur insentif.

Aliran ekonomi kelembagaan antara lain: Ronald Coase, Douglass North dan Oliver Williamson, Veblen dan Rutherford percaya bahwa kondisi ekonomi akan menentukan bentuk struktur kelembagaan. Aliran ini juga mementingkan bekerjanya suatu sistem perekonomian. Transaksi-transaksi ekonomi hanya dapat terjadi karena adanya kelembagaan, sehingga tanpa kelembagaan mustahil akan timbul transaksi ekonomi. Thorstein Veblen tidak sependapat dengan teori ekonomi klasik/neoklasik yang cenderung statis, karena manusia sebagai

pembuat keputusan dalam ekonomi, dan bermotif ekonomi dalam melatarbelakangi setiap kegiatan adalah tidak sepenuhnya benar.

Demikian pula dengan beberapa asumsi dasar dalam ekonomi klasik dan neo-klasik: 1) setiap aktivitas manusia didasarkan atas perhitungan

rasional untung-rugi; 2) manusia selalu mendahulukan kepentingannya sendiri; 3) adanya persaingan akan dapat meningkatkan efisiensi;

4) *private property right* merupakan sebuah keharusan, dan; 5) teori ekonomi klasik rupanya mengabaikan faktor-faktor lain seperti sejarah, sosial, kelembagaan dalam membangun strukturnya (emosional).

Konsep Non-CBT telah membawa konsekuensi kepada rembetan kesejahteraan pada masyarakat sekitar menurun karena perilaku dan budaya kaum borjuis (pemilik modal) yang sangat lekat dengan *conspicuous consumption*, yaitu kecenderungan mengumpulkan dan mengonsumsi barang-barang mewah, eksklusif. Selanjutnya, kelas orang kaya ini memiliki juga banyak waktu santai (*conspicuous leisure*), suka pamer. Implikasi *conspicuous consumption*, eksklusif, *conspicuous leisure* tidak akan berimbang dan merembes pada masyarakat sekitar.

Kondisi seperti ini telah diuraikan Veblen pada tahun 1899 dalam buku yang berjudul "the Theory of Leisure Class". Teori ini menceritakan perilaku kelas orang-orang kaya, dimana mereka berlomba-lomba mengumpulkan kekayaan sebagai motif kekuatan. Benda-benda yang dikumpulkan merupakan gambaran *conspicuous consumption* (konsumsi mewah), seperti mobil model mutakhir, rumah mewah, pakaian yang eksklusif dan barang-barang yang mahal lainnya yang kesemuanya sebagai cermin kemewahan dan kebanggaan sosial. Jadi menurut Veblen, kelas santai (*leisure class*) adalah kelasnya orang-orang yang kaya, yang sebenarnya mempunyai kesenggangan waktu yang banyak

237
B237
(*conspicuous leisure*) suka konsumsi mewah dan boros, suka pamer, sehingga sebenarnya perilakunya dapat mubazir (*conspicuous waste*) dan dapat menjurus kepada keserakahan materi (*pecuniary emulation*).

Berikutnya pada tahun 1904 "the Theory of Business Enterprise" oleh Veblen dikatakan bahwa pengusaha, dalam pandangannya bukanlah penggerak ekonomi, akan tetapi dinilai sebagai penyabot. Masyarakat industri dikurung oleh mesin, dan manusia diatur secara mekanistik. Manusia bekerja disesuaikan dengan mesin, peraturan mesin, dan disiplin mesin. Proses produksi tergantung pada mesin dan fungsi terpenting untuk operatornya tergantung kepada teknisi, sedangkan usahawan menjadi penumpuk kekayaan, harga pun menjadi mahal. Kaum pengusaha membentuk super struktur tersendiri, mereka lebih sibuk mengurus perkreditan, keuangan dan perdagangan dan mereka menjadi orang-orang kaya karena merampok, yang Veblen sebut robber-barons. Dengan semakin tidak meratanya pembagian pendapatan yang diperoleh atas rembesan pembangunan pariwisata akan menyebabkan produktivitas makin lesu, kemampuan untuk konsumsi lemah, pada akhirnya bahaya adanya resesi tidak dapat dihindari.

Meneropong kesejahteraan sebenarnya juga harus melibatkan aspek-aspek lain seperti kebiasaan, adat, hukum, etika, dan kejiwaan.

Begitu juga, dalam kegiatan pembangunan pariwisata bukan hanya individu, tetapi juga kelompok dan anggota-anggota kelompok yang diatur oleh aturan permainan. Aturan-aturan itu merupakan ketentuan yang harus ditaati bersama, yang bertujuan untuk kemajuan individu, membebaskan individu dari tekanan dan diskriminasi. Keberadaan persaingan bebas diperlukan campur tangan pemerintah untuk melakukan regulasi.

Dari diskusi di atas dapat disimpulkan bahwa konsep kelembagaan yang terang benderang dapat digunakan untuk memahami kompleksitas pengelolaan pariwisata yang berkelanjutan dan sekaligus dapat dijadikan "umbrella" bagi masalah pembangunan pariwisata.

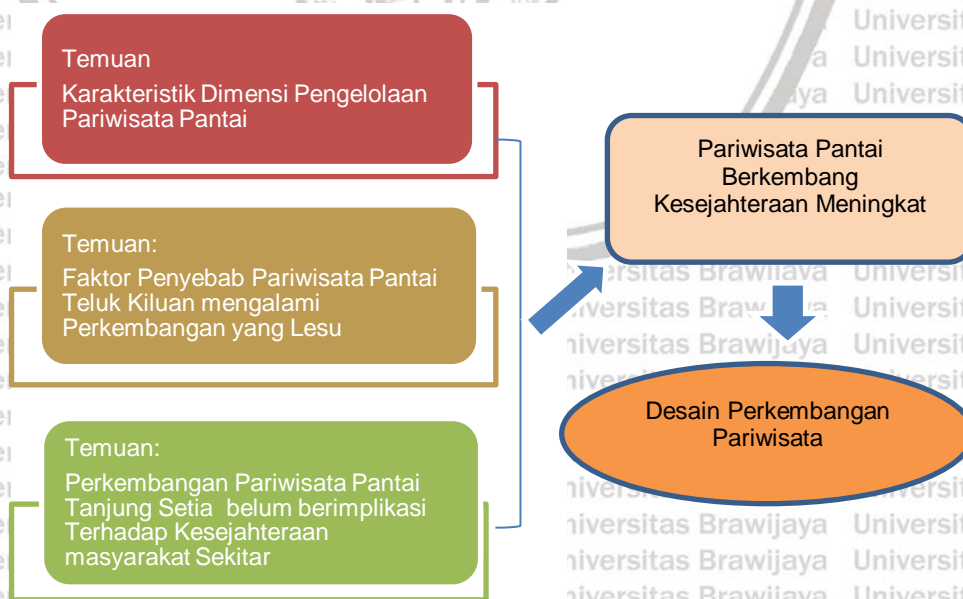


BAB VII

DESAIN PERKEMBANGAN PARIWISATA DALAM MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT SEKITAR

Pada Bagian ini akan disajikan desain perkembangan pariwisata dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitar. Desain perkembangan pariwisata dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitar dibentuk berdasarkan beberapa rekomendasi temuan yaitu: 1) karakteristik dimensi pengelolaan pariwisata yang memunculkan karakteristik pada desain perkembangan pariwisata pantai Teluk Kiluan dan Pantai Tanjung Setia di Lampung untuk masa yang akan datang, 2) beberapa faktor penyebab pariwisata Pantai Teluk Kiluan mengalami perkembangan yang lesu, 3) beberapa penyebab pariwisata Pantai Tanjung Setia yang mengalami perkembangan pesat namun belum berimplikasi optimal terhadap kesejahteraan

Gambar 7.1 Dasar Pembentukan Desain Pariwisata



Sumber: Peneliti

Pemikiran tentang karakteristik dimensi pengelolaan pariwisata dan desain perkembangan pariwisata pantai di Lampung akan ditampilkan pada uraian berikut ini.

7.1 Karakteristik Dimensi Pengelolaan Pariwisata di Pantai Teluk Kiluan dan Pantai Tanjung Setia

Sangat bijak jika sebelum membuat desain perkembangan pariwisata Pantai Tanjung Setia dan Pantai Teluk Kiluan, perhatikan pula penerapan dimensi pengelolaan perkembangan pariwisata yang telah dilakukan baik pada konsep CBT atau pada konsep Non-CBT seperti telah teruraikan pada bab IV dan Bab V. Merujuk ke penjelasan tersebut telah terungkap bahwa wisata pantai merupakan wisata yang disediakan oleh alam dengan keindahan, pesona, keunikan pada daerah-daerah tertentu memikat wisatawan lokal dan wisatawan mancanegara untuk melihatnya dan mendatanginya.

Sebagai suatu konsep pengelolaan pariwisata pantai, CBT dan Non-CBT dalam pelaksanaannya secara *general* telah memenuhi beberapa karakteristiknya yaitu: dimensi ekonomi yang lebih banyak menguntungkan masyarakat sekitar, mengembangkan budaya lokal, secara prinsip sosial menggunakan partisipasi masyarakat, secara prinsip politik pelibatan tokoh dan pemangku kebijakan pun dilakukan, termasuk sangat bijaksana terhadap pandangan menjaga kelestarian atau keberlangsungan ekosistem pantai/lingkungan. Beberapa karakteristik pengelolaan pariwisata "CBT dan Non-CBT" tersebut terangkum dalam tabel 7.1

**Tabel 7.1 Karakteristik Prinsip Pengelolaan
Wisata Pantai New-CBT**

No	Karakteristik Dimensi	Pengelolaan CBT	Pengelolaan Non-CBT
1	Ekonomi	Dominasi masyarakat, hasilnya mengalir ke masyarakat	Dominasi pemilik modal, hasilnya deras menetes ke pemodal
2	Budaya	Konten lokal	Konten lokal
3	Sosial	Partisipasi Masyarakat	Partisipasi Masyarakat
4	Politik:	Melibatkan, tokoh adat, tokoh masyarakat, pemerintah	Melibatkan, tokoh adat, tokoh masyarakat, pemerintah
5	Lingkungan	Konservasi/ekowisata	Abai terhadap lingkungan
6	Menejemen	Menejemen tradisional Belum ada perencanaan, koordinasi, dan pengawasan	Sudah melaksanakan perencanaan, koordinasi, dan pengawasan
7	Kelembagaan	Belum ada badan pengelola pariwisata, aturan formal dan informal yang jelas	Belum ada badan pengelola pariwisata, aturan formal dan informal yang jelas

Sumber : Olahan Hasil Penelitian, 2019

Tabel 7.1 di atas memberi gambaran bahwa konsep pengelolaan pariwisata pantai di Lampung baik dikelola secara konsep CBT dan Non-CBT memiliki kesamaan pada karakteristik yaitu: dimensi ekonomi, budaya, sosial, dan menejemen. Pada dimensi lingkungan, konsep CBT berkomitmen kuat untuk menjaga ekosistem pantai, karena keunikan unsur-unsur ekosistem pantai adalah merupakan daya tarik yang memikat wisatawan.

Sebaliknya konsep Non-CBT, para pemodal telah abai dalam pelestarian lingkungan, pemodal lebih intensif kepada mengurus keuntungan material (ekonomi), efisiensi biaya, penghematan sumber daya yang digunakan dan mengabaikan bentuk-bentuk aktivitas sosial atau bentuk toleransi sosial, segala sesuatu dihitung dengan cermat dan teliti untuk pencapaian keuntungan pemodal (Aang, A. 2014).

Karakteristik prinsip manajemen dan kelembagaan juga merupakan karakteristik temuan yang bisa mendorong pariwisata berkembang. Menejemen yang baik paling tidak mampu membuat perencanaan, pengorganisasian, dan mengevaluasi bisnis yang dikelolanya. Prinsip kelembagaan dimunculkan sebagai karakteristik pengelolaan pariwisata pantai karena kebutuhan sebuah badan sebagai pengelola pariwisata.

Goodwin dan Santili (2009: 4) berpendapat bahwa *Community Base Tourism* seharusnya berkontribusi terhadap peningkatan ekonomi masyarakat pedesaan atau masyarakat yang hidup di kota-kota kecil dengan standar hidup rendah, juga keterlibatan mereka dalam pelaku kegiatan pariwisata secara langsung, termasuk dalam pelestarian budaya dan lingkungan.

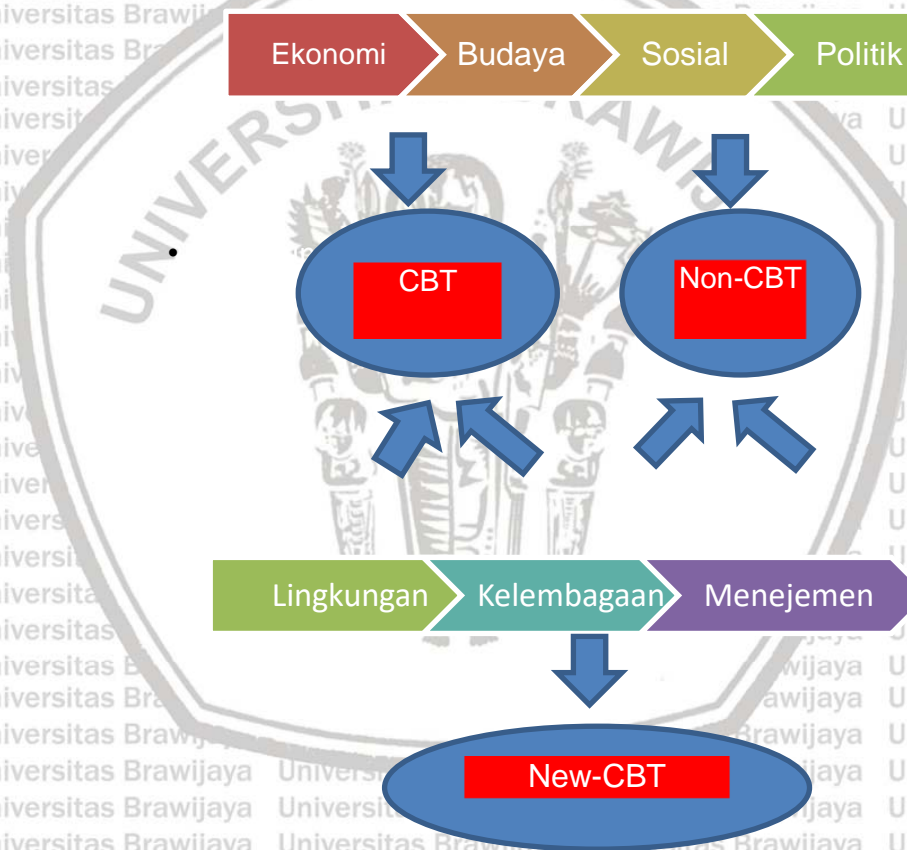
Pernyataan Tasci *et al* (2003: 10-11) memperkuat pendapat Goodwin dan Santili (2009) yang menyatakan bahwa konsep pariwisata berbasis masyarakat dimaksudkan untuk meningkatkan standar hidup yang rendah dengan melibatkan masyarakat miskin tradisional yang *sub-sisten* domisili di daerah yang secara potensial pariwisatanya dapat dikembangkan. CBT dimaksudkan membuka peluang kepada masyarakat lokal kurang posisi tawarnya menjadi memiliki kekuatan *bargaining* pada berbagai akses yang ada di dunia pariwisata.

Pendapat Tasci *et al* (2003: 10-11) dan Goodwin dan Santili (2009) perlu penyempurnaan pada prinsip ekonomi, menejemen, dan kelembagaan. Pemodal dan pemerintah memberikan peluang bagi masyarakat untuk didukasi, diberi pendampingan, arahan, dan bimbingan berpartisipasi aktif sebagai pelaku pariwisata.

Konsep dalam pengelolaan pariwisata di Pantai Teluk Kiluan dan Pantai Tanjung Setia, Lampung hasil temuan penelitian ini adalah "Gabungan CBT dan

Non-CBT". Gabungan konsep CBT dan Non-CBT ini diberi nama "New-CBT" yaitu mengelola pariwisata dengan menerapkan dimensi ekonomi, budaya, sosial, politik, lingkungan, menejemen, dan kelembagaan. New-CBT diharapkan menggiring pariwisata pantai Teluk Kiluan dan Pantai Tanjung Setia terus berkembang dan memberi implikasi kepada kesejahteraan masyarakat yang lebih baik. Bagan prinsip pengelolaan pariwisata New-CBT tersebut seperti ditunjukkan pada gambar 7.2

Gambar 7.2 Dimensi Pengembangan Pariwisata Pantai Di Lampung



Sumber: Olahan Hasil Penelitian, 2019

7.2 Desain Perkembangan Pariwisata Pantai di Pantai Teluk Kiluan Dan Pantai Tanjung Setia Dalam Rangka Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Sekitar

Desain adalah membuat suatu rencana, representasi, atau diskripsi konseptual dapat berbentuk *prototype*, rumusan secara matematis, maket, gambar, atau bagan rancangan untuk maksud menjelaskan suatu objek. Desain ekonomi pariwisata yang dimaksud dalam bab ini adalah sebuah diskripsi konsep berbentuk bagan rencana yang akan dilakukan oleh pemangku kepentingan pariwisata untuk objek wisata atau destinasi pantai di Propinsi Lampung.

Desain perkembangan pariwisata merupakan bagian dari kebijakan pembangunan nasional yang erat kaitannya dengan otonomi daerah. Agar pembangunan daerah dapat terlaksana dengan baik maka dibutuhkan kewenangan yang nyata dan bertanggungjawab dari masing-masing daerah. Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah daerah dalam rangka menjawab dan memenuhi tuntutan reformasi untuk tujuan pemberdayaan daerah.

Selanjutnya mensejahterakan masyarakat adalah bagian dari amanat Undang-Undang Dasar 1945. Agar dapat mencapai tujuan tersebut maka kontribusi sektor pariwisata sangat dibutuhkan. Desain pariwisata diharapkan mampu untuk menjawab perkembangan pariwisata pantai di Provinsi Lampung umumnya dan di Pantai Teluk Kiluan dan Pantai Tanjung Setia khususnya. Perkembangan pariwisata pantai di Provinsi Lampung sehat dan kuat akan memberi implikasi *multiplier* (rebetan) pada kegiatan dan aktivitas masyarakat lainnya untuk lebih cepat dalam mengayuh roda perekonomian daerah.

Harapannya akan menetes keseluruh sektor ekonomi dan keseluruh pelaku

ekonomi, pelaku kebijakan dan, pelaku kepentingan untuk mewujudkan kesejahteraan.

Pariwisata di Pantai Teluk Kiluan mengalami perkembangan yang lesu. Lesunya perkembangan pariwisata tersebut masih memberi harapan kepada masyarakat baik secara ekonomi atau non-ekonomi. Secara ekonomi atau non-ekonomi kesejahteraan masyarakat meningkat. Berbeda kondisinya dengan perkembangan pariwisata di Pantai Tanjung Setia yang cukup menggembirakan karena lompatan perkembangannya. Namun lompatan dalam perkembangan pariwisata di Pantai Tanjung Setia menetes deras ke pemilik modal. Jhon Eduar salah satu informen telah mengatakan lebih dari 50 persen pengeluaran wisatawan asing yang datang ke Pantai Tanjung Setia mengalir kepada pemilik-pemilik rumah makan hotel, angkutan.

Ada beberapa faktor pemicu lesunya perkembangan pariwisata di Pantai Teluk Kiluan dan beberapa faktor pemicu mengapa perkembangan pariwisata di Pantai Tanjung Setia belum meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitar seperti yang diharapkan. Bab IV dan Bab V telah mengeksplorasi beberapa faktor tersebut seperti di bawah ini:

Tabel 7.2 Faktor-Faktor Penyebab Perkembangan Yang Lesu Pariwisata di Pantai Teluk Kiluan

No	Faktor-Faktor
1	Belum ada badan pengelola (kelembagaan)
2	Akses jalan jauh dan rusak
3	Biaya perjalanan (<i>trip</i>) menjadi tinggi
4	Pasokan listrik, internet kurang memadai
5	Tidak ada koordinasi antar pelaku wisata
6	Berkurangnya Lumba-lumba
7	Lingkungan kotor dan kurang tertata
8	Kurang atraksi budaya dan terkikisnya budaya lokal

Sumber: Olahan Hasil Penelitian, 2019

Selanjutnya berdasarkan temuan penelitian mengapa pariwisata Pantai Tanjung Setia belum memberi implikasi terhadap kesejahteraan masyarakat yang berada di sekitarnya terpotret dalam beberapa penyebabnya. Beberapa penyebab tersebut dapat dilihat pada tabel 7.3

Tabel 7.3 Penyebab Perkembangan Pariwisata di Pantai Tanjung Setia belum meningkatkan kesejahteraan masyarakat

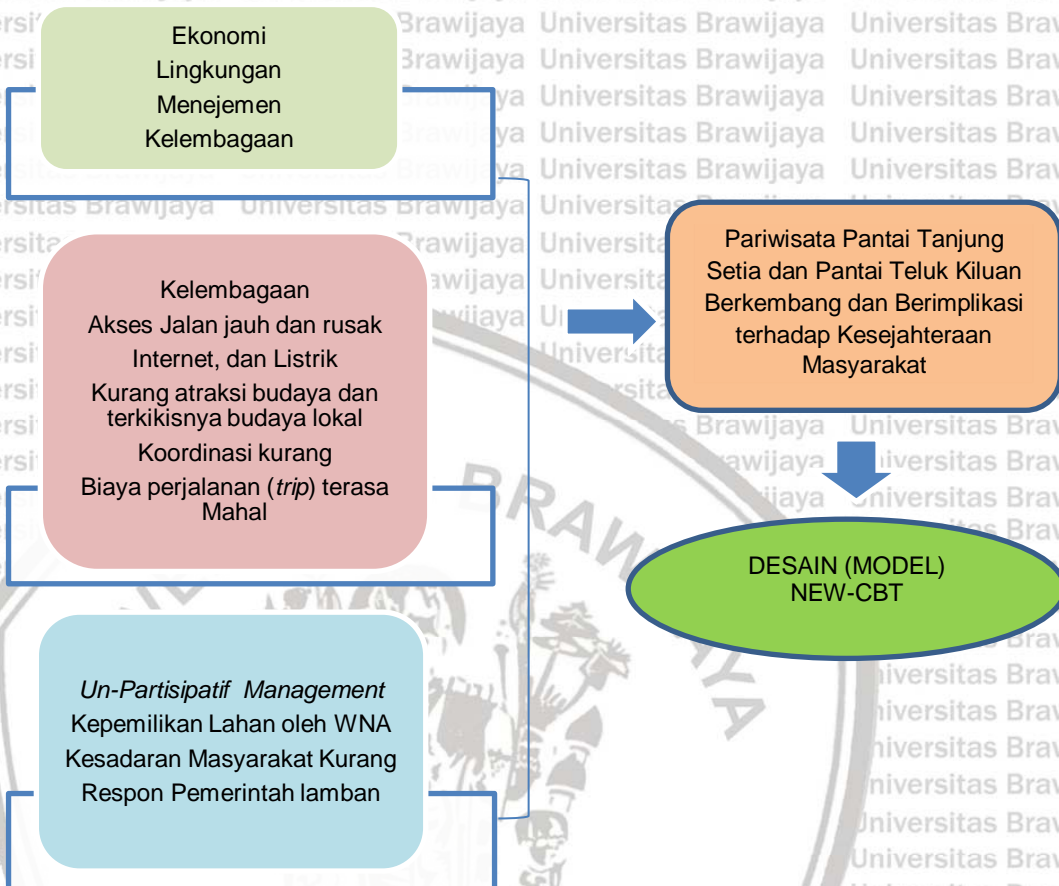
No	Faktor-Faktor
1	Un-partisipatif Management (<i>Base on Investor</i>)
2	Kesadaran Masyarakat melihat pariwisata sebagai potensi
3	Respon Pemerintah Lamban
4	Kepemilikan lahan oleh WNA
5	Abai Lingkungan
6	Belum ada badan pengelola (kelembagaan)

Sumber: Olahan Hasil Penelitian, 2019

Perancangan desain pengembangan pariwisata di Pantai Teluk Kiluan dan Pantai Tanjung Setia agar dapat berimplikasi pada kesejahteraan masyarakat sekitar merujuk pendapat Yin (2009, 57). menurutnya bahwa desain dikembangkan dan terbentuk dari *framework* pengembangan teori, merancang kasus, telusuri data, formulasikan temuan, modifikasi, dan muncul suatu desain

Berikutnya komponen Desain perkembangan pariwisata Pantai Teluk Kiluan dan Pantai Tanjung Setia berdasarkan temuan seperti terlihat dalam gambar di bawah ini.

Gambar 7.3 Komponen Desain Pariwisata Pantai Teluk Kiluan dan Pantai Tanjung Setia Di Lampung



Sumber: Olahan Hasil Penelitian, 2019

Persoalan yang timbul dari Pariwisata dengan pengelolaan CBT dan Non-CBT yaitu kurangnya anggaran untuk mengembangkan aktivitas pariwisata maupun *event-event* yang bisa menarik minat wisatawan. Persoalan lain adalah kurangnya SDM yang mumpuni yang mampu berkreasi untuk mengembangkan wisata sehingga diakui secara internasional. Setiap masyarakat harus diposisikan memiliki peran penting dalam pembangunan pariwisata di sebuah daerah karena masyarakat telah menguasai dan memiliki hak untuk mengembangkan daerah tersebut menjadi lokasi wisata, apalagi ini sebagai pariwisata alam.

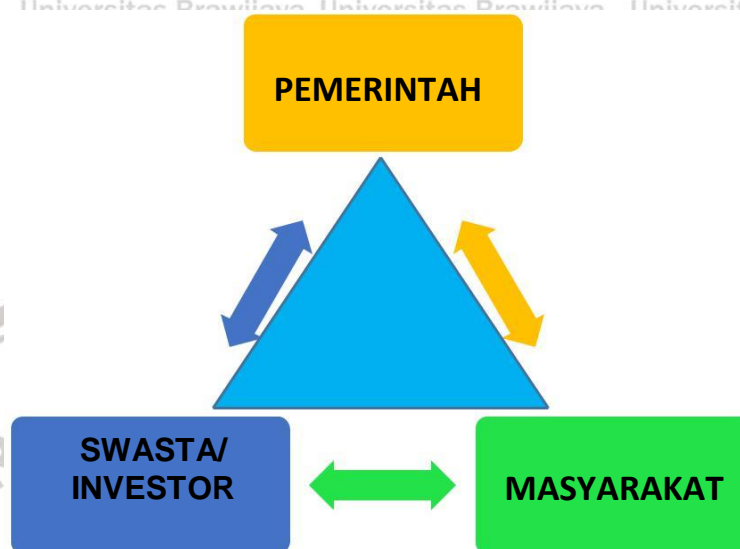
Persoalan lain lagi yang dihadapi oleh perkembangan pariwisata adalah tergerus dan menjadi hilangnya kearifan lokal, berkurangnya lahan dan produk pertanian lokal, masuknya budaya barat, perubahan gaya hidup, pengikisan moral (*moral hazard*), jiwa gotong royong terabaikan, rusaknya fungsi lingkungan, hilangnya harga diri dan lainnya. Pada akhirnya masyarakat akan terabaikan serta manfaat yang minim dari perkembangan pariwisata yang meningkat atau belum menerima kesejahteraan secara sempurna.

Oleh karenanya diperlukan desain pariwisata yang bisa meningkatkan perkembangan kegiatan pariwisata dan kesejahteraan masyarakat. Swasta ikut berperan sebagai pemilik dan penyedia modal dalam setiap pengembangan ekonomi pariwisata.. Sehingga desain perkembangan pariwisata ini merupakan titik tengah solusi menggabungkan modal-modal yang tersedia, yakni kelompok penyedia dana atau modal keuangan besar (investor) yang mampu berinvestasi pada wisata berbasis modal dan masyarakat yang memiliki kesediaan dalam penyediaan berbasis komunitas. Selain itu alternatif ini juga memungkinkan munculnya destinasi, atraksi yang lebih beragam, Ketika *supply* produk wisata lebih beragam dan diikuti pelayanan yang baik memberikan kepuasan lebih pada konsumen maka *supply creates our demand*.

Pemerintah adalah wasit terbaik dalam memberikan ruang perlindungan bagi masyarakat, komunitas termasuk swasta/investor dan wisatawan sebagai pelaku dan pengguna usaha pada pariwisata dapat berjalan sesuai dengan koridor yang telah ditentukan. Dengan kata lain pemerintah selaku pembuat kebijakan melindungi, mengedukasi, memfasilitasi, memotivasi dan memberi pendampingan agar pelaku-pelaku pariwisata mendapat keuntungan tanpa merugikan pihak lain. Masyarakat, Investor, dan Pemerintah merupakan tiga komponen pemangku kebijakan dalam pengembangan Pariwisata (Wearing,

2001). Komponen-komponen pemangku kebijakan dalam pariwisata dapat diligat pada gambar 7.4

Gambar 7.4 Pemangku Kebijakan Dalam Pariwisata



Sumber: Wearing (2001).

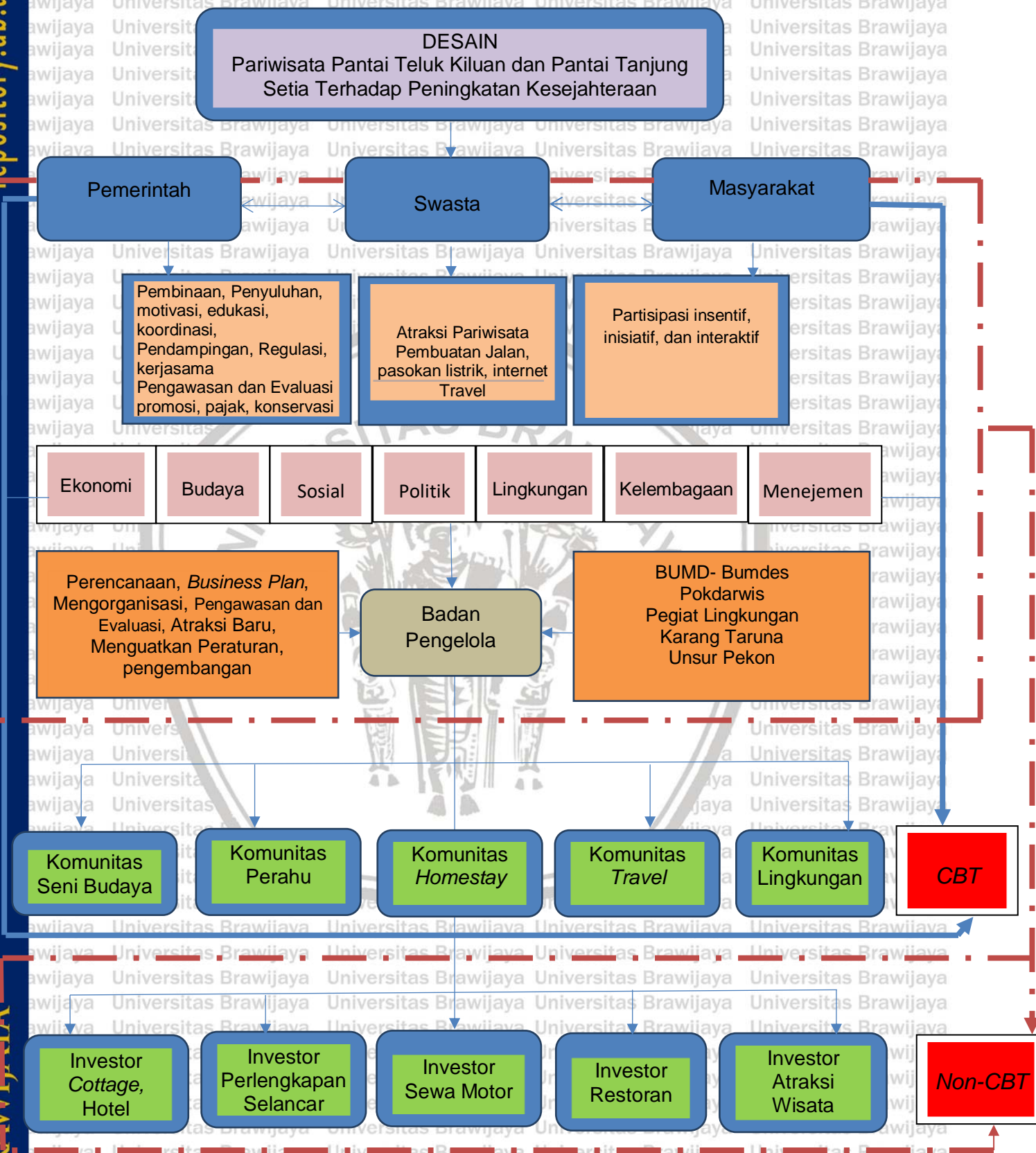
Bramwell dan Lane (Gde Pitana 2009), menyatakan beberapa manfaat yang didapatkan dari pelibatan semua pemangku kepentingan (*stakeholders*) yaitu:

1. Pelibatan beragam *stakeholder*, termasuk dari kepentingan non-ekonomi, akan memperkuat pertimbangan dari sisi lingkungan, sarana dan prasarana fisik, SDM yang dibutuhkan untuk menjamin keberlanjutan demi kesejahteraan di masa depan.
2. Keterlibatan *stakeholder* dari beragam bidang aktivitas memungkinkan adanya pendekatan integratif dan holistik dalam proses pengambilan keputusan, sedangkan *partnership* juga dapat membantu merefleksikan kesalingtergantungan antara pariwisata dan aktivitas lainnya.

3. Beragam *stakeholder* yang terlibat dalam proses kebijakan pariwisata memungkinkan lebih adilnya pendistribusian keuntungan dan biaya, Partisipasi juga memicu kepedulian dan kesadaran akan dampak pariwisata yang mungkin terjadi sehingga diharapkan melandasi pengambilan keputusan yang lebih baik.
4. Partisipasi yang luas dalam pembuatan kebijakan kepariwisataan dapat mendemokratisasi pengambilan keputusan, memberdayakan partisipan untuk memperkuat *capacity building* dan *skill acquisition*.

Beranjak dari konsep pengelolaan pariwisata oleh Wearing (2001) maka untuk mengembangkan pariwisata pantai Tanjung Setia dan Pantai Teluk Kiluan di Lampung yang dilakukan oleh pemerintah, masyarakat dan investor dibuatlah desain perkembangan pariwisata yang dapat dikembangkan berdasarkan kewenangan dari setiap *stakeholder* dan temuan yang muncul di situs penelitian. Tujuan mendesain pariwisata di Pantai Tanjung Setia dan Pantai Teluk Kiluan berkembang dan berimplikasi pada kesejahteraan masyarakat sekitar. Desain pengembangan pariwisata tersebut dapat di modifikasi seperti bagan di bawah

Gambar 7.5 Desain New-CBT



Sumber: Olahan Hasil Penelitian, 2019

7.2.1. Peran Masyarakat

Peran masyarakat dalam mengembangkan kemajuan ekonomi pariwisata sangat besar dan memerlukan kerjasama yang seimbang dengan peran pemerintah maupun swasta. Namun, dalam kenyataan yang terjadi peran masyarakat masih jauh lebih rendah bila dibandingkan dengan kedua *stakeholder* lainnya. Penyebabnya adalah berasal dari faktor internal seperti: tidak adanya atau lemahnya akses sumberdaya (*resources*) dan keuangan yang dimiliki, abai terhadap pengalaman pariwisata, padatnya kehadiran komunitas *tour*. Penyebab lainnya dari faktor eksternal yaitu: pelibatan yang minimal dalam proses pengambilan keputusan, kebijakan pemerintah yang mendorong konsentrasi kekuasaan di pusat (Cole, 2006). Penyebab eksternal ini disebut Aref dan redzuan (2006) adanya hambatan operasional, hambatan struktural dan budaya dalam partisipasi.

Pentingnya pemberdayaan masyarakat dalam pengembangan ekonomi pariwisata telah menjadi sorotan yang tajam beberapa pakar pariwisata dunia. Murphy (1988), Dawyer, Forsyth, dan Dwyer (2010) menyatakan bahwa pembangunan kepariwisataan harus merupakan suatu kegiatan yang berbasis pada komunitas melalui keunikan komunitas lokal baik berupa elemen fisik maupun elemen non fisik. Elemen-elemen tersebut harus menjadi penggerak utama dalam ekonomi kepariwisataan. Hilangnya partisipasi masyarakat telah teridentifikasi sebagai hambatan penting dalam keefektifan pembangunan pariwisata.

Berdasarkan pemberdayaan masyarakat maka pemberdayaan masyarakat dalam ekonomi pariwisata harus diarahkan pada: 1) meningkatkan kapasitas, peran dan inisiatif (kreatifitas), 2) meningkatkan kualitas, dan posisi

partisipasinya, 3) meningkatkan nilai kesejahteraan masyarakat, dan 4) mampu menjadi pendorong, magnet bagi wisatawan

Beberapa peran yang segera dan mendesak harus di mainkan masyarakat dapat berbentuk: ambil bagian dalam memandu wisatawan, mengembangkan kreatifitas seni budaya, memasarkan/promosi keunikan yang menjadi daya tarik wisatawan dapat melalui media elektronik atau digital untuk menarik wisatawan milenial, melalui komunitas dan bentuk kerjasama dengan investor, pegiat lingkungan, pokdarwis, pemerintah menjadi unsur kunci didalam badan pengelola ekonomi pariwisata (Lorio dan Wall (2012)).

Peran yang lain lagi dapat berbentuk pelaku dari pengembangan produk lokal berbahan dasar lokal seperti bahan dasar dari ikan, singkong, pisang, kopi, dan sebagainya. Beberapa bahan tersebut melimpah jumlahnya. Menambah pengetahuan secara formal dan informal lewat edukasi dari pemerintah dan pengusaha sangat berguna untuk meningkatkan *skill hospitality*, menjadi tuan rumah yang baik dan efektif, dan dapat memandangi ekonomi pariwisata sebuah potensi sumber pendapatan, penyaluran hobi dan minat, menjaga kelestarian lingkungan, dan keikutsertaan sebagai aktor aktualisasi diri dalam pembangunan.

Tabel 7.5 Peran Masyarakat Di Destinasi Pantai Teluk Kiluan dan Pantai Tanjung Setia

No	Pantai Teluk Kiluan	Pantai Tanjung Setia
1	<p>Budaya Meng-eduksi diri dalam pencerahan tentang budaya dan agama, Mengaktifkan dan meningkatkan budaya nyambai, pantun dan tari-tarian. Pentas Budaya pada hari-hari akbar (lebaran-hari libur sekolah)</p>	<p>Meng-eduksi diri dalam pencerahan budaya dan agama, mengaktifkan dan meningkatkan budaya nyambai, pantun dan tari-tarian. Pentas Budaya Sakura-an pada hari-hari akbar (lebaran-hari libur sekolah)</p>
2	<p>Lingkungan Melestarikan terumbu karang Menjaga kebersihan pantai, dan lingkungan dari sampah Mempertahankan up-welling Menjaga keberadaan ikanikan plagis</p>	<p>Melestarikan terumbu karang menjaga kebersihan pantai, dan lingkungan dari sampah</p>
3	<p>Koordinasi Menertibkan <i>Travel</i> dari Jakarta, Banten dan Bandung</p>	-----
4	<p>Kelembagaan Terlibat dalam membentuk badan pengelola pariwisata Sumbangan fikiran kritis, dalam rapat, membuat perencanaan sampai evaluasi</p>	<p>Terlibat dalam membentuk badan pengelola pariwisata Sumbangan fikiran kritis, dalam rapat, membuat perencanaan sampai evaluasi</p>
5	<p>Edukasi Meningkatkan pengetahuan dan <i>skill</i> kepariwisataan, bahasa inggris dan ekonomi kreatif</p>	<p>Meningkatkan pengetahuan dan <i>skill</i>, kepariwisataan, bahasa inggris dan ekonomi kreatif</p>

Sumber: Olahan Hasil Penelitian 2019

Berbagai peran yang dimainkan oleh masyarakat belum berjalan dengan sempurna. Beberapa hal menjadi ganjalan dalam pelaksanaannya adalah

1. Pariwisata belum secara lugas dipandang sebagai potensi ekonomi dan potensi non ekonomi
2. Dorongan komitmen sebagai pelaku wisata masih rendah
3. Kualitas pendidikan dan pengetahuan warga yang seadanya
4. Pembinaan dan pelatihan yang diberikan sekedar "project"
5. Hasil pembinaan terbentur dengan pasar
6. Pemikiran kritis yang dilontarkan berpihak pada bisnis dan kepentingan individu.

7.2.2 Peran Swasta

Swasta/Investor atau pemodal merupakan pemangku kebijakan dalam pengembangan pariwisata yang sangat penting keberadaannya. Beberapa keterbatasan pemerintah dan masyarakat dalam pengembangan ekonomi pariwisata selalu terbentur dengan sumberdaya pendanaan. Terkadang banyak kreativitas dan improvisasi pemikiran berhenti sebagai sebuah wacana karena besarnya biaya. Beberapa hal dapat dilakukan bagi swasta dalam ambil bagian dalam pengembangan pariwisata tersebut diantaranya memfasilitasi pengadaan atraksi pariwisata. Pengadaan Atraksi Wisata dapat dalam macam-macam bentuk :

1. Berbasis Budaya dan konten lokal

Pengembangan industri kecil pembuatan kain Tapis yaitu kain khas daerah Lampung yang terbuat dari benang emas, Tari-tari khas Lampung dan beberapa budaya lain bisa menjadi daya tarik bagi wisatawan yang datang ke Teluk Kiluan. Kain Tapis bisa menjadi salah satu oleh-oleh. Selain itu wisata pembuatan barang-barang khas Teluk

Kiluan dan Tanjung Setia bisa menjadi sebuah pengalaman yang menarik bagi wisatawan yang datang. Demikian juga pengembangan kain batik Lampung, dan makanan khas lainnya seperti kripik pisang, mpek-empek, dodol Lampung, kopi dan makanan olahan berbahan dasar ikan (mpek-mpek, krupuk ikan, otak-otak, pindang, sop ikan).

Memelihara dan menumbuhkembangkan budaya lokal hingga ke belahan dunia terus dipromosikan lewat *event* surfing internasional, festival sakura-an, tari-tarian selamat datang. Edukasi pengembangan budaya lokal tidak saja pemerintah yang ambil peranan tetapi didukung oleh masyarakat dan pencinta seni budaya. Ke depan, pentas budaya tari-tarian, sakura-an, pantun nyambai diharapkan menjadi sebuah atraksi pariwisata yang punya daya tarik kuat untuk memindahkan devisa ke Provinsi Lampung.

2. Berbasis Alam dan buatan

Atraksi wisata berbasis alam perlu bervariasi, tentunya disesuaikan dengan keinginan pengunjung seperti atraksi-atraksi yang penuh tantangan: *Flying Fox*, spot-spot selfie, permainan anak-anak dan modifikasi *Banana Boat* dan perahu, *homestay* di atas air laut, termasuk masjid terapung. Wisata alam sangat penting agar pengunjung tidak jenuh ketika lelahnya menunggu antrian waktu melihat lomba-lomba sehingga wisatawan dapat menikmati panorama alam yang disajikan Pantai Teluk Kiluan.

Mengadaan spot-spot *selfie* di pinggir pantai atau di pinggir karang dengan latar pantai di Pantai Teluk Kiluan atau spot-spot dengan model lainnya yang menarik misalnya *prototype* lomba-lomba sebagai *icon*. Spot *selfie* ini penting karena hasil foto-foto wisatawan

yang terunggah di media dapat juga menjadi promosi objek wisata yang tidak berbayar.

3. Membuat *event-event* pada hari raya dan libur sekolah
4. Membenahi akses jalan, jaringan listrik, internet, *travel*.
5. Akses jalan yang lancar dan baik (mulus) menjadi asa tidak saja wisatawan tetapi juga asa bagi orang yang melakukan bepergian dengan tujuan selain wisata. Jauhnya jarak tempuh kedua situs telah membuat perjalanan lama dan membutuhkan banyak pengeluaran, ongkos *travel*, bensin, biaya untuk makan, parkir, dan makanan ringan juga biaya ketika berada di lokasi wisata. Bermalam di destinasi wisata menjadi keharusan buat wisatawan karena lumba-lumba akan muncul kepermukaan pada waktu pagi hari sekitar pukul 6.00 s.d. pukul 7.00 wib. Inilah yang menyebabkan wisatawan harus bermalam di *homestay* milik penduduk (rumah penduduk). Akibat jarak yang cukup jauh dan kondisi jalan cukup melelahkan karena rusak, ditambah lagi perlu bermalam dan makan maka menyebabkan biaya perjalanan menjadi mahal.

Pembenahan yang dibingkai dengan penambahan pasokan listrik dan internet menjadi keharusan untuk dapat Pantai Teluk Kiluan dan Pantai Tanjung Setia ditaksir wisatawan. Listrik dan internet merupakan kebutuhan pelengkap manusia yang sudah melekat seperti kebutuhan pokok. Artinya tanpa listrik dan internet sebagian aktivitas manusia akan terganggu, putusnya informasi dan kegiatan yang menggunakan kedua akses ini menjadi pertimbangan sendiri bagi wisatawan untuk berkunjung.

Tabel 7.5 Peran Swasta Di Destinasi Pantai Teluk Kiluan dan Pantai Tanjung Setia

No	Pantai Teluk Kiluan	Pantai Tanjung Setia
1	Atraksi Pariwisata Pembuatan <i>Flying-Fox</i> , Spot-spot <i>Selfie</i> , Permainan anak (Ayun-ayunan, prosotan), <i>Banana Boat</i> , Peralatan <i>Camping</i> , masjid dan <i>Homestay</i> terapung	<i>Live Music</i> ,
2	Akses Investasi perbaikan jalan	-----
3	Fasilitas Menambah pasokan listrik dan internet	-----
4	Menambah jumlah ATM	Menambah jumlah ATM

Sumber: Olahan Hasil Penelitian 2019

Hambatan dan masalah sering ditemui ketika swasta ingin berinvestasi adalah karena akses jalan yang kurang baik (rusak). Akses merupakan sumber penghalang terbesar berkembangnya Pantai Teluk kiluan.

7.2.3 Peran Pemerintah

Pemerintah bersama dengan Masyarakat dan Swasta membentuk Komunitas. Pembentukan komunitas ini bertujuan untuk berkoordinasi dan bekerjasama untuk membahas mengenai manajemen ekonomi pariwisata. Setiap pihak seperti masyarakat, swasta, dan pemerintah memiliki peran masing-masing untuk memajukannya. Pulina et al. (2006) menyatakan bahwa pemerintah memiliki peran penting dalam pembangunan pariwisata pedesaan.

Kebijakan pemerintah tentang objektivitas lahan, Sumberdaya alam, keanekaragaman hayati, dan identitas budaya sebagai kendali penggunaan

sumberdaya pada generasi saat ini tidak mengurangi kesempatan generasi yang akan datang.

Permasalahan yang muncul dan menghambat dalam hal mengembangkan pariwisata teridentifikasi sebagai berikut: 1). Pemerintah lambat dalam merespon perkembangan objek wisata, 2). Distribusi pendapatan yang tidak merata, 3). Memudarnya budaya masyarakat (daerah), 4). Menjamurnya investor asing. Dari adanya kendala-kendala tersebut, maka perlu dilakukan langkah-langkah pencegahan untuk meminimalisir resiko dari dampak negatif yang timbul antara lain

1. Berdialog dengan masyarakat

Hal ini bertujuan untuk melihat apa yang terjadi dilapangan dan menggali potensi yang ada, serta *men-support* apa yang dibutuhkan masyarakat untuk mengembangkan ekonomi pariwisata guna meningkatkan pendapatan. Dengan hadirnya pemerintah, akan mendorong masyarakat untuk lebih peka terhadap potensi dan masyarakat akan merasa diperhatikan. Kegiatan kunjungan rutin tersebut, sekaligus dapat memantau perkembangan masyarakat ataupun objek wisata dengan duduk bersama menjaring aspirasi ataupun keluhan yang mereka rasakan. Setelah itu diadakanlah evaluasi bersama terkait bagaimana alternatif yang cocok untuk mengatasinya.

2. Membuat regulasi terkait kesenjangan pendapatan dan isu Lingkungan

Tujuan dibuatnya sebuah regulasi adalah menciptakan keadilan dan pemerataan disesuaikan dengan kondisi yang ada. Tanjung Setia merupakan pariwisata berbasis non-CBT yang berarti tidak

adanya komunitas dari masyarakat sekitar untuk mengelola pariwisata secara mandiri sehingga rawan adanya eksploitasi alam oleh investor yang datang karena masyarakat kurang paham bagaimana seharusnya alam tersebut dijaga dan dikembangkan.

Disinilah peran pemerintah dibutuhkan untuk menjembatani antara masyarakat dengan investor luar yang berhubungan dengan pendapatan dari adanya destinasi wisata Pantai Tanjung Setia ini. Pemerintah sangat diharapkan membuat kebijakan baru dari *gap* yang timbul, karena sektor potensial malah mayoritas bukan kepemilikan dari penduduk setempat, meskipun mengatasnamakan asetnya dengan nama warga sekitar sebagai syarat wajib tetapi tetap saja masyarakat tahu siapa pemilik aslinya. Padahal Nesparnas (2017) mencatat fasilitas penginapan, *cottage*, hotel, *homestay*, restoran, angkutan yang di gunakan wisatawan adalah sumber pendapatan vital bagi pariwisata melalui sejumlah pengeluaran wisatawan. Pengeluaran wisatawan yang digunakan untuk beberapa keperluan penginapan, *cottage*, hotel, *homestay*, restoran, angkutan jumlahnya menghabiskan 60 persen dari total pengeluarannya. Di sisi lain, penduduk sekitar hanya mendapatkan "sisa" dari sektor yang diabaikan dan tidak dilirik investor, seperti: upah tenaga kerja kasar (*tukang masak, cleaning service, satpam, laundry, warung*).

Mengatasi situasi dan kondisi yang *un-partisipatif* ini tentunya pemerintah perlu ketegasan dalam menggali sumber pendapatan dari hasil usaha kepemilikan yang dilakukan oleh investor, yaitu dengan mengejar pajak dan sanksi denda sebagai sumber penerimaan

daerah. Pajak yang dikejar oleh pemerintah bisa digunakan sebagai kompensasi terhadap sumber pendapatan baru masyarakat.

Bentuk kebijakannya adalah dengan memperketat administrasi penjualan tanah dikawasan. Pemerintah harus sensitif agar kepemilikan tidak jatuh ketangan warga negara asing (WNA).

3. Memfasilitasi Pelestarian Budaya

Banyaknya wisatawan mancanegara yang datang juga memiliki dampak negatif, salah satunya adalah mereka membawa budaya mereka yang kurang cocok atau bahkan bertentangan dengan budaya daerah Tanjung Setia. Permasalahan ini sudah dijelaskan pada bab kebudayaan diatas dan inilah yang menjadikan budaya disana perlahan memudar. Maka dari itu dibutuhkan langkah pencegahan untuk tetap menjaga kelestarian budaya lokal. Salah satu caranya adalah dengan membentuk komunitas pemerhati budaya, dimana ini akan menjadi wadah bagi masyarakat bukan hanya budaya dalam hal tradisi, norma, adat istiadat tetapi juga menyangkut tentang kesenian daerah. Sebagai cara untuk menjaga, mengenalkan dan menciptakan generasi baru yang sadar akan kebudayaan.

Pemerintah juga diharapkan menjadi fasilitator dalam hal ini, dengan menyediakan sarana dan prasarana yang mendukung. Termasuk memberikan edukasi kepada masyarakat tentang pentingnya menjaga budaya apalagi provinsi Lampung

dikenal dengan ciri agamisnya, tentunya hal ini akan tetap dipertahankan.

6. Koordinasi, Edukasi Antara Pemerintah dan Masyarakat

Untuk mengurangi maraknya investor asing yang datang untuk membeli tanah dan mendirikan bangunan berupa hotel, vila dan sebagainya. Pentingnya kerjasama antara pemerintah dengan masyarakat. Dari sisi pemerintah bertindak dengan membatasi ijin pembelian tanah oleh investor lokal ataupun luar, ini dilakukan untuk kelangsungan objek wisata kedepannya serta memberi ruang bagi masyarakat untuk bersaing dengan investor lama yang sudah ada bukan dengan menciptakan pesaing baru. Dengan menumbuhkan kesadaran masyarakat, akan menemukan alasan kenapa tanah di area sekitar pantai seharusnya tidak untuk diperjual-belikan. Masyarakat juga harus diberi edukasi untuk berani menolak tawaran apabila investor datang untuk membeli tanahnya, dan alternatifnya adalah pemerintah memberi kemudahan untuk mengajukan pinjaman bagi masyarakat yang membutuhkan biaya mendirikan hotel atau *villa*, losmen dan seterusnya. Sehingga aset itu tetap menjadi milik masyarakat tersebut. membeli tanahnya, dan alternatifnya adalah pemerintah memberi kemudahan untuk mengajukan pinjaman bagi masyarakat yang membutuhkan biaya mendirikan hotel atau *villa*, losmen dan seterusnya. Sehingga aset itu tetap menjadi milik masyarakat tersebut.

Tabel 7.6 Peran Pemerintah Di Destinasi Pantai Teluk Kiluan dan Pantai Tanjung Setia

No	Pantai Teluk Kiluan	Pantai Tanjung Setia
1	<p>Lingkungan Menetapkan sebagai kawasan konservasi</p> <p>Melestarikan terumbu karang menjaga kebersihan sekitar pantai</p> <p>Mempertahankan <i>up-welling</i></p> <p>Menjaga keberadaan ikan-kan plagis</p>	<p>Menetapkan sebagai kawasan konservasi</p> <p>Melestarikan terumbu karang menjaga kebersihan sekitar pantai,</p>
2	<p>Kelembagaan Membentuk badan pengelola pariwisata</p> <p>Terlibat dalam badan pengelola pariwisata</p> <p>Membuat Regulasi tentang retribusi, parkir</p> <p>Mendorong pusat agar segera menetapkan kawasan konservasi</p> <p>Re-inventarisasi kepemilikan lahan</p> <p>Sosialisasi setiap perubahan aturan</p>	<p>Membentuk badan pengelola pariwisata</p> <p>Terlibat dalam badan pengelola pariwisata</p> <p>Membuat Regulasi tentang retribusi, parkir</p> <p>Intensifikasi pungutan pajak</p> <p>Memperketata regulasi untuk kepemilikan lahan</p> <p>Re-inventarisasi kepemilikan lahan</p> <p>Sosialisasi setiap perubahan aturan</p>
3	<p>Akses Membuat prioritas perbaikan jalan pada setiap perencanaan pembangunan Kabupaten Tanggamus</p> <p>Mengintegrasikan perencanaan pembangunan jalan dengan perencanaan Kabupaten Pesawaran</p>	<p>Menjaga kelancaran dan kualitas jalan</p>
4	<p>Koordinasi Konektivitas dengan destinasi: terdekat (Pantai Pahawang)</p>	<p>Konektivitas dengan destinasi: terdekat (pantai ngambur)</p>
5	<p>Pelatihan hospitality, kewirausahaan, membuat makanan oleh-oleh dari bahan dasar ikan, mengeksplorasi kreatifitas tapis krui dan batik lampung</p>	<p>Pelatihan hospitality, kewirausahaan, membuat makanan oleh-oleh dari bahan dasar ikan, mengeksplorasi kreatifitas tapis krui dan batik lampung, festival budaya tahunan "sakura-an"</p>

Sumber: Olahan Hasil Penelitian 2019

Peran pemerintah merupakan *invisible hand* bagi pelaku ekonomi produsen dan konsumen pariwisata. Tindakan pemerintah sebagai wasit harus bersikap adil kepada semua pelaku ekonomi pariwisata melalui produk aturan yang dilahirkannya agar produsen pariwisata dapat berjalan secara wajar dan konsumen pariwisata mendapat kepuasan maksimum. Namun dalam pelaksanaannya memainkan peran pemerintah dihadapkan dengan kendala sehingga pengembangan ekonomi pariwisata di Pantai Teluk Kiluan dan Pantai Tanjung Setia melesat perkembangannya dan berimbas pada kesejahteraan sosial. Kendala itu antara lain

1. Pemerintah daerah dan Cikal sudah mengajukan rencana kawasan konservasi untuk menjadi kawasan konservasi ke Kementerian Lingkungan hidup, namun masih ada tarik menarik dengan Kementerian kelautan dan perikanan
2. Anggaran Pemkab terbatas
3. Jalan raya sangat *intensive* digunakan oleh perusahaan udang yang lokasinya berdekatan dengan destinasi
4. Terhubung dengan Kabupaten lain (Pesawaran), terjadi perbedaan kewenangan anggaran
5. Kunjungan wisatawan yang turun

Todaro (2009), Sukirno (2006), dan Arsyad (2010) mengatakan dalam setiap pembangunan ekonomi apalagi pembangunan ekonomi di negara sedang berkembang akan terjadi hambatan-hambataan.

Hambatan pembangunan ekonomi meliputi : Modal, sumberdaya alam, sumberdaya manusia, teknologi, investasi, tabungan dan kelembagaan.

Di bagian bawah ini disajikan apa yang menyebabkan ekonomi pariwisata di Pantai Teluk Kiluan turun dan apa penyebab perkembangan

ekonomi pariwisata di Pantai Tanjung setia belum menyentuh kesejahteraan masyarakat, bagaimana eksekusinya, siapa yang menjadi eksekutor, dan kendala apa yang dihadapi secara menyeluruh ditampilkan.

Tabel 7.7 Matriks Langkah eksekusi, eksekutor, dan Kendala Masyarakat, Swasta, dan Pemerintah Dalam Pengembangan Ekonomi Pariwisata di Pantai Teluk Kiluan

No	Penyebab Ekonomi Pariwisata di Pantai Teluk Kiluan Perkembangannya menurun	Langkah Eksekusi	Eksekutor	Kendala
1	Atraksi Wisata terbatas	Pembuatan <i>Flying-Fox</i> , Spot-spot <i>Selfie</i> , Permainan anak (Ayun- ayunan, prosotan), Banana Boat, Peralatan <i>Camping</i> , masjid dan <i>Homestay</i> terapung	Swasta	Swasta masih kurang melirik karena akses jalan yang rusak
2	Kuantitas Lumba-Lumba makin sedikit	Menetapkan sebagai kawasan konservasi melindungi ekosistem	Pemerintah	Pemerintah daerah dan Cikal sudah mengajukan rencana kawasan konservasi untuk menjadi kawasan konservasi ke Kementerian Lingkungan hidup, namun masih ada tarik menarik dengan Kementerian kelautan dan perikanan
3	Kurang atraksi	Eduksi: Pencerahan tentang budaya dan agama, mengaktifkan dan meningkatkan budaya nyambai, pantun dan tari-tarian.	Masyarakat: individu, komunitas seni dan budaya, grup	Komitmen komunitas seni dan budaya rendah Terbentur dengan aktivitas lain, sebagian anggota komunitas pelajar dan mahasiswa yang sekolah di Bandar

				Lampung
				Menggunakan dana besar
				Swadaya masyarakat
4	Tidak ada koordinasi antar pelaku wisata	Mendata Pelaku <i>Travel, homestay, villa</i> , perahu (asal dari dalam dan luar Kiluan) Pembagian wilayah kerja dan pemerataan penggunaan fasilitas persewaan	Badan Pengelola Pariwisata	Badan pengelola belum terbentuk
5	Akses Jalan, listrik dan Internet	Membuat prioritas perbaikan jalan pada setiap perencanaan pembangunan Kabupaten Tanggamus	Kementerian Pekerjaan Umum	Anggaran Pemdkab terbatas Jalan raya sangat <i>intensive</i> digunakan oleh perusahaan udang yang lokasinya berdekatan dengan destinasi Terhubung dengan Kabupaten lain (Pesawaran), kewenangan anggarannya Kunjungan wisatawan yang turun
6	Biaya perjalanan (<i>trip</i>) menjadi tinggi	Membuat prioritas perbaikan jalan pada setiap perencanaan pembangunan Kabupaten Tanggamus Konektivitas dengan destinasi: terdekat (Pantai Pahawang) Menertibkan <i>travel</i> dan Bandung	Pemerintah (Kementerian Pariwisata & Pekerjaan Umum) Kabupaten Pengelola destinasi pariwisata	Terhubung dengan jalan yang kewenangannya pemkab Pesawaran Jika ke Pahawang tidak perlu bermalam, wisatawan bisa pulang-pergi Tarif <i>Travel</i> dari luar Lampung lebih murah
7	Belum ada badan	Membentuk	Pokdarwis,	Masing-masing

pengelola (kelembagaan)	badan pengelola pariwisata	cikal, Bumdes, Perwakilan Pekon, pemerintah Desa dan Kabupaten Provinsi (BUMD)	pengelola sibuk memasarkan produknya
-------------------------	----------------------------	--	--------------------------------------

Sumber: Olahan Hasil Penelitian, 2019

Berikutnya untuk beberapa langkah eksekusi, dan siapa yang menjadi eksekutor, serta beberapa kendala yang dihadapi di situs Pantai Tanjung Setia Agar Berimplikasi Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Sekitar dapat di tunjukkan pada tabel 7.8

Tabel 7.8 Matriks Langkah eksekusi, eksekutor, dan Kendala Ekonomi Pariwisata di Pantai Tanjung Setia Agar Berimplikasi Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Sekitar

No	Penyebab Perkembangan Ekonomi Pariwisata di Pantai Tanjung Setia belum berimplikasi terhadap kesejahteraan masyarakat sekitar	Langkah Eksekusi	Eksekutor	Kendala
1	<i>Un-partisipatif (base to investor)</i>	Membuat Regulasi tentang retrebusi, parkir, dan karcis masuk melibatkan komunitas Intensifikasi pungutan pajak pada investor <i>homestay, cottage</i> , restoran dan hasil pajak dikembalikan untuk masyarakat dalam bentuk bantuan fisik dan non fisik ke masyarakat Mempekerjakan masyarakat	Pemerintah	Kunjungan wisatawan hanya ramai pada musim ombak pada bulan-bulan tertentu Belum menerapkan pungutan pajak, pemkab baru hasil pemekaran Skill masyarakat pada level

				tertentu belum mumpuni
2	Kesadaran masyarakat rendah dalam melihat ekonomi pariwisata sebagai potensi	Edukasi Pelatihan hospitality, kewirausahaan, membuat makanan oleh-oleh dari bahan dasar ikan, mengeksplorasi kreatifitas tapis krui dan batik lampung, festival budaya tahunan "sakura-an"	Pemerintah: Perguruan Tinggi, Kementerian Koperidag, Pariwisata, Dekranasda Swasta: Pengusaha Batik, makanan olahan (mpek-mpek, dodol, krupuk, pindang, kopi, kripik pisang)	Edukasi pelatihan berjalan, namun konsentrasi masyarakat untuk meningkatkan pendapatan masih pada bertani dan berkebun Peralatan dan skill terbatas Pasar terbatas
3	Respon Pemerintah Lamban	Pejabat pemerintah atau kepala (kementerian pariwisata Kabupaten) sebelum ditetapkan harus menjabarkan visi dan misinya terkait komitmen kemajuan pariwisata	Pemerintah Daerah Provinsi	Pencopotan/pergar Kepala dinas Pariwisata sering dilakukan kasaja Latar belakang pengetahuan kepala dinas pariwisata yang kurang sesuai
4	Banyak WNA yang memiliki tanah/lahan secara syah	Re-inventarisasi kepemilikan lahan Sosialisasi Memperketata regulasi untuk kepemilikan lahan	Pemerintah: Pamong Desa, Kecamatan, dan BPN	Perkawinan warga dengan WNA Pembelian tanah dengan mengatashamakan warga setempat sebagai kerabat dari orang WNA WNA sudah membeli beberapa tanah dari sebelum menjadi lokasi pariwisata
5	Abai Lingkungan	membangun kawasan baru dengan menggeser lokasi <i>vila</i> , <i>homestay</i> , <i>restoran</i> , <i>arena sport</i> bagi investor/pengusaha/per	Pemerintah	Mendirikan bangunan sebelum adanya pemkab Pesibar dimekarkan

	orangan melalui IMB baru dan menerapkan sesuai dengan uu lingkungan hidup	Kepemilikan lahan umumnya WNA syah bersertifikat
--	---	--

Sumber: Olahan Hasil Penelitian, 2019

7.2.4. Diskusi Teori dan Temuan

Pembangunan ekonomi dapat didefinisikan sebagai setiap kegiatan yang dilakukan suatu negara dalam rangka mengembangkan kegiatan ekonomi dan taraf hidup masyarakatnya. Batasan tersebut mengevolusi makna pembangunan ekonomi sebagai suatu proses yang tidak hanya melahirkan pendapatan riil per kapita penduduk suatu negara dalam jangka panjang naik tapi dilengkapi oleh perbaikan sistem kelembagaan. Dari definisi di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa pembangunan ekonomi mempunyai unsur-unsur pokok dan sifat sebagai berikut:

1. Suatu proses yang berarti perubahan yang terjadi secara kontinu
2. Usaha untuk meningkatkan pendapatan per kapita
3. Peningkatan pendapatan per kapita itu harus terus berlangsung dalam jangka panjang
4. Perbaikan sistem kelembagaan di segala bidang (misalnya ekonomi, politik, hukum, sosial, dan budaya).

Pembangunan ekonomi suatu negara tujuannya terjadi suatu pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi merupakan laju pertumbuhan ekonomi yang dibentuk dari berbagai macam sektor

ekonomi yang secara tidak langsung menggambarkan tingkat pertumbuhan yang terjadi dan sebagai indikator penting bagi daerah untuk mengevaluasi keberhasilan pembangunan. Pertumbuhan ekonomi dipengaruhi oleh beberapa faktor penting (Arsyad, 2010) yaitu: 1) Akumulasi modal, 2) Pertumbuhan penduduk (*labor force*), dan 3) Kemajuan teknologi.

Dalam perspektif ekonomi pariwisata pemerintah bertindak sebagai *principal* yaitu organisasi yang memiliki hak penuh terhadap kepemilikan destinasi pariwisata apalagi objek wisata alam yang sifatnya milik umum dan pihak lain investor untuk mengelola destinasi wisata. Jika pemerintah bertindak sebagai *principal*, maka investor sebagai pengelola disebut sebagai *agent*. Jika pemerintah dan investor atau masyarakat memiliki tujuan yang sama maka Investor/swasta akan mendukung dan melaksanakan semua yang diperintahkan oleh pemerintah, demikian sebaliknya (Padilla, 2002). Dalam penelitian ini, pemerintah yang bertindak sebagai *prinsipal* memerintahkan kepada investor untuk menggunakan konten lokal (bahan baku, tenaga kerja), dalam setiap aktivitas ekonomi pariwisata, membayar pajak dan menjaga kelestarian lingkungan. Hal yang terjadi adalah investor sebagai agen lebih mengutamakan kepentingannya dalam mengoptimalkan laba atas investasi yang ditanamkan, meminimalisir beban, termasuk membayar upah pekerja yang murah, menggunakan bahan baku bukan lokal konten agar harganya lebih murah, dan abai terhadap kelestarian lingkungan. Menurut investor penggunaan lokal konten, memperhatikan kelestarian lingkungan, membayar pajak, partisipasi masyarakat akan menambah *cost of production* dan menurunkan laba yang diterima.

Perbedaan “kepentingan ekonomis” ini menyebabkan timbulnya informasi tentang pengelolaan pariwisata yang asimetris (kesenjangan informasi) antara pemerintah dan investor. Pada hal dalam membuat kontrak antara pemerintah dan investor harapannya investor akan bertindak/melakukan pekerjaan seperti yang diinginkan oleh pemerintah. Disepakatinya suatu kontrak ditentukan oleh seberapa besar biaya transaksi, informasi dan asumsi perilaku (*bounded rationality* atau *oportunisme*).

Kenyataannya informasi simetris itu tidak pernah terjadi dalam setiap kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah dan investor. Penyebab tidak pernah terjadi informasi yang simetris karena kehadiran pemerintah terkadang terlambat, sangat jarang dilapangan atau bahkan tidak pernah ada sehingga tidak terjadi perencanaan apalagi evaluasi bahkan *punishment*. Akibat ini semua informasi yang diperoleh pemerintah untuk melakukan perbaikan pembangunan pariwisata kurang optimal. Hal ini menyebabkan kontrak efisien tidak pernah terlaksana sehingga hubungan investor dan pemerintah selalu dilandasi oleh asimetri informasi. Dengan demikian, membuka peluang investor untuk memaksimalkan kepentingannya sendiri dengan melakukan tindakan yang tidak semestinya atau sering disebut *disfunctional behaviour*, dimana tindakan ini dapat merugikan pemerintah, seperti rekayasa dalam kinerja investor (memberikan laporan yang tidak dilakukan/*fiktif*).

7.2.4.1 Pemerintah-Swasta/Investor (*Principal-Agent*)

Teori keagenan atau teori agensi adalah teori yang menjelaskan tentang hubungan kerja antara pemilik perusahaan (pemegang saham) dan manajemen. Manajemen adalah agen yang oleh pemegang saham

(prinsipal) diberi tugas dan kewenangan untuk mengelola perusahaan (Eisenhardt (1989:1)). Dalam teori keagenan dijelaskan tentang dua pelaku ekonomi: agen dan prinsipal memiliki karakter yang saling bertentangan. Hubungan keagenan merupakan suatu kontrak dimana satu atau lebih prinsipal memerintah agen untuk bertindak atas nama prinsipal serta memberi wewenang kepada agen membuat keputusan yang terbaik bagi prinsipal.

Hubungan pemerintah-investor (*principal-agent*), idealnya menurut North (1996:33), bahwa *principal* memiliki daya untuk mendisiplinkan *agent* sesuai dengan tujuan perusahaan, di samping itu, *agent* dapat memonitor *principal* dan menegakkan apa yang menjadi hak mereka dalam perjanjian yang diatur diawal hubungan kerja (kontrak). Pembuatan kontrak bertujuan dalam rangka kedua belah pihak menghindari asimetri informasi, perilaku oportunistik, dan terjadinya *adverse selection* (menyembunyikan informasi) dan moral hazard (penyalahgunaan wewenang).

Kontrak yang efisien adalah kontrak yang memenuhi dua faktor, yaitu (1) investor dan pemerintah memiliki informasi yang simetris artinya baik kedua pelaku memiliki kualitas dan jumlah informasi yang sama sehingga tidak terdapat informasi tersembunyi yang dapat digunakan untuk keuntungan dirinya sendiri, dan (2) risiko yang dipikul investor berkaitan dengan imbal jasanya adalah kecil yang berarti investor mempunyai kepastian yang tinggi mengenai imbalan yang diterimanya.

Scape (1991) dalam Gozali (2004:11) bahwa jika terjadi ketidakseimbangan informasi atau asimetri informasi pemerintah dan

investor maka akan terjadi *moral hazard*, yaitu investor cenderung untuk menipu pemerintah.

Dalam perspektif ekonomi pariwisata pemerintah bertindak sebagai *principal* yaitu organisasi yang memiliki hak penuh terhadap kepemilikan destinasi pariwisata dan pihak lain (investor) untuk mengelola destinasi wisata. Jika pemerintah bertindak sebagai *principal*, maka investor sebagai pengelola destinasi pariwisata disebut sebagai *agent*.

Jika pemerintah dan investor atau masyarakat memiliki tujuan yang sama maka Investor/swasta akan mendukung dan melaksanakan semua yang diperintahkan oleh pemerintah, demikian sebaliknya (Padilla, 2002).

Dalam penelitian ini, pemerintah yang bertindak sebagai prinsipal memerintahkan kepada investor untuk menggunakan konten lokal (bahan baku, tenaga kerja) dalam setiap aktivitas ekonomi pariwisata, dan menjaga kelestarian lingkungan. Hal yang terjadi adalah investor sebagai agen lebih mengutamakan kepentingannya dalam mengoptimalkan laba atas investasi yang ditanamkan, meminimalisir beban, termasuk membayar upah pekerja yang murah, menggunakan bahan baku bukan lokal konten agar harganya lebih murah, dan abai terhadap kelestarian lingkungan. Menurut investor penggunaan lokal konten, memperhatikan kelestarian lingkungan, peartisipasi masyarakat akan menambah *cost of production*.

Perbedaan “kepentingan ekonomis” ini menyebabkan timbulnya informasi tentang pegelolaan ekonomi pariwisata yang asimetris (kesenjangan informasi) antara pemerintah dan investor. Pada hal dalam

membuat kontrak antara pemerintah dan investor harapannya, investor akan bertindak/melakukan pekerjaan seperti yang diinginkan oleh pemerintah. Disepakatinya suatu kontrak ditentukan oleh seberapa besar biaya transaksi, informasi dan asumsi perilaku (*bounded rationality* atau *oportunisme*).

Kenyataannya informasi simetris itu tidak pernah terjadi dalam setiap kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah dan investor, karena kehadiran pemerintah terkadang terlambat, sangat jarang atau bahkan tidak pernah ada sehingga informasi yang diperoleh pemerintah untuk melakukan perbaikan kurang optimal. Hal ini menyebabkan kontrak efisien tidak pernah terlaksana sehingga hubungan investor dan pemerintah selalu dilandasi oleh asimetri informasi. Dengan demikian, membuka peluang investor untuk memaksimalkan kepentingannya sendiri dengan melakukan tindakan yang tidak semestinya atau sering disebut *disfunctional behaviour*, dimana tindakan ini dapat merugikan pemerintah, seperti rekayasa dalam kinerja investor.

7.2.4.2 Pemerintah-Masyarakat (*Principal-Agent*)

Principal yaitu organisasi yang memiliki hak penuh terhadap kepemilikan pengembangan ekonomi pariwisata dan pihak lain adalah masyarakat (komunitas) sebagai pengelola destinasi wisata. Jika pemerintah bertindak sebagai *principal*, maka masyarakat (komunitas) sebagai pengelola disebut sebagai *agent*.

Sebagai agen, masyarakat dituntut cerdas untuk melihat potensi, melakukan sesuatu terkait dengan bagaimana mengembangkan ekonomi pariwisata dimasa yang akan datang menjadi lebih baik. Seperti pada

penjelasan di atas, baik pemerintah atau masyarakat haruslah memiliki informasi tentang bagaimana konsep pengelolaan pariwisata, dan bagaimana pengembangannya pariwisata ini di masa yang akan datang berdasarkan atas informasi yang sama dengan pemerintah.

Partisipasi masyarakat merepresentasikan hasil pendelegasian otoritas pengambil keputusan yang di berikan pemerintah terhadap masyarakat. Dalam pendelegasian tersebut, pemerintah harus menempatkan kepercayaan kepada masyarakat untuk bertindak sesuai kepentingan pemerintah.

Akan tetapi, permasalahan yang muncul masyarakat tidak menjalankan perannya karena beberapa faktor, misalnya: imbalance keuangan, peluang pasar tenaga kerja, ketidak berdayaan, mencari pekerjaan beresiko rendah, dan hubungan lain yang tidak relevan dengan pemerintah. Hal ini dapat mengakibatkan masyarakat menjadi lebih bersemangat bekerja pada sektor ekonomi lain atau kinerja masyarakat di bawah kontrak yang disepakati. Ketidak terbukaan masyarakat ini telah mengakibatkan *asimetris information*. Jika terjadi ketidakseimbangan informasi atau asimetri informasi pemerintah dan masyarakat dalam pengembangan pariwisata maka masyarakat akan melakukan *moral hazard*, yaitu masyarakat cenderung untuk mengelabui pemerintah karena dorongan untuk memaksimalkan *utility* bagi kepentingan individu. Perbuatan *moral hazard* masyarakat berbentuk pertanggungjawaban program bantuan fiktif, pelaksanaan bantuan yang diberikan dialokasikan tidak sesuai rencana, berpura-pura menunjukkan komitmennya, mengikuti pendidikan dan pelatihan atau terlibat dalam organisasi sekedar ikut-ikutan, dan sebagainya.

Untuk menghindari perilaku masyarakat yang cenderung menyembunyikan informasi dan menciptakan *moral hazard* tapi tetap tidak mengesampingkan tujuan antara pemerintah dan masyarakat, maka pemerintah perlu mengkompensasi dengan tindakan pengawasan dan evaluasi, pembinaan dan penyuluhan, advokasi, bantuan pendanaan, pengembangan organisasi, dan hal-hal lain yang dapat mendekatkan informasi yang asimetri ke informasi simetri.

Penguatan kelembagaan dalam pembangunan ekonomi merupakan sisi lain yang menjadi pijakan dalam membicarakan *problem* pembangunan. Konsep sebuah kelembagaan menyangkut pola perilaku sosial. Pola perilaku sosial yang sudah mengakar dan berlangsung terus menerus atau berulang umumnya sering menjadi konsep suatu lembaga. Perilaku sosial tidak membatasi lembaga pada peraturan yang mengatur perilaku tersebut atau mewajibkan orang atau organisasi untuk harus berpikir positif ke arah norma-norma yang menjelaskan perilaku mereka tetapi juga memusatkan perhatian pada pengertian mengapa orang berperilaku atau bertindak sesuai dengan atau bertentangan dengan peraturan yang ada (Djogo dkk., 2003).

Pola hubungan antara anggota masyarakat atau organisasi yang saling mengikat dapat menentukan bentuk hubungan antar manusia atau antara organisasi yang mewadahi dalam suatu jaringan. Dalam bekerja, dan mencapai tujuan bersama, organisasi tersebut ditentukan oleh faktor-faktor pembatas dan pengikat berupa norma, kode etik aturan formal maupun informal untuk pengendalian perilaku sosial serta insentif.

Dari diskusi sebelumnya dikatakan bahwa perilaku yang terbatas (*bounded rationality*) dan perilaku yang oportunistis (*opportunistical behaviour*) menyebabkan hubungan kontrak tidak jelas di organisasi publik, berakibat meningkatkan biaya transaksi ekonomi (*transaction cost economics*). Kebijakan birokrasi kontinu dan diskontinu telah menggeser pola penyalahgunaan kekuasaan "*abuse of power*" oleh segelintir oknum di lembaga publik.

Kompleksitas permasalahan di organisasi publik seperti ketidakjelasan aturan kepemilikan kewenangan (*institutional environment*) dan ketidakjelasan tata kelola (*institutional governance*), seperti ketidakjelasan kontrak-kontrak hubungan kewenangan, dan ketidakjelasan hubungan *principal-agent* menghasilkan ketidakjelasan struktur insentif.

Model "New-CBT" mendesak *stakeholder* segera merespon perubahan dalam kelembagaan. Respon terhadap perubahan kelembagaan menggiring tercapainya perkembangan pariwisata Pantai Teluk Kiluan dan Pantai Tanjung Setia dan berimplikasi terhadap transaksi ekonomi. Transaksi ekonomi hanya dapat terjadi karena adanya kelembagaan, sehingga tanpa kelembagaan mustahil akan timbul transaksi ekonomi. Douglas North seorang sejarawan ekonomi terkemuka mendefinisikan kelembagaan sebagai batasan-batasan yang dibuat untuk membentuk pola interaksi yang harmonis antara individu. Pola interaksi yang harmonis antara individu dalam melakukan interaksi politik, sosial dan ekonomi (North, 1990). Senada dengan North, Schmid (1972) mengartikan kelembagaan sebagai sejumlah peraturan yang berlaku dalam sebuah masyarakat, kelompok atau komunitas, yang mengatur hak, kewajiban, tanggung jawab, baik sebagai individu maupun sebagai

kelompok. Sedangkan menurut Schotter (1981), kelembagaan merupakan regulasi atas tingkah laku manusia yang disepakati oleh semua anggota masyarakat dan merupakan penata interaksi dalam situasi tertentu yang berulang. Kelebagaan yang dimaksudkan di sini adalah aturan main (*rule of the game*) yang berlaku di masyarakat, baik formal seperti undang-undang, hukum dan peraturan, maupun non-formal seperti norma-norma yang berlaku, kebiasaan, dan adat istiadat. Singkatnya, kelembagan adalah aturan main yang berlaku dalam masyarakat yang disepakati oleh anggota masyarakat tersebut sebagai sesuatu yang harus diikuti dan dipatuhi (memiliki kekuatan sanksi) dengan tujuan terciptanya keteraturan dan kepastian interaksi di antara sesama anggota masyarakat. Interaksi yang dimaksud terkait dengan kegiatan ekonomi, politik maupun sosial.

North (1990) mendefinisikan lembaga adalah suatu organisasi sebagai wadah yang di dalamnya terdiri atas interaksi individu-individu berorganisasi politik, ekonomi, keagamaan, pendidikan, olah raga dan lain-lain. Kumpulan individu yang ada dalam suatu wadah ini terikat oleh kesamaan tujuan dan berupaya untuk mencapai tujuan tersebut sebagai kepentingan bersama. Pendapat ini sebagai landasan kuat dalam membentuk desain New-CBT. New-CBT menghendaki adanya badan pengelola yang menangani pengembangan pariwisata di situs penelitian. Badan pengelola pariwisata adalah organisasi pemerintah berbentuk Badan Usaha milik Daerah (BUMD), dan berkolaborasi dengan pemerintah pusat, pemerintah provinsi dan Kabupaten, Swasta, dan komunitas lokal dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) interaksinya tidak saja dalam wadah politik dan, ekonomi tetapi pada wadah yang lebih luas yaitu: sosial, budaya, lingkungan, dan manajemen.

Tujuan kelembagaan adalah mengarahkan perilaku individu menuju titik poin yang diinginkan oleh anggota masyarakat serta untuk meningkatkan kepastian dan keteraturan dalam masyarakat serta mengurangi perilaku oportunistik. Selain itu, kelembagaan juga harus dapat membatasi perilaku manusia yang cenderung berfikir strategik, rasional dan mengutamakan kepentingan diri sendiri; serta harus mampu mendistribusikan sumberdaya ekonomi secara adil dan merata (Libecap, 1989).

Selanjutnya, lahirnya desain New-CBT berkepentingan agar operasional *rule* yang berlaku dalam keseharian yang ditemukan dalam sebuah komunitas, organisasi pemerintah atau kelompok masyarakat mengenai bagaimana interaksi antar anggota komunitas tersebut seharusnya terjadi. Terkait dengan pembangunan pariwisata, operasional *rule* merupakan instrument pembatas mengenai kapan, dimana, seberapa banyak dan bagaimana anggota sebuah organisasi memanfaatkan potensi pariwisata. Pengawasan (*monitoring*) terhadap tindakan setiap aktor, penegakan sanksi bagi para pelanggar dan pemberian *reward* kepada mereka yang taat aturan semuanya diatur dalam operasional *rule*.

Peran masyarakat, swasta, dan pemerintah telah terpapar pada Tabel 7.4, Tabel 7.5, dan Tabel 7.6 adalah wujud operasional *rule* dalam pengembangan pariwisata di Pantai Teluk Kiluan dan Pantai Tanjung Setia. Peran masing-masing *stakeholder* ini diarahkan agar terjadi informasi yang simetris. Informasi yang simetris antar *stakeholder* menjadi obat bagi problem pariwisata yang muncul (moral hazard, perilaku oportunistik, *adverse selection*) dan telah menghambat tujuan pembangunan pariwisata di Pantai Teluk Kiluan dan Pantai Tanjung Setia. Teori keagenan telah secara lugas, gamblang menceritakan hal ini

pada uraian di atas, dan kontrak adalah solusinya. Kontrak juga menunjukkan operasional *rule* menepi pada aksi menghapus perbedaan kepentingan, efisiensi, *property rights* (hak-hak kepemilikan), keadilan, kepatuhan, dan pada ujungnya menciptakan kesejahteraan baik secara ekonomi maupun non ekonomi

Dari diskusi di atas dapat disimpulkan bahwa konsep ekonomi kelembagaan memaknai pembangunan ekonomi secara luas penerangannya telah memperlihatkan ada yang lebih substansial dalam pembangunan itu tidak saja digunakan untuk memahami: kompleksitas pengelolaan pariwisata yang berkelanjutan dan sekaligus dapat dijadikan terapi bagi penyembuhan masalah pembangunan pariwisata.



BAB VIII

KESIMPULAN, PROPOSISI, IMPLIKASI, TEMUAN (NOVELTY) DAN REKOMENDASI

Berbagai paparan, penjelasan, dan gambaran tentang implikasi dan desain ekonomi pariwisata di Pantai Teluk Kiluan dan Pantai Tanjung Setia terhadap kesejahteraan masyarakat sekitar, maka Bab VIII ini akhirnya berujung pada simpulan dan rekomendasi hasil penelitian

8.1 Kesimpulan

1. Pariwisata Pantai Teluk Kiluan yang dikelola dengan konsep CBT mengalami penurunan dalam perkembangannya, dan pariwisata di Pantai Tanjung Setia yang dikelola dengan konsep Non-CBT membawa kenaikan dalam perkembangannya.
2. Implikasi pariwisata terhadap kesejahteraan masyarakat sekitar ditemukan bahwa pariwisata yang berkembang dengan baik melalui penerapan konsep Non-CBT justru belum berimplikasi terhadap kesejahteraan masyarakat sekitar secara optimal, tetapi sebaliknya untuk ekonomi pariwisata yang perkembangannya menurun dan dikelola melalui konsep pengelolaan CBT memberikan implikasi kesejahteraan terhadap masyarakat sekitar.
3. Pengelolaan pariwisata Pantai Teluk Kiluan dan Pantai Tanjung Setia agar dapat berkembang dan dapat berimplikasi kepada kesejahteraan masyarakat sekitarnya dengan lebih baik lagi maka desain konsep pengelolaannya adalah New-CBT yaitu gabungan antara konsep CBT dan konsep Non-CBT dengan balutan dimensi: ekonomi, budaya, sosial, politik, menejemen, lingkungan dan kelembagaan.

8.2 Proposisi Penelitian

Pengembangan pariwisata merupakan sebuah proses yang terjadi hampir di seluruh negara di dunia. Pariwisata sebagai salah satu sumber pendapatan negara melalui pemasukan devisa. Bagi negara-negara yang sedang berkembang (*developing countries*) menjadikan pariwisata sebagai sebuah potensi besar untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, pembangunan berbagai infrastruktur dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pengembangan pariwisata akan berdampak pada kehidupan sosial budaya, sebagai sarana untuk melestarikan lingkungan dan meningkatkan pembangunan. Dalam pengembangan pariwisata harus ada keterlibatan masyarakat, dikarenakan masyarakat sebagai pelaku serta pengelola langsung daerah tujuan wisata.

Masyarakat hendaknya diberikan informasi dan pemahaman mengenai perkembangan pariwisata yang berkelanjutan akan berimplikasi kepada ekonomi daerah dan masyarakat sekitar. Implikasi positif dari pertumbuhan pariwisata menurut Fridgen (1996), adalah *Increase in employment, Stimulation of business activity, Increase business diversity, Increase tax collection, Increase in sales of good and services, Increase in community pride and concern for community history, culture attraction, and artifacts, Enhancement of community appearances, Conservation or restoration of historic sites or attractions,* dan *Conservation of natural resources and tourist attraction* sejalan dengan hasil temuan penelitian. Tumbuh dan berkembangnya pariwisata berdasarkan temuan di-push oleh: 1) akses jalan berkualitas baik, dan terkoneksi, 2) atraksi wisata yang menarik, 3) pasokan listrik dan internet mencukupi, 4) *cost of trip* tidak terasa relatif mahal, 5) adanya koordinasi

antar pelaku unit usaha, 6) penataan lingkungan, 7) keunikan budaya, dan 8) kelembagaan.

Selanjutnya pembangunan pariwisata yang berkembang dengan baik secara teoritis akan diikuti meningkatnya kesejahteraan masyarakat sekitar. Pada penelitian ini telah diungkapkan pengelolaan pariwisata pantai Tanjung Setia dominasi pemilik adalah pemodal asing, *un-partisipatif* (peran masyarakat terbatas), abai terhadap lingkungan, pemerintah sebagai institusi dengan kewenangannya hadir belakangan, dan masyarakat belum melihat bahwa pariwisata merupakan potensi ekonomi. Hal ini menyebabkan perkembangan pariwisata pantai Tanjung Setia yang cukup baik belum merembet pada peningkatan kesejahteraan masyarakat sekitar.

Kelembagaan merupakan temuan yang tidak terpisahkan dengan pembangunan dan perkembangan pariwisata. Betapapun kuatnya faktor pendorong dan penarik pariwisata tanpa kerangka kelembagaan yang baik, kuat, dan memiliki mekanisme penegakan atau pelaksanaan (*enforcement*) yang terarah, konsisten, terhindar dari kepentingan pihak pribadi atau golongan hanya mewujudkan rencana pengembangan pariwisata secara sementara saja dan jauh dampak rembetannya kepada peningkatan kesejahteraan masyarakat sekitar.

Selanjutnya Yin (2009,57) mengarahkan untuk tindakan pemecahan permasalahan yang bersifat kasuistis (dalam konteks penelitian ini agar pariwisata berkembang dan berimplikasi terhadap kesejahteraan masyarakat) perlu memodifikasi dan mengembangkan hasil penelitian ke dalam suatu desain yang realistis.

Agar desain pariwisata pantai Teluk Kiluan dan Pantai Tanjung Setia yang dihasilkan dalam penelitian tidak mubazir, maka setiap *stakeholder* mensikapi agenda yang sama dalam mewujudkan rencana diatas kertas menjadi terealisasi.

8.3 Implikasi Penelitian

Beberapa implikasi teoritis dan praktis dalam penelitian ini dirangkum dalam 3 item

1. *New-Community Base Tourism* (New-CBT) menambah Cakrawala dan Khasanah berkembangnya ilmu pengetahuan dalam pembangunan ekonomi terutama tentang pembangunan ekonomi yang terkait bagaimana mengembangkan pembangunan pariwisata yang memberi efek terhadap meningkatnya kesejahteraan masyarakat sekitar. Model New-CBT ini dikonstruksi dalam *linkage* persepsi praktis mengelola pariwisata *base-on* CBT dan Non-CBT. Secara menyeluruh dimensi praktik CBT di Pantai Teluk Kiluan hampir semuanya beririsan dengan dimensi praktik Non-CBT yang dilakukan di Pantai Tanjung Setia. Beberapa dimensi dalam konsep CBT adalah: ekonomi, budaya, sosial, politik, lingkungan, dan kelembagaan. Selanjutnya dimensi dalam konsep Non-CBT meliputi: ekonomi, budaya, sosial, politik, manajemen, dan kelembagaan. Padunya konsep CBT dan Non-CBT secara praktis ini muncul pemikiran desain pengelolaan pariwisata "NEW-CBT".
2. Pembangunan pariwisata *base-on* CBT dan Non-CBT secara praktis tidak selalu linier dengan teori pembangunan ekonomi (pembangunan pariwisata). Pada penelitian ini mengatakan pembangunan pariwisata tidak selalu membawa pariwisata itu mengalami perkembangan, dan

pembangunan pariwisata yang mengalami perkembangan belum tentu memberi kesejahteraan.

3. *Outcome* desain New-CBT adalah membangun konsep/perancangan atau *prototype* pengembangan pariwisata yang mensejahterakan masyarakat terkonstruksi dari dimensi-dimensi konsep New-CBT, problematika pariwisata, aksi *stakeholder* padu dalam kesatuan pandang yaitu pembangunan kelembagaan. Secara praktis dan teoritis perlu mengembangkan konsep pembangunan kelembagaan dalam pariwisata.

8.4 Temuan Penelitian (*Novelty*)

Penelitian dengan tema pariwisata yang mengangkat problema desain dan implikasi perkembangan ekonomi pariwisata terhadap kesejahteraan di dua destinasi KWP unggulan Lampung yakni Pantai Teluk Kiluan di kabupaten Tanggamus dan Pantai Tanjung Setia Kabupaten Pesisir Barat temuan penelitiannya sebagai berikut:

1. Menemukan Karakteristik konsep yang sama antara penerapan konsep CBT dan Non-CBT.

Karakteristik dimensi itu meliputi dimensi ekonomi, budaya, sosial, politik, lingkungan, dan kelembagaan. Penerapan konsep pengelolaan pariwisata Non-CBT dapat meningkatkan perkembangan pariwisata ketimbang menerapkan konsep pengelolaan pariwisata CBT.

2. Menemukan ada pertentangan antara teori dan hasil penelitian.

Hasil penelitian menemukan bahwa pembangunan pariwisata dengan konsep CBT tidak menjadikan pariwisata berkembang, dan pariwisata dengan konsep Non-CBT yang meningkat

perkembangannya tidak berimplikasi terhadap kesejahteraan masyarakat sekitar.

3. Adanya kesamaan dimensi dalam Konsep CBT dan konsep Non-CBT

Tabel 8.1 Matrik Temuan Karakteristik, Perkembangan, dan Implikasi, Serta Konsep Pengelolaan Pariwisata New-CBT

	Pantai Teluk Kiluan (CBT)	Pantai Tanjung Setia (Non-CBT)	Konsep New-CBT
Karakteristik Pengelolaan Ekonomi Pariwisata	Ekonomi, Budaya, sosial, Politik, lingkungan, -- kelembagaan	Ekonomi, Budaya, sosial, Politik, -- manajemen, kelembagaan	Ekonomi, Budaya, sosial, Politik, lingkungan, manajemen kelembagaan
Perkembangan	Menurun	Meningkat	
Implikasi Terhadap Kesejahteraan	Berimplikasi	Tidak berimplikasi	
Desain	New-CBT		

Sumber: Olahan Hasil Penelitian 2019

4. Membuat desain New-CBT

5. Terdapat perbedaan dimensi konsep pengelolaan pariwisata konsep CBT di Pantai Teluk Kiluan dengan konsep pengelolaan pariwisata Non-CBT di Pantai Tanjung Setia pada penjabaran dimensi ekonomi, lingkungan dan manajemen.

Dimensi ekonomi,

Konsep CBT menjelaskan pengelolaan pariwisata berasal dan dikelola oleh masyarakat dan hasilnya juga mengalir ke masyarakat,

tetapi pada konsep Non-CBT berbeda dominasi ke pemilik modal, hasilnya pun deras mengalir ke pemodal.

Dimensi lingkungan,

Konsep CBT menjelaskan pengelola pariwisata lebih mengutamakan *sustainable development*, karena masyarakat

sangat sadar bahwa pantai merupakan wisata alam yang harus dijaga keberlanjutannya. Jika destinasi pantai ini rusak maka hilang

pula pengelolaannya. Konsep Non-CBT abai teradap kelestarian

lingkungan, memperhatikan lingkungan merupakan biaya yang harus dikeluarkan oleh pemilik modal/investor. Dengan demikian,

maka masyarakat merasa terganggu kenyamanannya.

Dimensi manajemen,

Konsep CBT menjelaskan pengelolaan pariwisata menggunakan manajemen konvensional, sangat sederhana, sehingga terkadang

pekerjaan tanpa perencanaan yang baik, tanpa koordinasi dan tanpa pengawasan atau evaluasi. Sebaliknya untuk konsep Non-

CBT. Pemaparan di atas dijabarkan ke dalam matrik sebagai berikut

Tabel 8.2 Karakteristik Dimensi Dalam Pengelolaan Pariwisata CBT Dan Non-CBT

No	Karakteristik Dimensi	Pengelolaan CBT	Pengelolaan Non-CBT
1	Ekonomi	Dominasi masyarakat, hasilnya mengalir ke masyarakat	Dominasi pemilik modal, hasilnya deras menetes ke pemodal
2	Budaya	Konten lokal	Konten lokal
3	Sosial	Partisipasi Masyarakat	Partisipasi Masyarakat
4	Politik:	Melibatkan, tokoh adat, tokoh masyarakat, pemerintah	Melibatkan, tokoh adat, tokoh masyarakat, pemerintah
5	Lingkungan	Konservasi/ekowisata	Abai terhadap lingkungan
6	Menejemen	Manajemen tradisional Belum ada perencanaan, koordinasi, dan pengawasan	Sudah melaksanakan perencanaan, koordinasi, dan pengawasan
7	Kelembagaan	Belum ada badan pengelola pariwisata	Belum ada badan pengelola pariwisata

4. Pariwisata yang dikelola menerapkan konsep CBT di Pantai Teluk Kiluan telah membawa perkembangan yang menurun, beberapa faktor penyebabnya adalah: jumlah atraksi yang terbatas, kuantitas lumba-lumba makin sedikit akibat ikan plagis diburu nelayan, kurang atraksi budaya dan terkikisnya budaya lokal, tidak ada koordinasi antar pelaku wisata, biaya perjalanan (*trip*) menjadi tinggi, belum ada badan pengelola (organisasi).

Tabel 8.3 Penyebab Pariwisata di Pantai Teluk Kiluan Perkembangan menurun

No	Faktor-Faktor Penyebab Pariwisata di Pantai Teluk Kiluan Perkembangannya menurun (CBT)
1	Atraksi Wisata terbatas
2	Kuantitas Lumba-Lumba makin sedikit
3	Kurang atraksi budaya dan terkikisnya budaya lokal
4	Tidak ada koordinasi antar pelaku wisata
5	Biaya perjalanan (<i>trip</i>) menjadi tinggi
6	Belum ada badan pengelola (Organisasi kelembagaan)
7	Akses jalan, listrik, internet

Sumber: Peneliti

5. Berikutnya faktor-faktor penyebab pariwisata di Pantai Tanjung Setia dengan konsep Non-CBT belum meningkatkan kesejahteraan masyarakat adalah: *Un-partisipatif management (base on Investor)*, Kesadaran masyarakat melihat ekonomi pariwisata sebagai potensi, respon Pemerintah lamban, kepemilikan lahan oleh WNA, abai Lingkungan.

Tabel 8.4 Penyebab Pariwisata di Pantai Tanjung Setia Belum Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat

No	Faktor-Faktor Penyebab Pariwisata di Pantai Tanjung Setia Belum Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat (Non-CBT)
1	Un-partisipatif Management (<i>Base on Investor</i>)
2	Kesadaran Masyarakat melihat ekonomi pariwisata sebagai potensi
3	Respon Pemerintah Lamban
4	Kepemilikan lahan oleh WNA
5	Abai Lingkungan
6	Belum ada badan pengelola (kelembagaan)
7	-----

Sumber: Olahan Hasil Penelitian

6. Penelusuran siapa yang berperan strategis dan pembenahan apa yang perlu dilakukan serta kendala yang dihadapi dalam mengembangkan ekonomi pariwisata di Pantai Teluk Kiluan disajikan pada tabel 8.5 di bawah ini

Tabel 8.5 Matriks Langkah Eksekusi dan Kendala oleh Pemangku Kepentingan Pariwisata Di Pantai Teluk Kiluan

No	Penyebab Ekonomi Pariwisata di Pantai Teluk Kiluan Perkembangannya menurun	Langkah Eksekusi	Eksekutor	Kendala
1	Atraksi Wisata terbatas	Pembuatan <i>Flying-Fox</i> , Spot-spot <i>Selfie</i> , Permainan anak (Ayun-ayunan, prosotan), Banana Boat, Peralatan <i>Camping</i> , masjid dan <i>Homestay</i> terapung	Swasta	kurang dilirik karena akses jalan yang rusak Minat wisatawan yang cenderung turun

2	Kuantitas Lumba-Lumba makin sedikit	Menetapkan sebagai kawasan konservasi melindungi ekosistem	Pemerintah	Pemerintah daerah dan Cikal sudah mengajukan rencana kawasan konservasi untuk menjadi kawasan konservasi Kementerian Lingkungan hidup, namun masih ada tarik menarik dengan Kementerian kelautan dan perikanan
3	Kurang atraksi budaya dan terkikisnya budaya lokal	Eduksi: Pencerahan tentang budaya dan agama, mengaktifkan dan meningkatkan budaya nyambai, pantun dan tari-tarian. Pentas Budaya pada hari-hari akbar (lebaran-hari libur sekolah)	Masyarakat: individu, komunitas seni dan budaya, grup	Komitmen komunitas seni dan budaya rendah Terbentur dengan aktivitas lain, sebagian anggota komunitas pelajar dan mahasiswa yang sekolah di Bandar Lampung Menggunakan dana besar Swadaya masyarakat
4	Tidak ada koordinasi antar pelaku wisata	Mendata Pelaku <i>Travel, homestay, villa</i> , perahu (asal dari dalam dan luar Kiluan)	Badan Pengelola Pariwisata	Badan pengelola belum terbentuk

		Pembagian wilayah kerja dan pemerataan penggunaan fasilitas persewaan		
5	Akses Jalan, listrik dan Internet	Membuat prioritas perbaikan jalan pada setiap perencanaan pembangunan Kabupaten Tanggamus Menambah pasokan listrik dan internet	Kementerian Pekerjaan Umum, Perusahaan Listrik Negara, dan Telkom/ Swasta	Anggaran Pemdakab terbatas Jalan raya sangat <i>intensive</i> digunakan oleh perusahaan udang yang lokasinya berdekatan dengan destinasi Terhubung dengan Kabupaten lain (Pesawaran), kewenangan anggarannya Kunjungan wisatawan yang turun
6	Biaya perjalanan (<i>trip</i>) menjadi tinggi	Membuat prioritas perbaikan jalan pada setiap perencanaan pembangunan Kabupaten Tanggamus Konektivitas dengan destinasi: terdekat (Pantai Pahawang) Menertibkan travel dari Jakarta,	Pemerintah Kementerian Pariwisata & Pekerjaan Umum Kabupaten Pengelola destinasi pariwisata	Terhubung dengan jalan yang kewenangannya pemkab Pesawaran Jika ke Pahawang tidak perlu bermalam, wisatawan bisa pulang-

		Banten dan Bandung		pergi Tarif Travel dari luar Lampung lebih murah
7	Belum ada badan pengelola (kelembagaan)	Membentuk badan pengelola pariwisata	Pokdarwis, cikal, Bumdes, Perwakilan Pekon, pemerintah Desa dan Kabupaten	Masing-masing pengelola sibuk memasarkan produknya

Sumber : Peneliti

7. Mengapa belum berimplikasi kepada kesejahteraan masyarakat di sekitar Pantai Tanjung Setia tentunya perlu penelusuran siapa yang berperan strategis dan pembenahan apa yang perlu dilakukan serta kendala yang dihadapi. Untuk itu dapat dilihat dalam matrik berikut

Tabel 8.6 Matriks Langkah Eksekusi dan Kendala oleh Pemangku Kepentingan Pariwisata Di Pantai Tanjung Setia

No	Penyebab Ekonomi Pariwisata di Pantai Teluk Kiluan Perkembangannya menurun	Langkah Eksekusi	Eksekutor	Kendala
1	Atraksi Wisata terbatas	Pembuatan <i>Flying-Fox</i> , Spot-spot <i>Selfie</i> , Permainan anak (Ayun- ayunan, prosotan), Banana Boat, Peralatan	Swasta	kurang dilirik karena akses jalan yang rusak Minat wisatawan

		<i>Camping, masjid dan Homestay terapung</i>		yang cenderung turun
2	Kuantitas Lumba-Lumba makin sedikit	Menetapkan sebagai kawasan konservasi melindungi ekosistem	Pemerintah	Pemerintah daerah dan Cikal sudah mengajukan rencana kawasan konservasi untuk menjadi kawasan konservasi Kementerian Lingkungan hidup, namun masih ada tarik menarik dengan Kementerian kelautan dan perikanan
3	Kurang atraksi budaya dan terkikisnya budaya lokal	Eduksi: Pencerahan tentang budaya dan agama, mengaktifkan dan meningkatkan budaya nyambai, pantun dan tari-tarian. Pentas Budaya pada hari-hari akbar (lebaran-hari libur sekolah)	Masyarakat: individu, komunitas seni dan budaya, grup	Komitmen komunitas seni dan budaya rendah Terbentur dengan aktivitas lain, sebagian anggota komunitas pelajar dan mahasiswa yang sekolah di Bandar Lampung Menggunakan dana besar Swadaya masyarakat
	Tidak ada koordinasi antar	Mendata Pelaku <i>Travel, homestay,</i>	Badan Pengelola	Badan pengelola

4	pelaku wisata	<p><i>villa</i>, perahu (asal dari dalam dan luar Kiluan)</p> <p>Pembagian wilayah kerja dan pemerataan penggunaan fasilitas persewaan</p>	Pariwisata	belum terbentuk
5	Akses Jalan, listrik dan Internet	<p>Membuat prioritas perbaikan jalan pada setiap perencanaan pembangunan Kabupaten Tanggamus</p> <p>Menambah pasokan listrik dan internet</p>	<p>Kementerian Pekerjaan Umum</p> <p>Perusahaan Listrik Negara, dan Telkom/Swasta</p>	<p>Anggaran Pemdakab terbatas</p> <p>Jalan raya sangat <i>intensive</i> digunakan oleh perusahaan udang yang lokasinya berdekatan dengan destinasi</p> <p>Terhubung dengan Kabupaten lain (Pesawaran), kewenangan anggarannya</p> <p>Kunjungan wisatawan yang turun</p>
6	Biaya perjalanan (<i>trip</i>) menjadi tinggi	<p>Membuat prioritas perbaikan jalan pada setiap perencanaan pembangunan Kabupaten Tanggamus</p> <p>Konektivitas dengan destinasi: terdekat (Pantai Pahawang)</p>	<p>Pemerintah (Kementerian Pariwisata & Pekerjaan Umum) Kabupaten</p> <p>Pengelola destinasi pariwisata</p>	<p>Terhubung dengan jalan yang kewenangannya pemkab Pesawaran</p> <p>Jika ke Pahawang</p>

		Menertibkan travel dari Jakarta, Banten dan Bandung		tidak perlu bermalam, wisatawan bisa pulang-pergi Tarif Travel dari luar Lampung lebih murah
7	Belum ada badan pengelola (kelembagaan)	Membentuk badan pengelola pariwisata	Pokdarwis, cikal, Bumdes, Perwakilan Pekon, pemerintah Desa dan Kabupaten	Masing-masing pengelola sibuk memasarkan produknya

Sumber : Peneliti

8. Pembinaan Kelembagaan

Berangkat dari karakter dimensi, faktor-faktor penyebab melesunya perkembangan dan belum berimplikasi terhadap kesejahteraan, eksekusi peran masing-masing eksekutor (*stakeholder*) maka muncul kunci dari novelty ini yaitu pembinaan kelembagaan. Kelembagaan berupa institusi (organisasi) dan aturan perangkat hukum di dalamnya harus kuat, tidak berfihak, adaptif, aktif, *committed* dan *responsive*.

8.5 Rekomendasi

1. Masyarakat

Masyarakat dan komunitas-komunitas termasuk NGO dan LSM; berperan mendukung terselenggaranya sapta pesona dan sadar pariwisata dan menyediakan jasa ekonomi pariwisata/ekonomi kreatif. Masyarakat adalah obyek dan subyek dari ekonomi pariwisata itu sendiri, tapi di sisi lain masyarakat bisa

menjadi kendala pengembangan pariwisata di suatu destinasi. Oleh sebab itu masyarakat harus tahu persis apa peran mereka dan pariwisata adalah tidak lain untuk kesejahteraan mereka juga. Pendampingan terus menerus dari pemerintah, LSM dan swasta dapat meningkatkan peran masyarakat dalam pengembangan pariwisata daerah.

Peningkatan partisipasi dan peran aktif masyarakat menjadi kekuatan utama dalam mengelola ekonomi pariwisata di Pantai Teluk Kiluan dan Pantai Tanjung Setia. Beberapa rekomendasi dari catatan hasil penelitian ditemukan bahwa partisipasi dan peran masyarakat dalam mengelola ekonomi pariwisata di Pantai Teluk Kiluan dan Pantai Tanjung Setia tersebut agar berkembang dan mensejahterakan masyarakat sekitar dalam bentuk:

- a. Partisipasi masyarakat secara langsung dengan terlibat sebagai tenaga kerja yang menerima kompensasi berupa uang atau gaji, mulai penjaga tiket masuk, petugas parkir, petugas keamanan pantai, serta kerja bakti atau membangun fasilitas penunjang, mengelola sampah, *homestay*, *cottage*, hotel, restoran, *villa*, sepeda motor, menyewakan perahu dan sebagai penjual barang atau jasa (partisipasi insentif)
- b. Partisipasi keterampilan dan kemahiran, di tuju dengan adanya kemauan masyarakat untuk usaha rumah makan, dan kios kecil-kecilan, warung yang menjual makanan dan minuman ringan, ketrampilan bahasa inggris sebagai *tourguide*, seni budaya, mengolah bahan makanan berbahan dasar ikan, menenun kain tapis khas daerah, dodol, kripik pisang (partisipasi inisiatif)
- c. Partisipasi buah pikiran kritis, seperti yang ditunjukkan dengan keikutsertaan untuk mengikuti pertemuan sosialisasi, rapat, membuat program kerja mulai dari perencanaan dan tahap pelaksanaan dan pengawasan baik yang dilakukan oleh pemerintah desa, perusahaan,

dan perguruan tinggi. Karena masyarakat sekarang telah melek dan tergantung dengan digital maka promosi pariwisata lewat digital merupakan peran yang efektif dengan jangkauan luas, cepat, mudah, dan murah (partisipasi interaktif).

2. Swasta/Investor

Peran dunia usaha sebagai modal utama pariwisata adalah sebagai lembaga yang "*profit oriented*" ikut bertanggung jawab dalam keberlanjutan perkembangan ekonomi pariwisata yang berkualitas.

Swasta/investor terkadang lebih familiar dengan istilah *Business* atau dunia usaha sebagai penyelenggara bisnis pada ekonomi pariwisata sesuai dengan etika bisnis, profesional, bertanggung jawab dan berkelanjutan serta bermartabat. Kemitraan swasta dengan pemangku kebijakan lain yaitu masyarakat dan pemerintah sangat diperlukan dalam arti yang "sebenarnya". Hubungan yang saling menguntungkan (*win-win*) harus dibangun dengan pola-pola pendekatan yang formal maupun non formal. Beberapa destinasi pariwisata yang berhasil melibatkan banyak pihak, salah satunya berhasil dikembangkan karena membangun pendekatan non formal antara swasta dan pemerintah.

Di destinasi Pantai Teluk Kiluan postulasi peran swasta yang dibutuhkan segera adalah dalam menyediakan

- a). atraksi pariwisata seperti : pembuatan *Flying-Fox*, Spot-spot *Selfie*, permainan anak (ayun- ayunan, prosotan), *Banana Boat*, peralatan *camping*, masjid dan *homestay* terapung,
- b) menambah pasokan listrik dan internet.

Untuk destinasi Pantai Tanjung Setia peran, swasta diharapkan lebih meng-edukasi bidang-bidang terkait pelatihan *hospitality*, kewirausahaan,

membuat makanan oleh-oleh dari bahan dasar ikan, mengeksplorasi kreatifitas tapis kroi dan batik lampung. Untuk kelancaran mobilitas keluar masuk orang dan wisatawan, swasta dapat menambah frekuensi *travel* yang nyaman dengan biaya sebanding dengan menggunakan armada *Elf*.

2. Pemerintah

Pemerintah berperan menyiapkan prasarana dan sarana dasar yang mendukung pengembangan ekonomi pariwisata, menyiapkan berbagai peraturan berkaitan dengan pariwisata, memfasilitasi kemudahan berwisata dan berusaha dan melakukan kegiatan promosi dan pemasaran destinasi. Peran Pemerintah Daerah dalam pengembangan destinasi adalah sebagai: regulator, fasilitator, mediator dan penyedia prasarana. Pengembangan ekonomi pariwisata memerlukan regulasi yang jelas dan bijak serta kelembagaan yang padu baik dari pihak swasta maupun pemerintah. Dalam ketergantungan tersebut dapat diidentifikasi pembagian peran atau siapa melakukan apa. Pengembangan ekonomi pariwisata tentunya dilakukan oleh swasta dan pemerintah. Swasta dan pemerintah berfungsi memfasilitasi dan mendukung perkembangan ekonomi pariwisata.

Pemerintah Provinsi bersama Pemerintah Pusat dan Kabupaten/Kota bertugas mengembangkan masyarakat dan berbagai macam pelayanan publik yang diperlukan agar pariwisata dapat terselenggara di tempat tersebut dan industri kepariwisataannya dapat berkembang. Selain itu pemerintah berperan langsung dalam pengembangan regulasi untuk mengatur, mengendalikan kegiatan pengembang dan industri, serta memperkuat kelembagaan untuk

peningkatan kapasitas dalam merumuskan kebijakan dan pengambilan keputusan di berbagai tingkatan pemerintahan

a. Meng-educasi masyarakat, upaya dari pemerintah terhadap masyarakat untuk mengubah cara memperoleh dan mengembangkan pengetahuan tentang pariwisata menuju cara tertentu yang diinginkan oleh pemerintah. Edukasi ke masyarakat dapat berbentuk kemitraan/kerjasama dengan perusahaan menggerakkan ekonomi kreatif, pelatihan *hospitality*, kewirausahaan, membuat makanan oleh-oleh dari bahan dasar ikan, mengeksplorasi kreatifitas tapis kroi dan batik lampung, promosi melalui media digital, edukasi lingkungan menjaga terumbu karang dan menjaga kebersihan dari kotornya sampah.

b. Memotivasi atau mendorong masyarakat agar dapat melihat potensi, peluang yang bisa dilakukan oleh masyarakat/swasta dalam pengembangan ekonomi pariwisata. Motivasi yang diperlkan berbentuk: memberikan penghargaan bagi yang berinovasi, memberi hukuman/teguran untuk yang melakukan pelanggaran, memberi bantuan dana dan fasilitas

c. Memberi pendampingan dalam pengembangan ekonomi kreatif, tidak sekedar dilatih tapi langsung praktek dan pengembangan usaha

d. Membuat regulasi tentang: 1) kawasan konservasi, 2) Badan pembentukan pengelolaan pariwisata di desa, 3) Penetapan retribusi parkir, tiket masuk, pengelolaan sampah, dan jumlah ikan yang boleh ditangkap.

e. Kerjasama dengan swasta: 1) pengusaha batik, pengusaha oleh-oleh Mpek-mpek dan krupuk ikan, kripik pisang, dodol, 2) PLN dan telkomsel, 3) *Entertainmen* dan pengusaha atraksi wisata

- f. Koordinasi dan kolaborasi dengan: kementerian PU, Kelautan dan Perikanan, Koperasi dan Perdagangan UMKM, Perbankan, Perguruan Tinggi, Pengelola Destinasi terdekat. Koordinasi yang mendesak adalah mengatasi tarik menarik kepentingan antara Dinas Pariwisata dan Dinas Kelautan dan Perikanan diselesaikan. Agar terumbu karang dan ikan-ikan kecil tetap terjaga, sebaiknya volume dan cara-cara penangkapan dibatasi dan sesuai spek *sustainability*.
- g. Menempatkan pimpinan dinas pariwisata sesuai dengan keahliannya dan pengangkatan pimpinan berdasarkan visi misi yang sesuai dengan komitmen pengembangan pariwisata, serta tidak melakukan penggantian/*re-shuffle* pimpinan sebelum habis masa jabatannya.
- h. Meningkatkan promosi melalui pariwisata digital dengan objek sasaran kaum milenial.

Dewasa ini Indonesia merupakan negara yang punya daya tarik bagi investor asing yang mau menanamkan investasinya dibandingkan negara ASEAN lain seperti Thailand dan Malaysia. "Indonesia masih punya daya tarik tersendiri bagi Investor Asing." Rasa ketertarikannya itu, terpicu karena Indonesia membuka diri terhadap negara lain yang ingin menanamkan investasinya disini. Disamping itu, kondisi politik yang kondusif juga menjadi pertimbangan dan memunculkan rasa kepercayaan tinggi investor terhadap Indonesia. "Investor ingin kenyamanan dalam berinvestasi, dan mereka mendapatkan di Indonesia makanya mereka lebih memilih Indonesia dalam berinvestasi dibandingkan negara lain. Menurutnya, Indonesia masih menjadi radar investasi asing saat ini, sebab berdasarkan survei yang dirilis *Japan Bank for International Cooperation* (JBIC), tahun 2019 ini Indonesia masuk pada peringkat pertama negara yang diminati untuk berinvestasi.

Desain New-CBT mengadopsi tidaksaja komunitas dilibatkan tetapi juga investor, agar pariwisata dimasa yang akan datang berlembang dan membawa implikasi pada kesejahteraan masyarakat Dalam pengembangan kelembagaan tidak cukup hanya membentuk Dinas Pariwisata Provinsi/Kabupaten/Kota, tetapi yang lebih penting adalah sesuai dengan karakteristik sektor pariwisata yang multisektor dan multidimensi, diperlukan adanya wadah yang mempertemukan berbagai sektor tersebut. Selanjutnya bagaimana kelompok tersebut berkoordinasi dan melaksanakan program bersama. Wadah ini tentunya melindungi agar investor dan komunitas sebagai pemain di bidang pariwisata terayomi sesuai dengan tujuannya. Sebut saja BUMD (Badan Usaha Milik Daerah) di era otonomi daerah, pemerintah telah memberikan kesempatan yang luas mengatur sendiri beberapa aspek kehidupan di daerahnya. Dalam aspek ekonomi, pemerintah daerah memiliki kewenangan untuk membentuk suatu BUMD.

Penelitian ini berharap BUMD sebagai *partnership* dapat melakukan dukungan perkembangan pariwisata di Pantai Teluk Kiluan dan Pantai Tanjung Setia melalui sentuhan komunitas dan investor terkait dengan promosi pariwisata, khususnya dalam hal pembangunan merek, pengiklanan dan penjualan penjualan produk wisata. BUMD bisa juga terlibat aktif mengembangkan destinasi wisata, termasuk pengembangan atraksi serta peningkatan aksesibilitas dan kenyamanan. Di bidang industri, BUMD bisa melakukan kreasi, inkubasi, dan komersialisasi," juga berperan dalam upaya pemberdayaan dan pengembangan sumber daya manusia.

DAFTAR PUSTAKA

Afandi, Aang. 2007. *Analisis Tourism Livelihoods Berkelanjutan Di Kota Batu: Pendekatan SLFT (Sustainable Livelihoods Framework For Tourism)*. Disertasi Program Doktor Universitas Brawijaya (Tidak Dipublikasikan)

Al-Ababneh, M. 2013. Service quality and its impact on tourist satisfaction. *Interdisciplinary Journal of contemporary research in business*, 4(12), 164-177.

Al-Tarawneh, H. A. 2012. The main factors beyond decision making. *Journal of Management Research*, Vol. 4, No 1, p. 1-23

Alegre, Joaquín., and Cladera, Magdalena. 2012. Tourist characteristics that influence shopping participation and expenditures. *International Journal of Culture, Tourism and Hospitality Research*, 6(3), pp:223-237.

Allison, Frank., 2006." Livelihoods and Rural Poverty Reduction in Uganda". *Economic Policy Research Centre*, Kampala, Uganda.

Antara, Made dan Pitana, I Gde. 2012. Pasar Tenaga Kerja Pariwisata di Wilayah Asia Pacific: Studi Kasus Indonesia dan Bali. *Jurnal Kepariwisata Indonesia*, 7(2), pp:513-532.

Anwar, Jahid Md. 2012. "Poverty Alleviation Through Sustainable Tourism: A Critical Analysis Of 'Pro-Poor Tourism' And Implications For Sustainability In Bangladesh", *Research Report Presented to Professor COOPER Malcolm J. M. In Partial Fulfillment of the Requirements for the Degree Of Master of Science in International Cooperation Policy*, hlm.1-94.

Archer, B.H. 2000. Tourism and Island Economies: Impact Analysis, dalam: Clem Tisdell, *The Economics of Tourism*, Volume II, An Elgar Reference Collection, Cheltenham, UK Northampton, USA.

Aref, Fariborz., 2010. Residents' attitudes towards tourism impacts: a case study of Shiraz, Iran. *Tourism Analysis*, 15(2), pp.253-261.

Aref, F. And Redzuan, M 2008. Barriers to Community Participation Toward Tourism Development in Shiraz. *Pakistan Journal of Social Science*.5(9):936-940

Armstrong, Rebecca. 2012. "An analysis of the conditions for succes of community based tourism enterprises". *International Centre for Responsible Tourism*. Pp.1-52.

Arsyad, Lincolin, 2004, *Ekonomi Pembangunan*, Edisi 4, Yogyakarta: Bagian Penerbitan STIE YKPN.

Athanasopoulou, Anna. 2013. Tourism as a driver of economic growth and development in the EU-27 and ASEAN regions. EU Center, Singapore.

„Peran Strategis Sektor Pariwisata Dalam Pembangunan Ekonomi

Nasional". *Makalah* disampaikan pada acara Seminar dan Diskusi terfokus ISEI: Sektor Jasa sebagai Motor Penggerak Ekonomi Daerah, pada tanggal 18 Mei 2006, Denpasar.

Avramescu et al. 2008. The Effect of tourism development on Local Communities. BadanPusatStatistik. 2015

Azad, A. S. M., Chheang, V., dan Ahsan, A. 2014. External shocks and tourist arrivals to Cambodia. *Tourism Analysis*, 19(3), 311-321.

Badan Pusat Statistik, 2009a, *Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten/Kota Tahun 2002-2008*, Jakarta: Badan Pusat Statistik.

Babbie, Earl 2005. *The Basic of Social Research, Third Edition*, ChapmanUniversity, Thompson Wadsworth, USA

Badan Perencanaan Pembangunan Nasional RI (Bappenas RI). 2016. *Pembangunan Destinasi Pariwisata Prioritas Tahun 2016..* https://www.bappenas.go.id/.../Pembangunan_Pariwisata_Update_2_Mar_et_2016.pdf diakses 8 Agustus 2017

Provinsi Lampung Dalam Angka Tahun 2018. Badan Pusat Statistik Provinsi Lampung. <https://lampung.bps.go.id/publication/2018/08/16/8a37f460958edf158a0314de/provinsi-lampung-dalam-angka-2018.html>

Balli, F. dan Tsui, W.H.K., 2016. Tourism demand spillovers between Australia and New Zealand: Evidence from the partner countries. *Journal of Travel Research*, 55(6), pp.804-812.

Berno, T., dan Bricker, K. 2001. Sustainable tourism development: the long road from theory to practice. *International journal of economic development*, 3(3), 1-18. Bindu V.T dan Devi, M. Kiruthika. 2016. Accessible Tourism: Determinants and Constraints; A Demand Side Perspective. *Journal of Business and Management (IOSR-JBM)*. Vol. 18, Issue 9 pp. 01-08

Bigné, J.E., Sánchez, M.I. dan Sánchez, J. 2001. Tourism image, evaluation variables and after purchase behaviour: Inter-relationship. *Tourism Management*, 22, 607-617.

Blasco, D., Guia, J. dan Prats, L. 2014. Tourism Destination Zoning In Mountain Regions: A Consumer-Based Approach. *Tourism Geographies*, Vol. 16, No 3, p. 512-528

Boediono, 2008, *Teori Pertumbuhan Ekonomi, Edisi Pertama*, BPFE, Yogyakarta.

Bogdan, R., & Biklen, S. K. (2007). *Qualitative Research for Education: An Introduction to Theories and Methods*, 5th Edition

Bowtell, J. 2015. Assessing the value and market attractiveness of the accessible tourism industry in Europe: a focus on major travel and leisure companies. *Journal of Tourism Futures*, 1(3), 203-222.

Brida, Juan Gabriel, Marta Meleddu, dan Manuela Paulina. 2013. *The Economic Impacts of Cultural Tourism*. In *The Routledge Handbook of Cultural Tourism*, ed. Melanie Smith and Greg Richards, 110–115. New York: Routledge

Button, K.J. 2002. *Transport: Economics*. Tokyo: Heinemann Educational Books.

Celata, F. 2007. Geographic marginality, transport accessibility and tourism development. *Global Tourism and regional competitiveness*. Bologna.

Chen, C.-F. dan Tsai, D. 2007. How destination image and evaluative factors affect behavioural intentions? *Tourism Management*, 28, 1115–1122.

Chen, C. F., dan Chen, F. S. 2010. Experience Quality, Perceived Value, Satisfaction And Behavioral Intentions For Heritage Tourists. *Tourism Management*, Vol. 31, No 1, p. 29-35.

Chi, C. G. Q., dan Qu, H. 2008. Examining the structural relationships of destination image, tourist satisfaction and destination loyalty: An integrated approach. *Tourism management*, 29(4), 624-636.

Chou, M. C. 2013. Does tourism development promote economic growth in transition countries? A panel data analysis. *Economic Modelling*, 33, 226-232.

Chulaphan, W. dan Barahona, J.F., 2017. Contribution of disaggregated tourism on Thailand's economic growth. *Kasetsart Journal of Social Sciences*.

Clark, G dan Chabrel, M. 2007. Measuring integrated rural tourism. *Tourism Geogr.*, 9(4)

Cohen, S. A., Prayag, G. dan Moital, M. 2014. Consumer behaviour in tourism: Concepts, influences and opportunities. *Current Issues in Tourism*, Vol. 17, No 10, p. 872-909

Cole, S. 2006. *Cultural Tourism, community Participation and Empowerment*. In M.K. Smith, and M. Robson (Eds.), *Cultural Tourism in a Changing World: Politics, Participation and (re) Presentation*. Cleveland-UK: Channel View Publications.

Cooper, Chris., et al. 1993. *Tourism Principles & Practice*. United Kingdom: Longman Group Limited

Creswell, John W. 2003. *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches*. London: SAGE Publications.

Creswell, J. W., Hanson, W. E., Clark Plano, V. L., & Morales, A. (2007). Qualitative research designs: Selection and implementation. *The counseling psychologist*, 35(2), 236-264.

Damanik, Janianton dan Helmut F. Weber. 2006. *Perencanaan Ekowisata*. Yogyakarta: CV Andi Offset. Dinas Kebudayaan Pariwisata Pemuda dan Olah Raga .

Danesh-Yazdi, M., Botter, G. dan Foufoula-Georgiou, E., 2017. Time-Variant Lagrangian Transport Formulation Reduces Aggregation Bias of Water and Solute Mean Travel Time in Heterogeneous Catchments. *Geophysical Research Letters*.

Decrop, A. dan Kozak, M. 2014. Consumer Goals In Vacation Decision Making. *Journal of Travel and Tourism Marketing*, Vol. 31, No 1, p. 71-81

Denzin, Norman K and Lincoln, Yvonna S. 2011. *Qualitative Research*. Third Edition. Sage Publication. Inc. California.

Djeri, K, Plavša, J. dan Čerovic, S. 2007. Analysis of potential tourists' behaviour in the process of deciding upon a tourist destination based on a survey conducted in Bačka region. *Geographica Pannonica*, Vol. 11, p. 70-76.

Djogo, Toni. 2003. *Kelembagaan dan Kebijakan dalam Pengembangan Agroforestri*. Bogor: World Agroforestry Centre.

Djojohadikusumo, Sumitro, 1994, *Perkembangan Pemikiran Ekonomi: Dasar Teori Ekonomi Pertumbuhan dan Ekonomi Pembangunan*, Jakarta: LP3ES.

Drăgulănescu dan Druțu. 2012. *Rural Tourism for Local Economic Development. International Journal of Academic Research in Accounting, Finance and Management Sciences*. Vol. 2, No. pp. 196-203

Domínguez, T., Fraiz, J. A., dan Alén, E. 2013. *Economic profitability of accessible tourism for the tourism sector in Spain. Tourism Economics*, 19(6), 1385-1399.

Egbali, N., Nosrat, A. B., dan Alipour, S. K. S. 2011. Effects of positive and negative rural tourism (Case study: Rural Semnan Province). *Journal of Geography and Regional Planning*, 4(2), 63-76.

Ekanayake, E.M. dan Long. A. E. Tourism Development And Economic growth In Developing Countries. *The International Journal of Business and Finance Research*. Vol 6., No. 1., pp 51-63.

Engelstoft, S., Jensen-Butler, C., Smith, I., & Winther, L. 2006. Industrial clusters in Denmark: Theory and empirical evidence. *Papers in Regional Science*, 85(1), 73-98.

Esterberg, Kristin G., 2002. *Qualitative Methods in Social Research*, Mc. Graw Hill,. New York

Fairbairn (2001). *"Tourism in Tonga: Trends, Development, Prospects"*. London and New York Routledge.

Feldman, M., Hadjimichael, T., Lanahan, L., dan Kemeny, T. 2016. The logic of economic development: a definition and model for investment. *Environment and Planning C: Government and Policy*, 34(1), 5-21.

Fennel, David, A., 2003. *Ecotourism: An Introduction*. New York: Routledge.

Friedmann and William Alonso, The MIT Press, Massachusetts, pp 332 – 347.

Galor, O. 2011. Inequality, human capital accumulation and the process of development, in *Handbook of the Economics of Education* Eds E Hanushek, S Machin, L Woessmann (Elsevier, Amsterdam) pp 441–493

Ghozali, H. Imam, (2006). *Structural Equation Modeling. Metode Alternatif Dengan Partial Least Square (PLS)*. Badan Penerbit UNDIP Semarang.

Giampiccoli, Andrea and Janet Hayward Kalis. 2012. "Community-based tourism and local culture: the case of the amaMpondo" *PASOS. Revista de Turismo y Patrimonio Cultural*. Vol: 10. No. 1. pp. 173-188.

Gilovic, B., dan McIntosh, A. 2015. Stakeholder perspectives of the future of accessible tourism in New Zealand. *Journal of Tourism Futures*, 1(3), 223-239.

Gjorgievski, Mijalce., Gramatnikovski, Sasko., and Nakovski, Dejan. 2013. Geographic Positioning as a Determination of Tourism Development of Gevgelija Region. *UTMS Journal of Economics*, 4(1), pp:61-69.

Goetz S J, Partridge M D, Rickman D S, dan Majumdar S. 2011. Sharing The Gains Of Local Economic Growth: Race-To-The-Top Versus Race-To-The-Bottom Economic Development. *Environment and Planning C* 29(3) 428–456

Goodwin, Harold and Rosa Santilli. 2009. "Community-Based Tourism: a success?. *Responsible Tourism*. pp. 1-37.

Gordon R J. 2010. Okun's law and productivity innovations. *The American Economic Review*. 100(2) 11–15

Hall, D. 2004. Rural tourism development in southeastern Europe: transition and the search for sustainability. *Int. J. Tourism Res.*, 6

Hanim, Norlida., Othman, H.M. Redzuan., dan Ramachandran, Sridar., "2007. Malaysia's Tourism Demand from Selected Countries: The ARDL Approach to Cointegration". *International Journal of Economics and Management*, 3(1), 39-57.

Heriawan, R., 2004. Peranan dan Dampak Pariwisata pada Perekonomian Indonesia: Suatu Pendekatan Model I-O dan SAM. *Disertasi*. Bogor: IPB.

Holloway, L., Kneafsey, M., Venn, L., Cox, R., Dowler, E., dan Tuomainen, H. 2007. Possible food economies: A methodological framework for exploring food production-consumption relationships. *Sociologia Ruralis*, 47(1), 1–19.

Hausler, Nicole. 2005. Planning for Community Based Tourism. Sumber: repository.upi.edu/21562/9/S_MPP_1202549_Bibliography.pdf. Diakses 22/02/2019

Hrubcova, G, Loster, T. 2015. Clustering of the Least Developed Countries by the Tourism Economic Impact Analysis. In: The 9th International Days of Statistics and Economics, Prague. p. 587-596.

Hrubcova, G., Loster, T., dan Obergruber, P. 2016. The Economic Effects of Tourism in the Group of the Least Developed Countries. *Procedia Economics and Finance*, 39, 476-481.

Hsu, T. K., Tsai, Y. F. dan Wu, H. H. 2009. The Preference Analysis For Tourist Choice Of Destination: A Case Study Of Taiwan. *Tourism Management*, Vol. 30, No 2, p. 288-297.

Jamieson, Walter., Harold Goodwin and Christopher Edmundo. 2004. Contribution of Tourism To Poverty Alleviation: Pro-Poor Tourism and Challenge of Measuring Impacts. For Transport Policy and Tourism Section Transpor and Tourism Devision UN ESCAP

Jennings, Gayle. 2001. *Tourism Research*. John Wiley and Sons Australia. Sidney and Melborne.

Jensen, M.C. and W.H. Meckling. 1976. "Theory of the firm: Managerial Behavior, Agency Costs and Ownership structure." *Journal of Financial Economics*. Oktober, 1976, Volume 3, No 4. Hal 308

Jhingan, ML, 1994, *Ekonomi Pembangunan dan Perencanaan*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

Jones, Sam., 2010. "The Economic Contribution of Tourism in Mozambique: Insight from a Social Accounting Matrix". *Development Southern Africa* 27, (5).

Jonker, Jan., Pening, J.W., Bartjan., Wahyuni, Sari. 2011. *Metode Penelitian Pantuan untuk Master dan Ph.D. di Bidang Manajemen*, Penerbit Salemba Empat, Jakarta.

Jovanović and Ilic. 2016. Infrastructure As Important Determinant Of Tourism Development In The Countries Of Southeast Europe

Jumadi, M. P., Ghozali, M., dan Khusaini, M. 2013. The Impact of Fiscal Decentralization on Local Economic Development in East Java. *Journal of Humanities and Social Science*, 13(1), 01-07.

Kaplan, M., dan Tuncay, Celik., 2008. "The Impact of Tourism on Economic Performance: The Case of Turkey", *The International Journal of Applied Economics and Finance*. 2(1): 13-18.

Kneafsey, M. (2010). The region in food: Important or irrelevant? *Cambridge Journal of Regions Economy and Society*, 3(2), 177–190.

KM Eisenhardt. 1989. Agency Theory: An Assessment and Review. Stanford University.

Kostakis, I., dan Theodoropoulou, E. 2017. Spatial analysis of the nexus between tourism–human capital–economic growth: Evidence for the period 2000–2014 among NUTS II Southern European regions. *Tourism Economics*.

Kozak, M., dan Rimmington, M. 2000. Tourist satisfaction with Mallorca, Spain, as an off-season holiday destination. *Journal of travel research*, 38 (3), 260-269.

Kresna, S.R., 2010. *Peran Nilai Budaya Nort-Sout Corridor Terhadap Aglomerasi Ekonomi Di Jawa Timur*. Disertasi Universitas Brawijaya Malang. Jawa Timur. Indonesia

Kuncoro, Mudrajad, 2010, *Ekonomi Pembangunan: Teori, Masalah, dan Kebijakan*, Yogyakarta: Unit Percetakan dan Penerbitan AMP YKPN Yogyakarta.

Kumar, J. dan Hussain, K., 2014. Evaluating Tourism's Economic Effects: Comparison of Different Approaches. *Procedia-Social and Behavioral Sciences*, 144, pp.360-365.

Kumar, R. R., dan Kumar, R. (2013). Exploring the developments in urbanization, aid dependency, sectorial shifts and services sector expansion in Fiji: A modern growth perspective. *Global Business and Economics Review*, No. 15., 371–395

Kweka, J., Morrissey, dan Blake, A., 2001. "Is Tourism A Leading Sector in Tanzania?". *Annals of Tourism Reaserch*, vol 32-131.

Lampung Dalam Angka Tahun 2018. Badan Pusat Statistik Provinsi lampung. <https://lampung.bps.go.id/publication/2018/08/16/8a37f460958edf158a0314de/provinsi-lampung-dalam-angka-2018.html>

Lee, M. K., Yoon, H. Y., dan Park, H. W. 2017. From online via offline to online: how online visibility of tourism information shapes and is shaped by offline visits. *Journal of Travel & Tourism Marketing*, 1-12

Lee, S.Y., Petrick, J.F. dan Crompton, J. 2007. The roles of quality and intermediary constructs in determining festival attendees' behavioural intention. *Journal of Travel Research*, 45(4), 402–412.

Lincoln and Guba (1987)., Creswell (1944) dan Agusta (2005). Asumsi-Asumsi Penelitian Kualitatif dan Penelitian Kuantitatif vanagusta. files.wordpress.com/..ivan-metode-kualitatif. Diunduh Januari 2014-09-24.

Lickorish, Leonard J., dan Carson L. Jenkins. 2006. *Uvod u turizam (Introduction to Tourism)*. Trans. Ivan Dino Dulcic. Split: Ekokon. Lovelock, B., & Lovelock, K. 2013. *The ethics of tourism: Critical and applied perspectives*. Routledge.

Lorio, M., and Walls,G. 2012. Behind The Mask: Tourism and Community in Sardinia. *Tourism Management*,33(2012):1440-1449.

Lumaksono, Adi., D.S. Priyarsono., Kuntjoro.D.S., danHeriawan, Rusman.,2012. "DampakEkonomiPariwisataInternasionalpadaPerekonomian Indonesia". *Forum Pascasarjana* Vol. 35 No. 1 Januari 2012:53-68.

Manzilati, A. 2009. Tata Kelola Kelembagaan (Institutional Arrangement) Kontrak Usaha Tani Dalam Rangka Persoalan Keagenan (Principal Agent Problem) dan Implikasinya Terhadap Keberlanjutan Usaha Tani. Program Doktor Ilmu Ekonomi PPS Fakultas Ekonomi Universitas Brawijaya Malang.

Manzilati, A. 2011. Kontrak yang melemahkan: relasi petani dan korporasi. Ub Press.

Marre & Weber, 2007 with respect to understanding community capacity for tourism development.

Maslow, 1988. Teori Motivasi dengan Pendekatan hierarki Kebutuhan Manusia. PT PBP, Jakarta

Michopoulou, E., Darcy, S., Ambrose, I., & Buhalis, D. 2015. Accessible tourism futures: the world we dream to live in and the opportunities we hope to have. *Journal of Tourism Futures*, 1(3), 179-188.

Moleong, Lexy J. 2004. *Metode Penelitian Kualitatif*, PT Remaja Rosdakarya, Bandung 40252

Moses,Njole.2011.Tourism for Sustainable Local Livelihood and Nature Conservation (a case of Lake Manyara Park)

Moutinho, L. 2005. Strategic management in Tourism. Cambridge, Mass., CABI Publishing

Naniopoulos, A., Tsalis, P., Papanikolaou, E., Kalliagra, A., & Kourmpeti, C. 2015. Accessibility improvement interventions realised in Byzantine monuments of Thessaloniki, Greece. *Journal of Tourism Futures*, 1(3), 254-268.

Naniopoulos, A., dan Tsalis, P. 2015. A methodology for facing the accessibility of monuments developed and realised in Thessaloniki, Greece. *Journal of Tourism Futures*, 1(3), 240-253.

Navickiene, R., Fominiene, V. B., & Dias, F. 2015. Entrepreneurship In The Sustainable Tourism Sector. The Case Of Tour Operators In Lithuania. *Transformation in Business & Economics*, 14(3).

Neraca Satelit Pariwisata Nasional (Nesparnas).2017. Kementerian Pariwisata. Diakses di www.kemenpar.go.id

Ngoc, K. M., dan Trinh, N. T. 2015. Factors Affecting Tourists' Return Intention towards Vung Tau City, Vietnam-A Mediation Analysis of Destination Satisfaction. *Journal of Advanced Management Science* Vol, 3(4).

Nicely, Annmarie., and Palakurthi, Radesh. 2012. Navigating through tourism options: an island perspective. *International Journal of Culture, Tourism and Hospitality Research*, 6(2), pp:133-144.

Nicholson Walter., 2005. *Microeconomic Theory: Basic Principles and Extensions* 7th Edition, The Dryden Press, Philadelphia.

Njole, M. 2011. Tourism for sustainable local livelihood and nature conservation : a case of Lake Manyara National Park. MSc Thesis Cultural Geography - Cultural Geography - Wageningen University

North, D. C. 1990. *Institutions, Institutional Change and Economics Performance*. Cambridge University Press

North, 1996. Teory of The Firm: Managerial Behavior, Agency Cost. *Journal of Financial Economics* 3 (1976) 305-360

Nurjaya, P. 2014. *Analisis Pengaruh Pariwisata Terhadap Perekonomian negara-Negara Asean+4*. Disertasi Institut Pertanian Bogor (Tidak dipublikasikan)

Ohlan, R., 2017. The relationship between tourism, financial development and economic growth in India. *Future Business Journal*, 3(1), pp.9-22.

Oneteu, A.N. dan Predonu, A.M. 2013. Effects of Tourism on Labour Market. *Procedia - Social and Behavioral Sciences*, Vol. 92, pp. 652-655

Osman, Z. dan Sentosa, I. 2013. Mediating effect of customer satisfaction on service quality and customer loyalty relationship in Malaysian rural tourism. *International Journal of Economics and Management Studies*, 2(1), 25-37.

Othman, M. 2011. *Jordan's tourism strategy: double income by 2010*. Islamic Tourism. London

Padilla and McElroy.2009. *The Three Cs of Caribbean Tourism: Contexts, Characteristics and Consequences*

Patton, M. Q. (2005). *Qualitative research*. John Wiley & Sons, Ltd.

Papeli, Y., Mohamad, H., dan Mehdi, S. 2007. *Tourism (Nature And Concepts)*, Samt publicatio.

Patera, Made., et. al., 2015. "Effect of Tourism And Economic Performance On Poverty In Bali. *International Journal Of Multidisciplinary Educational Research*. Volume 4, Issue 12(1).

Pedrana, M. 2013. Local Economic Development Policies And Tourism: Anapproach To Sustainability And Culture. *Regional Science Inquiry Journal*, Vol. V, (1), 2013, pp. 91-99

Pejanović, R., Demirović, D., Glavaš-Trbić, D., Maksimović, G., dan Tomaš-Simin, M. 2017. Clusters as a factor of competitiveness of rural tourism

destinations in the Danube region of the Republic of Serbia. *Tourism Economics*, 23(2), 475-482.

Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2011 Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Nasional Tahun 2010 – 2025

Petrick, J.F. 2004. Are loyal visitors desired visitors? *Tourism Management*, 25(4), 463-470.

Pleumarom, A. 2012. The politics of Tourism and Poverty Reduction. In: Leslie, D., editor. *Responsible Tourism*. Wallingford, 2012

Popescu, G. 2011. *Quantitative phase imaging of cells and tissues*. McGraw Hill Professional.

Portales, R. C. 2015. Removing “invisible” barriers: opening paths towards the future of accessible tourism. *Journal of Tourism Futures*, 1(3), 269-284.

Posner, Richard A. 1998. Creating a Legal Framework for Economic Development, *The World Bank Research Observer*, Vol. 13 (1), pp. 1-11.

Prayag, G. 2009. Tourists' evaluations Of Destination Image, Satisfaction, And Future Behavioral Intentions-The Case Of Mauritius. *Journal of Travel & Tourism Marketing*, 26(8), 836-853.

Prayag, G. dan Ryan C. 2011. The relationship between the ‘push’ and ‘pull’ factors of a tourist's destination: the role of nationality- an analytical qualitative research approach. *Current Issues in Tourism*. 14 (2), 128-139.

Pressman, Steven, 2000, *Lima Puluh Pemikir Ekonomi Dunia*. Jakarta: Murai Kencana PT Radja Grafindo Persada.

Raabova, Tereza, Petr Merta dan Alena Ticha. 2013. Potential Methods for Measuring the Economic Impacts of Cultural Tourism. In *Routledge Handbook of Cultural Tourism*, ed. Melanie Smith and Greg Richards, 100-109. New York: Routledge.

Ramseook-Munhurrin, P., Seebaluck, V. N., dan Naidoo, P. 2015. Examining the structural relationships of destination image, perceived value, tourist satisfaction and loyalty: case of Mauritius. *Procedia-Social and Behavioral Sciences*, 175, 252-259.

Reisinger, Y. (2006). Shopping in tourism. In D. Buhalis & D. Costa. *Tourism business frontiers: Consumers, products and industry*. Burlington, MA: Elsevier

Richardson, Robert B. 2010. *Michigan State University. The Contribution of Tourism to Economic Growth and Food Security*. USAID Mali

Robert K. Yin. *Applied Social Research Methods Series. Volume 5*. ~ SAGE Publications. ~ International Educational and Professional Publisher.

Rohendi, 2015. Menakar Dampak Buruk Investasi <http://harian.analisadaily.com/opini/news/196721/2015/12/12>. Diakses 25 Mei 2019

Rukuizienė, R. 2014. Sustainable tourism development implications to local economy. *Region formation and development studies*. Vol. 3, No 14, pp.170-177

Sakti, R. K., & Ananda, C. F. (2010). Studi Hubungan Budaya dengan Aglomerasi Ekonomi (North-South Corridor) Di Jawa Timur. *WACANA, Jurnal Sosial dan Humaniora*, 13(3), 431-438.

Santoso, G. A., & Royanto, L. R. (2009). Teknik penulisan laporan penelitian kualitatif. *Depok: LPSP3 UI*.

Satori, Djam'an dan Komariah, Aan. *Metodologi. Penelitian. Kualitatif*. 2013. Bandung: Alfabeta

Scheyvens, Regina and Janet H. Momsen. 2008. "Tourism and Poverty Reduction: Issues for Small Island States". *Tourism Geographies*. Vol: 10. No. 1. pp. 22-41.

Schiffman, L., O'Cass, A., Paladino, A., dan Carlson, J. 2014. *Consumer Behaviour* (ed. 6th).

Sebele, Lesego S. 2010. "Community-based tourism ventures, benefits and challenges: Khama Rhino Sanctuary Trust, Central District, Botswana" *Tourism Management*. Vol:31. pp. 136-146.

Seyidov, J. dan Adomaitiene, R. 2016. Factors Influencing Local Tourists' Decision-Making On Choosing A Destination:A Case Of Azerbaijan. *Ekonomika*, 95(3), 112.

Sharpley R (2002). *Rural tourism*, Translated by Monshi Zade, Rahmatolah dan Fateme Nasiri, Entesharate Monshi.

Sharpley, R., dan Telfer, D. J. 2015. *Tourism and Development: Concepts and Issues*. Channel View Pulications, Bristol, 2015

Sidali, K. L., Kastenholz, E., dan Bianchi, R. 2015. Food tourism, niche markets and products in rural tourism: combining the intimacy model and the experience economy as a rural development strategy. *Journal of Sustainable Tourism*, 23(8-9), 1179-1197.

Sinclair, M.T., dan Stabler, M., 1997. *The Economics of Tourism*, Routledge, London.

Sirakaya, E. Dan Woodside, A. G. 2005. "Building and testing theories of decision making by travellers. *Tourism Management*, Vol. 26, No 6, p. 815-832.

Škuflić, L. dan Štoković, I. 2011. Demand Function for Croatian Tourist Product: A Panel Data Approach. *Modern Economy*, No. 2, pp. 49-53.

Smallman, C. Dan Moore, K. 2010. Process Studies Of Tourists' Decision-Making. *Annals of Tourism Research*, Vol. 37, No 2, p. 397-422

Spillane, J., 1994. *Pariwisata Indonesia. Siasat Ekonomi dan Rekayasa Kebudayaan*, Kanisius, Yogyakarta.

Spradley. 2007. *Metode Etnografi*. Yogyakarta: Tiara Wacana, .Edisi. II

Stake, R. (1995). The art of case study research (pp. 49-68). Thousand Oaks, CA: Sage. 4. Data Gathering.

Stewart, C.J., & Cash, W.B. (2008). *Interviewing. Principles and Practices*, 12th Edition. New York : McGraw Hill

Stiglitz, J.E. 2001. Hand Book. Economics, helped create the theory of markets with ... Principal– agent theory introduces conflicts of interest

Suansri, Potjana. 2003. *Community Based Tourism Handbook*. Thailand: REST Project

Sugiyarto, Guntur., Adam Blake, dan M. Thea Sinclair, 2004. *Economic Impact of Tourism and Globalisation in Indonesia*. Nottingham University Bussines School, Jubilee Campus, Nottingham

Sugiyono, M. P. K. (2013). *kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 124.

Sukirno, Sadono, 2006, *Ekonomi Pembangunan: Proses, Masalah, dan Dasar Kebijakan*, Ed. 2, Jakarta: Prenada Media Group.

Sukirno, S. 2006. *Pembangunan Ekonomi, Proses, Masalah, dan Dasar Kebijakan*. Kencana (Prenada Media)

Suman, A, 2009. *Ekonomika Politik dan Kesejahteraan*. Surabaya :ITS Press

Suman, A, 2011. *Infrastruktur Penghambat Ekonomi*. Jawa Pos kolom Opini, Sabtu 16 April.

Suwantoro, Gamal., 2004. *Dasar-Dasar Pembangunan Pariwisata*. Yogyakarta: Andi.

Suyana Utama, I Made. 2006. *Pengaruh Perkembangan Pariwisata terhadap Kinerja Perekonomian dan Perubahan Struktur Ekonomi serta Kesejahteraan Masyarakat di Propinsi Bali*. *Disertasi*. Universitas Udayana.

Syaodih. 2013. *Metode Penelitian Pendidikan*. Bandung : PT. Remaja

Tang, C.F. dan Abosedra, S., 2016. Tourism and growth in Lebanon: new evidence from bootstrap simulation and rolling causality approaches. *Empirical Economics*, 50(2), pp.679-696.

Tang, C. F., dan Tan, E. C. 2015. Does tourism effectively stimulate Malaysia's economic growth?. *Tourism Management*, 46, 158-163.

Tasci, Asli D.A., Semrad, Kelly J., Yilmaz Semih S. 2013, *Community Based Tourism Finding The Equilibrium in COMCEC Contact, Setting the Pathway for the Future*. COMCEC Coordination Office, Ankara, Turkey.

Tewksbury, Richard. 2009. Qualitative versus Quantitative Methods: Understanding Why Qualitative Methods are Superior for Criminology and Criminal Justice. *Journal of Theoretical and Philosophical Criminology*, Vo 1 (1) 2009. University of Louisville, USA

Theobald, William F. 2005. *Global Tourism Third Edition*, Elsevier Inc, New York.

Tokarchuk, O., Gabriele, R., & Maurer, O. 2017. Development of city tourism and well-being of urban residents: A case of German Magic Cities. *Tourism Economics*, 23(2), 343-359.

Todaro, Michael P. and Stephen C. Smith, 2009, *Economic Development, 9 Edition*, New York: Pearson Addison Wesley.

Torres, Rebecca and Janet Henshall Momsen. 2004. "Challenges and Potential for Linking Tourism and Agriculture to Achieve Pro-Poor Tourism Objectives". *Progress in Development Studies*. Vol: 4. No. 4.

Tsundoda, T., dan Mendlinger, S. 2009. Economic and social impact of tourism on a small town: Peterborough New Hampshire. *Journal of Service Science and Management*, 2(02), 61.

Tugcu, C.T. 2014. Tourism And Economic Growth Nexus Revisited: A Panel Causality Analysis For The Case Of The Mediterranean Region. *Tourism Management*, 42, 207-212.

Undang-undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata

Untong, A. 2014. Examining the tourism-led growth hypothesis: a case study of Thailand. *Applied Economics Journal*, 21(2), 30-51.

Van Vuuren, C. and Slabbert, E. 2011. Travel motivations and behaviour of tourists to a South African resort". *Book of proceedings Vol. I International conference on tourism & management studies 2011: Full papers Algarve*, p. 295-304

Veblen, T. B. (1967b). *The theory of the leisure class: An economic study of institutions*. New York: Funk & Wagnalls. (Original work published 1899)

Veblen, T. B. (1904). *The theory of business enterprise*. New York: Scribner.

Vojnovic, Nikola. dan Knezevic, Rade. 2013. Economic And Tourism Indicator as a Menas of Monitoring Sustainable Tourism: The Case Of Inland Istria. *UTMS Journal of Economics*, 4 (2), pp:213-230.

Vojnovic, Nikola. And Knezevic, Rade. 2013. Economic And Tourism Indicator as a Menas of Monitoring Sustainable Tourism: The Case Of Inland Istria. *UTMS Journal of Economics*, 4(2), pp:213-230.

Wagner, J.E., 1997. "Estimating the economic impacts of tourism in Brazil". *Annals of Tourism Research*, 24:78-89.

Yoeti, Oka A., 2008. *Ekonomi Pariwisata: Introduksi, Informasi, dan implementasi*. Kompas. Jakarta.

Wahyuni, Sari. 2015. *Qualitative Research Method Theory and Practice*, 2nd Edition, Penerbit Salemba Empat, Jakarta.

Wearing, S.L. and Donald, Mc. 2001. "The Development of Community Based Tourism: Re-Thinking The Relationsgip between Tour Operators and Development Agents as intermediaries in rural and isolated area Communities." *Journal of Sustainable Tourism*.

Williamson, Oliver E., 2000. "The New Institutional Economics: Taking Stock, Looking Ahead". *Journal of Economics Literature* 38(3):595-613

Wold, Herman. 1966. *Theory and Application of Partial Least Squares*, Department of Statistics University of Uppsala, Sweden.

World Bank. 2013. *Annual Report 2015*.

Wold, Herman. 1966. *Theory and Application of Partial Least Squares*, Department of Statistics University of Uppsala, Sweden.

Yoeti, Oka A., 2008. *Ekonomi Pariwisata: Introduksi, Informasi, dan implementasi*. Kompas. Jakarta

Yoon, Y., dan Uysal, M. 2005. An examination of the effects of motivation and satisfaction on destination loyalty: a structural model. *Tourism management*, 26 (1), 45-56.

Yoppe, Marion. 1996. *Sustainable Community Tourism Development Revisited*, *Tourism Management*, Vol. 17 No.7, pp 475-479, 1996. Elsevier Science Ltd, Great Britain

Yustika, Ahmad Erani, 2006, *Ekonomi Kelembagaan; Definisi, Teori dan Strategi*, Bayumedia, Malang.

Zajadacz, A. 2015. Evolution of models of disability as a basis for further policy changes in accessible tourism. *Journal of Tourism Futures*, 1(3), 189-202.

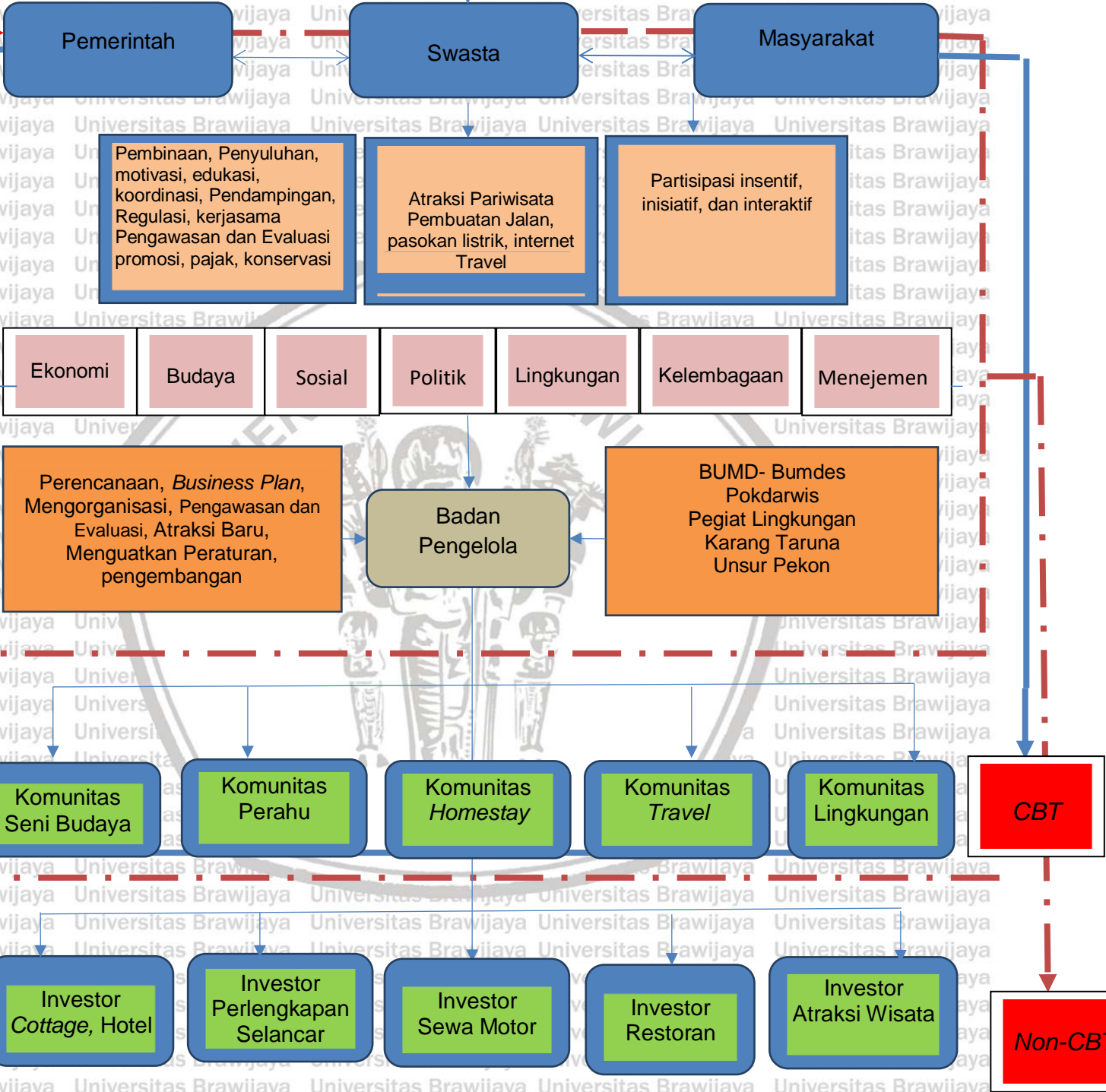
Zadel, Z., dan Bogdan, S. 2013. Economic impact of cultural tourism. *UTMS Journal of Economics*, 4(3), 355-366.

Zanotti L, Chernela J. 2008. Conflicting cultures of nature: ecotourism, education and the kayapo of the brazilian amazon, *Tourism Geogr.*, 10(4)

Zhu, D., Chimita, B. dan Xu, H., 2017. Self-development of Chinese Overseas Students in their European Travels. *Journal of China Tourism Research*, 13(1), pp.46-64.

Zieba, M., 2017. Cultural participation of tourists—Evidence from travel habits of Austrian residents. *Tourism Economics*, 23(2), pp.295-315

DESAIN
Pariwisata Pantai Teluk Kiluan dan Pantai Tanjung Setia Terhadap Peningkatan Kesejahteraan



Note :Tanda Panah ➔: adalah *Partnership*
Sumber: Olahan Hasil Penelitian, 2019

Pemerintah minta BUMN- BUMD dukung pengembangan pariwisata

Kamis, 26 Februari 2015 17:02 WIB



Menteri Pariwisata Arief Yahya meminta BUMN dan BUMD mendukung pengembangan sektor pariwisata. (ANTARA FOTO/Widodo S. Jusuf)

Jakarta (ANTARA News) - Menteri Pariwisata Arief Yahya minta Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) mendukung pengembangan sektor pariwisata.

Dalam rapat koordinasi mengenai peran BUMN-BUMD dalam promosi pariwisata Indonesia di Balai Rung Sapt Pesona Jakarta, Kamis, ia mengatakan pemerintah meminta BUMN dan BUMD terlibat aktif dalam upaya memajukan sektor pariwisata di Tanah Air.



"Kami berharap BUMN melakukan empat hal ini untuk mendukung sektor pariwisata kita," kata Arief.

Ia meminta BUMN dan BUMD membantu promosi pariwisata, khususnya dalam hal pembangunan merek, pengiklanan dan penjualan produk wisata.

Pemerintah juga meminta BUMN dan BUMD terlibat aktif mengembangkan destinasi wisata, termasuk pengembangan atraksi serta peningkatan aksesibilitas dan kenyamanan.

"Untuk dukungan di bidang industri, kami harapkan BUMN-BUMD bisa melakukan kreasi, inkubasi, dan komersialisasi," katanya.

Menteri Pariwisata juga ingin BUMN dan BUMD berperan dalam upaya pemberdayaan dan pengembangan sumber daya manusia sektor pariwisata.

Pewarta: Hanni Sofia Soepardi

Editor: Maryati

COPYRIGHT © ANTARA 2015

TAGS:

- [pengembangan pariwisata](#)
- [industri wisata](#)
- [menteri pariwisata](#)

Paduan UMKM dan wisata dalam pengembangan ekonomi daerah

Play Video

BERITA TERKAIT



[Menpar ajak pengusaha hotel dukung pengembangan pariwisata](#)

awijaya Universitas Brawijaya Universitas Brawijaya Universitas Brawijaya Universitas Brawijaya

1 Oktober 2019 23:54



Pulau Komodo batal ditutup, ini tanggapan Asita NTT

1 Oktober 2019 08:56



Pulau Komodo tidak ditutup, hanya dibatasi

1 Oktober 2019 06:41



Menpar dorong Indonesia jadi destinasi wisata ramah vegan

1 Oktober 2019 00:54

Sebulan penuh, 14 mal di Bali gelar Festival Kuliner dan Belanja

27 September 2019 22:32

Pencanangan Gorontalo Karnaval Karawo 2019 akan dihadiri ribuan warga

27 September 2019 20:59

Menpar buka kejuaraan sepeda dan triathlon Tanjung Lesung 2019

27 September 2019 20:06

awijaya Universitas Brawijaya Universitas Brawijaya Universitas Brawijaya Universitas Brawijaya
awijaya Universitas Brawijaya Universitas Brawijaya Universitas Brawijaya Universitas Brawijaya
awijaya Universitas Brawijaya Universitas Brawijaya Universitas Brawijaya Universitas Brawijaya
awijaya Universitas Brawijaya Universitas Brawijaya Universitas Brawijaya Universitas Brawijaya

[Menpar: promosi kunci sukses kejuaraan paragliding dunia di Sumedang](#)

26 September 2019 21:53

[Bali dinobatkan sebagai Destination of The Year di Thailand](#)

25 September 2019 19:01

[Komodo dan nasib para penghuni Pulau Komodo](#)

25 September 2019 13:34

[Wisman buru kuliner khas Batam usai kunjungi Masjid Sultan](#)

21 September 2019 13:49

[Ini alasan masterplan pengembangan wisata religi diterapkan di Banten](#)

21 September 2019 08:40

KOMENTAR

Kirim

TERPOPULER

TERKOMENTARI



[Usai dilantik, Tommy Kurniawan disambut pelukan keluarga](#)



DPR 2019-2024 DALAM ANGKA

Sebanyak 575 anggota DPR periode 2019-2024 baru saja dilantik di Komplek Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa, (01/10). Mereka adalah para wakil rakyat terpilih hasil Pemilihan Legislatif (Pileg) 2019.



Fakta Menarik

Termuda **23** tahun
 Tertua **80** tahun

Berdasarkan jenis kelamin



Latar Belakang Pendidikan



1 Oktober 2019 19:35
PALING DICARI



Akademisi sebut pola penguatan karakter bangsa perlu disesuaikan



1 Oktober 2019 11:07



Wakil Bupati Belitung harapkan semangat Pancasila terus berkobar

1 Oktober 2019 12:18



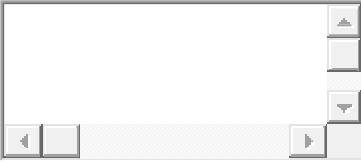
Trikarya dinilai tepat dukung Airlangga sebagai ketua umum

1 Oktober 2019 10:37



www.antaranews.com
Copyright © 2019





TOP NEWS

- [TERKINI](#)
- [TENTANG KAMI](#)



Rabu, 2 Oktober 2019

• [HOME](#)

- [POLITIK](#)
- [HUKUM](#)
- [EKONOMI](#)
- [METRO](#)
- [SEPAKBOLA](#)
- [OLAHRAGA](#)
- [HUMANIORA](#)
- [LIFESTYLE](#)
- [HIBURAN](#)

- [NUSANTARA](#)
- [DUNIA](#)

- [ENGLISH](#)

- [INFOGRAFIS](#)
- [FOTO](#)
- [VIDEO](#)
- [TEKNO](#)
- [OTOMOTIF](#)
- [WARTA BUMI](#)
- [KARKHAS](#)
- [ANTI HOAX](#)
- [ANTARA INTERAKTIF](#)
- [PEMILU](#)
- [RILIS PERS](#)
- [INDEKS](#)

Pemerintah minta BUMN- BUMD dukung pengembangan pariwisata

Kamis, 26 Februari 2015 17:02 WIB





Menteri Pariwisata Arief Yahya meminta BUMN dan BUMD mendukung pengembangan sektor pariwisata. (ANTARA FOTO/Widodo S. Jusuf)

Jakarta (ANTARA News) - Menteri Pariwisata Arief Yahya minta Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) mendukung pengembangan sektor pariwisata.

Dalam rapat koordinasi mengenai peran BUMN-BUMD dalam promosi pariwisata Indonesia di Balai Saptas Pesona Jakarta, Kamis, ia mengatakan pemerintah meminta BUMN dan BUMD terlibat aktif dalam upaya memajukan sektor pariwisata di Tanah Air.

"Kami berharap BUMN melakukan empat hal ini untuk mendukung sektor pariwisata kita," kata Arief.

Ia meminta BUMN dan BUMD membantu promosi pariwisata, khususnya dalam hal pembangunan merek, pengiklanan dan penjualan produk wisata.

Pemerintah juga meminta BUMN dan BUMD terlibat aktif mengembangkan destinasi wisata, termasuk pengembangan atraksi serta peningkatan aksesibilitas

dan kenyamanan.

"Untuk dukungan di bidang industri, kami harapkan BUMN-BUMD bisa melakukan kreasi, inkubasi, dan komersialisasi," katanya.

Menteri Pariwisata juga ingin BUMN dan BUMD berperan dalam upaya pemberdayaan dan pengembangan sumber daya manusia sektor pariwisata.

Pewarta: Hanni Sofia Soepardi

Editor: Maryati

COPYRIGHT © ANTARA 2015

TAGS:

-
-
-

Paduan UMKM dan wisata dalam pengembangan ekonomi daerah

Play Video

BERITA TERKAIT



[Menpar ajak pengusaha hotel dukung pengembangan pariwisata](#)

1 Oktober 2019 23:54



[Pulau Komodo batal ditutup, ini tanggapan Asita NTT](#)



1 Oktober 2019 08:56



Pulau Komodo tidak ditutup, hanya dibatasi

1 Oktober 2019 06:41



Menpar dorong Indonesia jadi destinasi wisata ramah vegan

1 Oktober 2019 00:54

Sebulan penuh, 14 mal di Bali gelar Festival Kuliner dan Belanja

27 September 2019 22:32

Pencanangan Gorontalo Karnaval Karawo 2019 akan dihadiri ribuan warga

27 September 2019 20:59

Menpar buka kejuaraan sepeda dan triathlon Tanjung Lesung 2019

27 September 2019 20:06

Menpar: promosi kunci sukses kejuaraan paragliding dunia di Sumedang

26 September 2019 21:53

Bali dinobatkan sebagai Destination of The Year di Thailand

Universitas Brawijaya Universitas Brawijaya Universitas Brawijaya Universitas Brawijaya

25 September 2019 19:01 ya

ya

ya

ya

ya

ya

ya

ya

ya

ya

ya

ya

ya

ya

ya

ya

ya

ya

ya

ya

ya

ya

ya

ya

ya

ya

ya

ya

ya

ya

ya

ya

ya

ya

ya

ya

ya

ya

ya

ya

ya

ya

ya

ya

ya

Komodo dan nasib para penghuni Pulau Komodo

25 September 2019 13:34

Wisman buru kuliner khas Batam usai kunjungi Masjid Sultan

21 September 2019 13:49

Ini alasan masterplan pengembangan wisata religi diterapkan di Banten

21 September 2019 08:40

KOMENTAR

Universitas Brawijaya Universitas Brawijaya

Kirim

Universitas Brawijaya Universitas Brawijaya

- **TERPOPULER**
- **TERKOMENTARI**



Usai dilantik, Tommy Kurniawan disambut pelukan keluarga



Demo DPR, massa mulai lakukan pembakaran di sekitar Palmerah



Kisah perantau Jember menyelamatkan diri dari kerusuhan Wamena

Universitas Brawijaya Universitas Brawijaya Universitas Brawijaya Universitas Brawijaya

Universitas Brawijaya Universitas Brawijaya Universitas Brawijaya Universitas Brawijaya

Universitas Brawijaya Universitas Brawijaya Universitas Brawijaya Universitas Brawijaya

Universitas Brawijaya Universitas Brawijaya Universitas Brawijaya Universitas Brawijaya

Universitas Brawijaya Universitas Brawijaya Universitas Brawijaya Universitas Brawijaya

Universitas Brawijaya Universitas Brawijaya Universitas Brawijaya Universitas Brawijaya



Anti Hoax

Hoaks, pesawat gagal mendarat di Bandara Kualanamu



Infinix Hot 8 pecahkan rekor 24 jam non stop main game



DPR 2019-2024 DALAM ANGKA

Sebanyak 575 anggota DPR periode 2019-2024 baru saja dilantik di Komplek Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa, (01/10). Mereka adalah para wakil rakyat terpilih hasil Pemilihan Legislatif (Pileg) 2019.



1 Oktober 2019 19:35

PALING DICARI



Akademisi sebut pola penguatan karakter bangsa perlu disesuaikan

1 Oktober 2019 11:07



Wakil Bupati Belitung harapkan semangat Pancasila terus berkobar

1 Oktober 2019 12:18



Trikarya dinilai tepat dukung Airlangga sebagai ketua umum

1 Oktober 2019 10:37



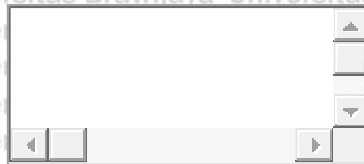
www.antaraneWS.com
Copyright © 2019



ANTARANEWS.com

ANTARAFOTO





✓ Pengertian BUMD, Fungsi, Tujuan, Ciri, Jenis, Kelebihan dan Kekurangan

Oleh [Parta Ibeng](#) Diposting pada Agustus 12, 2019

Pendidikan.Co.Id – Kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai BUMD, pada artikel sebelumnya juga kita sudah membahas mengenai BUMN, BUMD sendiri merupakan cabang dari BUMN. penjelasan selengkapnya mengenai BUMD ini diantaranya sebagai berikut :





BUMD

PENGERTIAN, FUNGSI, TUJUAN, CIRI, JENIS, KELEBIHAN DAN KEKURANGAN

Daftar Isi Artikel Ini :

Pengertian BUMD

Pengertian BUMD adalah singkatan dari (Badan Usaha Milik Daerah) ini merupakan badan usaha yang dalam pelaksanaannya itu berada dibawah pengawasan, pengelolaan serta juga pembinaan pemerintah daerah. Sebagian besar atau seluruh modal dari BUMD tersebut dimiliki atau dikuasai oleh negara yang berasal dari kekayaan daerah yang dipisahkan.

Dapat juga dikatakan kalau BUMD ini merupakan cabang dari Badan Usaha Milik Negara (BUMN) di tiap-tiap daerah. BUMD ini ialah salah satu instrumen pemerintahan yang memiliki peran sangat penting dalam menjalankan serta juga mengembangkan perekonomian pada daerah serta juga perekonomian nasional.

Contoh dari BUMD diantaranya seperti

1. Bank Pembangunan Daerah (BPD),
2. Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM),
3. Perusahaan Daerah Angkota Kota (Bus Kota), dll.

Fungsi BUMD

1. Ialah Sebagai penyedia barang ekonomis yang tidak disediakan oleh pihak swasta

2. Ialah Instrumen pemerintahan daerah yang membantu penataan perekonomian daerah
3. Pengelola cabang-cabang produksi sumberdaya pada daerah yang setelahnya itu dimanfaatkan untuk kepentingan umum
4. Menyediakan layanan untuk rakyat
5. Memajukan sektor usaha yang belum diminati oleh para pihak swasta
6. Pembuka lapangan kerja di daerah yang bersangkutan
7. Membantu pengembangan usaha kecil (contohnya koperasi)
8. Pendorong aktivitas serta juga kemajuan masyarakat di berbagai bidang

Tujuan Didirikannya BUMD

1. Memberikan sumbangan pendapatan (penerimaan) daerah serta negara, dan juga berperan dalam memajukan perekonomian.
2. Mendapatkan keuntungan demi kepentingan daerah.
3. Menyelenggarakan kemanfaatan umum yakni seperti penyediaan barang maupun jasa bermutu tinggi serta juga memadai bagi pemenuhan kebutuhan hidup orang banyak di daerah.
4. Perintis kegiatan atau aktivitas usaha yang belum bisa dilaksanakan oleh pihak swasta serta juga koperasi di daerah.
5. Memberikan bimbingan dan juga batuan kepada pengusaha golongan ekonomi lemah, koperasi, serta juga masyarakat di daerah.
6. Melaksanakan pembangun daerah dengan melalui pelayanan kepada masyarakat.

Ciri-Ciri BUMD

1. BUMD ini merupakan badan usaha yang didirikan serta dalam pelaksanaannya itu berada di bawah pemerintah daerah.
2. Pemerintah ialah yang memegang hak atas seluruh kekayaan serta usaha sehingga mempunyai kekuasaan absolut.
3. Sebagian besar atau juga seluruh modal BUMD itu dikuasai pemerintah daerah, modal itu berasal dari kekayaan daerah yang dipisahkan.
4. BUMD ini dipimpin oleh direksi yang diangkat serta juga diberhentikan oleh kepala daerah, baik gubernur, walikota atau juga bupati yang berwenang di daerah tersebut.
5. Pemerintah itu bertanggung jawab penuh terhadap risiko yang dapat terjadi didalam menjalankan usaha.
6. Merupakan Salah satu penyumbang kas daerah serta negara (sumber pendapatan daerah dan negara)
7. Merupakan Salah satu instrumen yang digunakan untuk dapat mengembangkan perekonomian daerah serta negara.

8. Tidak ditujukan atau dibuat untuk mencari keuntungan sebesar-besarnya dengan modal yang sekecil-kecilnya, tetapi dibenarkan untuk mencari keuntungan. Keuntungan tersebutlah yang kemudian dimanfaatkan untuk kesejahteraan rakyat.
9. Pemerintah itu berperan sebagai pemegang saham dalam BUMN.
10. Dapat menghimpun dana dari pihak lain, baik itu dari Bank ataupun juga Non-Bank.

Klasifikasi Macam Jenis Kegiatan Usaha BUMD

1. Pada Bidang Transportasi Umum (contohnya bus kota)
2. Pada Bidang Pengelolaan Pasar (Contohnya Perusahaan Daerah Rumah Potong Hewan atau PDRPH)
3. Pada Bidang Jasa Perbankan (Contohnya Bank Daerah)
4. Pada Bidang Penyediaan Air Bersih (Perusahaan Daerah Air Minum atau PDAM)

Kelebihan Dan Kekurangan BUMD

Adapun kelebihan dan kekurangan dari BUMD ini, akan dijelaskan dibawah ini :

Kelebihan dan Manfaat BUMD (Badan Usaha Milik Daerah)

1. Kegiatan ekonomi dilakukan untuk melayani kepentingan publik.
2. Memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam memperoleh kebutuhan hidup berupa barang dan jasa.
3. Membuka dan memperluas lapangan kerja di daerah.
4. Mencegah monopoli pasar oleh para pihak swasta dalam pemenuhan barang serta jasa di daerah.
5. Mengisi kas daerah yang memiliki tujuan ialah memajukan serta mengembangkan perekonomian daerah dan negara.

Kekurangan BUMD (Badan Usaha Milik Daerah)

Kekurangan BUMD ini diantaranya sebagai berikut :

1. Fasilitas yang diperoleh dari negara itu tidak dimanfaatkan dengan secara maksimal di lapangan.
2. Kualitas Sumber daya manusia (SDM) yang diperkerjakan masih kurang.

3. Pengelolaan yang kurang efisien sehingga hal tersebut masih sering mengalami kerugian dalam usahanya.

Nah itulah penjelasan mengenai Pengertian BUMD, Fungsi, Tujuan, Ciri, Jenis, Kelebihan dan Kekurangan, semoga apa yang dipaparkan dapat bermanfaat untuk anda. Terima kasih

